



**Rencana Kerja
Pemerintah Daerah**

RKPD

*Kabupaten Batang
Tahun 2026*



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun Anggaran 2026;
- b. bahan penyusunan dan pembahasan KUA serta PPAS; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. JUDUL;
- b. DAFTAR ISI;
- c. DAFTAR TABEL;
- d. DAFTAR GAMBAR;
- e. BAB I PENDAHULUAN:
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
- f. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH:
 - 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan Realisasi RPD sampai dengan tahun 2026
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
- g. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH:
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- h. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH:
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
- i. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH:
 - 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026
 - 5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - 5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 5.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 5.2.3. Urusan Pilihan
 - 5.2.4. Urusan Penunjang

- 5.3 Dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional dalam RKPD Tahun 2026
 - 5.4 Dukungan program daerah terhadap kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang RKPD Tahun 2026
 - j. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:
 - 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah
 - 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 6.3 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan
 - k. BAB VII PENUTUP.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO S.H., M.H.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

URAIAN SECARA RINCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan APBD atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2026. Namun, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Batang Tahun 2026.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu, perencanaan pembangunan secara heirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar pelaku pembangunan.

Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA Tahun Anggaran 2026, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2025.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. RKPD Tahun 2026 akan dijadikan rencana pembangunan dokumen KUA dan PPAS, dan Rencana APBD Kabupaten Batang Tahun 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja

6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.
7. Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2026 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan, yakni tahun 2026.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum..... I-4

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6

1.4 Maksud dan Tujuan I-9

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD II-147

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-233

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 IV-1

4.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026 IV-7

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 IV-1

4.3 Inovasi Kabupaten Batang..... IV-51

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 V-1

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 V-2

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026 VI-1

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Perencanaan Pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada dokumen jangka menengah daerah dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta mendukung pencapaian visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata. Disisi lain, sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, RKPD Tahun 2026 memiliki posisi strategis dalam meletakkan fondasi pelaksanaan visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pada tahap awal ini, Pemerintah Kabupaten Batang berupaya menyelaraskan berbagai rencana strategis dengan kondisi riil daerah, sekaligus merancang kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan dan peluang yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2026, RKP Tahun 2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2026.

Dalam menjamin kualitas perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD dilakukan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom-*

up dan top-down yang berbasis pada data (*data-based planning*), berbasis risiko (*risk based planning*) melalui pendekatan *money follows program* dengan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1. 1
Konsep Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting yakni a) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD/RPD ; b) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD/RPD ; d) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi

rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penyusunan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2026 memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Batang sesuai Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah **“Penguatan Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan”**.

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 meliputi: a) Persiapan penyusunan RKPD, b) Penyusunan rancangan awal RKPD, c) Penyusunan rancangan RKPD, d) Pelaksanaan musrenbang RKPD, e) Perumusan rancangan akhir RKPD, dan f) Penetapan RKPD tahun 2026.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 secara sederhana terlihat pada gambar berikut ini.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039;
19. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

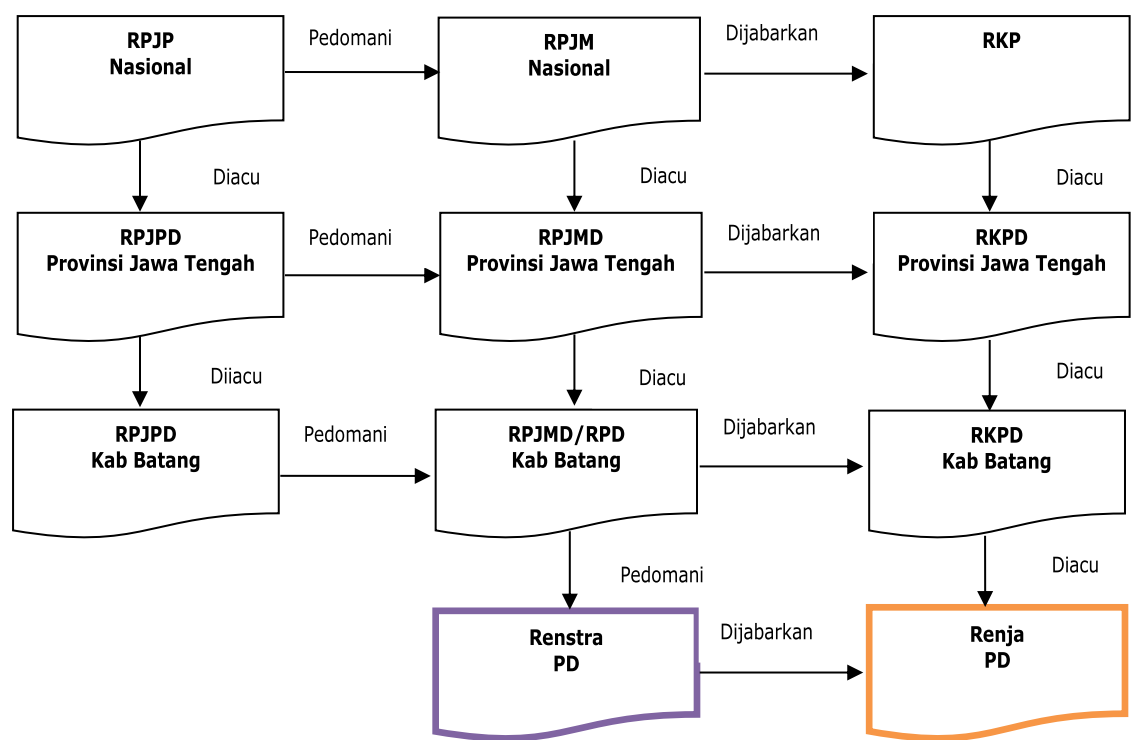
Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 dan dengan tetap menjaga sinergitas dengan dokumen perencanaan lainnya ditingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, secara hierarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Batang

Tahun 2026 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 akan digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, serta sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2026.

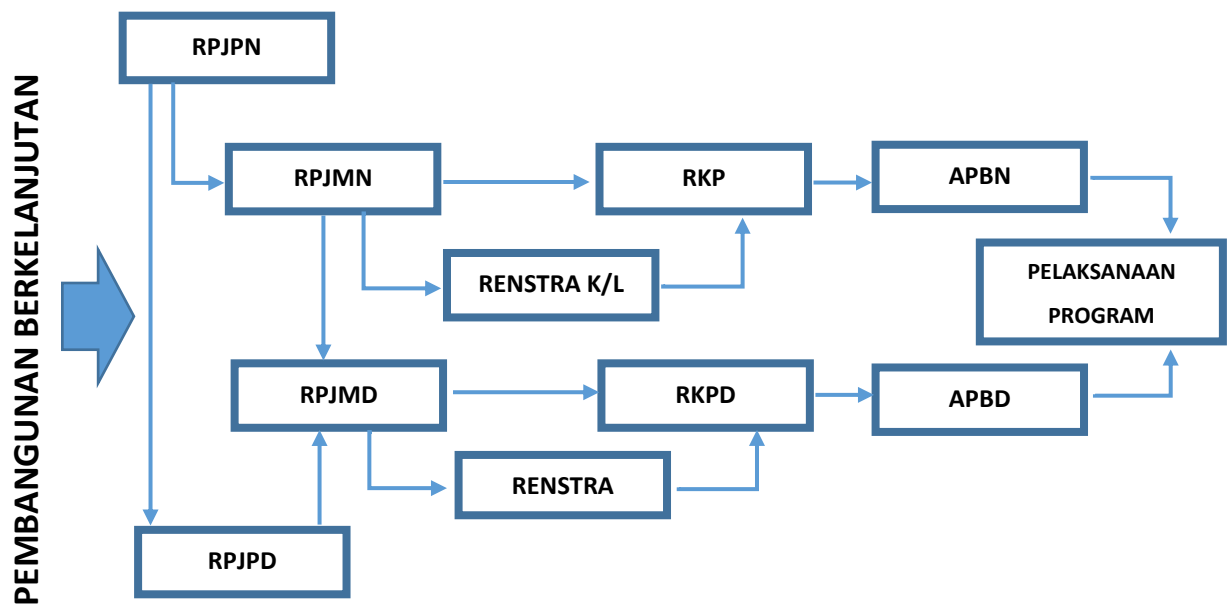
Secara ringkas hubungan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 3 Keterkaitan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya

a. Keterkaitan RKPD dengan SDG’s

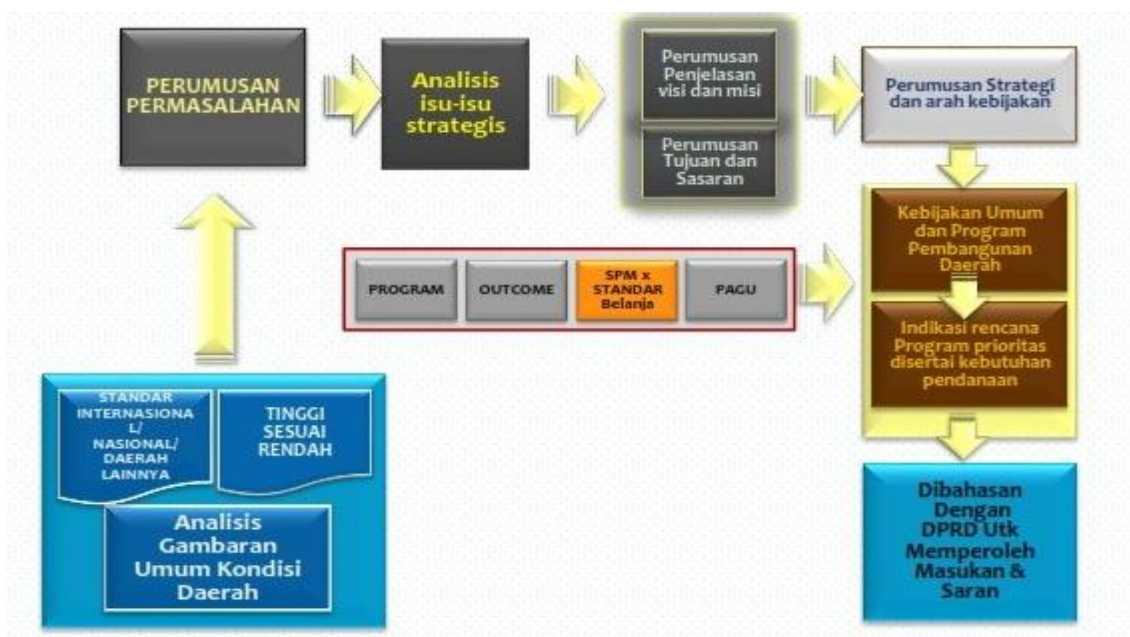
Integrasi pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional dan daerah. Dalam rencana pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah dan diterjemahkan melalui tujuan sasaran Kabupaten, kemudian dijadikan sebuah rencana pembangunan daerah, dari hasil RPJMD maka dibuat sebuah Renstra SKPD untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaan program maka bersumber dari APBD. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik ditingkatan pusat ataupun tingkatan daerah.



Gambar 1. 4 Keterkaitan dokumen Perencanaan Daerah dengan SGD's

b. Keterkaitan RKPD dengan SPM

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar (SPM) dimuat dalam dokumen RKPD dimana kondisi dan rencana pemenuhan harus diintegrasikan dalam setiap substansi di RKPD. Perumusan pemenuhan SPM dalam dokumen RKPD meliputi kondisi eksisting pemenuhan SPM ditahun berjalan, besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar, serta perogram/ kegiatan beserta target capaian, alokasi dana indikatif, serta sumber pendanaan pemenuhan pelayanan dasar ditahun perencanaan.



Gambar 1. 5 Integrasi SPM dalam RKPD

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 disusun sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2026, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026.

Sementara tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2026.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2026.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaah kondisi ekonomi makro Kabupaten Batang mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan prioritas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi serta tindak lanjut yang diperlukan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

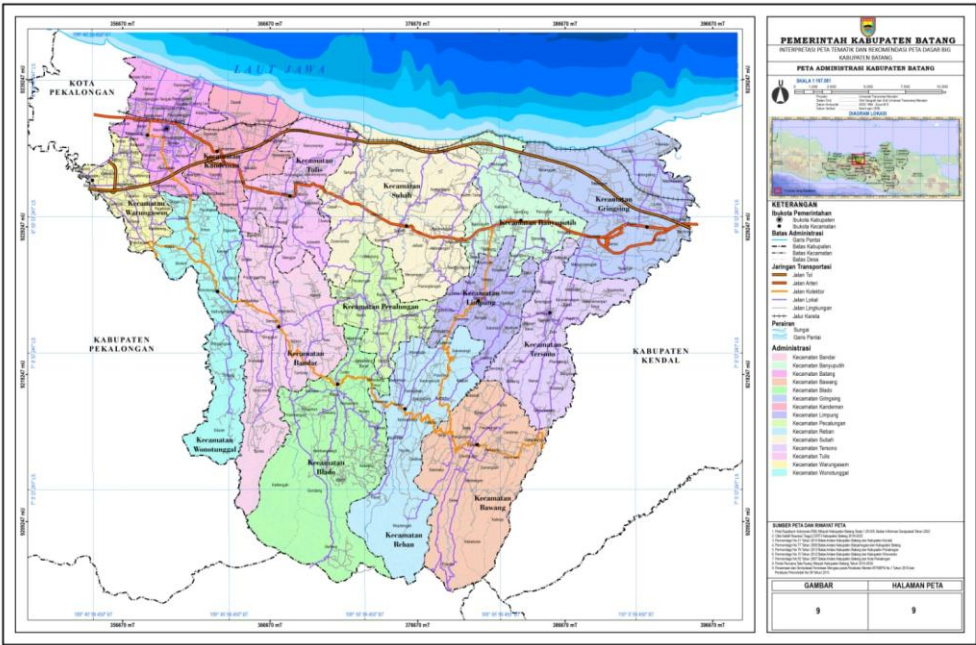
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

1. Geografis

Secara geografi, Kabupaten Batang terletak antara 6° 51’ 46” dan 7° 11’ 47” Lintang Selatan dan antara 109° 40’ 19” dan 110° 03’ 06” Bujur Timur dengan luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 85.721 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kab. Kendal.
- Sebelah Selatan : Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara.
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Batang
Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Batang 2024-2044

Secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan. Lima belas kecamatan tersebut meliputi Wonotunggal, Terseno, Pecalongan, Bandar, Gringsing, Tulis, Blado, Limpung, Kandeman, Reban, Banyuputih, Batang, Bawang, Subah, dan Warungasem. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Blado dengan luas 9.644,78 Ha (11,25%). Sedangkan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Warungasem dengan luas 2.445,61 Ha (2,85%).

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/ Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Batang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1	Wonotunggal	15	5.565,54	6,49%
2	Bandar	17	7.936,76	9,25%
3	Blado	18	9.644,78	11,25%
4	Reban	19	6.947,07	8,10%
5	Bawang	20	7.696,92	8,97%
6	Tersono	20	5.135,60	5,99%
7	Gringsing	15	7.989,29	9,32%
8	Limpung	17	3.271,72	3,81%
9	Banyuputih	11	4.242,36	4,94%
10	Subah	17	9.166,67	10,69%
11	Pecalungan	10	3.342,14	3,89%
12	Tulis	17	4.419,15	5,15%
13	Kandeman	13	4.060,20	4,73%
14	Batang	12 Desa/ 9 Kelurahan	3.931,44	4,58%
15	Warungasem	18	2.445,61	2,85%
	Total	248	85.721	100%

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Batang 2024-2044

Secara geografis, Kabupaten Batang terletak di Pantai Utara Jawa dan dilewati oleh jalur pantura (jalan arteri primer). Jalur pantura mulai dibangun pada sekitar abad ke-18 M sehingga disebut sebagai salah satu jalur tertua yang ada di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang dilalui oleh jalur pantura tersebut mendapatkan akses yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, jalur pantura masih berfungsi sebagai simpul utama pergerakan barang dan manusia di Pulau Jawa. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan wilayah Kabupaten Batang, terutama dalam mendukung konektivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Aksesibilitas yang tinggi melalui jalur pantura mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor jalan tersebut, seperti perdagangan, jasa, logistik, serta kawasan industri. Selain itu, keberadaan jalur transportasi laut melalui Pelabuhan di wilayah utara Kabupaten Batang turut memperkuat posisi strategis daerah ini sebagai simpul transportasi regional, yang mendukung pertumbuhan sektor perikanan, distribusi barang, dan potensi ekspor produk lokal. Kombinasi antara transportasi darat dan laut menjadikan Kabupaten Batang sebagai wilayah dengan potensi besar dalam pengembangan ekonomi.

Dari sisi aksesibilitas, Kabupaten Batang memiliki keunggulan strategis karena dilalui oleh berbagai moda transportasi utama. Selain dilintasi oleh Jalan Pantura yang merupakan jalan arteri primer nasional, Kabupaten Batang juga terhubung dengan jaringan jalan tol trans-Jawa. Saat ini, Kabupaten Batang memiliki dua akses keluar (exit toll) utama, yaitu Exit Toll

Kandeman dan Exit Toll Warungasem. Selain itu, akses tol menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kecamatan Gringsing juga telah dibuka, semakin memperkuat konektivitas wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain jalan tol, Kabupaten Batang juga dilintasi oleh jalur kereta api yang memperkuat konektivitas antarwilayah. Saat ini, layanan naik dan turun penumpang dilayani melalui Stasiun Kereta Api Batang, yang termasuk dalam klasifikasi stasiun kelas II, berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat.

Kabupaten Batang tidak hanya memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi pada jalur darat saja, tetapi juga jalur laut. Hal ini ditandai dengan adanya pelayanan oleh Pelabuhan Batang. Saat ini Pelabuhan Batang berfungsi sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Selain Pelabuhan Pengumpan Regional, Kabupaten Batang juga memiliki Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi Pelabuhan Pengumpan Lokal Roban di Kecamatan Subah, Pelabuhan Pengumpan Lokal Celong di Kecamatan Banyuputih, terminal multipurpose di KEK Industropolis dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Seklayu di Kecamatan Gringsing.

Kabupaten Batang berada di tengah-tengah pulau Jawa, dan merupakan koridor jalan pantura yang merupakan koridor pertumbuhan Pulau Jawa. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

1.	Pekalongan	:	9 km
2.	Pemalang	:	43 km
3.	Tegal	:	72 km
4.	Brebes	:	85 km
5.	Cirebon	:	144 km
6.	Jakarta	:	392 km
7.	Kendal	:	64 km
8.	Semarang	:	93 km
9.	Surabaya	:	480 km



Gambar 2. 2 Posisi Kabupaten Batang

Sumber: Bapelitbang Kab. Batang, 2021

a. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Kabupaten Batang memiliki relief yang bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan berbukit dengan pegunungan landai hingga curam, dan daerah pantai. Kabupaten Batang memiliki garis pantai yang panjang (38 km) dengan akses ke laut Jawa, sangat memungkinkan pengembangan sektor perikanan laut. Potensi kopi di Kabupaten Batang juga dapat tumbuh dengan kualitas yang baik khususnya di daerah pegunungan dan lereng-lereng gunung.

Kabupaten Batang dilihat dari letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 8 wilayah ketinggian mulai dari 0 meter (pantai) sampai dengan 2.565 meter (pegunungan), yaitu:

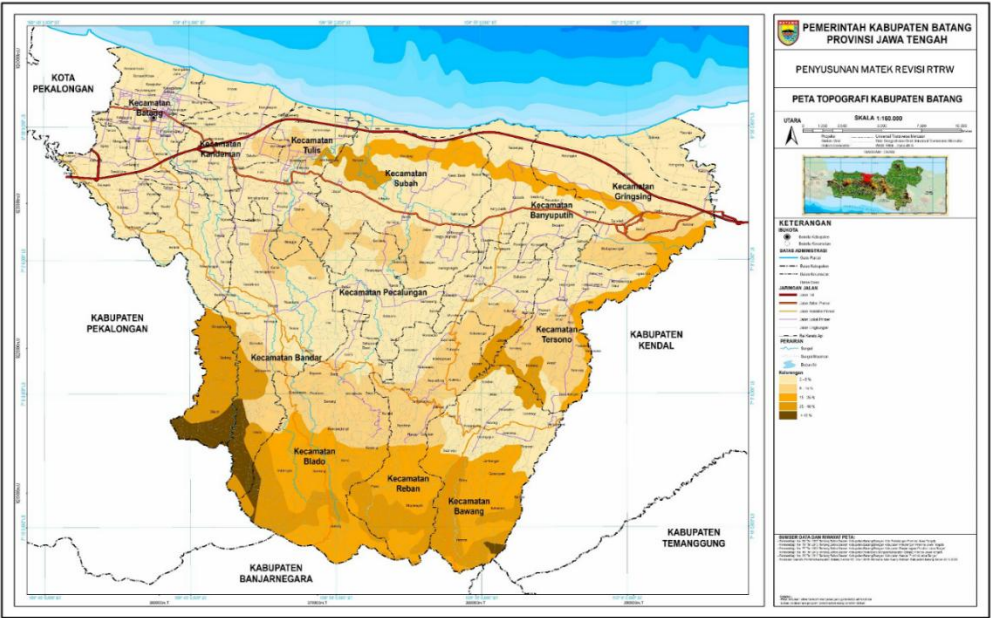
- Ketinggian 0–7 m, seluas 9,05 %, di sebagian Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, dan Warungasem.
- Ketinggian 7–25 m, seluas 6,83% di wilayah Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, dan Warungasem.
- Ketinggian 25–100 m, seluas 12,71 % di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
- Ketinggian 100–250m, seluas 21,11 % di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Limpung, Pecalungan, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
- Ketinggian 250–500m, seluas 17,77 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Gringsing, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
- Ketinggian 500–1000m, seluas 17,67 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Pecalungan, Tersono, dan Wonotunggal.

- g. Ketinggian 1000–2000m, seluas 13,78 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, dan Reban.
- h. Ketinggian >2000 m, seluas 1,08 % di sebagian Kecamatan Blado, Reban dan Bawang.

Sedangkan berdasarkan letak kemiringannya, wilayah Kabupaten Batang dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu:

- a. Kelas lereng I (kemiringan 0 – 8 %) seluas 56,37 %, dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Batang, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Reban, Pecalungan, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
- b. Kelas lereng II (kemiringan 8 – 15%) seluas 17,33 %, dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
- c. Kelas lereng III (kemiringan 15 – 25%) seluas 12,68 % dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Reban, Subah, dan Tersono.
- d. Kelas lereng IV (kelerengan 25 - 40%) seluas 11,66 %, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
- e. Kelas lereng V (kelerengan > 40%) seluas 1,95%, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, dan Wonotunggal.

Peta topografi Kabupaten Batang berdasarkan kemiringan lahan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Batang
Sumber: materi teknis RTRW 2024 – 2044

b. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan geologi sebagai berikut: Aluvial 13,08%; aluvial dan endapan danau 0,11%; anggota batupasir 1,74%, Batuan gunung api Dieng 0,29%, Batuan gunungapi Jembangan 46,38%, Formasi Damar 32,00%, Formasi Kaligetas 0,31% dan Kipas Aluvial 6,10%. Susunan geologi tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

c. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Batang secara umum memiliki suhu rata rata 25^oC-31^oC dan curah hujan dengan klasifikasi rendah hingga tinggi, memiliki iklim tropis dengan dua pergantian musim sepanjang tahun. Musim penghujan antara bulan November sampai dengan bulan April dan musim kemarau antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Curah hujan yang tinggi selama musim hujan mendukung kesuburan tanah dan keberhasilan pertanian di Kabupaten Batang, terutama untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Curah hujan yang tinggi di musim hujan dapat menyediakan pasokan air yang cukup untuk irigasi pertanian di musim kemarau.

Menurut data pengukuran tinggi curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan rata rata curah hujan 304,58 dan rata rata hari hujan sebanyak 11,83 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan rata-rata curah hujan sebanyak 201,72 mm dengan rata rata hari hujan 10,23 hari. Rata-rata hari dan curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Rata-Rata Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata curah/hari hujan	
	Hari	mm
2020	11,83	304,58
2021	12,70	299,66
2022	14,97	283,60
2023	10,23	201,72
2024	12,65	250,01

Sumber: Kab. Batang dalam Angka Tahun 2021-2025

d. Daerah Aliran Sungai

Terdapat 16 sungai yang melintasi Kabupaten Batang, yaitu Sungai Kupang, Sambong, Urang, Lampir, Susukan, Ambo Biji, Boyo, Kebanyon, Asin, Baja, Kedondong, Brontak, Pesanggrahan, Kuripan, Sengkarang, dan Serayu. Banyaknya sungai yang melintasi Kabupaten Batang dapat menyediakan air bagi permukiman, pertanian dan industri. Data Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Batang

No.	Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai	Kabupaten	Pengelola
I.	WS Pemali-Comal		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Kupang	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
2.	DAS Gabus	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
3.	DAS Sambong	Kab. Batang	
4.	DAS Sono	Kab. Batang	
5.	DAS Karanggeneng	Kab. Batang	
6.	DAS Boyo	Kab. Batang	
7.	DAS Urang	Kab. Batang	
8.	DAS Kretek	Kab. Batang	
9.	DAS Bugel	Kab. Batang	
10.	DAS Kuripan	Kab. Batang	
11.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
II.	WS Bodri-Kuto		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Brontak	Kab. Batang	
2.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
3.	DAS Kuto	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
4.	DAS Pesanggrahan	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
5.	DAS Lampir	Kab. Batang	

Sumber : Bapperida Kabupaten Batang, 2025

e. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan materi teknis revisi RTRW Kabupaten Batang Tahun 2024-2044, arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Batang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Arah kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai berikut:

1) Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

a) Badan Air

Badan air yang dimaksud merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Badan Air di Kabupaten Batang seluas 737,77 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Batang.

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya pada Kabupaten Batang berupa kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung merupakan Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung dengan kode HL di Kabupaten Batang seluas 2.885,31 (dua ribu delapan ratus delapan lima koma tiga satu) hektare berada di Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Reban.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat merupakan Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber - sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Adapun kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Batang meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Batang seluas 151,39 (seratus lima puluh satu koma tiga sembilan) hektare berada di Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Batang, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tulis.

d) **Kawasan Konservasi**

Kawasan konservasi pada Kabupaten Batang berupa cagar alam. Cagar alam merupakan keadaan alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Kawasan cagar alam di Kabupaten Batang seluas 94,55 (sembilan puluh empat koma lima lima) hektare direncanakan berada di Kecamatan Subah.

2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Batang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan permukiman.

a) **Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan Hutan Produksi dengan luas 15.345 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima) hektare terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 8.760,91 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh koma sembilan satu) hektar tersebar di Kecamatan Bandar Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Wonotunggal. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap dengan luas 6.528,09 (enam ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol sembilan) tersebar di Kecamatan Bandar, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

b) **Kawasan Perkebunan Rakyat**

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan luas 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) hektare berada di Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Limpung, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

c) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian dengan luas 37.250 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektare terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan.

Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka penyediaan bahan pangan pokok di Kabupaten dengan luas kurang lebih 26.402,01 (dua puluh enam ribu empat ratus dua koma nol satu) hektar meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 16.681,27 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua tujuh) hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas kurang lebih 9.720,74 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh koma tujuh empat).

Kawasan hortikultura (dengan luas 19.738 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Batang. Kawasan perkebunan dengan luas 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) hektar berada di Kecamatan Bandar, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

d) Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan dengan luas 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare berupa kawasan perikanan budi daya yang berada di Kecamatan Batang, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tulis.

e) Kawasan Pertambangan Energi

Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan luas 252 (dua ratus lima puluh dua) hektare berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yang berada di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.

f) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 7.938 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektare berada di Kecamatan Bandar, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Batang, Kecamatan Blado, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Wonotunggal.

g) Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman dengan luas 19.030 (sembilan belas ribu tiga puluh) hektar meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 15.924

hektare dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 3.105 (tiga ribu seratus lima) hektar.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan percepatan dan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan administrasi dalam RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, potensi pengembangan wilayah dikelompokkan menjadi 5 (lima) Wilayah Pengembangan (WP) berdasarkan potensi dan sumber daya pengembangannya, yaitu :

- (1) WP – I meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Warungasem dengan arah pengembangan wilayah sebagai berikut :
 - a. penerpaduan pengembangan dengan Kawasan Perkotaan PETANGLONG;
 - b. penataan dan pengembangan PKL Batang;
 - c. pengembangan PPK yang mampu menjadi simpul dan distribusi produk olahan hasil pertanian
 - d. pengembangan industri maritim dan perikanan;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - f. pengembangan wisata laut dan pesisir;
 - g. pengembangan pusat pendidikan dan olah raga; dan
 - h. pengendalian alif fungsi lahan pertanian pangan;
- (2) WP - II meliputi Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Blado dengan arah pengembangan sebagai berikut :
 - a. pengembangan wisata berskala nasional;
 - b. penataan dan pengembangan PPK Bandar sebagai pusat WP;
 - c. pengembangan PPK yang mampu menjadi simpul dan distribusi produk olahan hasil pertanian
 - d. pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
 - e. pengendalian alif fungsi lahan pertanian pangan; dan
 - f. pengembangan perikanan darat.
- (3) WP – III meliputi Kecamatan Subah dan Kecamatan Tulis dengan arah pengembangan sebagai berikut :
 - a. pengembangan kawasan industri;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan sebagai pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB);

- c. pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
 - d. pengembangan wisata buatan, teknologi dan edukasi; dan
 - e. pengembangan fasilitas logistik pendukung kegiatan industri.
- (4) WP - IV meliputi Kecamatan Gringsing Kecamatan Banyuputih dengan arah pengembangan sebagai berikut :
- a. pengembangan kawasan industri;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan sebagai pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB);
 - c. Pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; dan
 - d. pengembangan wisata buatan, teknologi dan edukasi.
 - e. pengembangan pelabuhan darat (*dryport*) dan laut pendukung industri.
- (5) WP - V meliputi Kecamatan Limpung, Kecamatan Tersono, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Bawang dengan arah pengembangan sebagai berikut :
- a. pengembangan pariwisata berbasis eko-wisata;
 - b. penataan dan pengembangan PKL Limpung;
 - c. pengembangan PPK yang mampu menjadi simpul dan distribusi produk olahan hasil pertanian;
 - d. pengembangan industri pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
 - e. pengendalian alif fungsi lahan pertanian pangan;
 - f. pengembangan perikanan darat.

Sedangkan arahan kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2024-2044, kawasan strategis wilayah Kabupaten Batang terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Batang;
 - b. Kawasan Perkotaan Banyuputih-Gringsing;
 - c. Kawasan Perkotaan Limpung;
 - d. Kawasan Industri Terpadu Batang; dan

- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata berbasis eko wisata (wisata pegunungan, wisata budaya, wisata petualangan, dan wisata pantai).
- 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah.
- 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

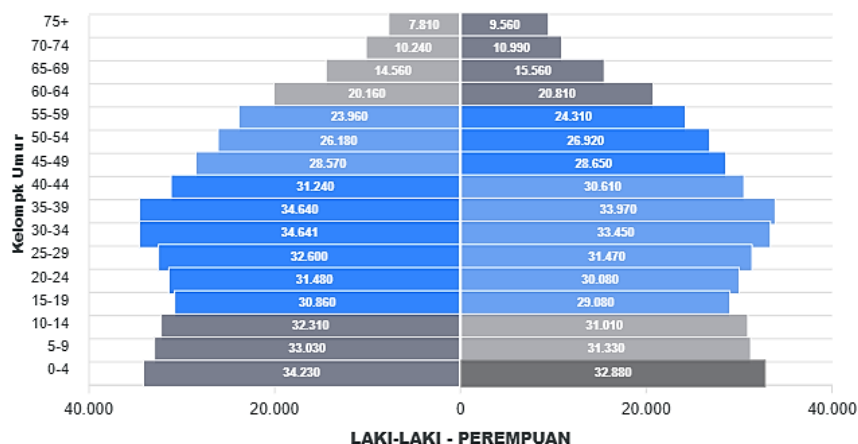
2. Demografi

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Proyeksi Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 838.187 jiwa dengan komposisi 422.237 laki-laki dan 415.950 perempuan. Penduduk terbanyak beradad di Kecamatan Batang sebanyak 16,64 persen dan paling sedikit di kecamatan Pecalungan 3,98 persen dari total penduduk Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2024 sebesar 1,12 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2023 mencapai 1.051 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sebesar 4.018 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Blado sebesar 597 jiwa/km².

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	Wonotunggal	20.436	20.233	40.669
2	Bandar	37.939	36.944	74.883
3	Blado	23.987	23.152	47.139
4	Reban	21.094	21.117	42.211
5	Bawang	29.319	28.141	57.460
6	Tersono	21.295	21.065	42.360
7	Gringsing	32.873	32.857	65.730
8	Limpung	22.884	22.990	45.874
9	Banyuputih	19.218	18.959	38.177
10	Subah	27.594	27.266	54.860
11	Pecalungan	16.825	16.590	33.415
12	Tulis	20.331	20.565	40.896
13	Kandeman	29.625	28.801	58.426
14	Batang	70.085	69.407	139.492
15	Warungasem	28.732	27.863	56.595
Jumlah		422.237	415.950	838.187

Sumber: Batang dalam Angka, 2024



Gambar 2. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2025
Sumber: <https://siperindu.online/piramida>, diakses pada 19 Mei 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kelompok penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi, dengan puncak tertinggi berada pada rentang usia 30–34 tahun dan 35–39 tahun untuk kedua jenis kelamin. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Batang masih berada dalam bonus demografi, dimana mayoritas penduduk berada pada usia produktif, yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) masih cukup besar namun mulai mengalami penurunan dibandingkan kelompok usia produktif. Ini menunjukkan adanya penurunan angka kelahiran dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mulai menunjukkan peningkatan, meskipun masih dalam jumlah yang relatif kecil. Ini merupakan indikasi awal bahwa Kabupaten Batang mulai menuju penuaan penduduk (aging population), yang kedepannya perlu diantisipasi melalui kebijakan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan lansia. Secara umum, piramida penduduk mencerminkan bahwa Kabupaten Batang pada tahun 2025 berada dalam fase penting transisi demografi, yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan momentum untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan usia produktif secara optimal.

Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Batang Tahun 2020 - 2024

TAHUN	TIDAK / BELUM TAMAT SD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	STRATA
2020	24,58	33,86	20,35	16,97	0,81	3,44
2021	24,92	33,71	21,69	16,02	0,66	2,99
2022	23,94	33,60	21,48	17,13	0,80	3,05
2023	23,47	33,14	22,21	17,17	0,62	3,40
2024	22,38	33,66	23,10	17,15	0,70	3,01

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang belum tamat SD selama 5 tahun terakhir terus menurun yaitu dari 25,58 di tahun 2022 menjadi 22,38 di tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Penurunan persentase penduduk yang belum tamat SD menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberhasilan dalam penyelesaian pendidikan dasar selama periode 2022 hingga 2024, yang dapat mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam mengurangi angka putus sekolah di tingkat SD.

Sementara itu, tamatan SMP, SMA, Diploma dan Strata mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam pencapaian pendidikan di tingkat lanjutan, tingkat pendidikan di level ini masih tidak stabil. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pendidikan, akses ke pendidikan lanjutan yang terbatas, atau dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan pada tingkat pendidikan dasar, masih ada tantangan dalam memastikan kelanjutan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi secara konsisten.

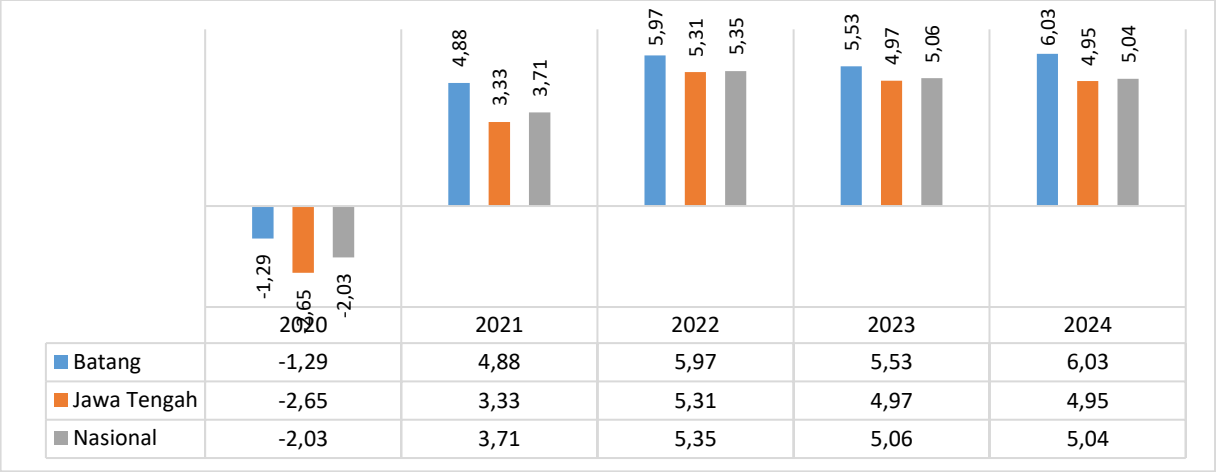
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kondisi capaian indikator berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami tren yang fluktuatif. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi pada berbagai sektor. Sedangkan penurunan pada tahun 2023 dikarenakan adanya pelambatan dari ekonomi global akibat dampak konflik geopolitik yang belum berakhir. Adapun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang masih lebih tinggi. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020-2024 tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2025 dan Statistik Indonesia Tahun 2025

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang tidak terlepas dari sumbangan dari masing-masing sektor perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Kabupaten Batang mengalami tren kenaikan tiap tahun. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2024 berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 10.601.820 juta rupiah (34,89%) dari total PDRB yang disusul dari sektor Pertanian dengan menyumbang sebesar 5.577.760 juta rupiah (18,35%). Selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3.783.110 juta rupiah (12,45%) dan sektor konstruksi sebesar 2.452.570 juta rupiah (8,07%) yang kemudian di lima besar terakhir penyumbang PDRB terbesar dari sektor Jasa Pendidikan 1.661.330 juta rupiah (5,47%).

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Tahun 2024 mencapai 30.389.480 juta rupiah, jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 25.488.048,01juta rupiah. Selengkapnya PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 6
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Ktgr	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.656.020,56	4.746.326,78	5.057.304,20	5.307.404,68	5.577.760
B	Pertambangan dan Penggalian	660.610,77	706.207,85	722.803,73	767.067,70	829.860
C	Industri Pengolahan	7.368.499,52	7.883.059,12	8.717.236,63	9.636.926,23	10.601.820
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.383,77	15.673,91	16.649,29	17.762,37	20.820
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.209,85	23.743,67	24.779,49	27.164,02	30.160
F	Konstruksi	1.189.042,66	1.668.969,88	1.854.880,61	2.160.740,00	2.452.570
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.746.140,70	2.946.563,79	3.175.421,16	3.493.458,89	3.783.110
H	Transportasi dan Pergudangan	375.835,73	396.530,85	744.366,16	881.721,57	964.750
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	784.096,84	845.052,24	1.058.517,93	1.165.319,58	1.311.450
J	Informasi dan Komunikasi	679.710,57	710.773,34	734.157,78	789.766,70	839.650
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	369.556,79	394.436,65	431.428,06	454.448,93	488.120
L	Real Estate	222.325,48	227.883,62	242.399,80	106.475,94	289.600
M,N	Jasa Perusahaan	84.314,96	87.603,25	97.502,85	106.475,94	117.690
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	504.043,88	495.122,31	517.915,64	524.752,35	571.720
P	Jasa Pendidikan	1.353.876,24	1.371.476,63	1.408.731,62	1.515.335,64	1.661.330
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179.312,69	186.521,06	196.704,79	217.336,21	239.010
R,S, T,U	Jasa lainnya	408.311,82	419.811,05	492.648,27	553.100,24	610.050
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		21.585.864,48	21.619.292,81	23.125.755,99	25.488.048,01	30.389.480

Sumber : <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTEjMg==/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha--miliar-rupiah-.html>, 2025

Tabel 2. 7
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.06	-0.47	1.75	-0.29	0,99
B. Pertambangan dan Penggalian	-0.18	5.83	-0.76	3.19	8,16
C. Industri Pengolahan	-2.82	4.38	5.46	5.28	5,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.13	9.89	5.42	3.41	14,69
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.38	1.22	2.33	8.49	4,93
F. Konstruksi	-1.03	35.78	4.36	13.01	13,22

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.26	5.95	3.65	6.26	6,64
H. Transportasi dan Pergudangan	-26.50	1.68	77.42	8.11	7,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6.48	5.31	20.32	14.31	10,36
J. Informasi dan Komunikasi	17.13	4.54	3.02	7.25	5,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.66	2.35	0.56	3.17	5,87
L. Real Estate	-1.26	1.33	4.67	9.23	7,57
M,N. Jasa Perusahaan	-6.74	2.65	6.56	5.14	8,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.20	-0.74	1.79	-0.01	7,64
P. Jasa Pendidikan	-0.10	0.07	2.13	6.31	7,5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	9.14	2.94	3.82	7.59	8,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-5.65	1.96	12.68	9.27	7,25
Produk Domestik Regional Bruto	-1.29	4.88	5.97	5.53	6,03

Sumber : <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA5IzI=/laju-pertumbuhan-pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>, 2025

Dari tabel 2.14 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 14,69% yang disusul oleh sektor Konstruksi sebesar 13,22%. Sebaliknya laju pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangyaitu masing masing 0,99 dan 4,93.

Selanjutnya jika dilihat dari distribusi persentase PDRB pada 5 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Batang masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pembangunan Kawasan industri menjadi faktor penting kenaikan persentase distribusi pada sektor tersebut. Sementara sektor-sektor lain cenderung stabil. Sebagaimana distribusi PDRB menurut lapangan usaha dari tahun 2020-2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Distribusi persentase PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,53	20,52	19,82	19,03	18,35
B. Pertambangan dan Penggalian	3,06	3,05	2,84	2,75	2,73

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
C. Industri Pengolahan	34,08	34,09	34,20	34,56	34,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,1	0,1
F. Konstruksi	5,50	7,22	7,28	7,75	8,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,70	12,74	12,46	12,53	12,45
H. Transportasi dan Pergudangan	1,75	1,71	2,92	3,16	3,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,63	3,65	4,15	4,18	4,32
J. Informasi dan Komunikasi	3,14	3,07	2,88	2,83	2,76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,71	1,69	1,63	1,61
L. Real Estate	1,03	0,99	0,95	0,96	0,95
M,N. Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,14	2,03	1,88	1,88
P. Jasa Pendidikan	6,26	5,93	5,53	5,43	5,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	0,83	0,81	0,77	0,78	0,79
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,89	1,82	1,93	1,98	2,01
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0UxS09GQlBTbk5QWTBNdlVWUmxSMjV3Y3l0VWR6MDkjMyMzMzI1/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen--di-kabupaten-batang.html?year=2024>, diakses pada Mei 2025

Sementara itu, kondisi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 9
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.977.772,61	2.963.785,83	3.016.331,06	3.006.924,88	3.036.560
B	Pertambangan dan Penggalan	405.324,81	428.966,34	425.714,77	439.315,74	475.170
C	Industri Pengolahan	4.947.572,62	5.164.177,57	5.445.934,39	5.760.221,01	6.064.740
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.376,51	13.600,45	14.337,02	14.826,39	17.000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.059,92	19.292,48	19.742,41	21.418,74	22.470
F	Konstruksi	819.046,23	1.112.109,97	1.160.652,38	1.311.612,98	1.484.960
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.102.712,81	2.227.173,18	2.308.457,86	2.452.940,00	2.615.710
H	Transportasi dan Pergudangan	310.474,56	317.018,69	562.440,12	608.055,44	655.450

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	588.060,38	619.311,59	745.174,61	823.251,85	908.510
J	Informasi dan Komunikasi	719.911,65	752.583,55	775.319,10	831.507,60	880.020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	253.493,64	259.462,43	260.903,41	269.161,86	284.970
L	Real Estate	181.361,19	183.778,74	192.365,06	210.126,51	226.040
M,N	Jasa Perusahaan	57.775,36	59.304,10	63.195,90	66.443,86	71.770
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	339.564,23	337.041,69	343.078,99	343.044,63	369.240
P	Jasa Pendidikan	848.468,12	849.039,14	867.162,11	921.900,83	991.050
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.776,75	129.472,68	134.422,04	144.621,31	156.270
R,S,T,U	Jasa lainnya	321.825,63	328.147,12	369.755,51	404.015,64	433.300
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.030.577,04	15.764.265,54	16.704.986,75	17.629.389,28	18.693.220

Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA4IzI=/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha--miliar-rupiah-.html>, diakses Mei 2025

Selanjutnya nilai ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2024 atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran mencapai 30.389.480 juta rupiah, yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 20.999.530 (69,10%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8.226.980 juta rupiah (27,07%). Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 76,71 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori (1,60%). Nilai PDRB Kabupaten Batang ADHB menurut pengeluaran selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut masih dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2. 10
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)				
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.568.041,10	16.184.573,40	17.860.508.26	17.860.508.26	20.999.530
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	352.637,80	364.824,14	410.823.63	410.823.63	543.720
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.527.434,99	1.567.301,04	1.584.128.07	1.584.128.07	1.768.600
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.116.316,15	6.229.771,65	6.810.506.03	6.810.506.03	8.226.980
Perubahan Inventori	521.481,68	390.464,63	500.782.76	500.782.76	485.050
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.364.548,91	-1.611.178,87	-1.678.700.73	-1.678.700.73	-1.634.410
Produk Domestik Regional Bruto	21.621.362,81	23.125.755,99	25.488.048.01	25.488.048.01	30.389.480

Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcwIzI=/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran--miliar-rupiah-.html>, diakses Mei 2025

Selama periode 2020-2024, konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran tahun 2024 peranannya masih begitu dominan yaitu sebesar 70,68 persen. Pengeluaran untuk pembentukan modal atau kapital (PMTB) porsinya terhadap PDRB menempati urutan kedua setelah konsumsi rumah tangga sebesar 25,55 persen. Pada pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2024, hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membentuk PDRB tidak mendominasi. Perdagangan Kabupaten Batang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa net ekspor barang dan jasa bernilai negatif, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Batang selama kurun waktu 2020-2024 selalu menunjukkan posisi “defisit” yang mencapai-5,45 persen di tahun 2024. Capaian ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Peranan konsumsi akhir LNPRRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1,53 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian, sehingga pada masa mendatang dapat semakin meningkat. Kondisi PDRB ADHK Menurut pengeluaran tersaji dalam tabel berikut ini :

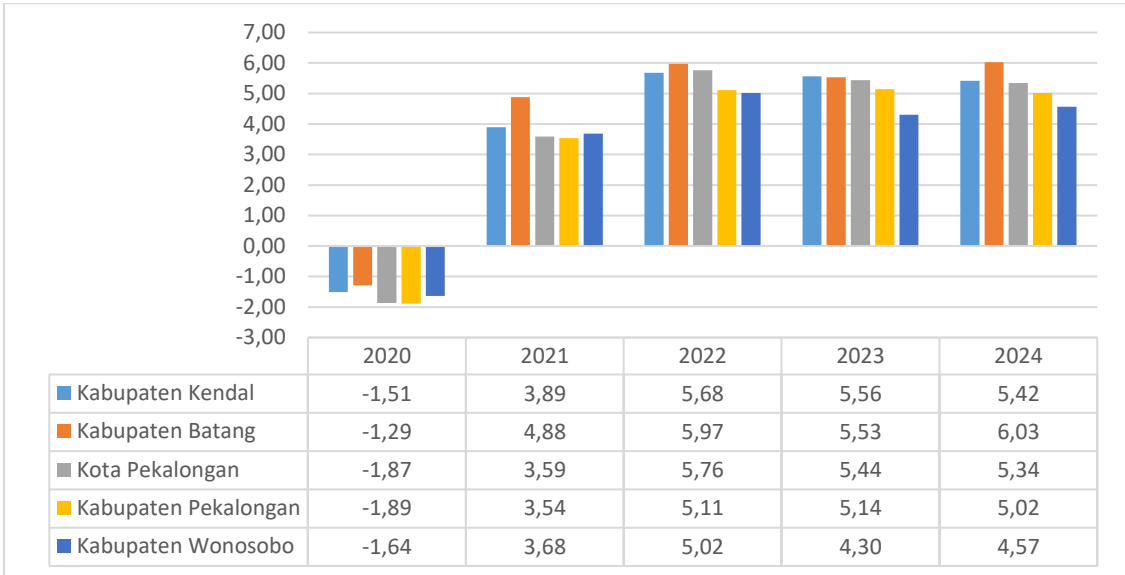
Tabel 2. 11
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.068.624,84	11.265.953,40	11.916.678,77	12.514.561,45	13.213.830
Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	217.574,16	218.713,77	229.482,09	246.043,64	287.670
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	960.782,78	960.632,13	961.400,63	982.841,68	1.013.390
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.839.547,20	3.924.731,82	4.150.417,12	4.366.661,36	4.776.190
Perubahan Inventori	504.245,43	372.517,51	479.746,43	497.870,23	421.290
Ekspor Barang dan Jasa	- 1.560.197,36	- 978.283,08	- 1.032.738,29	- 978.589,09	-1.019.140
Produk Domestik Regional Bruto	15.030.577,04	15.764.265,54	16.704.986,75	17.629.389,28	18.693.220

Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA3IzI=/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran-miliar-rupiah-.html>, diakses Mei 2025

Kontraksi ekonomi di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Kabupaten/Kota di sekitar Batang hingga mencapai rentang minus 1,29 persen hingga minus 1,89 persen. Namun pada tahun 2021 hingga 2023 ini, kondisi ekonomi di sekitar kabupaten/kota sekitar Batang sudah berangsur membaik yang ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2023 mencapai 5,53 persen

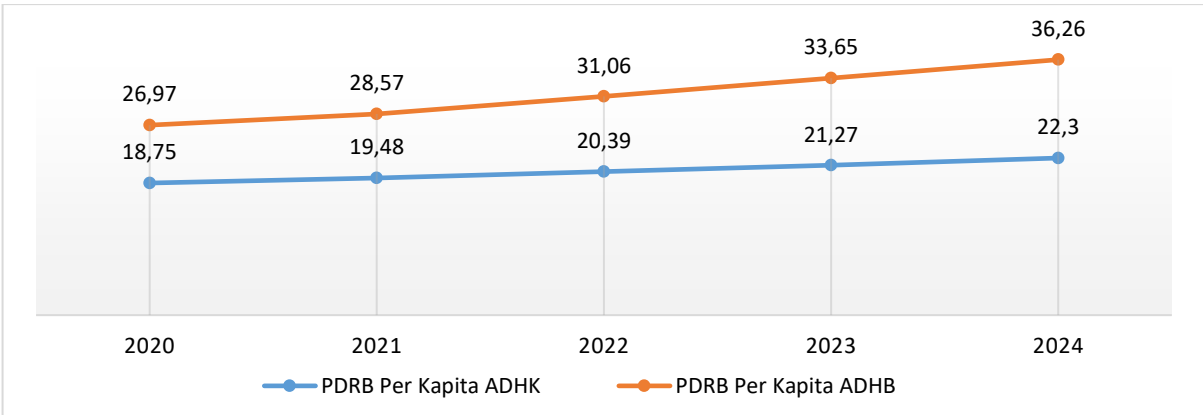
dimana capaian ini menurun dari tahun 2022 yang mencapai 5,97 persen. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Kabupaten/Kota sekitar yakni Kabupaten Wonosobo sebesar 4,30 persen, Kabupaten Pekalongan sebesar 5,14 persen, dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 4,98 persen. Dan masih lebih rendah disbanding 2 kabupaten kota yaitu Kabupaten Kendal sebesar 5,56 persen dan Kota Pekalongan sebesar 5,44 persen. Sebagaimana capaian tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2024

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah diukur dengan mengetahui besarnya nilai pendapatan per kapita yaitu dengan menghitung PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Sebagaimana capaian PDRB per Kapita ADHK ADHB tersaji sebagai berikut :

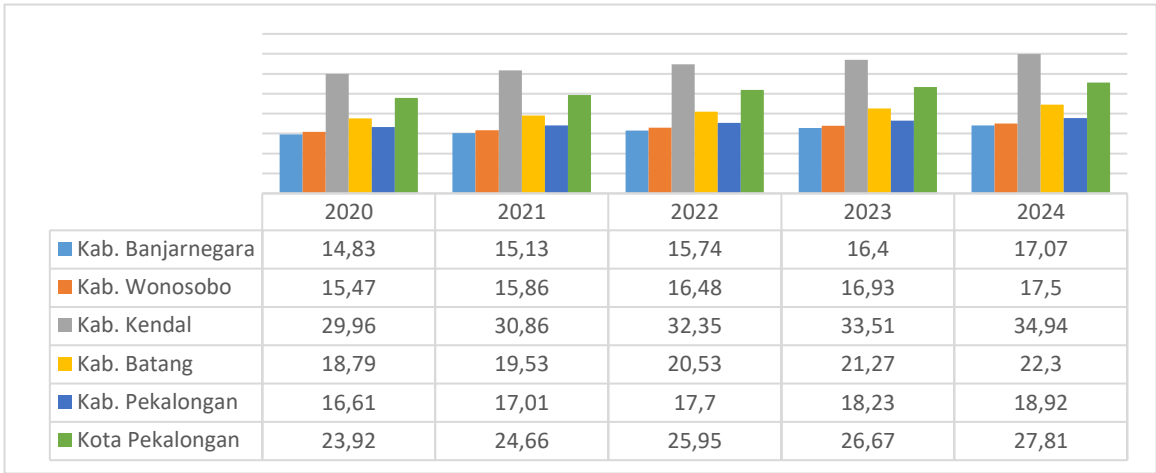


Gambar 2. 7 PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Batang menunjukkan adanya kemajuan ekonomi yang positif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan bahwa produktivitas ekonomi di Kabupaten Batang semakin meningkat, di mana pendapatan rata-rata masyarakat terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama, peningkatan investasi, perbaikan infrastruktur, serta adanya kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan usaha dan industri. Peningkatan ini juga dapat mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, di mana lebih banyak pendapatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perubahan PDRB per kapita tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian juga dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Capaian PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Batang Tahun 2024 jika dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar terlihat lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Pekalongan. Namun capaian Kabupaten Batang lebih rendah dibanding Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :



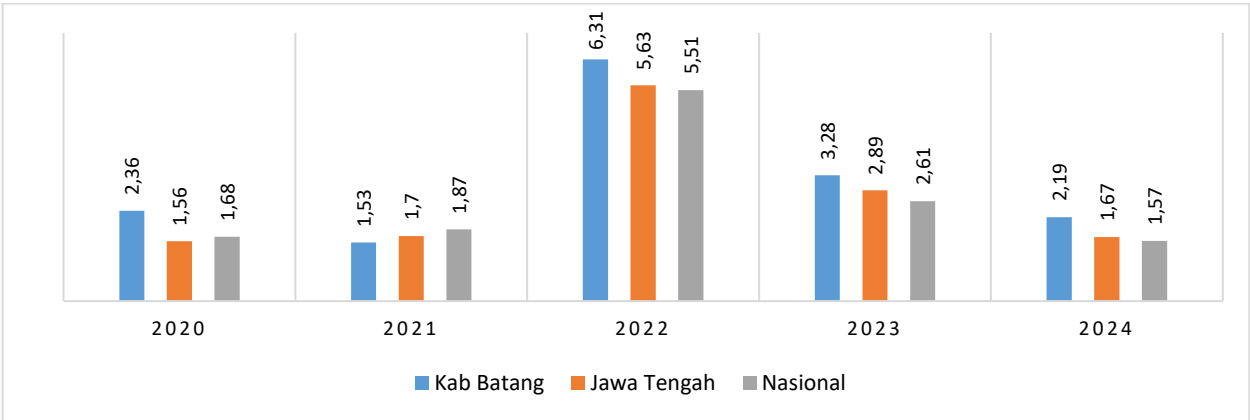
Gambar 2. 8 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK dengan rata rata capaian wilayah sekitar Tahun 2020-2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0NyMy/-seri-2010--pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah--juta-rupiah-.html>, diakses Mei 2025

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat berdampak signifikan terhadap daya saing daerah. Kenaikan biaya produksi akibat inflasi mengurangi profitabilitas perusahaan lokal dan menurunkan minat investasi. Selain itu,

inflasi juga mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi konsumsi domestik. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing wilayahnya melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Angka inflasi Kabupaten Batang mengacu pada angka inflasi Kota Tegal tahun 2020-2024 selengkapnya tersaji pada gambar berikut:



Gambar 2. 9 Laju inflasi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2025

Perhitungan inflasi Kabupaten Batang sejak tahun 2020 menggunakan pendekatan sister city sebagaimana mengacu pada letak geografis yang berdekatan dan pola konsumsi yang hampir sama. Sister city yang ditentukan sebagai acuan perhitungan inflasi Kabupaten Batang adalah Kota Tegal. Hingga tahun 2024, Batang mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,19 persen, menurun sebesar 1,09 poin dari tahun 2023. Penurunan ini menandakan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Batang sudah berjalan dengan baik.

3. Tingkat Ketimpangan

Jumlah pendapatan atau distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk atau wilayah. Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai range nilai 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati 0 menunjukkan semakin rendah ketimpangannya dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan semakin tinggi ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar). Secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

$0,00 < G < 0,35$	pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
$0,35 \leq G \leq 0,50$	pemerataan / ketimpangan sedang
$G > 0,50$	pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Namun sejak tahun 2016, indeks Gini sudah tidak lagi dilakukan di tingkat Kabupaten. Alternatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan di daerah adalah menggunakan indikator ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Distribusi pengeluaran Kabupaten Batang pada pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah berdasarkan kriteria Bank Dunia 2019-2023 pada kurun waktu empat tahun terakhir berada diatas 17 persen, tahun 2019 sebesar 21,56 persen yang terus menurun hingga tahun 2023 sebesar 20,17 yang artinya tingkat ketimpangan di Kabupaten Batang berada pada kategori ketimpangan rendah.

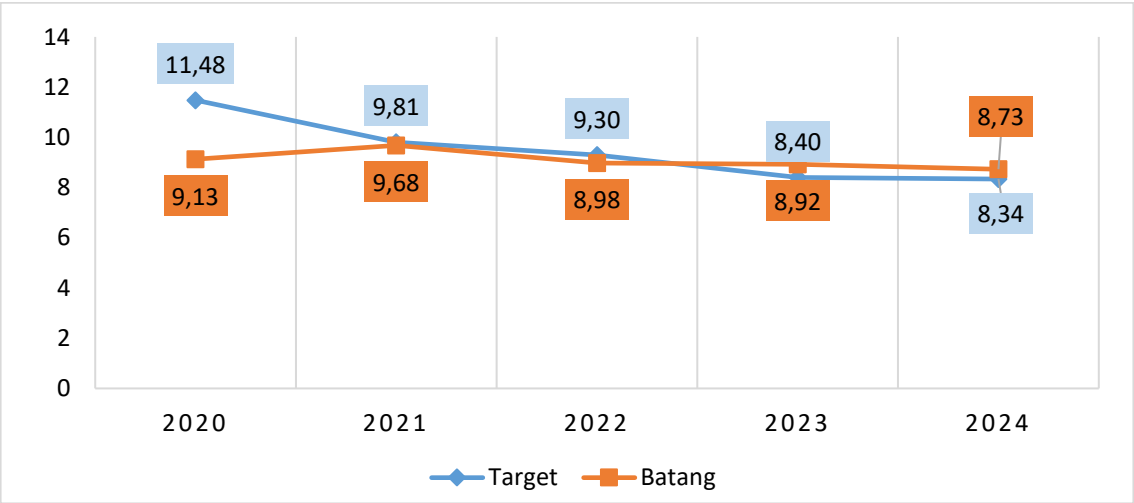
Tabel 2. 12
Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Kategori	40% bawah	40% tengah	20% atas
2019	21,56	39,65	38,79
2020	21,26	40,61	38,13
2021	21,79	38,97	39,24
2022	22,41	39,06	38,53
2023	20,17	38,29	41,54

Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2019- 2024

4. Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Batang berfluktuasi dari periode tahun 2020-2024 sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini :

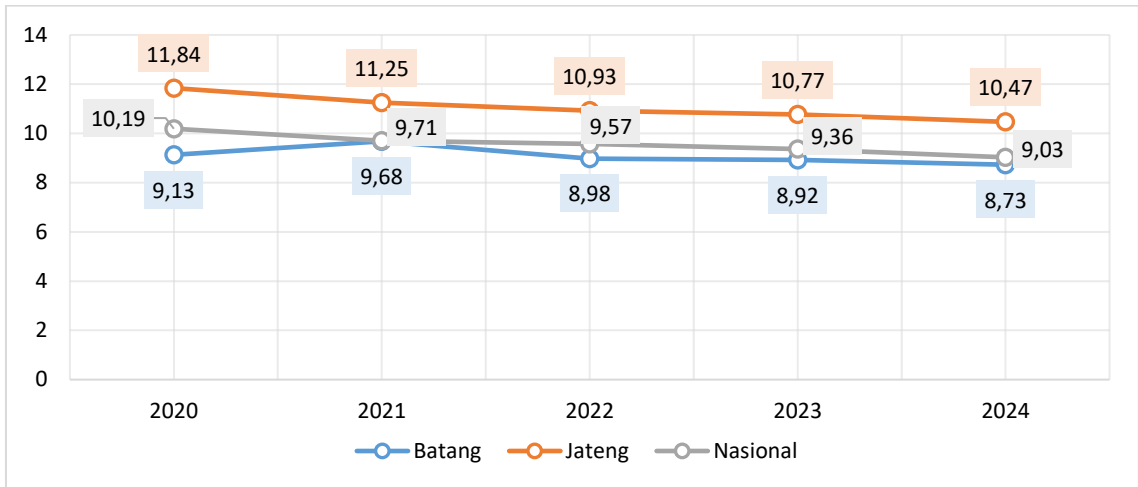


Gambar 2. 10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan target daerah tahun 2020 - 2024

Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTq2IzI=/persentase-penduduk-miskin---persen-.html>, 2024

Dari tabel 2.17 terlihat bahwa terjadi penurunan kemiskinan Kabupaten Batang dari sebesar 9,13% pada tahun 2020 menjadi 8,73% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Tahun 2023. Kondisi kemiskinan Kabupaten Batang mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 namun menurun kembali hingga tahun 2023. Upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang salah satunya melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah layak, dan akses KB, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial/subsidi untuk masyarakat miskin, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dan jaminan kesehatan warga miskin.

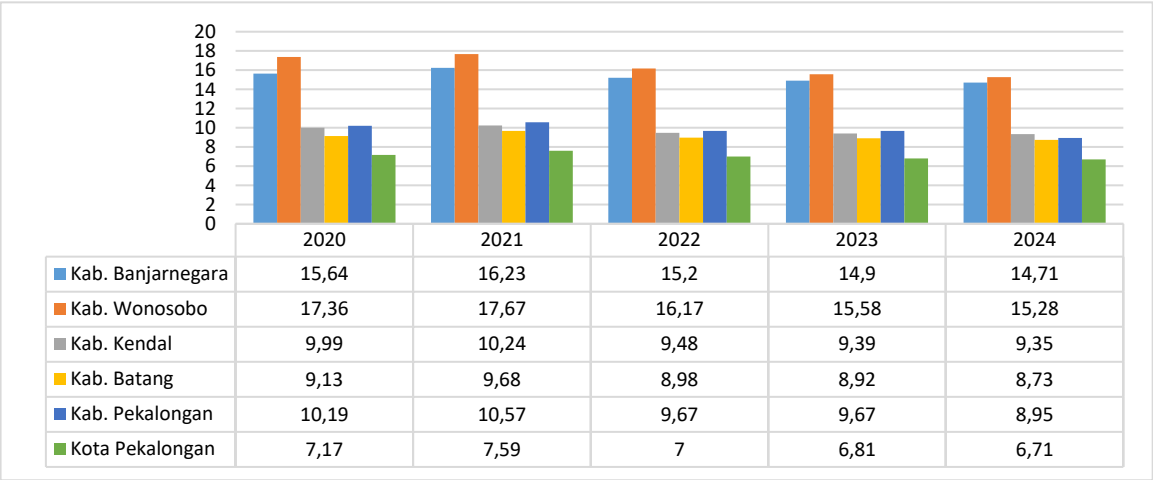
Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang di tahun 2024 jauh dibawah angka capaian Provinsi Jawa tengah dan Nasional. Selengkapnya pada gambar berikut :



Gambar 2. 11 Perbandingan pencapaian persentase penduduk miskin daerah dengan capaian provinsi dan nasional tahun 2020 - 2024

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2024, Statistik Indonesia 2024

Dari Tabel 2.18 diatas terlihat bahwa capaian kemiskinan Kabupaten Batang masih dibawah angka provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2024 masih lebih rendah dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,71%, Kabupaten Wonosobo sebesar 15,28%, Kabupaten Kendal sebesar 9,35% dan Kabupaten Pekalongan sebesar 8,95%, namun masih lebih tinggi capaiannya jika dibandingkan Kota Pekalongan yaitu sebesar 6,71%. Sebagaimana perbandingan tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :

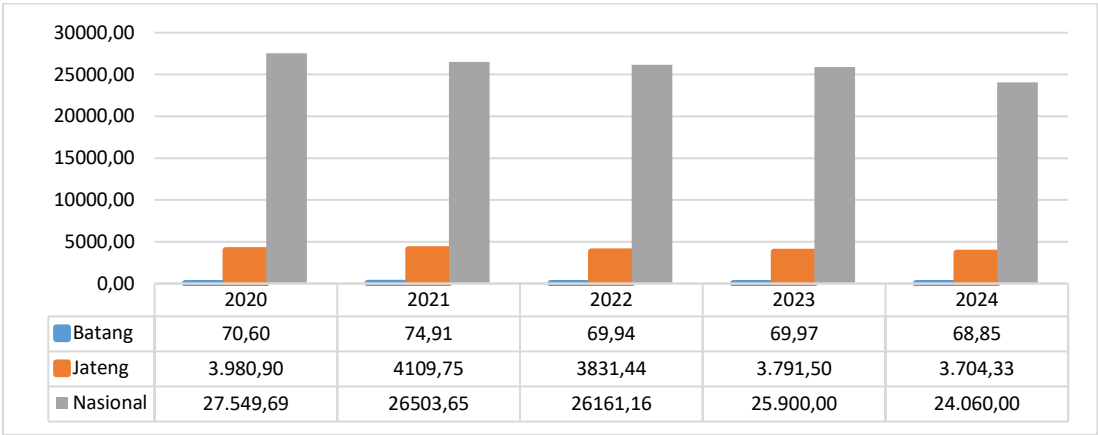


Gambar 2. 12 Perbandingan perubahan persentase penduduk miskin dengan capaian kab/kota sekitar tahun 2020 - 2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/kemiskinan.html>, 2024

Tingkat perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang dibanding dengan capaian nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024cenderung fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 menuju 2021 meningkat

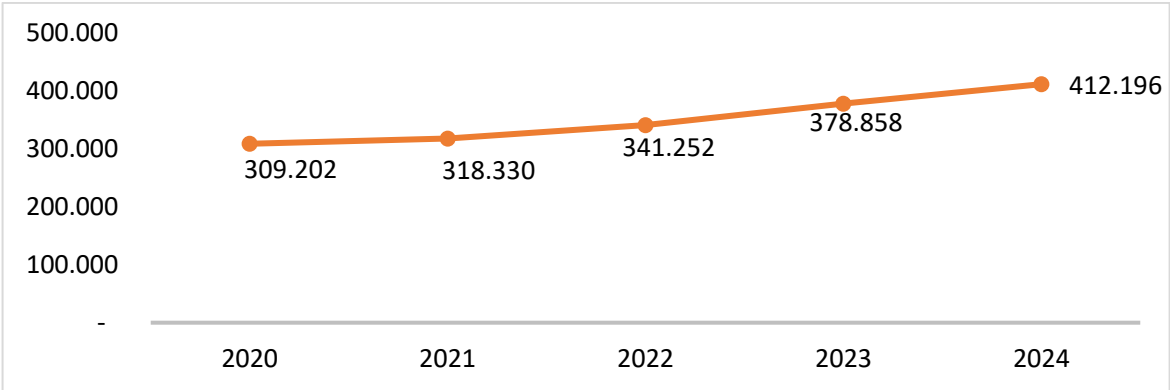
akibat pandemi covid 19 yang kemudian menurun menjadi 68,85 ribu jiwa pada tahun 2024. Sebagaimana tersaji dalam grafik dibawah ini :



Gambar 2. 13
Perbandingan Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah dengan
capaian nasional Tahun 2020 – 2024 (ribu jiwa)

Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024, Statistik Indonesia 2024

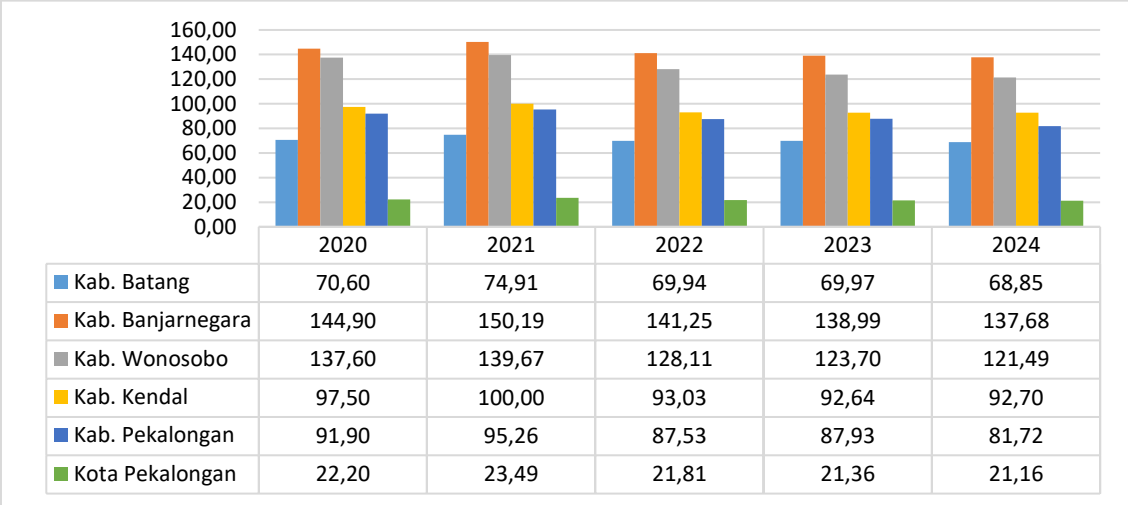
Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabuptaen Batang pada tahun 2023 disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Batang serta peningkatan garis kemiskinan (GKM). Dari tahun 2019 hingga tahun 2024, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Batang terus meningkat, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 14 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Tahun 2020-2024

Sumber : [Garis Kemiskinan \(Rp/ Kap/ Bulan\) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang](#) , 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di sekitar, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang masih lebih rendah dibanding Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana jumlah penduduk miskin dari Tahun 2020-2024 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 2. 15 Perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang dengan rata rata capaian wilayah kab/kota sekitar Tahun 2020 - 2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/kemiskinan.html>, 2025

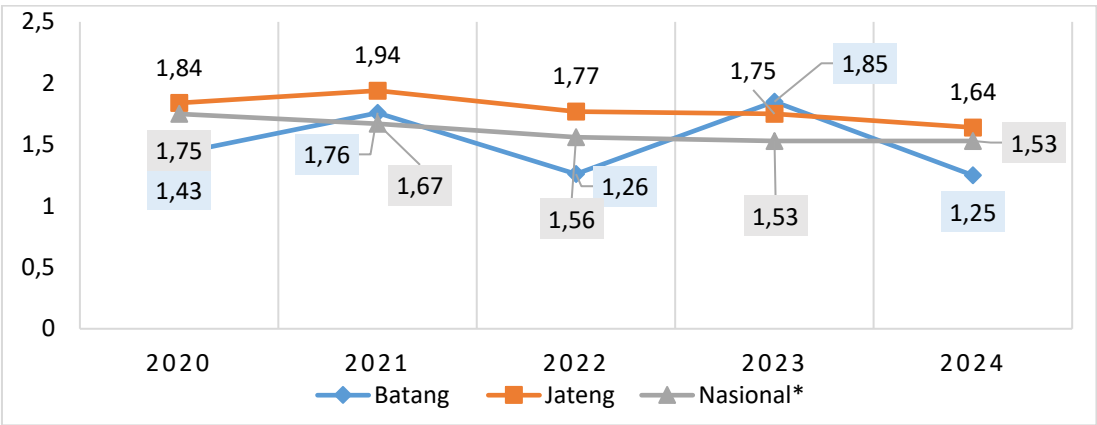
a) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) selama periode 2020-2024 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, P1 Kabupaten Batang berada pada angka 1,43 dan cenderung menurun menjadi 1,25 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di atas provinsi dan nasional;
- 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan di atas nasional;
- 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

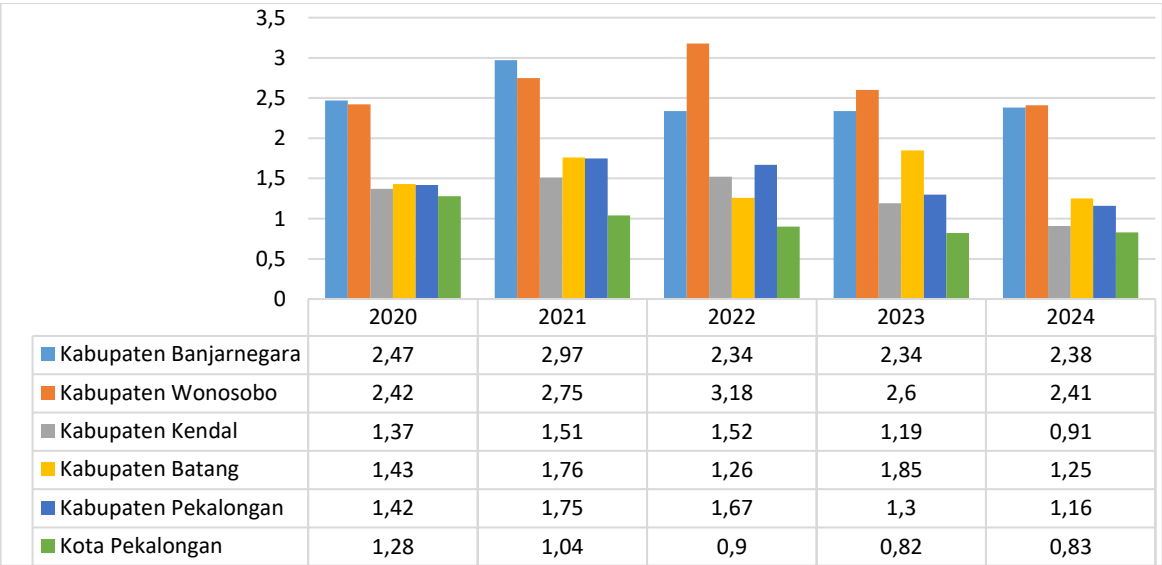


Gambar 2. 16 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: [Indeks Kedalaman Kemiskinan \(P1\) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024](#)

Berdasarkan grafik dan kriteria relative di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang tahun 2024 sebesar 1,25 masuk dalam kategori Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi yang artinya bahwa Kabupaten Batang memiliki P1 dibawah provinsi sebesar 1,75 dan nasional sebesar 1,53. Hal ini menandakan bahwa semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan Kabupaten Batang.

Pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang dengan Kabupaten/Kota sekitar dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

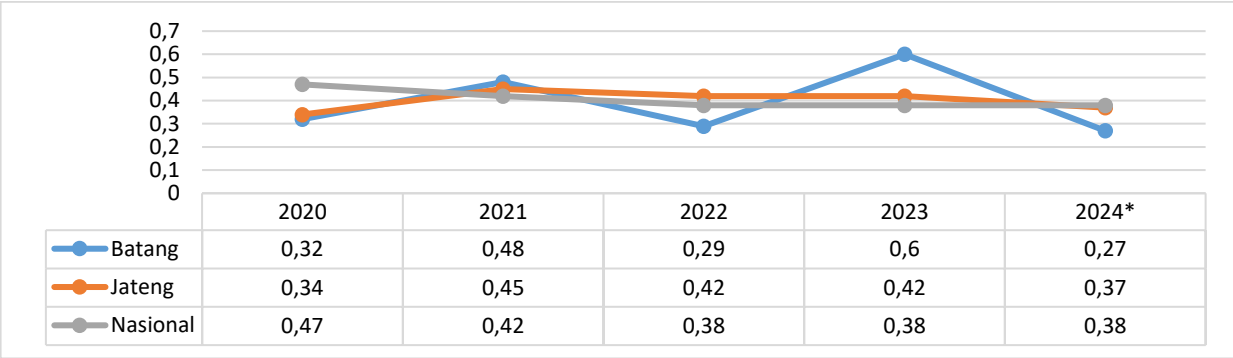


Gambar 2. 17 Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang dengan rata rata capaian Kab/Kota sekitar Tahun 2020 - 2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzcjMg==/indeks-kedalaman-kemiskinan--p1-.html>, 2025

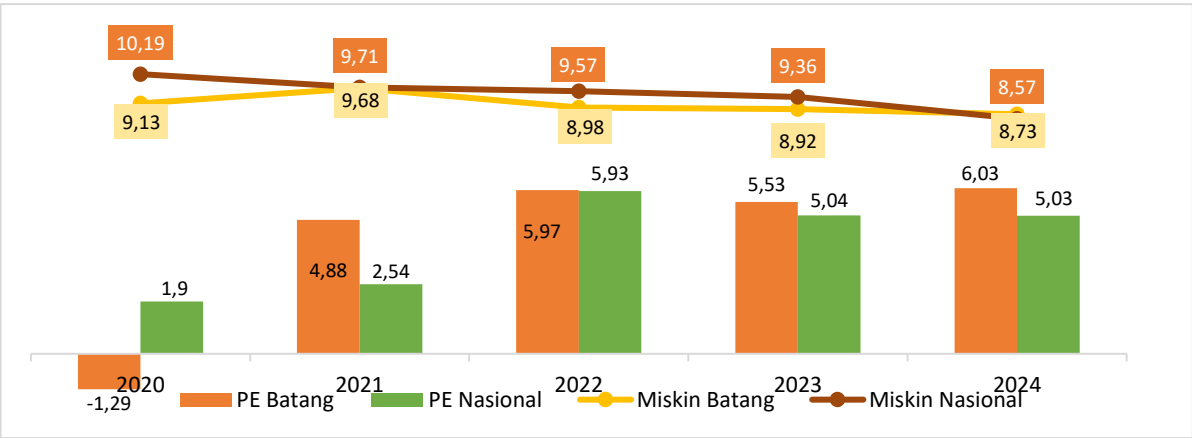
b) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menandakan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 18 Tingkat Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan
Sumber: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/indeks-keparahan-kemiskinan--p2-.html>, 2025

Berangkat dari P2 sebesar 0,32 pada tahun 2020, hingga tahun 2024 P2 atau keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang fluktuasi dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0,27. Capaian ini masih jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menandakan semakin menurunnya kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Batang. Sehingga masih perlu dilakukan perbaikan dalam upaya pemerataan ekonomi di masyarakat guna mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat. Berikut telah tersaji rasio perubahan persentase penduduk miskin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2020-2024 :



Gambar 2. 19 Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

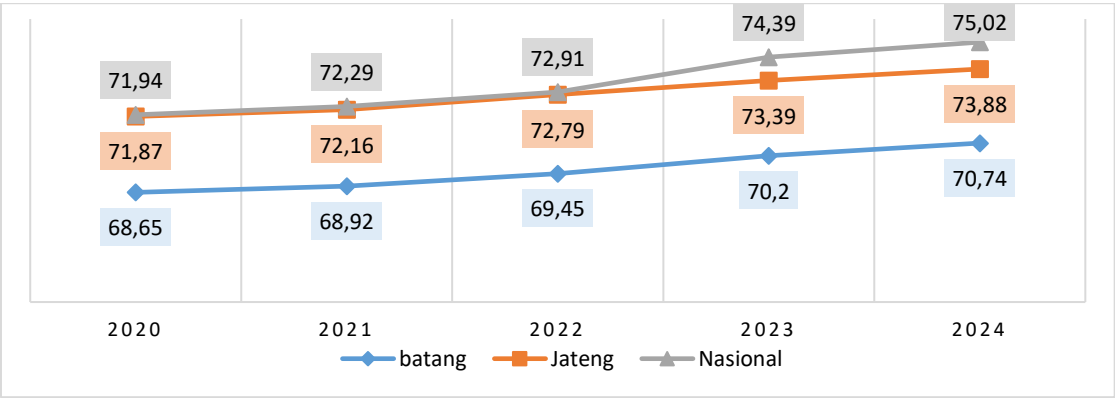
Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka tahun 2023-2025, Statistik Indonesia 2025

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjadi tolok ukur untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Untuk melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

- IPM rendah, jika nilai IPM < 60;
- IPM sedang, jika nilai 60 < IPM < 70;
- IPM tinggi, jika nilai 70< IPM < 80;
- IPM sangat tinggi, jika nilai IPM > 80.

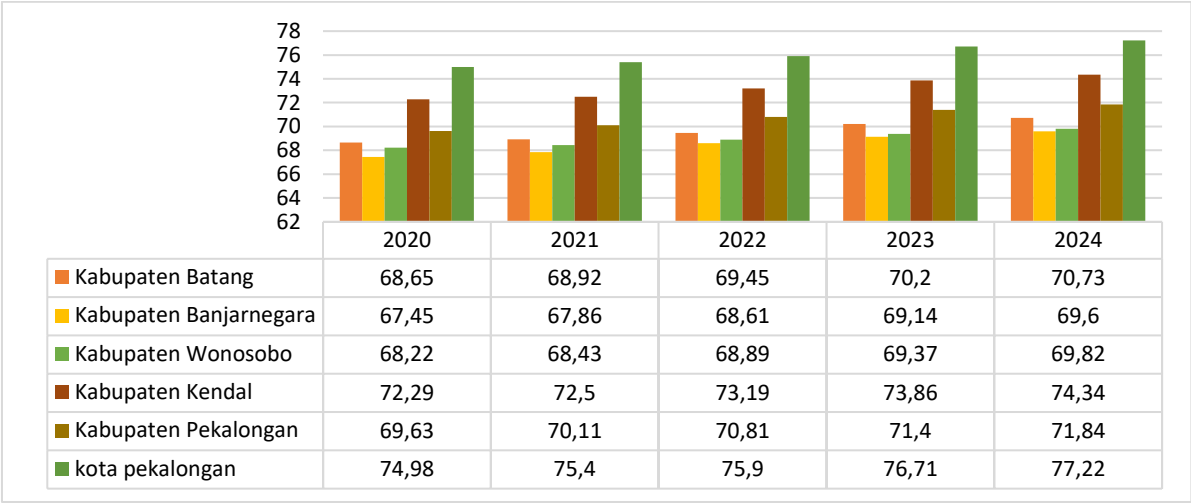
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menurut metode baru menunjukkan tren positif selama 5 tahun terakhir. IPM Kabupaten Batang tahun 2024 ini meningkat 0,54 poin dibandingkan tahun 2023 menjadi 70,74 di tahun 2024. Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, maupun pada dimensi standar hidup layak masyarakat. Namun IPM Kabupaten Batang sendiri masih jauh dibawah angka capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 20 IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>,
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwNSMy/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia--umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html> ,
2025

Sementara itu, Capaian IPM Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (69,60) dan Kabupaten Wonosobo (69,82), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Pekalongan (71,84), Kabupaten Kendal (74,34) dan Kota Pekalongan (77,22). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 21 IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>, 2025

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pencapaian IPM yaitu penyusunan program dan kegiatan lintas sektoral dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat yang diharapkan masyarakat dengan ekonomi yang cukup dapat mempengaruhi tingkat motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut diharapkan akan berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya lainnya adalah dengan melaksanakan inovasi pelayanan pendidikan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan anak di masa depan yang diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan Angka Harapan Hidup dan pengeluaran per kapita masyarakat karena sejatinya pendidikan merupakan bekal bagi mereka untuk bertahan hidup di masa depan.

Peningkatan IPM pada tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan pada dimensi pembentuk IPM. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan terutama pada dimensi pengetahuan dan standar hidup layak masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 13

Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2020-2024

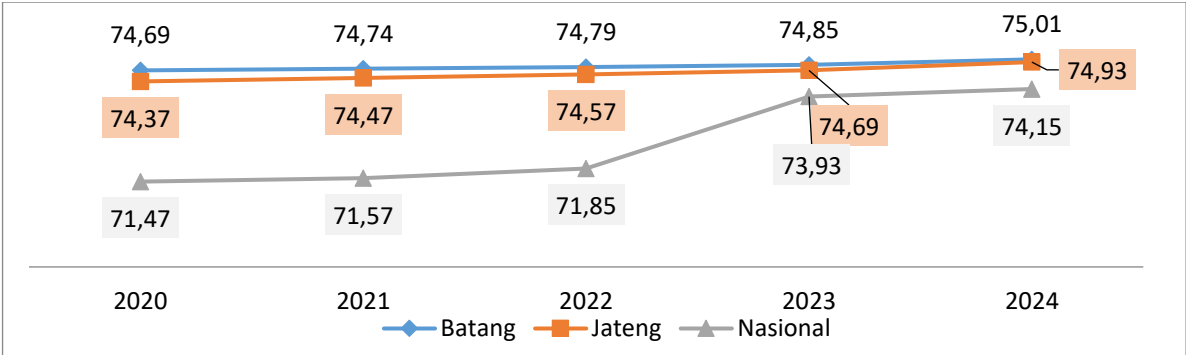
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
AHH (TH)	74,69	74,74	74,79	74,85	75,01
HLS (TH)	12,01	12,13	12,14	12,15	12,17
RLS (TH)	6,87	6,88	6,90	7,07	7,08
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu Rp/orang/th)	9.431	9.524	9.972	10.470	10.919
IPM	68,65	68,92	69,45	70,20	70,73

Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Nzc0IzE=/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-batang-berdasarkan-komponen--2022-2024.html>, 2025

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Faktor yang mempengaruhi AHH antara lain aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi AHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan upaya melalui paradigma sehat dengan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor.

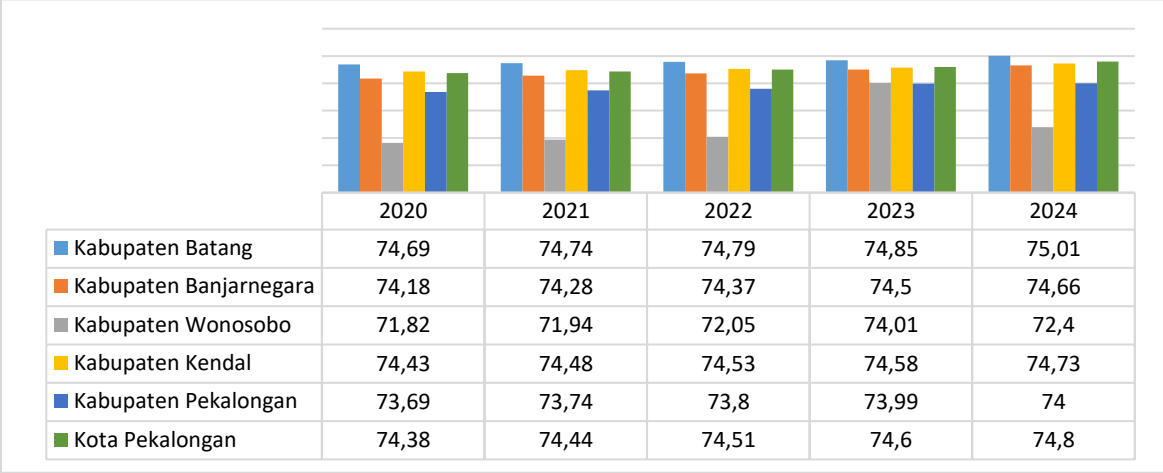
Perwujudan peningkatan AHH dipengaruhi kesehatan ibu, bayi, balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang komprehensif di sepanjang siklus hidup mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup keluarga, komunitas, puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan. Sebagaimana capaian AHH di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 22 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>, 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa AHH di Kabupaten Batang lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga 75,01 tahun, meningkat 0,18 tahun dibanding pada bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup pada bayi baru lahir dari tahun ketahun terus meningkat.

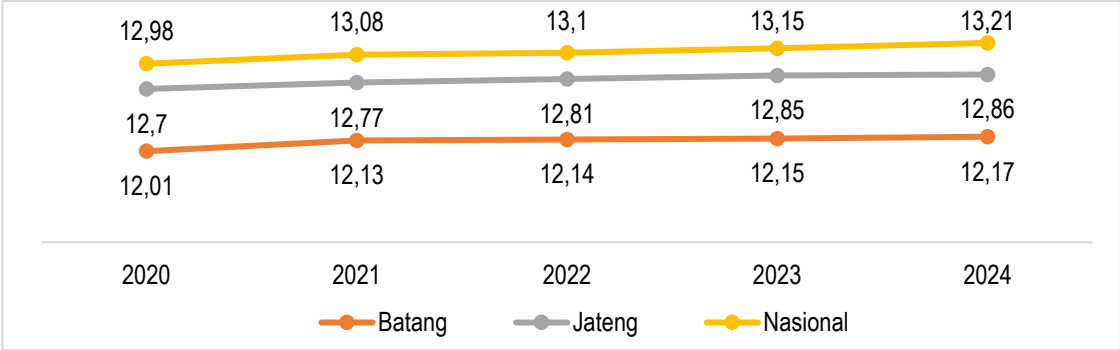


Gambar 2. 23 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>, 2025

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pencapaian HLS Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (12,15 tahun) masih lebih rendah dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (12,85 tahun) dan Nasional (13,15 tahun). Artinya pada tahun 2023 anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Batang memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. sebagaimana capaian HLS Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini:

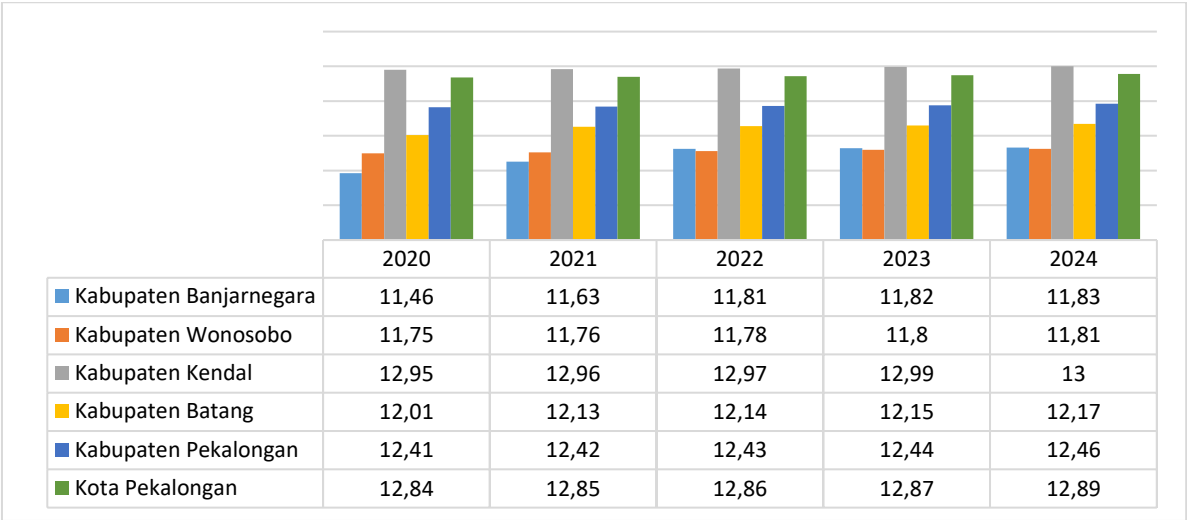


Gambar 2. 24 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>, 2025

Sehingga kedepan diperlukan upaya guna meningkatkan angka HLS Kabupaten Batang, serta lebih mewaspadaai potensi anak putus sekolah dengan melibatkan peran masyarakat dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pendidikan. Permasalahan utama selain kondisi ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang yaitu perubahan paradigma dan *mindset* masyarakat tentang pendidikan. Sehingga upaya peningkatan HLS ini perlu diperkuat dengan adanya sosialisasi menyeluruh melalui berbagai bentuk dan media agar masyarakat dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan serta pemerataan akses layanan Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang juga terus diupayakan melalui optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, pelaksanaan pendidikan dasar bebas pungutan dan berkualitas sesuai standar pendidikan nasional, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola layanan pendidikan terus dilakukan guna mendukung pencegahan anak putus sekolah serta perbaikan akses dan layanan pendidikan di Kabupaten Batang.

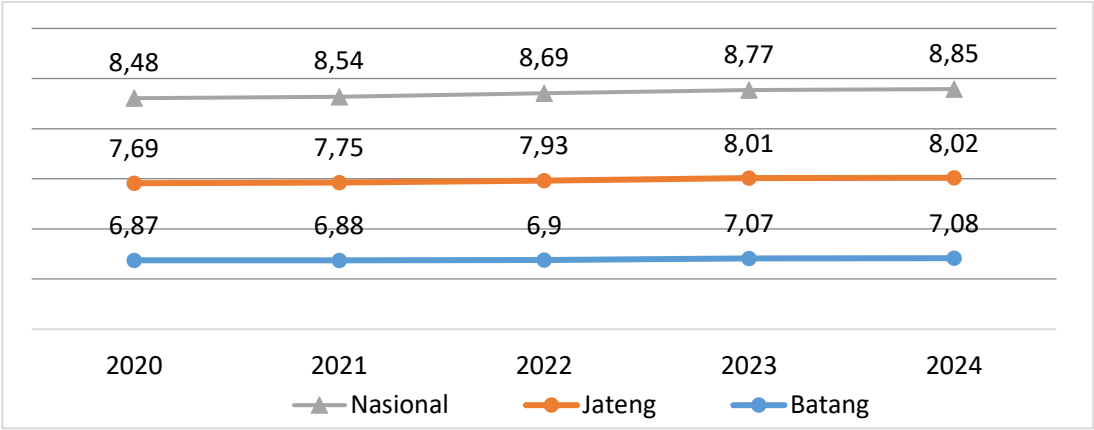
Capaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang pada tahun 2024 masih lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Kabupaten Kendal; Kabupaten Pekalongan; dan Kota Pekalongan. Namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo sebagaimana pada diagram berikut :



Gambar 2. 25 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024
Sumber : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>, 2025

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun belajar penduduk yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji sebagai berikut :



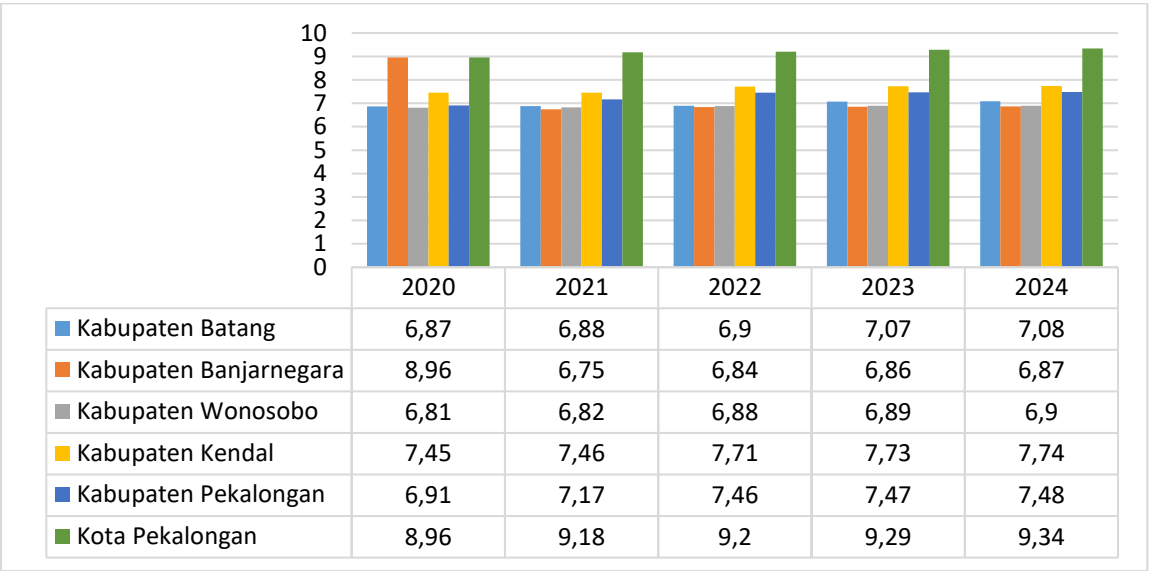
Gambar 2. 26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah--tahun-.html>, 2025

Pencapaian RLS Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari tahun 2020 sebesar 6,87 tahun naik menjadi 7,08 tahun pada tahun 2024. Hal ini menandakan pada tahun 2024 rata rata lama sekolah yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun keatas selama 7 tahun atau setara dengan jenjang sekolah menengah pertama kelas 1. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 8,02 tahun dan Nasional 8,85 tahun.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan HLS diantaranya Penelusuran AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah). AUSTS meliputi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SD/MI, usia 12-15 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SMP/MTs, dan usia 15-18 yang sedang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA dan menyalurkannya kembali ke sekolah formal atau melalui pendidikan kesetaraan serta membebaskan biaya pendidikannya. Optimalisasi peran masyarakat dan sekolah dalam mewaspadai anak-anak putus sekolah serta mengawal lulusan sekolah agar tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya juga terus ditingkatkan melalui kegiatan belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) selain upaya peningkatan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan,

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola pelayanan. Jumlah PKBM eksisting di Kabupaten Batang hingga tahun 2024 ini sebanyak 23 unit PKBM.

Selengkapnya rata-rata lama sekolah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar :



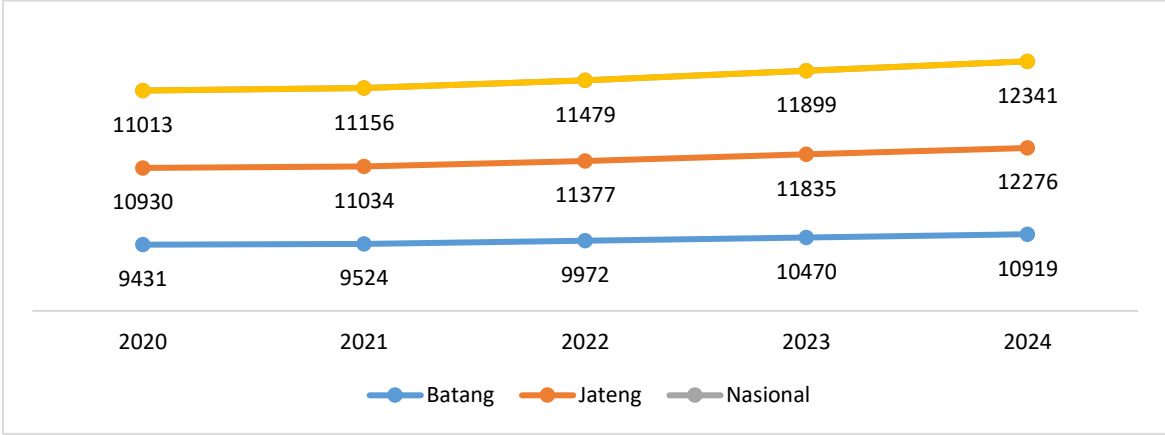
Gambar 2. 27 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah--tahun-.html>, 2025

Dari grafik diatas, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang tahun 2024 sebesar 7,08 tahun jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,87 tahun dan kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 6,90 tahun, namun lebih rendah dari Kabupaten Kendal sebesar 7,74 tahun, Kabupaten Pekalongan sebesar 7,48 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 9,34 tahun.

d. Pengeluaran per Kapita

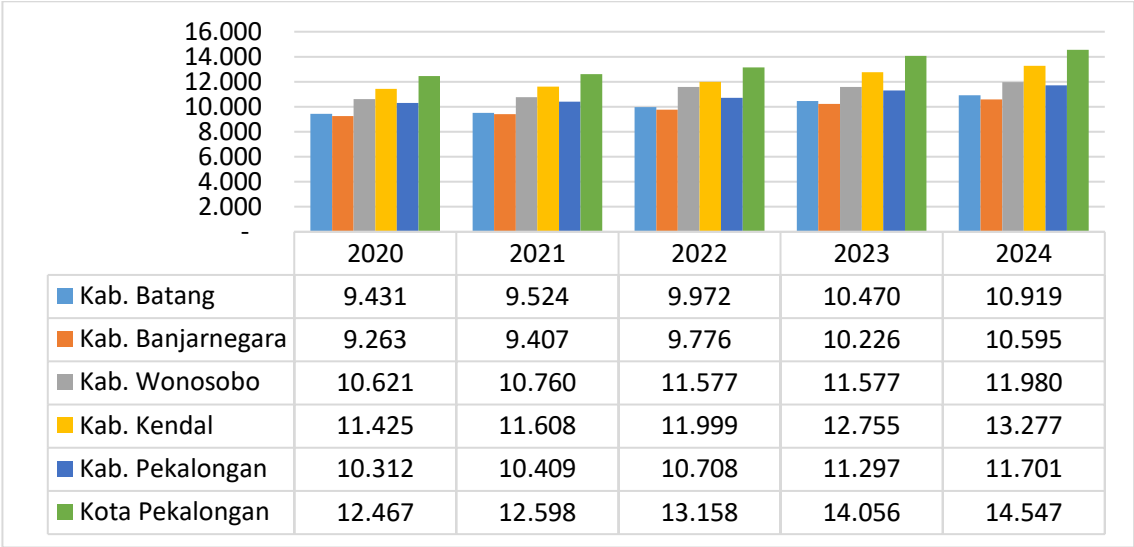
Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2019 sebesar Rp 9573 ribu per orang per tahun naik menjadi menjadi Rp 10470 ribu per orang per tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun karena adanya pandemi Covid-19 namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Meskipun capaian pengeluaran per kapita naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar Rp 11835 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar Rp 11899 ribu per orang per tahun. Selengkapnya pada grafik berikut :



Gambar 2. 28 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/orang/tahun)

Sumber : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE2IzI=-metode-baru--pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>, 2025

Pengeluaran per kapita Kabupaten Batang tahun 2024 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Selengkapnya tersaji dalam grafik berikut ini :



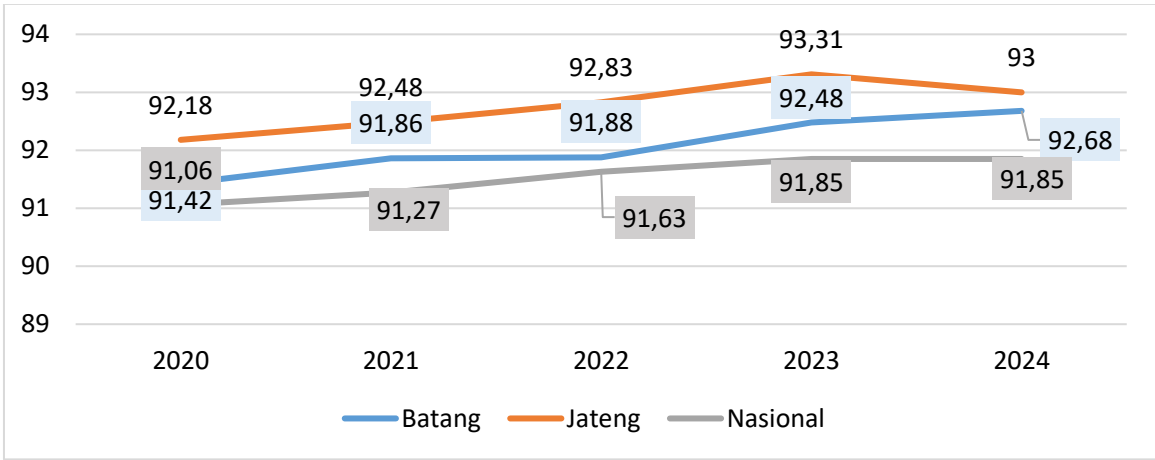
Gambar 2. 29 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024 (ribu rupiah/orang/tahun)

Sumber : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE2IzI=-metode-baru--pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>, 2025

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (pemilahan jenis kelamin setiap komponennya). IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding laki-laki berada pada angka 100. Jika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

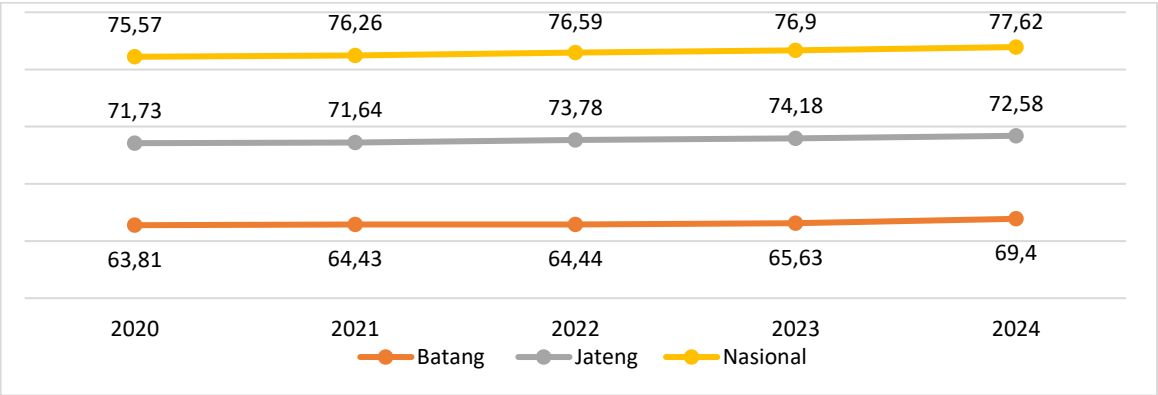


Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Indonesia, Indeks Pembangunan Gender, www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html diakses pada tanggal 1 Mei 2024

IPG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari 91,42 tahun 2020 meningkat menjadi 92,68 tahun 2024. Namun capaian Kabupaten Batang lebih rendah dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah (93,00) dan masih lebih tinggi dari Nasional (91,85).

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian IDG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2020 sebesar 63,81 meningkat menjadi 69,4 pada tahun 2024, namun demikian tahun 2024 capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 72,58 dan Nasional 77,62. Selengkapnya pada gambar berikut:

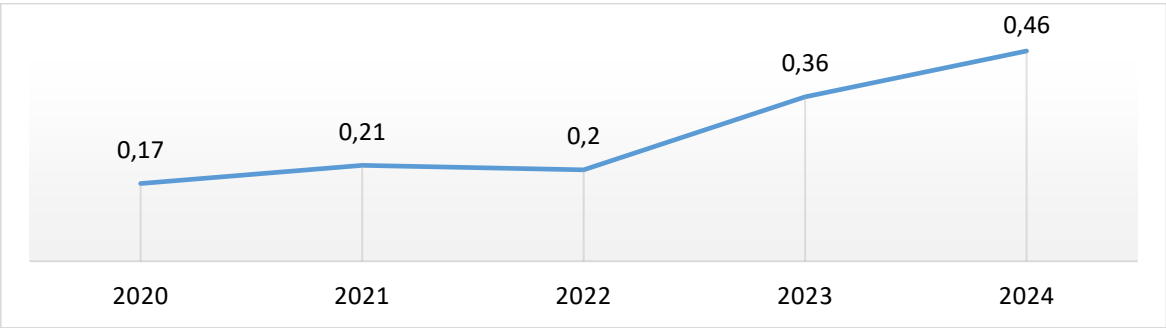


Gambar 2. 31 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, Indeks Pemberdayaan Gender, www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html diakses pada tanggal Mei 2025

8. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2020-2024, dari 0,17% pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 0,46% di tahun 2024. Fluktuasi pada prevalensi gizi buruk sangat dipengaruhi oleh Angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan menurunnya bayi yang ditimbang yang menyebabkan kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara cepat/dini, sehingga pemulihannya menjadi lebih lama. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan balita diantaranya dengan memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan, memberikan perawatan pada balita gizi buruk serta meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbang balitanya ke posyandu, untuk mengetahui tumbuh kembang balita. Peningkatan balita gizi buruk ini mengindikasikan bahwa kedepan diperlukan upaya yang lebih keras untuk menurunkan angka prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Batang. Sebagaimana kondisi prevalensi balita gizi buruk tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 32 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Batang

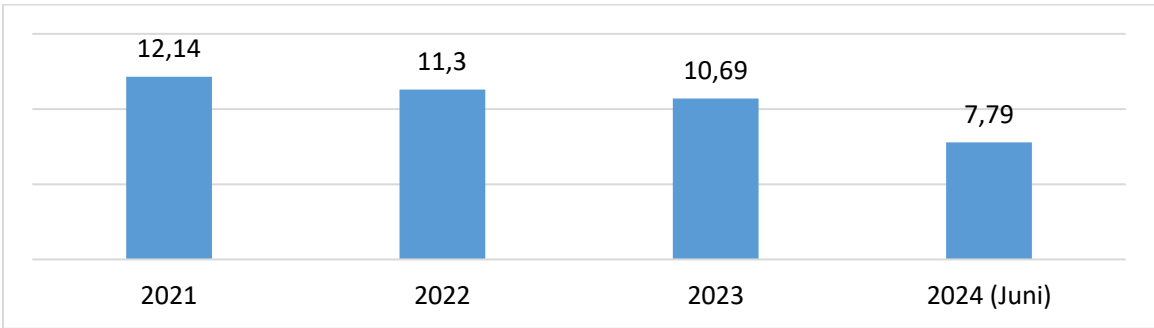
Sumber: https://sitika.batangkab.go.id/web/indikator_prioritas, 2025

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan

masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (*stunting*). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

9. Prevalensi Stunting

Kondisi stunting di Kabupaten Batang berdasarkan data e –PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada Tahun 2021-2023 terus menurun. Pada Tahun 2021 capaian stunting sebesar 12,14% dan terus menurun hingga tahun 2024 bulan Juni menjadi 7,79%. Sebagaimana capaian dan kriteria perhitungan stunting dari tahun 2021 hingga 2024 bulan Juni tersaji dalam grafik dan tabel berikut ini :



Gambar 2. 33 Prevalensi Stunting berdasarkan data SSGBI dan SSGI Tahun 2021-2024
Sumber: ePPGBM, 2024

Keterangan :

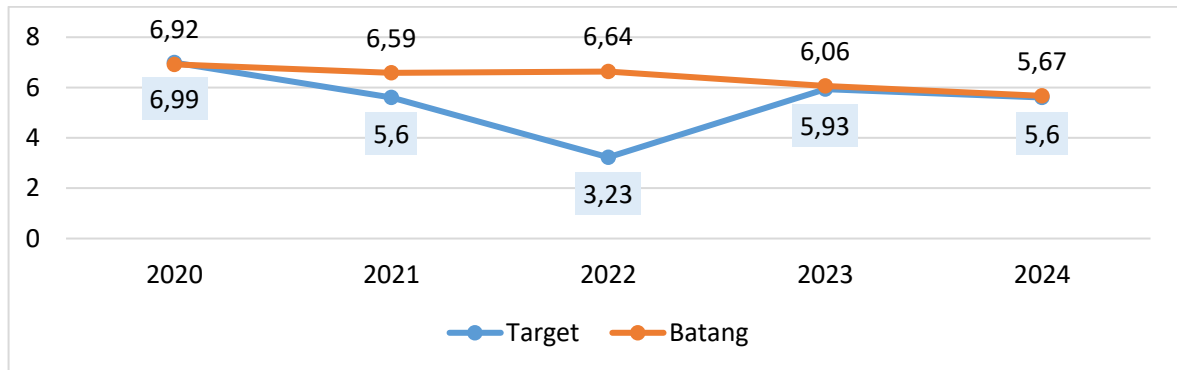
TAHUN	ePPGBM	
2021	Jumlah balita yang diukur 37.302 balita Jumlah balita stunting 5.275 balita	59.123 jumlah balita Cakupan pengukuran 63,09%
2022	Jumlah balita yang diukur 36.445 balita Jumlah balita stunting 4118 balita	57.243 jumlah balita Cakupan pengukuran 63,67%
2023	Jumlah balita yang diukur 42.164 balita Jumlah balita stunting 4.501 balita	59.325 jumlah Balita Cakupan : 71,45 %
2024	Jumlah yang diukur 53.390 balita Jumlah Balita Stunting 4.159	53.402 Jumlah Balita Cakupan : 99,99%

Dukungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penurunan stunting antara lain :



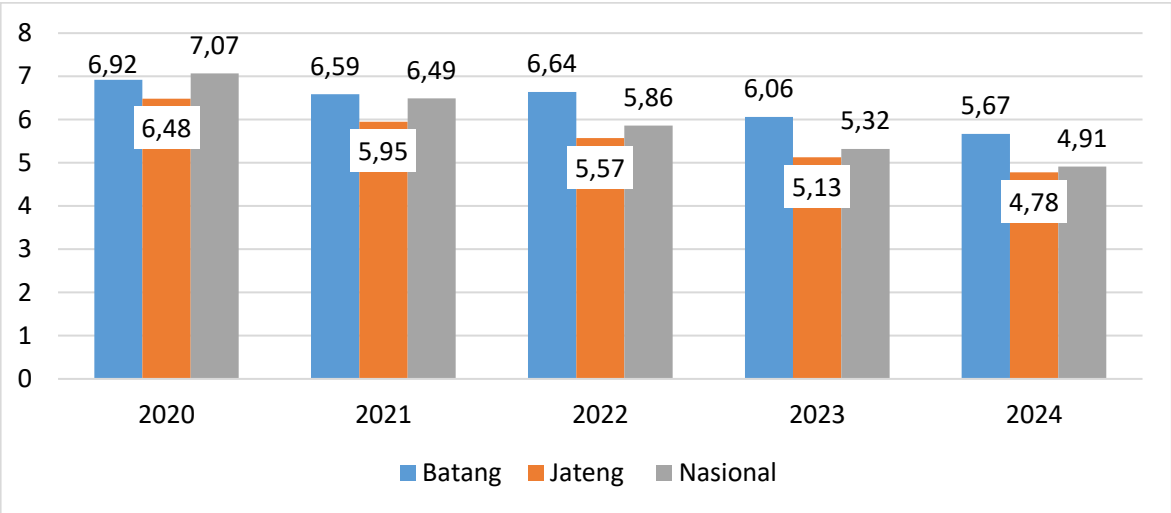
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang selama periode 2020-2024 cenderung menurun walaupun sempat meningkat pada tahun 2022 di angka 6,64 akibat banyaknya masyarakat usia produktif perantau kembali ke daerah dalam kondisi menganggur dengan harapan dapat bekerja di Kawasan Industri Kabupaten Batang. Sehingga perhitungan jumlah usia produktif kembali meningkat akibat banyaknya pekerja rantau yang kembali ke daerah dalam kondisi menganggur dan pencari kerja pendatang luar daerah yang berharap dapat bekerja di Kabupaten Batang. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengatasi pengangguran diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan program padat karya di sektor infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan kerja dan serta mendorong kemandirian berwirausaha melalui bantuan alat.



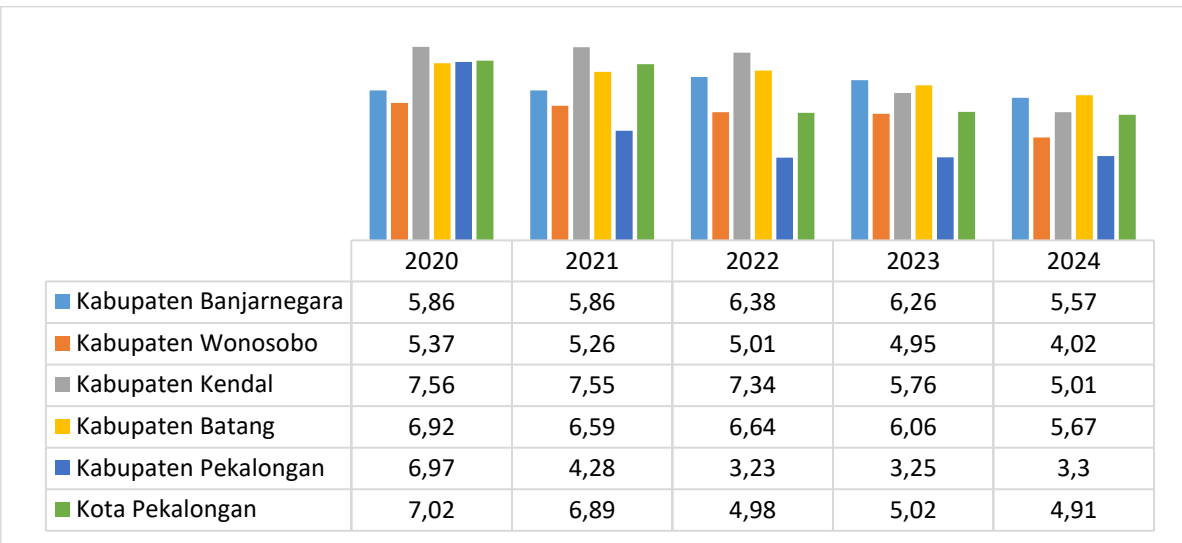
Gambar 2. 34 Perbandingan TPT dengan target daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024
Sumber : BPS Kab. Batang, 2025

Capaian TPT Kabupaten Batang Tahun 2024 masih lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dimana capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78 persen dan Nasional sebesar 4,91 persen.



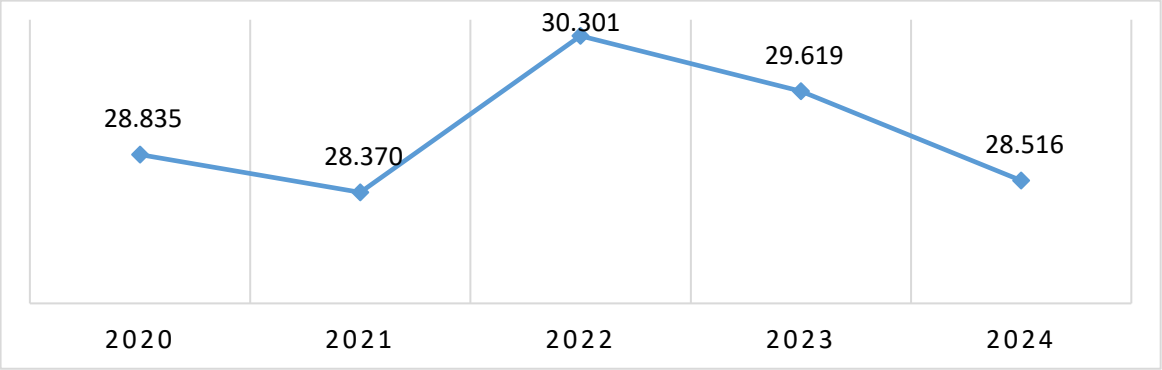
Gambar 2. 35 Perbandingan perubahan pencapaian TPT dengan capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2020 - 2024
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

Tingkat Pertumbuhan jumlah penganggur TPT Kabupaten Batang sebesar 5,67 persen lebih tinggi dibanding capaian TPT pada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.



Gambar 2. 36 Perbandingan perubahan TPT daerah dengan Kab/Kota Tahun 2020 - 2024
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2025

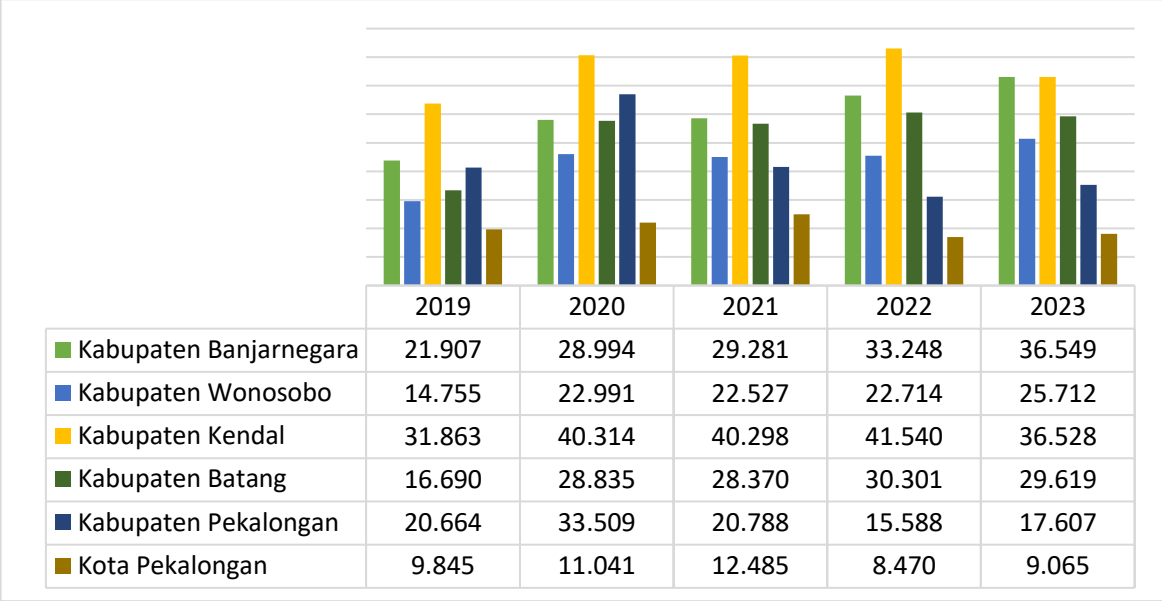
Jumlah penganggur Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif. Dalam 5 tahun terakhir kondisi terendah jumlah penganggur terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 28.835 jiwa dan terus meningkat menjadi 30.301 jiwa pada tahun 2022, kemudian menurun hingga 28.516 jiwa pada tahun 2024. Sebagaimana jumlah tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 37 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Batang Tahun 2020 - 2024 (jiwa)

Sumber : <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg4IzI=/jumlah-angkatan-kerja.html> , 2025

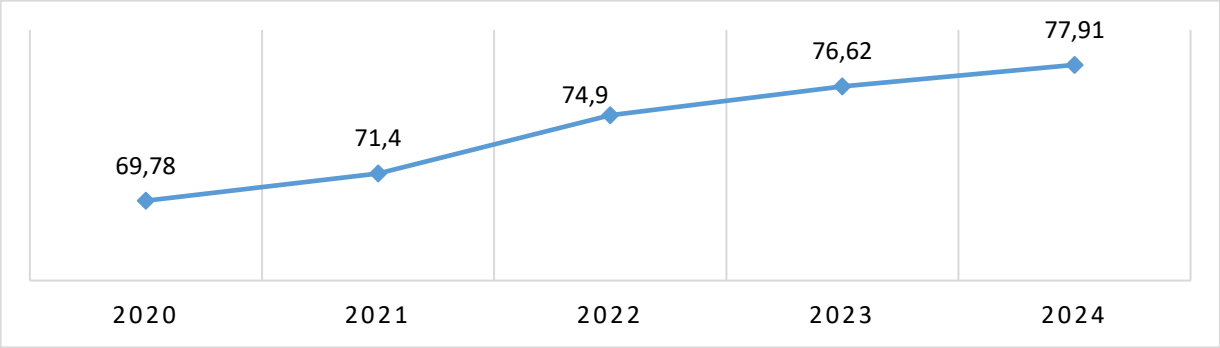
Pertumbuhan jumlah penganggur di wilayah kab/kota sekitar Batang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut :



Gambar 2. 38 Perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian Kab/Kota sekitar Tahun 2019 - 2023 (jiwa)

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2021-2024

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2023, jumlah penganggur tertinggi ada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 36.549 penganggur dengan penurunan tertinggi berada di Kabupaten Kendal dari 41.540 penganggur tahun 2022 menjadi 36.528 penganggur tahun 2023. Sedangkan pada Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan jumlah penganggur cenderung meningkat.

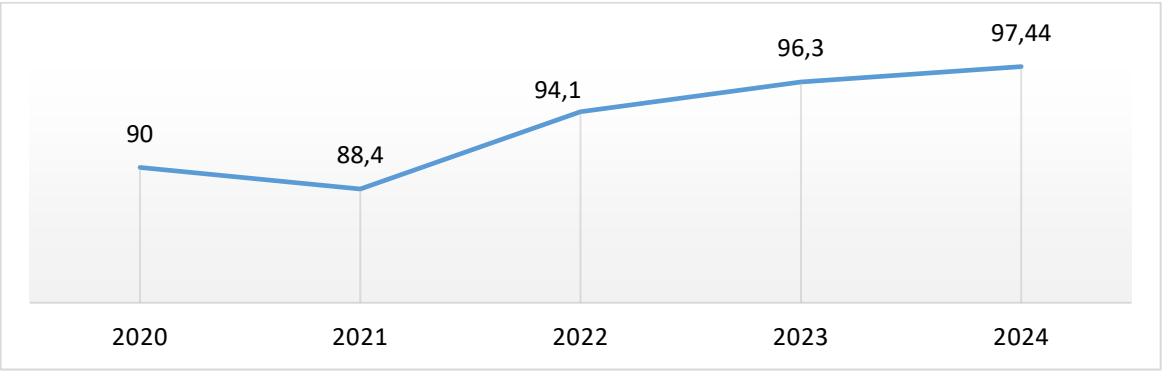


Gambar 2. 39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dari 69,78 persen pada tahun 2020 terus meningkat menjadi 77,91 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Batang.

11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan sebagai susunan proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Keragaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang periode 2020-2024 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:



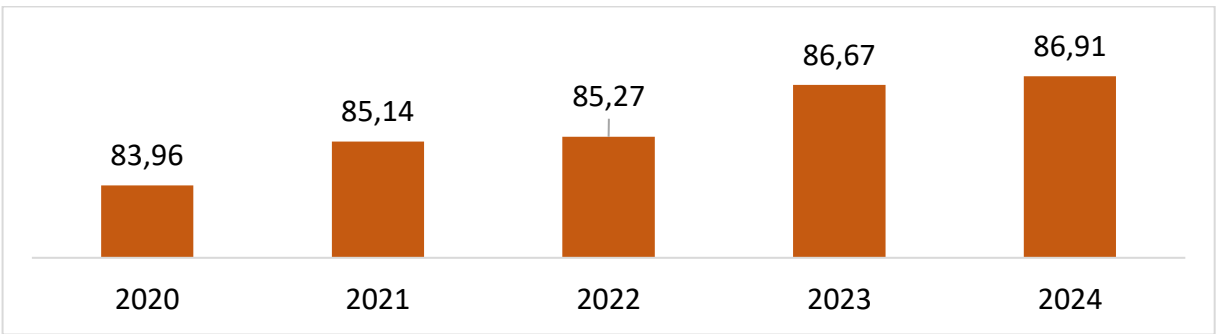
Gambar 2. 40 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2025

Skor PPH dalam periode lima tahun terakhir cenderung meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2021. Skor PPH pada tahun 2020 sebesar 90 kemudian menurun menjadi 88,4 pada tahun 2021 dan kembali

mengalami peningkatan hingga 97,44 pada tahun 2024 Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Batang mulai terus bergeser ke arah penerapan pola konsumsi yang kian beragam.

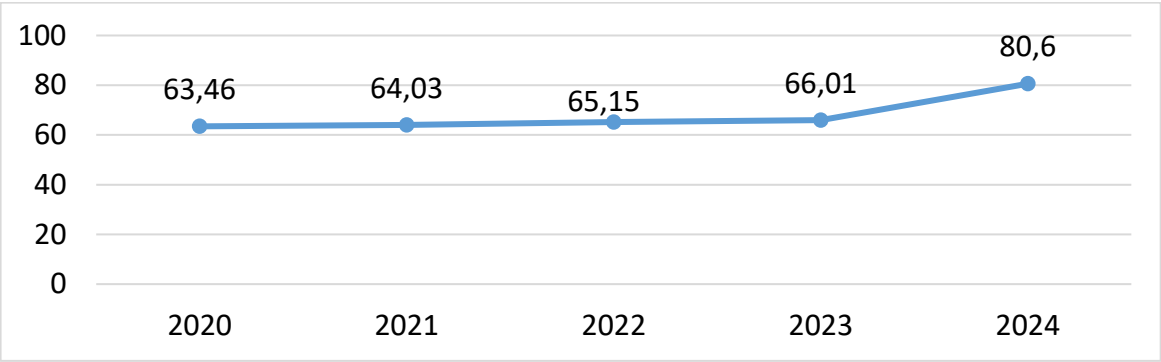
12. Pelayanan Publik

Salah satu fungsi pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP), baik yang pelaksanaannya difasilitasi maupun dilakukan secara mandiri oleh masing masing UPP (dilaksanakan sendiri maupun kerjasama pihak ketiga). Pengukuran IKM di Kabupaten Batang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, dimana capaian IKM pada tahun 2020 sebesar 83,96 menjadi 86,91 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk kualitas pelayanan publik cukup berhasil. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan diantaranya melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada UPP. Dalam periode lima tahun terakhir penerapan SOP dan SPP pada UPP di Kabupaten Batang sudah mencapai angka 100%. Meningkatnya pelayanan publik di Kabupaten Batang juga didukung oleh adanya layanan elektronik atau *e-service* melalui website, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan inovasi terbaru yaitu dibentuknya *Service Point* di Kecamatan Gringsing yang rencananya akan dikembangkan di setiap kecamatan. Serta untuk persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif mencapai angka 100%.



Gambar 2. 41 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Batang
Sumber: Bag Organisasi Setda Kabupaten Batang, 2025

Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020-2024 berfluktuasi. Tahun 2020 capaian PMPRB Kabupaten Batang 63,36 dan terus meningkat hingga 80,6 ditahun 2024.



Gambar 2. 42 Nilai Pemeringkatan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Batang, 2025

a. Transparansi

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Selain kualitas dan profesionalisme aparatur serta akuntabilitas kinerja pembangunan, keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima.

1) PPID

Undang-undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017.

Pemerintah Kabupaten Batang juga membentuk PPID Pembantu untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di tingkat Perangkat Daerah dan kemudian dilaporkan ke PPID. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, sebagai bentuk peningkatan transparansi Kabupaten Batang juga telah menerapkan sistem informasi berbasis web melalui aplikasi sistem pengendalian pembangunan (simpelbang) yang dapat diakses oleh masyarakat.

2) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mendorong percepatan produk dalam Negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 500/119/2022 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Batang serta Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 020/006/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Pada APBD Tahun 2023.

Dalam Surat Edaran tersebut diarahkan untuk PA/KPA wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% dari total Anggaran untuk Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 65 ayat 2 dan 3 yaitu “Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri” dan “Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah”. Menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Guna mendukung gerakan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Batang diperlukan sinergisitas seluruh Perangkat Daerah melalui perannya masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berperan aktif dalam mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi agar berpartisipasi dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 2) Inspektur Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 3) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran dan penanyangan produk (on boarding) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- 5) Perangkat Daerah ikut mendorong penyedia yang sudah bermitra untuk menayangkan dan menambah jumlah produk serta meningkatkan transaksi belanja melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

Adapun capaian P3DN sampai tanggal 31 Desember 2024 realisasi sebesar Rp. 254,780,148,377 atau sebesar 65.81% dari total belanja Barang/Jasa yang telah di validasi

b. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu syarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya adalah adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Menpan RB, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu dari 62,64 (B) pada tahun 2018 terus meningkat menjadi 68,95 (B) pada tahun 2024.

Tabel 2. 14
Nilai SAKIP Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

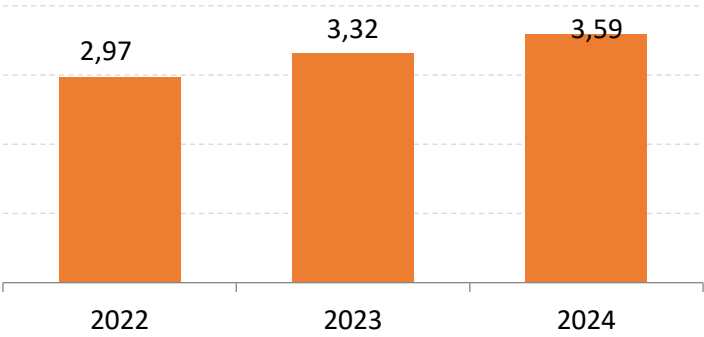
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP	skor	66,14 (B)	66,30 (B)	67,27 (B)	68,06 (B)	68,95 (B)

Sumber: Setda Kabupaten Batang Tahun 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan sejauh mana sebuah daerah mampu menciptakan lingkungan yang kompetitif, stabil, dan adaptif terhadap dinamika kawasan. Dalam konteks ini, daya saing daerah mencerminkan kapasitas institusi, efisiensi birokrasi, kualitas infrastruktur, stabilitas keamanan, hingga kesiapan teknologi dan inovasi. Kabupaten Batang terus berupaya memperkuat daya saingnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan konektivitas, serta penciptaan ekosistem pembangunan yang inklusif dan tangguh. Berikut capaian IDSD Kabupaten Batang tahun 2022-2024 :



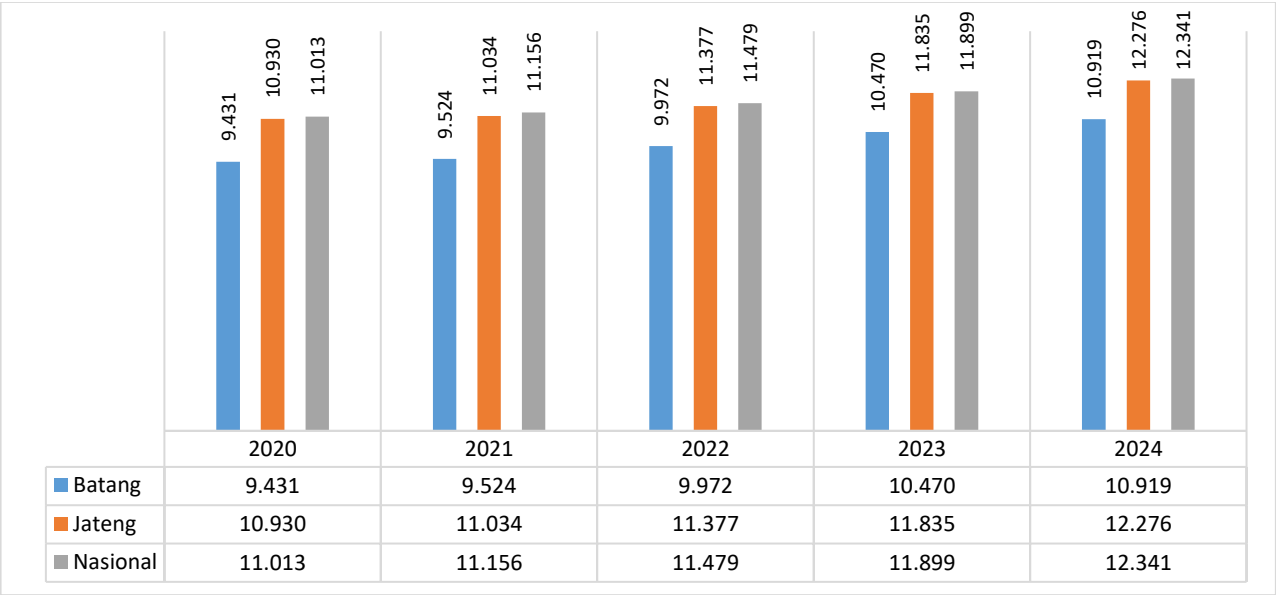
Gambar 2. 43 Hasil Penilaian Daya Saing Daerah Tahun 2020-2023
Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Batang menunjukkan tren positif dalam penguatan daya saing daerah. Tercatat, IDSD Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, dari 2,97 pada tahun 2022, naik hingga mencapai 3,59 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek, mulai dari kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, hingga kesiapan menghadapi era digital. Penilaian IDSD dilakukan berdasarkan 12 pilar utama, yang mencerminkan berbagai aspek strategis pembangunan dan tata kelola daerah yaitu pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK (teknologi informasi dan komunikasi), pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar keterampilan, pilar pasar produk, pilar pasar tenaga kerja, pilar sistem keuangan, pilar ukuran pasar, pilar dinamisme bisnis, dan pilar kapabilitas inovasi.

2. Pengeluaran per Kapita

Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2020 sebesar Rp 9.431

ribu per orang per tahun dan berfluktuasi naik menjadi Rp 10.919 ribu per orang per tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang memberi hasil yang positif terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun capaian pengeluaran per kapita tahun 2022 naik, namun jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 12.276 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar 12.341 ribu per orang per tahun. Selengkapnya dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2. 44 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/orang/tahun)

Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka tahun 2021-2025, Statistik Indonesia 2025

3. Rasio Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADHK

Jumlah net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang menunjukkan angka negatif dalam kurun waktu 2020-2024, yang artinya nilai impor masih lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor di Kabupaten Batang. Dari tahun 2020-2024 defisit ekspor dalam tiap tahunnya semakin menurun dari -10,38% tahun 2020 menjadi -5,45% tahun 2024. Nilai Ekspor di Kabupaten Batang sendiri masih didongkrak oleh komoditas pertanian. Sebagaimana rasio ekspor terhadap PDRB ADHK tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 15
Rasio Ekspor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang

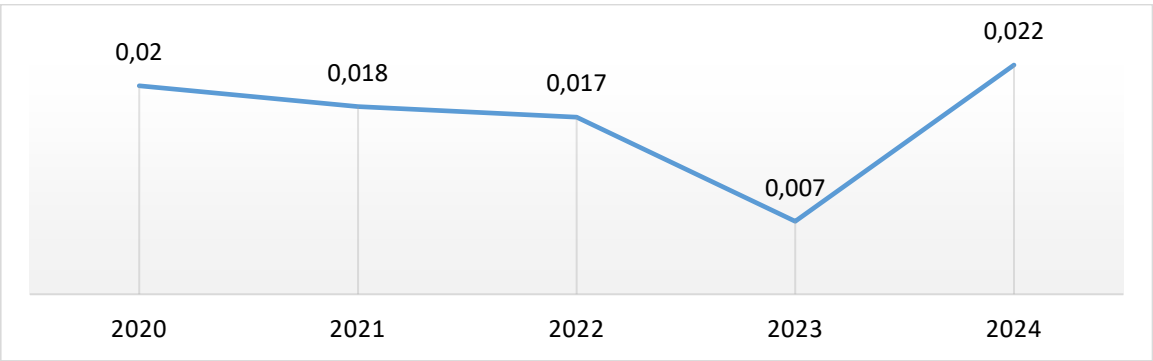
Tahun	PDRB ADHK (Juta Rp)	Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rp)	Rasio
2020	15.030.577	-1.559.690,55	-10,38
2021	15.764.265,54	-1.058.270,41	-6,71
2022	16.704.986,75	-1.032.738,29	-6,18
2023	17.629.389,28	-978.589,09	-5,55
2024	18.693.220,00	-1.019.140,00	-5,45

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2023-2025

4. Angka Kriminalitas yang ditangani

Penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tingkat penyelesaian kasus mencapai 87,97%, namun menurun pada tahun-tahun berikutnya karena sebagian kasus yang dilaporkan tidak dapat diselesaikan pada tahun yang sama dan baru ditangani pada tahun berikutnya. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2022, dengan kinerja penanganan sebesar 70,61%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 73,25%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan tindak pidana.

Tren kinerja penanganan tindak pidana di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



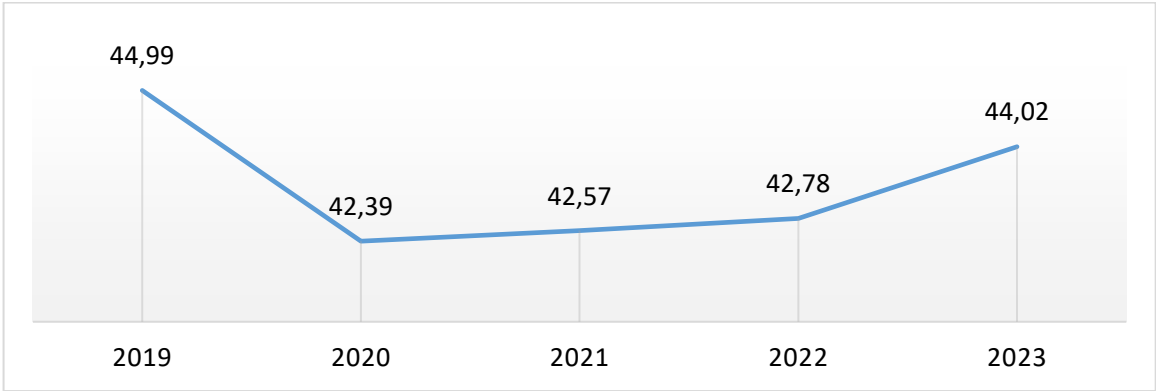
Gambar 2. 45 Angka Kriminalitas di Kabupaten Batang
Sumber: Satpol PP Kabupaten Batang, 2025

5. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk

membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan, maka akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.



Gambar 2. 46 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Batang
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2024

Selama periode 2019-2023, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 44,99 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif, maka menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif dan kemudian menurun menjadi 42,39 persen pada tahun 2020. Namun kembali meningkat hingga tahun 2024 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 44,02 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

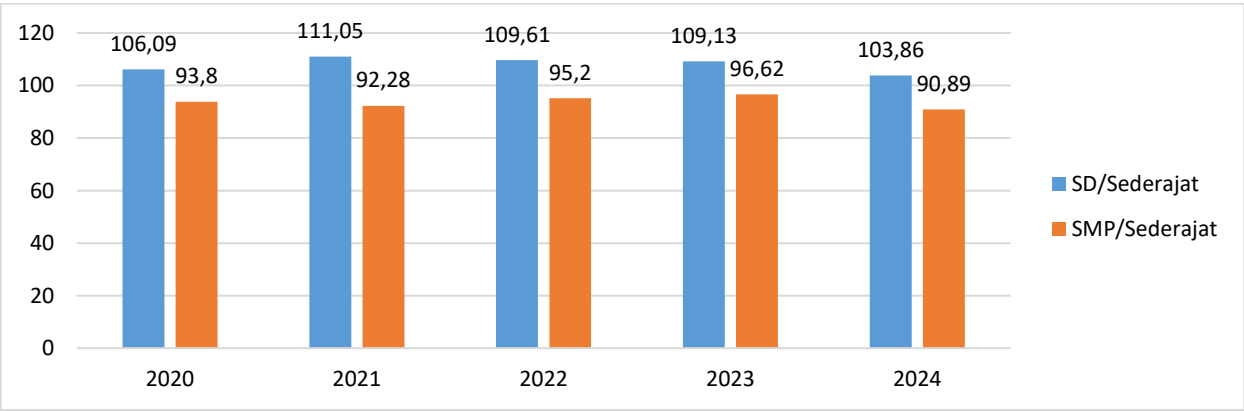
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan kabupaten dan dalam rangka pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dasar untuk jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

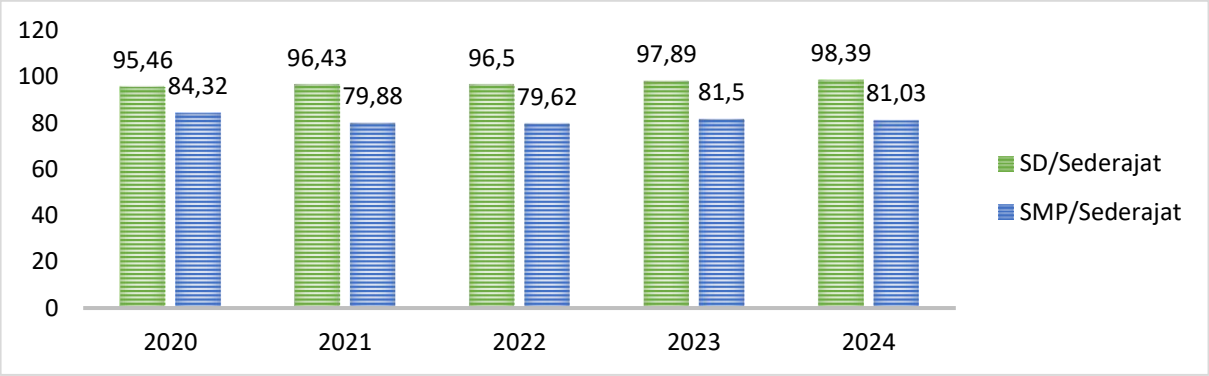
Kualitas pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan, antara lain Angka Melek Huruf, angka partisipasi sekolah, dan penyediaan prasarana sarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, secara keseluruhan baik APK dan APM semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 47 Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diakses Mei 2025

Jika dilihat dari grafik diatas, APK per jenjang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir APK SD/MI/ sederajat cenderung fluktuatif, dari 106,90 pada tahun 2020 menjadi 103,86 pada tahun 2024. Sedangkan APK SMP/MTs/ sederajat cenderung menurun dalam 2020-2024, dari 93,80 pada

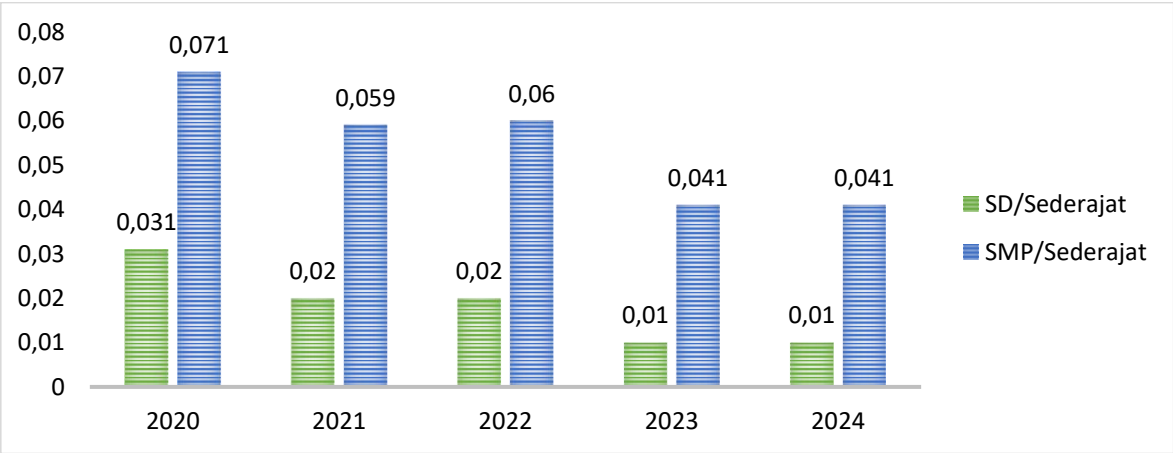
tahun 2020 menjadi 90,89 pada tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa semakin menurunnya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang SD Sederajat maupun SMP Sederajat. Sementara itu capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 tersaji berikut ini :



Gambar 2. 48 Angka Partisipasi Murni Per Jenjang Pendidikan Kab. Batang Tahun 2020-2024

Sumber : Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2022-2025

APM pada jenjang SD/MI/ sederajat terus mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, dari 95,46 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,39 pada tahun 2024. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi dari 84,32 di tahun 2020 menurun menjadi 79,62 di tahun 2022 kemudian meningkat menjadi 81,03 di tahun 2024.



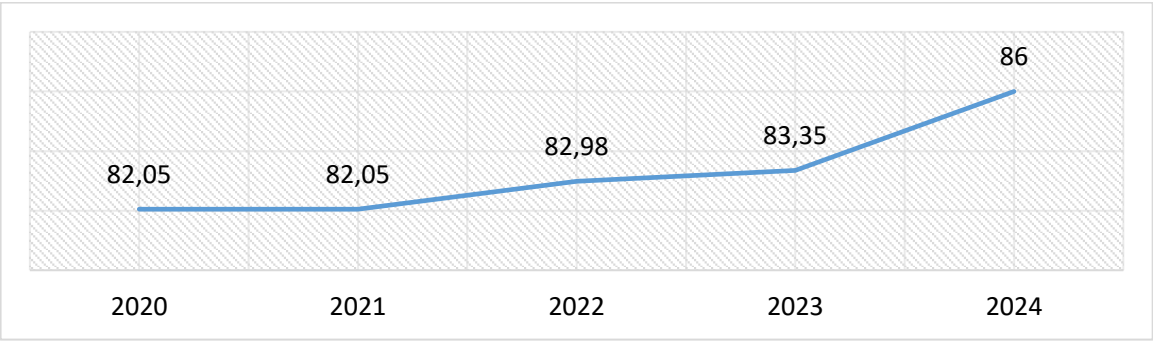
Gambar 2. 49 Angka Putus Sekolah Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : Disdikbud Kab. Batang, 2024

Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,031% dan terus menurun hingga 0,01% di tahun 2023. Sedangkan pada jenjang SMP/ Sederajat, angka putus sekolah cenderung menurun dimana realisasi sebesar 0,071% di tahun 2020 dan terus menurun menjadi 0,041% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas pendidikan di Kabupaten Batang. Indikator Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0,10% ini menunjukkan kepastian peserta

didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Upaya penanganan anak tidak sekolah akan terus dilaksanakan melalui pemenuhan layanan Pendidikan PAUD dan Dikdas serta strategi pencegahan melalui penguatan PKBM.

Sedangkan Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat dari 82,05% pada tahun 2020 menjadi 86 % pada tahun 2024. Selengkapnya dijelaskan pada grafik berikut ini :



Gambar 2. 50 Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2025

Tabel 2. 16 Kondisi sarpras pendidikan Kab.Batang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Stn	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,48	94,61	85,00	89,27	88
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	84,43	85,15	86,00	92,16	89,15
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	64,21	65,08	56,00	58,68	60,24
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	18,28	19,31	26,00	27,73	28,54

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2025

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini bangunan sekolah SD/MI menurun dari 94,48% pada tahun 2020 menjadi 88% pada tahun 2024, sedangkan bangunan sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik meningkat dari 84,43% pada tahun 2019 menjadi 92,16% pada tahun 2023 namun menurun pada tahun 2024 menjadi 89,15%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar dalam periode tahun 2020-2024 menurun dari 64,21% di tahun 2020 menjadi sebesar 60,24% pada tahun 2024 yang disebabkan karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah dasar yang tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sekolah sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah pendidikan menengah mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir yaitu dari 18,28% pada tahun 2020, naik menjadi 28,54% pada tahun 2024.

Tabel 2. 17
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9
	Angka Pendidikan yang ditamatkan						
1	a. Jenjang SD/Sederajat	%	74,00	76,00	51	67,4	53,56
2	b. Jenjang SMP/Sederajat	%	38,00	38,00	28,21	26,22	34,17

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2025

Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD/ sederajat cenderung menurun pada periode tahun 2020-2024 dari 74,00% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2024. Pada jenjang SMP/ sederajat juga berfluktuasi menurun pada periode lima tahun terakhir dari 38,00% pada tahun 2020 menjadi 36,18% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan dan juga faktor sosial budaya (bagi orang pedesaan pinggiran msh ada orang tua yg berfikiran bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi.

Sedangkan kualitas tenaga pendidik berdasarkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari 89,87% di tahun 2020 yang meningkat menjadi 100% di tahun 2024. Capaian ini didukung dengan adanya peraturan dari pusat bahwa guru wajib minimal S1/ setara. Selengkapnya dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 18
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	89,37	90,11	92,81	97,35	100

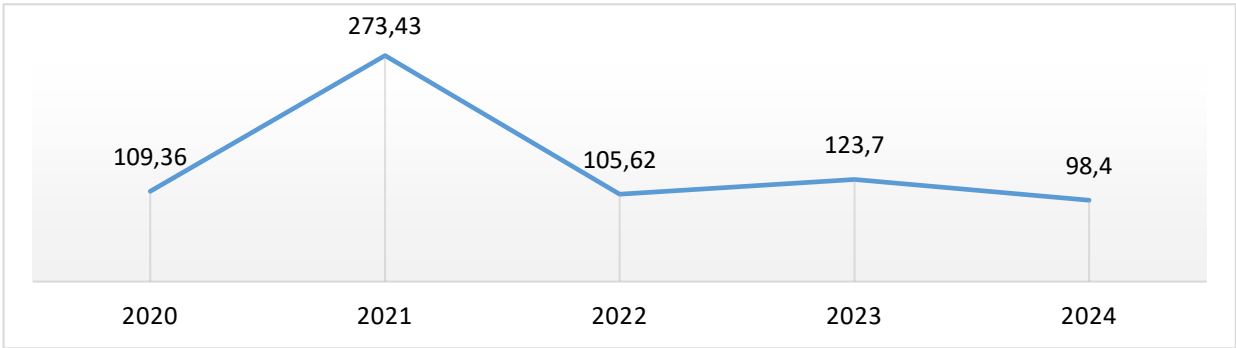
Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2025

2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Batang terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang

yaitu Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 2 (dua) Rumah Sakit meliputi RSUD Batang dan RSUD Limpung serta 1 (satu) Rumah Sakit swasta yaitu Rumah Sakit Umum QIM, puskesmas rawat inap sebanyak 4 buah, puskesmas rawat jalan sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 42 buah, puskesmas keliling/ambulan sebanyak 23 buah, Poliklinik Kesehatan Desa sebanyak 200 unit serta posyandu sebanyak 1.236 buah yang tersebar di seluruh Kabupaten Batang.

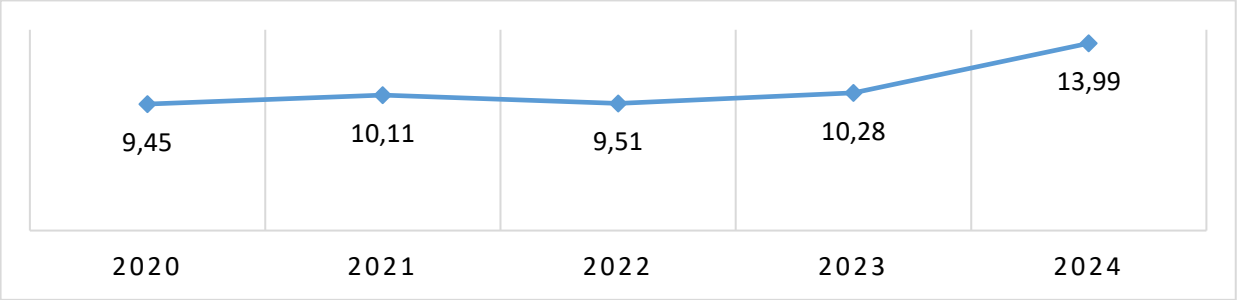
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan prevalensi gizi buruk pada Balita.



Gambar 2. 51 Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dari 109,36 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 meningkat hingga 273,43 di tahun 2021 dan menurun kembali menjadi 105,62 di tahun 2022 namun kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 123,7 kasus per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 98,40 per 100.000 KH di tahun 2024. Penurunan ini didukung dengan adanya Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) tingkat faskes dan tingkat kabupaten, USG pada ibu hamil K1 dan K5. Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Batang sebagian besar disebabkan oleh preeklamsia/eklamsia. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI secara rutin diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi,

organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5-ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya kondisi angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Batang tersaji dalam grafik berikut ini :

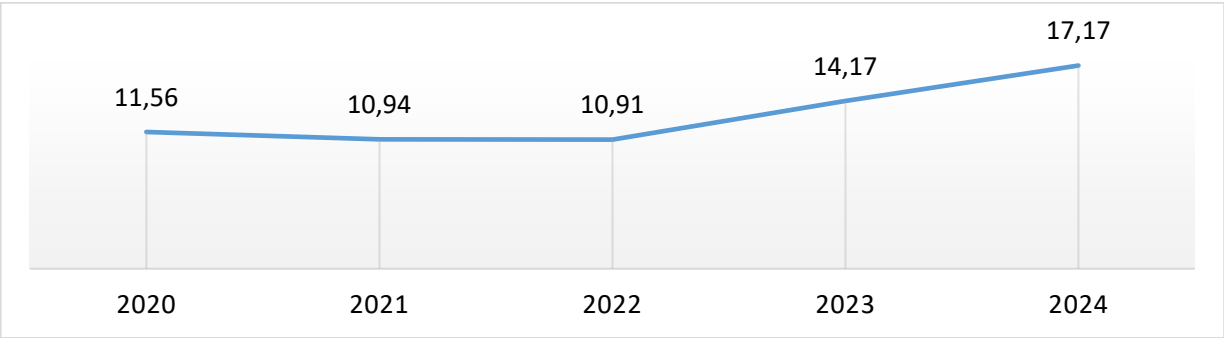


Gambar 2. 52 Angka Kematian Bayi per 1000 KH Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam periode tahun 2020-2024 cenderung menurun, dari 9,45 per 1000 KH pada tahun 2020 kemudian menurun menjadi 9,51 per 1000 KH di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 13,99 per 1000 KH pada tahun 2024. Meningkatnya AKB ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya angka komplikasi neonatal dan meningkatnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan PMT pada ibu hamil KEK, pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan neonatus dan bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun. Sementara itu angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Batang pada tahun 2023 sebesar 0,99178 yang berarti pada 1000 Kelahiran hidup terdapat 991 bayi yang bertahan hidup.

Kondisi peningkatan derajat kesehatan juga dilihat dari kondisi balita melalui indikator Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024 yaitu dari 11,56 per 1000 KH pada tahun 2020 menurun menjadi 10,91 per 1000 KH pada tahun 2022 dan kemudian meningkat menjadi 14,17 per 1000 KH pada tahun 2023 dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 17,17 per 1000 KH. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penurunan AKBA diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali

setahun, memberikan imunisasi lanjutan dan memberikan vitamin A, namun perlu ditingkatkan kembali untuk kembali menurunkan angka AKBA ini. Selengkapnya dijelaskan dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 53 Angka Kematian Balita per 1000 KH Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2025

Sarana Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kabupaten Batang sebanyak 86 unit dengan Rumah Sakit sebanyak 3 unit. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan berdasarkan indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 19
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit per satuan penduduk Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per penduduk	1:9.564	1:9.539	1:9.635	1:9.491	1:9.880
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per penduduk	1:258.230	1:270.282	1:276.192	1:278.390	1:283.229

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

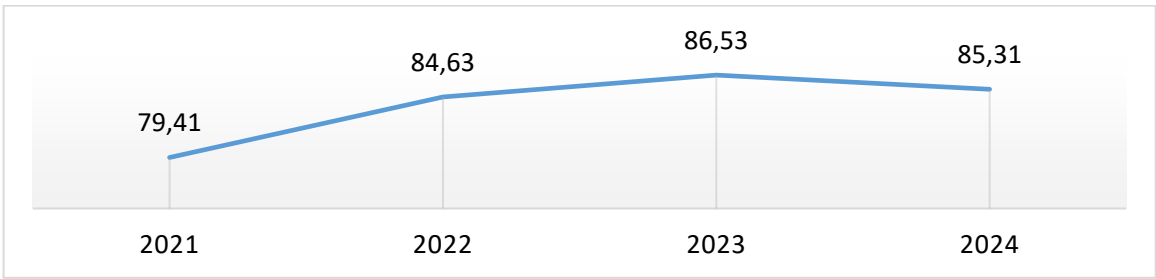
1) Jalan dalam kondisi baik

Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa Jalan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Batang terdiri dari 540,449 km jalan kewenangan nasional, 37,31 km jalan kewenangan provinsi dan 552,42 km merupakan jalan kewenangan kabupaten.

Tabel 2. 20
Kondisi Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten
di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Kondisi jalan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Km	279,316	160,240	317,96	400,57	367,71
2	Sedang	Km	111,788	249,694	148,75	49,93	93,32
3	Rusak Ringan	Km	64,967	83,792	56,88	51,69	35,56
4	Rusak Berat	Km	96,350	58,595	28,83	38,26	43,84

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025



Gambar 2. 54 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di
Kabupaten Batang Tahun 2021-2024
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2025

Dari tabel 2.22 dan gambar 2.65 terlihat bahwa Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten tahun 2024 sepanjang 540,449, menurun dari tahun 2023 yang sebelumnya sepanjang 552,421 km. Kondisi jalan mantap (baik dan sedang) dari tahun 2021 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 79,41% jalan dalam kondisi mantap meningkat terus hingga 86,53% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 84,31% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan SK jalan yang sebelumnya jalan kewenangan kabupaten sepanjang 552,421 Km menjadi 535,818 Km pada tahun 2024.

2) Kondisi Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi bertujuan untuk memenuhi permintaan air irigasi bagi daerah layanan. Di Kabupaten Batang, luas areal jaringan irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten seluas 20.329,896 Ha dengan nilai indeks kinerja sistem irigasi sebesar 57,35 dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 2,4% di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Batang terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian,

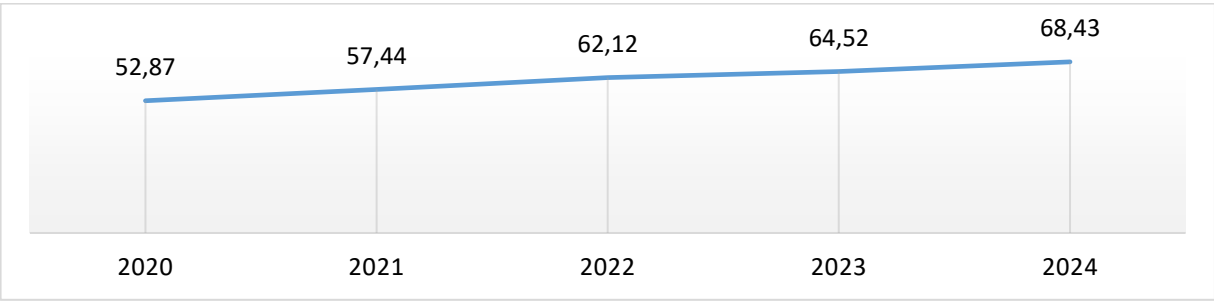
hal ini dapat dilihat dari luasan irigasi dalam kondisi baik yang luasannya terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir.

Tabel 2. 21
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
Tahun 2020-2024

NO	Kondisi Irigasi	Stn	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Ha	11.561,61	11.676,97	12.628,93	13.116,38	13.912,52
2	Rusak	Ha	8.768,28	8.652,92	7.700,966	7.213,514	6.417,36
	Total luas	Ha	20.329,90	20.329,89	20.329,89	20.329,89	20.329,89

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

Sementara itu, pada luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Batang dalam kurun tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat dimana pada tahun 2020, luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Batang sebesar 10.595,94 ha dan terus meningkat menjadi 13.912,52 ha (68,43%) pada tahun 2024. Luasan irigasi dalam kondisi baik ini juga lebih besar dibandingkan dengan luasan irigasi dalam kondisi rusak yaitu sebesar 6.417,36 ha pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang fokus terhadap upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batang guna menunjang produktivitas pertanian serta kedepan masih perlu lebih ditingkatkan karena masih banyaknya bangunan irigasi yang rusak disebabkan umurnya sudah lama dan tidak tertangani dengan baik serta seringnya terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan irigasi. Sebagaimana capaian tersebut tersaji dalam grafik berikut ini :



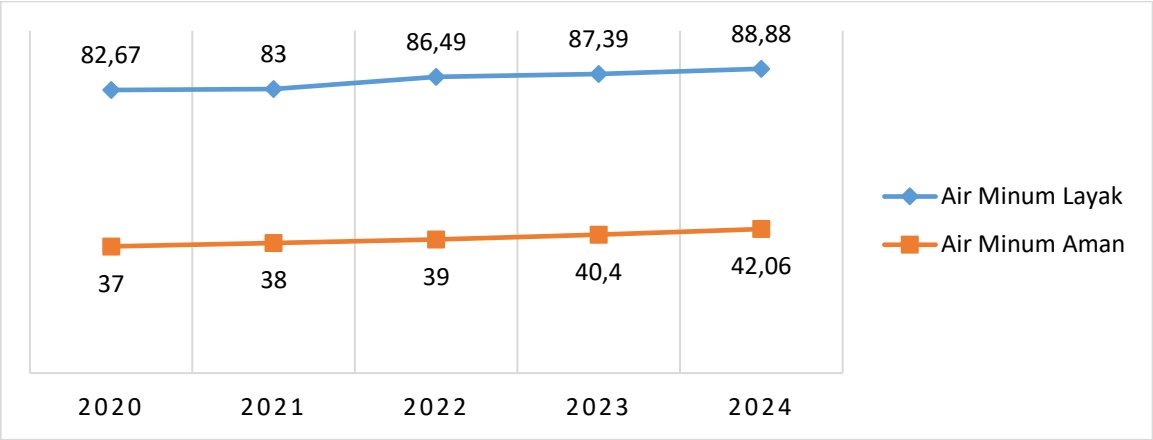
Gambar 2. 55 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) di
Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2025

3) Akses Air Minum dan sanitasi

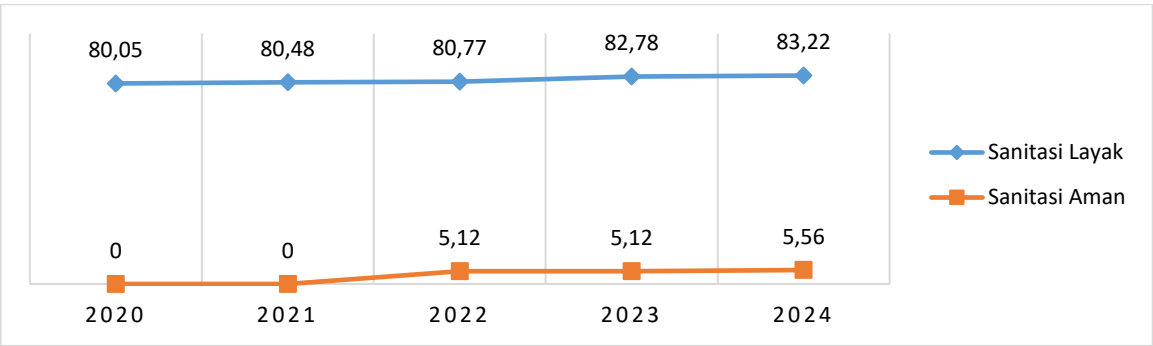
Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten

Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sebagaimana kondisi air minum tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 56 Persentase Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak dan aman Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, cakupan layanan akses air minum Layak yang terus meningkat dari tahun 2020-2024, dari 82,67% di tahun 2020 menjadi 88,88% di tahun 2024. Sementara itu, cakupan layanan akses air minum aman hingga tahun 2023 telah mencapai 42,06%. Hal ini mengindikasikan sebesar 42,06% akses air minum di Kabupaten Batang telah memenuhi syarat kesehatan alam sistem penyediaan air minum yang dikelola. Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi layak, dalam periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 80,05% di tahun 2020 menjadi 83,22% di tahun 2024 sedangkan sanitasi aman hingga tahun 2023 baru mencapai 5,56%. Sebagaimana cakupan sanitasi aman dan layak tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 57 Persentase Cakupan layanan Sanitasi aman dan layak Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

4) Drainase dalam kondisi baik

Drainase merupakan sistem pengelolaan air yang berfungsi mengalirkan air dari suatu area ke permukaan tertentu. Di Kabupaten Batang, persentase

panjang drainase yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 63,79%.

b. Penataan Ruang

Kondisi Ruang Terbuka Hijau dan Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 22
Rasio RTH dan Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang (%)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	%	24,32	28,83	25,42	25,51	25,60
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	72,73	72,73	72,15	71,84	81,03

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2024

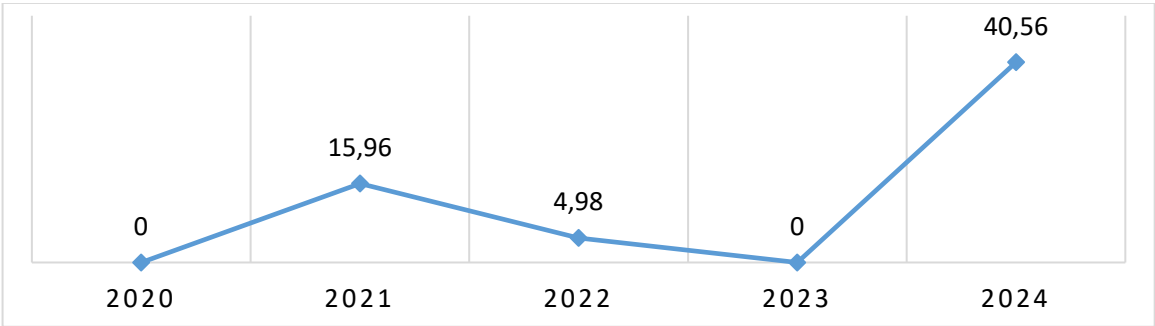
Dari tabel diatas, capaian rasio ruang terbuka hijau berfluktuasi dalam periode tahun 2020-2024, yaitu sebesar 24,32% pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali menjadi 25,60 di tahun 2024. Sedangkan persentase ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang tahun 2019 - 2023 cenderung stagnan di angka 72,73 dari tahun 2018-2021 dan menurun menjadi 72,15 persen pada tahun 2022 dan 71,84 ditahun 2023 yang kemudian meningkat menjadi 81,03 di tahun 2024. Hal ini disebabkan kondisi riil pemanfaatan ruang di lapangan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah dipetakan pada RTRW sehingga terjadi simpangan pemanfaatan ruang.

Pemerintah kabupaten Batang berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam Gerakan Sinergi Reforma Agraria. Tujuan ini adalah untuk mensinkronkan kegiatan penataan aset dan akses, serta mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang dapat memberikan dukungan teknis dan non-teknis kepada Kantah dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria. seperti memberikan kolaborasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

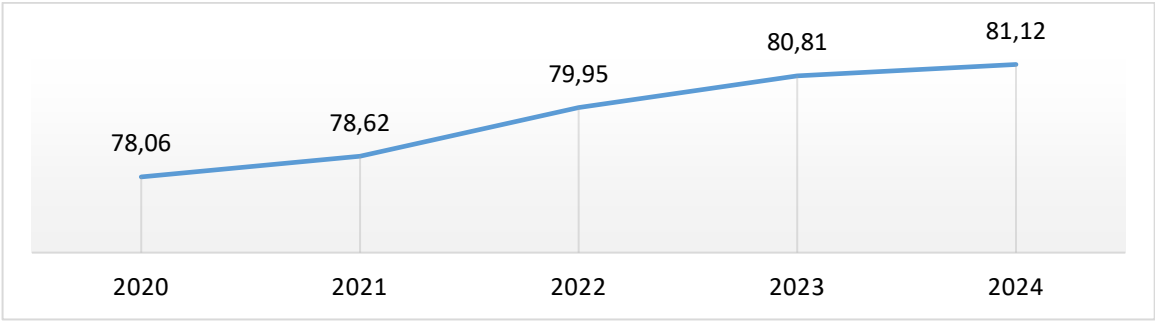
Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Batang dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Dalam SK terbaru terkait kawasan kumuh di Kabupaten Batang, total luasan kumuh tahun 2023 seluas 105,38 Ha. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima

tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup signifikan terutama pada tahun 2024, hal tersebut dapat dilihat dari persentase pengurangan luasan kawasan kumuh yang meningkat dari tahun 2020 – 2024. Dari tahun 2020 sebesar 0%, kemudian mengalami peningkatan penanganan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 15,96 Ha dan kemudian menurun 4,98 Ha pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023 tidak ada *progress* dalam upaya pengurangan luasan kawasan kumuh. Namun terjadi pengurangan yang signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 40,56 Ha dari total luasan kumuh di Kabupaten Batang.



Gambar 2. 58 Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 (Ha)
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang, 2025

Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 78,06% menjadi 81,12% pada tahun 2024. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang melalui pemugaran rumah tidak layak huni.



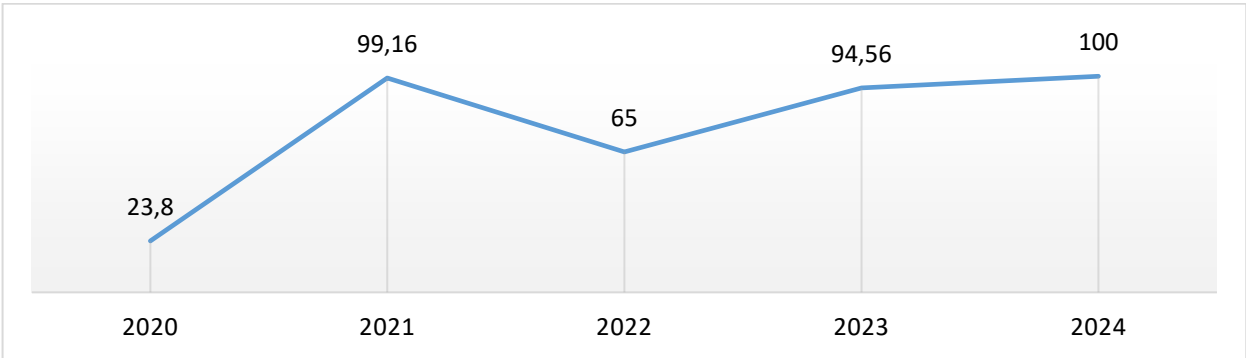
Gambar 2. 59 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Batang (%)
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang, 2025

5. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana. Salah satu fokus pemberdayaan dan perlindungan sosial yang ditangani antara lain PMKS yang terdiri dari 26 kriteria. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang

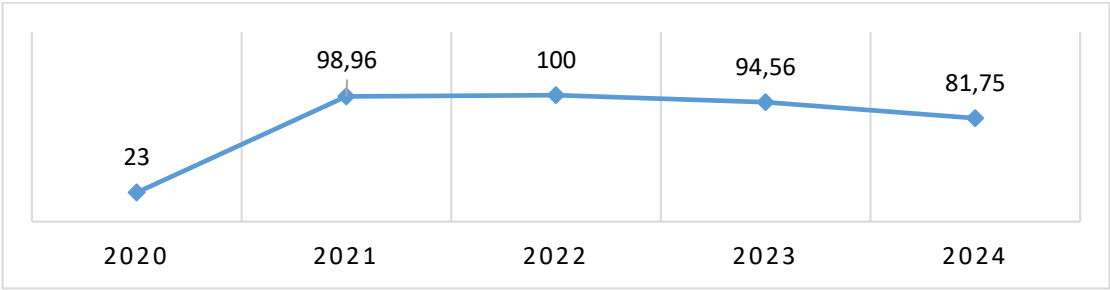
selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sejak tahun 2021, Kabupaten Batang telah memiliki rumah singgah untuk PMKS sejak tahun 2021 dan telah beroperasi secara aktif.

Penanganan PMKS yang tertangani bersifat fluktuatif dalam periode 2020-2024. Hingga tahun 2024 PMKS yang tertangani di Kabupaten Batang mencapai 100%. Penurunan persentase PMKS yang tertangani ini terjadi karena adanya penambahan Namun demikian, pelayanan dasar bagi PMKS yang juga merupakan salah satu indikator SPM urusan Sosial ini capaiannya masih relatif kecil. Sebagaimana grafik capaian PMKS yang tertangani di Kabupaten Batang dari 2020-2024 adalah sebagai berikut :



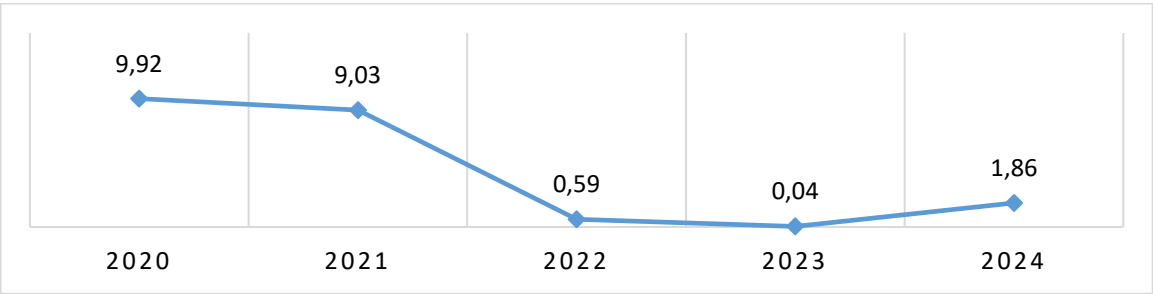
Gambar 2. 60 PMKS yang tertangani Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2025

Salah satu upaya penanganan PMKS adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Salah satu media/alat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosia serta adanya alokasi anggaran bantuan sosial yang terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten. Namun demikian, banyaknya bantuan sosial untuk PMKS dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dari 23 persen di tahun 2020 menjadi 94,56% di tahun 2023 dan menurun menjadi 81,75% pada tahun 2024. Sebagaimana persentase PMKS yang memperoleh Bantuan sosial tersaji dalam grafik berikut ini :



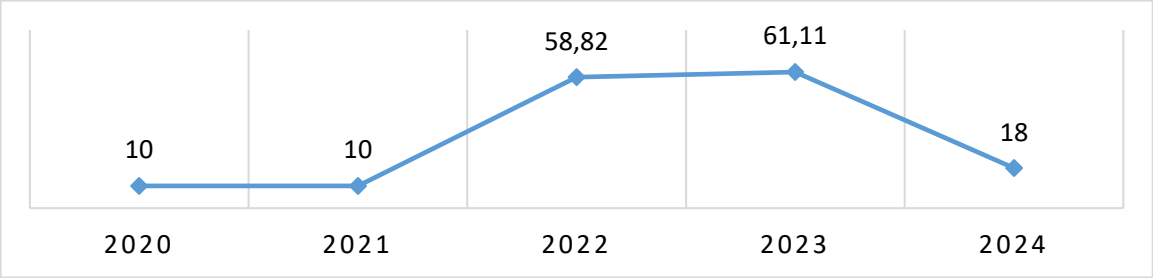
Gambar 2. 61 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2025

Penanganan PMKS juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial bagi PMKS dengan membentuk kelompok usaha bersama keluarga miskin, RTLH dan santunan kematian bagi warga miskin. Kinerja pemberdayaan sosial dapat dilihat dari capaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan dalam periode lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung fluktuatif. Dimana hingga tahun 2024, PMKS yang diberdayakan sebesar 1,86 persen, meningkat dari yang sebelumnya 0,04 persen pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras terkait peningkatan pemberdayaan PMKS di Kabupaten Batang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan asistensi sosial bagi PMKS antara lain berupa asistensi kepada para penyandang disabilitas, asistensi lanjut usia serta santunan kematian kepada untuk ahli waris warga miskin yang meninggal dunia. Sebagaim grafik PMKS yang diberdayakan tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 62 PMKS yang Diberdayakan di Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2025

Sedangkan Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan capaiannya cenderung stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2020 hingga 2021 terdapat 10% panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan, kemudian meningkat menjadi 61,11% ditahun 2023 dan menurun kembali menjadi 18% di tahun 2024.



Gambar 2. 63 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2025

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Gangguan keamanan yang tertangani di Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2020-2024, tahun 2020 sebesar 87,97% dan menurun karena terdapat kasus yang dilaporkan tidak semuanya dapat diselesaikan pada tahun berkenaan, tetapi baru dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Kemudian menurun hingga tahun 2022 kinerja menjadi sebesar 70,61% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 73,25%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penanganan tindak pidana yang selesai pada tahun 2023. Sebagaimana kinerja tindak pidana di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2. 23
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Kabupaten Batang**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Selesai	
1	2020	163	135	82,82
2	2021	149	107	71,81
3	2022	194	137	70,61
4	2023	258	189	73,25
5	2024	159	138	86,79

Sumber: Kepolisian Resort Batang Tahun 2025

Dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat tak terlepas dari peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain. Jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Batang tahun 2023 berjumlah 8.388 personil. Dengan 8.295 personil berjenis kelamin laki-laki dan 93 personil berjenis kelamin perempuan.

b. Penanggulangan Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Batang terdiri dari kawasan rawan tanah longsor (gerakan tanah), kawasan rawan gelombang pasang/banjir dan kawasan rawan abrasi laut.

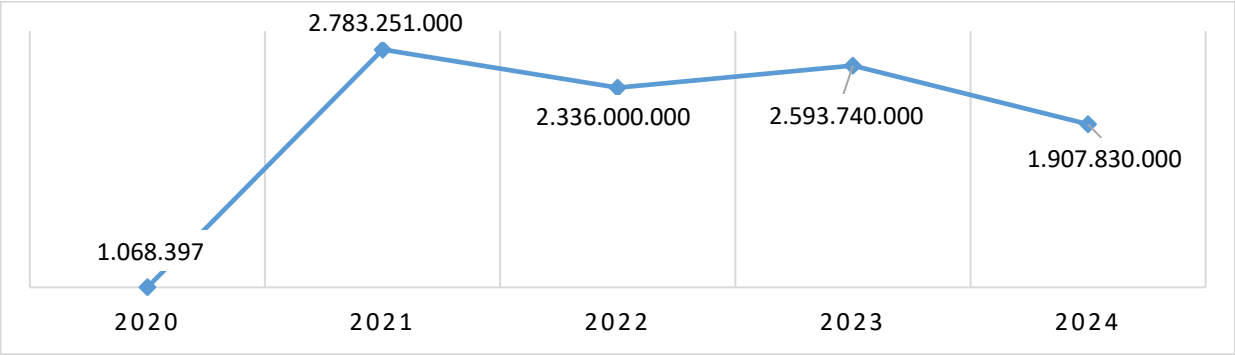
Di Kabupaten Batang tercatat setidaknya 139 bencana pada periode tahun 2020 – 2024 dengan jumlah bencana sebanyak 93 kali dan jumlah kejadian sebanyak 46 kali. Kejadian bencana lainnya yang sering terjadi adalah Cuaca Ekstrem, Banjir, Tanah Longsor, dan kejadian lain lain (kebakaran, gempa, angin). Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 24
Kejadian Bencana Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Jenis Kejadian	2020	2021	2022	2023	2024
Abrasi				1	2
Angin	5	19	24		
Banjir	8	7	11	10	16
Cuaca Ekstrem				14	51
Kebakaran Hutan dan Lahan	35	8		12	1
Kekeringan				4	2
Tanah Longsor	18	22	16	19	20
lain-lain		4	10	11	47
TOTAL	66	60	61	71	139

Sumber: Rekap Bencana/ kejadian tahun 2024

Sebagaimana kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana dalam kurun waktu 2020-2024 berfluktuasi, pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.068.397 yang kemudian meningkat hingga tahun 2023 dengan total kerugian Rp 2.293.740.000,- dan menurun kembali menjadi Rp 1.907.830.000 Yang tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 64 Kerugian/Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kabupaten Batang Tahun 2025

Pada fase pra bencana tahap mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan berperan penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan mitigasi, masyarakat memahami potensi dan resiko bencana yang berada di lingkungan mereka, Sosialisasi/penyuluhan kebencanaan dan penanggulangannya menjadi sangat dibutuhkan agar masyarakat tahu dan mengerti apa yang

harus dilakukan apabila terjadi bencana dan mitigasi struktural berupa penguatan bangunan fisik pencegah/pengurang dampak bencana yang sesuai dengan karakteristik bencananya. Disamping hal tersebut perlu dibangun sistem peringatan dini/early warning system untuk jenis-jenis bencana agar program pengurangan resiko berjalan baik.

Pada Fase tanggap darurat dukungan relawan penanggulangan bencana lebih optimal apabila ditunjang Sarana prasarana dan peralatan kebencanaan yang memadai. Untuk mencapai kondisi pemulihan saat tanggap darurat dalam waktu singkat perlu mobilisasi relawan dan peralatan kebencanaan, beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain pemenuhan sarana seperti perahu karet dan prasarana lainnya untuk memenuhi respon time penanganan bencana.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Batang hingga tahun 2024 sebanyak 12 desa. Sedangkan upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan melalui mitigasi non struktural antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Masyarakat yang terdampak bencana perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 di Kabupaten Batang sebesar 77,91 persen meningkat 1,29 poin dari tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Batang 2024 sebesar 5,67 persen, kondisi ini menurun dari tahun 2023 yang sebelumnya 6,06 persen. TPT

Perempuan tahun 2024 sebesar 5,51 persen dan TPT Laki Laki sebesar 5,78 persen. Sebagaimana untuk Jumlah Angkatan Kerja dirincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 25 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Batang (orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja Total
2020	387.741	28.835	416.576
2021	402.320	28.370	430.690
2022	426.004	30.301	456.305
2023	459.118	29.619	488.737
2024	474.641	28.516	503.157

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, Angkatan Kerja tahun 2023 sebanyak 488.737 orang terbagi menjadi penduduk Bekerja 459.118 orang dengan Pengangguran 29.619 orang. Jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja sebanyak 149.128 orang, dengan komposisi penduduk sekolah sebanyak 36.383 orang.

Selanjutnya persentase bekerja terhadap angkatan kerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 26 Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024**

Tahun	Penduduk 15+ Tahun	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
2020	586.190	95,84	68,67
2021	603.186	92,46	71,40
2022	609.256	93,36	74,90
2023	637.865	93,94	76,62
2024	474 641	94,33	73,49

Sumber: Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2025

Salah satu penyebab angka pengangguran di Kabupaten Batang adalah jumlah lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Batang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 3.956 pencari kerja terdaftar, sementara jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.141. Jumlah pencari kerja meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 7.234 orang, namun lowongan kerja hanya sedikit bertambah menjadi 2.231.

Pada tahun 2022, jumlah pencari kerja menurun menjadi 6.453 orang, sementara jumlah lowongan kerja meningkat cukup signifikan menjadi 3.401. Penurunan jumlah pencari kerja berlanjut pada tahun 2023, tercatat hanya 3.376 orang yang terdaftar, dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 2.762.

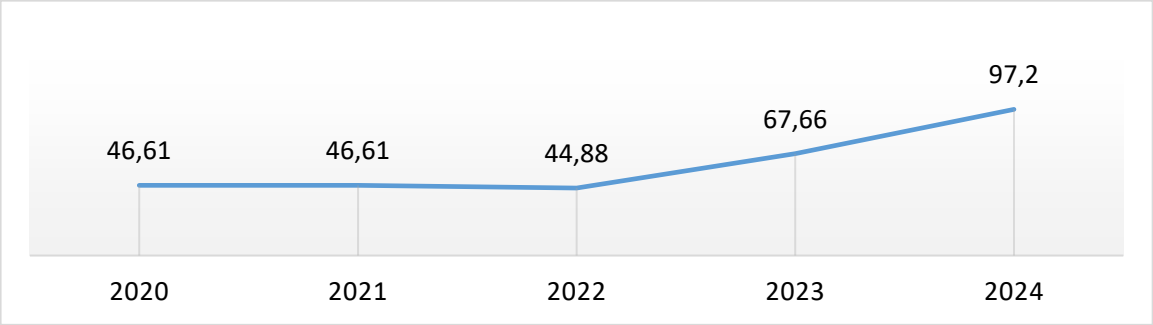
Tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif, dengan jumlah pencari kerja sebanyak 6.544 orang dan jumlah lowongan kerja hampir setara, yaitu sebanyak 6.470. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan yang semakin baik antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lowongan kerja di Kabupaten Batang, yang dapat menjadi indikasi membaiknya kondisi pasar tenaga kerja di wilayah tersebut namun kondisi tersebut juga mengindikasikan masih perlunya upaya yang keras untuk memperluas atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagaimana tren perkembangan pencari kerja dibanding dengan lowongan kerja yang tersedia tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 27
Jumlah Pencari Kerja dibandingkan Lowongan Kerja
di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja
2020	3.956	2.141
2021	7.234	2.231
2022	6.453	3.401
2023	3.376	2.762
2024	6.544	6.470

Sumber: Disnaker Kab.Batang, 2025

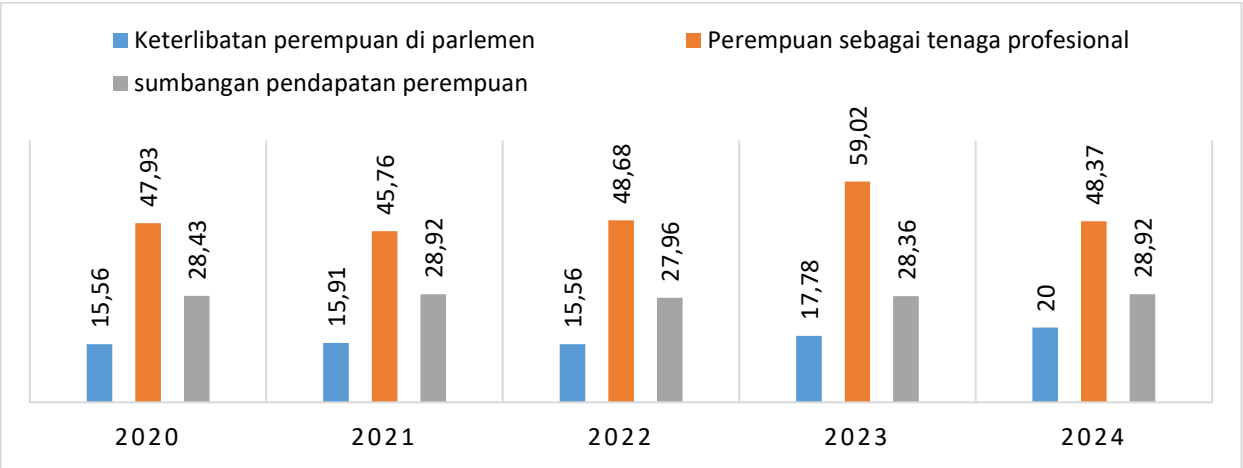
Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam periode tahun 2020-2024 cenderung meningkat yaitu pada tahun 2020 sebesar 46,61% meningkat menjadi 97,20 persen di tahun 2024. Hingga tahun 2024 terdapat pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6544 pencari dengan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 6361 pencari. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan maupun menambah lapangan kerja baru serta penyiapan kapasitas SDM sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja sudah baik namun perlu digenjot kembali agar pencari kerja di Kabupaten Batang mampu memenuhi kriteria pasar tenaga kerja.



Gambar 2. 65 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu upaya untuk menghadapi bonus demografi karena sebesar lebih dari 30 persen penduduk produktif di Kabupaten Batang adalah perempuan. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang jika dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :

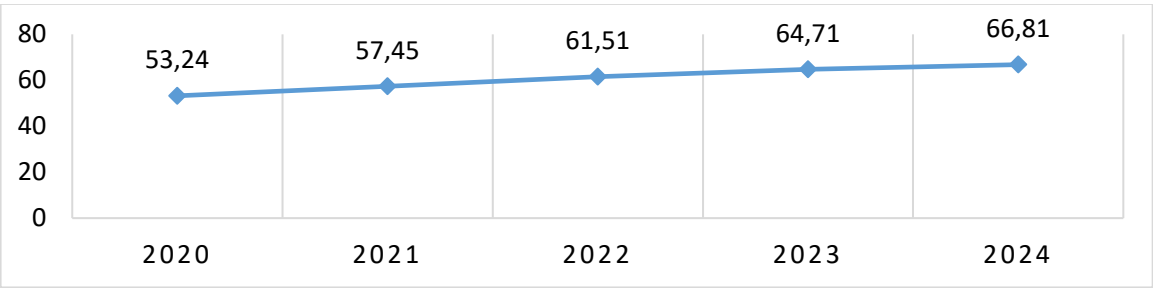


Gambar 2. 66 Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan, swasta dan legislative Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=564>, diakses Mei 2025

Dari tabel diatas, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dari 15% ditahun 2020 menjadi 20 % di tahun 2024 namun indikator ini cukup sulit untuk ditargetkan secara langsung karena merupakan hasil dari pemilihan legislatif. Pada indikator perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Batang cenderung fluktuatif dari 47,93% di tahun 2020 menjadi 48,37% di tahun 2024. Hal ini menandakan peran perempuan sebagai tenaga

professional di kabupaten Batang kian meningkat sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Batang. Sedangkan pada sumbangan pendapatan perempuan capaian tahun 2020 sebesar 28,43% dan menurun hingga tahun 2024 menjadi 28,92%. Capaian ini menandakan peran perempuan dalam berkontribusi dalam pendapatan keluarga kian menurun.

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Batang selama periode empat tahun terakhir (2020-2024) fluktuatif, pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 53,24 persen yang meningkat terus menjadi 66,81 persen tahun 2024.



Tabel 2. 28 Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg4OCMy/-indeks-ketimpangan-gender-ikg-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja---tpak--menurut-jenis-kelamin--persen-.html>, diakses Mei 2025

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan dengan peningkatan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak adalah adanya aturan tentang ruang atau area tanpa asap rokok, serta kerjasama antara DP3AP2KB dengan Dinas Perhubungan melalui pemasangan rambu-rambu Zona Selamat Sekolah, serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Meskipun capain indikator Kabupaten Layak Anak belum semua terpenuhi tetapi Pemerintah Kabupaten Batang sudah menerbitkan aturan mengenai perlindungan anak, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan KLA juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Kecamatan Ramah Anak dari 6 kecamatan ramah anak pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 13 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang.

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Batang pada periode 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu

sebanyak 49 kasus pada tahun 2020 naik menjadi 84 kasus pada tahun 2023. Namun mengalami penurunan kasus pada tahun 2024 menjadi 25 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 didominasi oleh kasus Kasus Anak berhadapan dengan hukum yaitu sebanyak 13 kasus. Sebagaimana data tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 29
Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batang
Tahun 2020-2024

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Seksual	21	12	15	67	7
2	Eksplorasi	-	-	-	-	-
3	KDRT	6	-	18	11	5
4	Penelantaran	2	3	3	-	-
5	TPPO	-	-	-	-	-
6	ABH	20	8	1	6	13
	Jumlah	49	23	37	84	25

Sumber: P2TP2A melalui DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2025

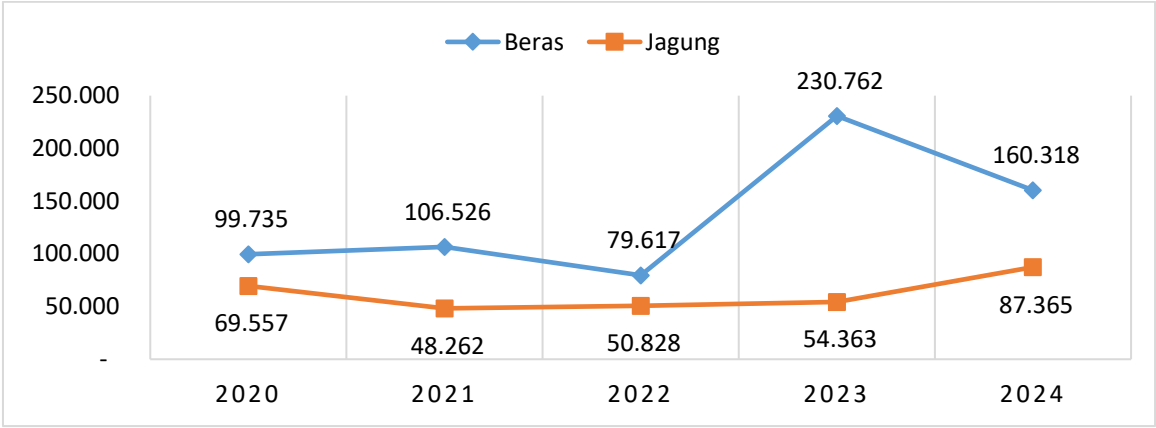
3. Pangan

Pelayanan urusan pangan Tahun 2020 – 2024 dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Batang masih di dominasi oleh beras dan jagung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ketersediaan beras cenderung fluktuatif yaitu sebanyak 99.735 ton pada tahun 2020 dan terus menurun menjadi 79.617 ton di tahun 2022. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya bencana banjir pada bulan November dan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan lahan seluas 150 Ha gagal panen yang berakibat pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras di Kabupaten Batang yang kemudian meningkat menjadi 230.762 ton pada tahun 2023 yang didukung adanya program IP 400 atau penanaman padi sebanyak 4 kali setahun. Dan menurun kembali menjadi 160. 318 ton pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2024 terjadi karena adanya alih fungsi lahan, yang mengakibatkan penurunan kerusakan lahan kualitas lahan pertanian sehingga mengurangi produksi beras. Selain itu, Kurangnya penggunaan teknologi pertanian yang memadai dapat menghambat produksi.

Sedangkan pada ketersediaan jagung juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 – 2024. Dimana pada tahun 2020 dengan

ketersediaan pangan jagung sebanyak 69.557 ton kemudian menurun menjadi 48.262 ton pada tahun 2021 yang kemudian meningkat menjadi 87.365 ton pada tahun 2024. Capaian ini didukung adanya peningkatan kesadaran petani tentang budidaya jagung yang menjanjikan serta peningkatan partisipasi petani dalam program pemerintah. Sebagaimana capaian ketersediaan pangan beras dan jagung tersaji dalam grafik berikut ini :



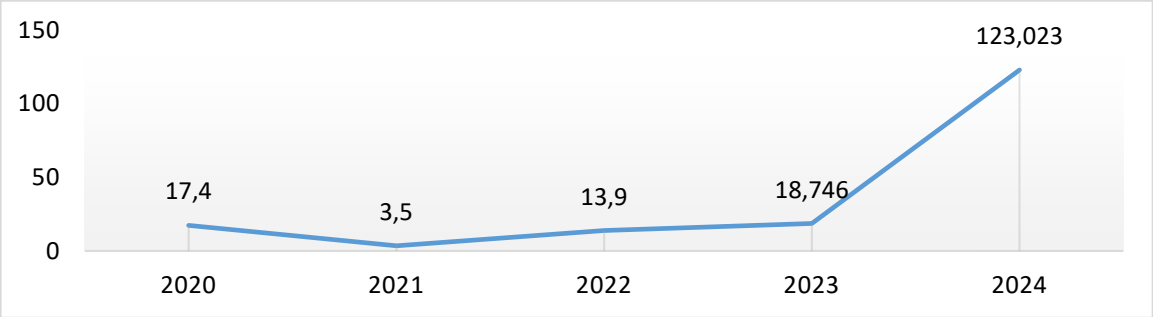
Gambar 2. 67 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Batang (ton) Tahun 2020-2024

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2025

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mencapai 100% melalui *website* : *komoditas.batangkab.go.id*. Penyediaan informasi ini merupakan salah satu upaya yang bersifat antisipatif yaitu dengan melakukan pemantauan untuk meninjau ketersediaan produksi di tingkat produsen maupun bersifat responsif yang didukung sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga menciptakan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

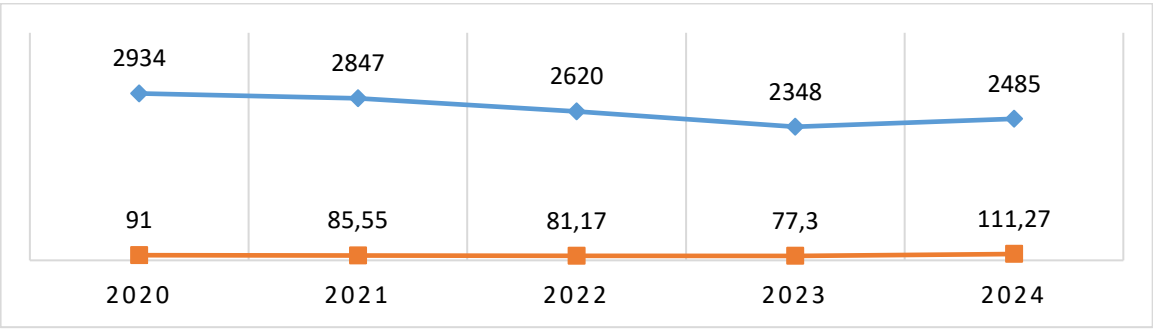
Cadangan pangan daerah digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di wilayah kabupaten Batang akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya. Cadangan pangan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat. Hal ini disebabkan cadangan pangan berupa gabah yang memiliki masa simpan tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak setiap tahun membeli gabah baru, tetapi menghabiskan dulu stok yang masih ada. Pada tahun 2020 cadangan pangan daerah sebanyak 17,4 ton yang kemudian menurun menjadi 3,5 ton dikarenakan Tidak ada kegiatan yang menunjang pengadaan cadangan pangan karena menghabiskan stok cadangan pangan yang masih ada dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat kembali menjadi 18,746 ton di tahun 2023 dan meningkat drastis pada tahun 2024 menjadi sebanyak 123,023 ton. Hal ini didukung pengoptimalisasian kegiatan cadangan pangan di Kabupaten Batang dan kedepan Pemerintah Daerah akan

tetap memperhatikan alokasi cadangan pangan daerah untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga. Sebagaimana grafik Cadangan Pangan Daerah tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 68 Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Batang (ton)
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2025

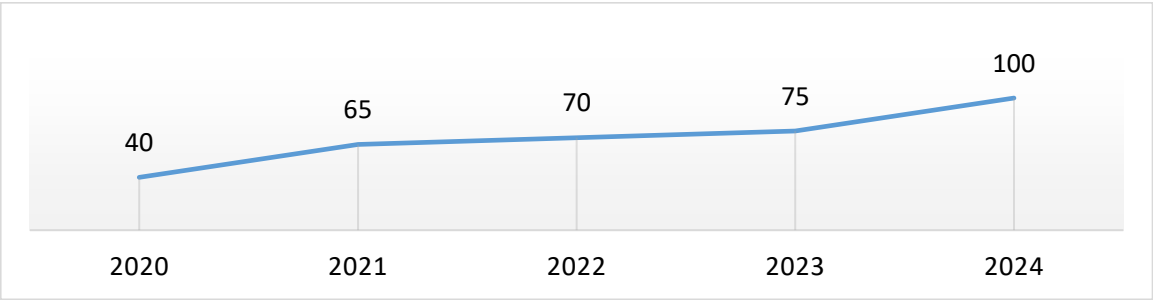
Ketersediaan energi per kapita Kabupaten Batang dalam periode 2020-2024 juga fluktuatif dengan kecenderungan menurun, tahun 2020 sebesar 2934 kal dan menurun terus menjadi 2485 kkal/Hari pada tahun 2024. Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita yang cenderung fluktuatif dari 91 gr/hr di tahun 2020 menjadi 111,27 gr/hr di tahun 2024. Namun meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka capaian ini masih melebihi dari angka yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam jumlah yang cukup dan aman.



Gambar 2. 69 Ketersediaan energi per kapita (kal) dan protein per kapita (G)
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2025

4. Pertanian

Pelayanan urusan pertanian tahun 2020 – 2024 dilakukan melalui fasilitasi hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanian. Dalam periode tahun 2020 – 2024 fasilitasi hak atas tanah di Kabupaten Batang cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 40% fasilitasi hak tanah yang terselesaikan dan terus meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan adanya koordinasi dalam penanganan penyelesaian fasilitasi pertanian dengan Tim baik dari DPRKP, BPN.

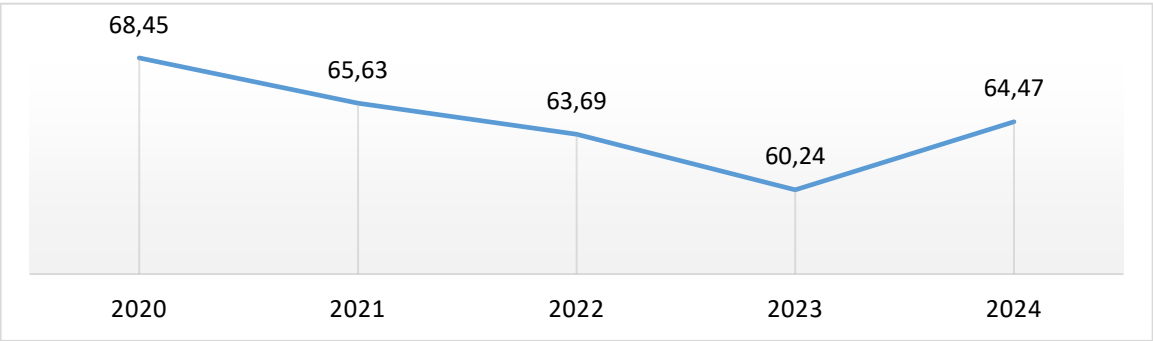


Tabel 2. 30 Fasilitas Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2025

5. Lingkungan Hidup

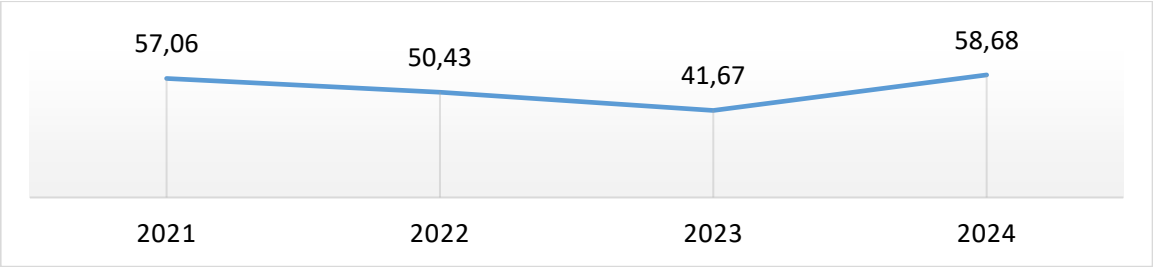
Kondisi lingkungan hidup merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, mengingat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat mempunyai dampak cukup besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Pencemaran Air, Indeks Kualitas Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang selama periode 2020-2024 cenderung menurun yaitu dari 68,45 di tahun 2020 turun hingga 60,24 pada tahun 2023 dan kemudian meningkat menjadi 64,47 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya upaya peningkatan kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan agar keberlanjutan dapat dipertahankan.



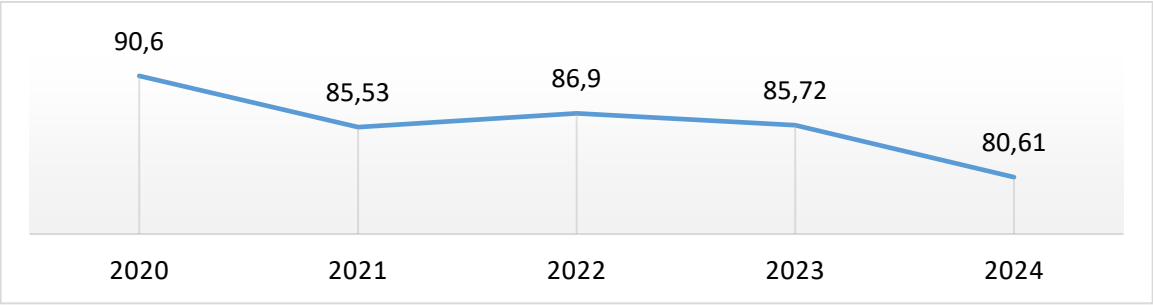
Gambar 2. 70 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2025

Jika dilihat dari komponen pembentuknya dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu (1) Indeks Kualitas Air, pada tahun 2021 nilai indeks kualitas air sebesar 57,06 dan menurun turun menjadi 41,67 pada tahun 2023 dan kemudian meningkat kembali menjadi 58,68 pada tahun 2024; (2) Indeks Kualitas Udara juga terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 90,6 dan

cenderung menurun menjadi 80,61 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas air dan udara di Kabupaten Batang namun tetap diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk mempertahankan kualitas udara.

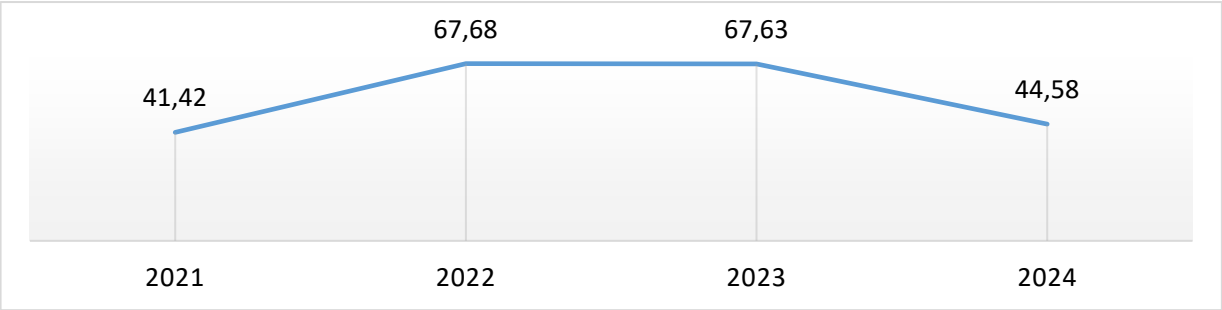


Gambar 2. 71 Indeks Kualitas Air Kabupaten Batang Tahun 2021-2024
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2025



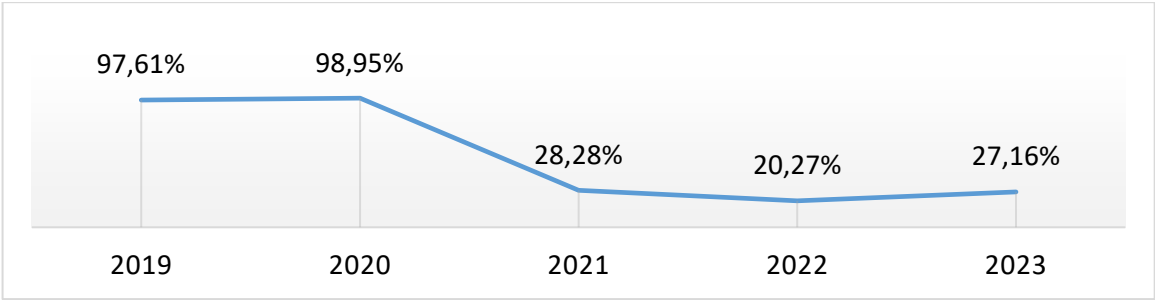
Gambar 2. 72 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2025

Indeks Kualitas Lahan merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Batang terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 41,42 menjadi 67,63 pada tahun 2023 kemudian menurun kembali menjadi 44,58 tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas lahan di Kabupaten Batang.



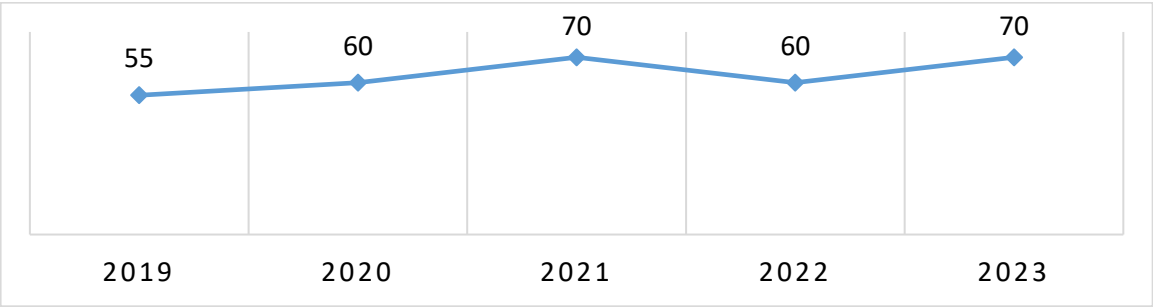
Gambar 2. 73 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Batang (%)
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2025

Salah satu penyebab ketidakseimbangan lingkungan hidup adalah sampah yang tidak ditangani dengan baik. Bukan hanya mengganggu keseimbangan lingkungan saja, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga sosial ekonomi masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menangani masalah persampahan dapat dilihat dari kinerja penanganan sampah di Kabupaten Batang yang terus meningkat selama lima tahun terakhir (2019-2023), dari 97,61% sampah yang tertangani di tahun 2019 meningkat menjadi 98,95% di tahun 2021 dan kemudian menurun terus hingga tahun 2023 menjadi 27,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan bank sampah, pembuatan TPS composting dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk menangani masalah persampahan belum cukup berhasil. Namun demikian, capaian penanganan sampah di Kabupaten Batang masih belum mencapai 50% karena itu kedepan upaya penanganan sampah terutama pembangunan TPA dan TPST baru perlu segera dilaksanakan karena daya tampung TPA Randukuning sudah overload. Sebagaimana capaian penanganan persampahan dalam kurun tahun 2019-2023 tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 74 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Batang
Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

Sementara itu pada Cakupan area pelayanan penanganan persampahan juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 seluas 55 persen menjadi 70 persen di tahun 2021 kemudian menurun menjadi 60 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 70 kembali pada tahun 2023. Peningkatan ini didukung dengan adanya penambahan sarana prasarana persampahan.

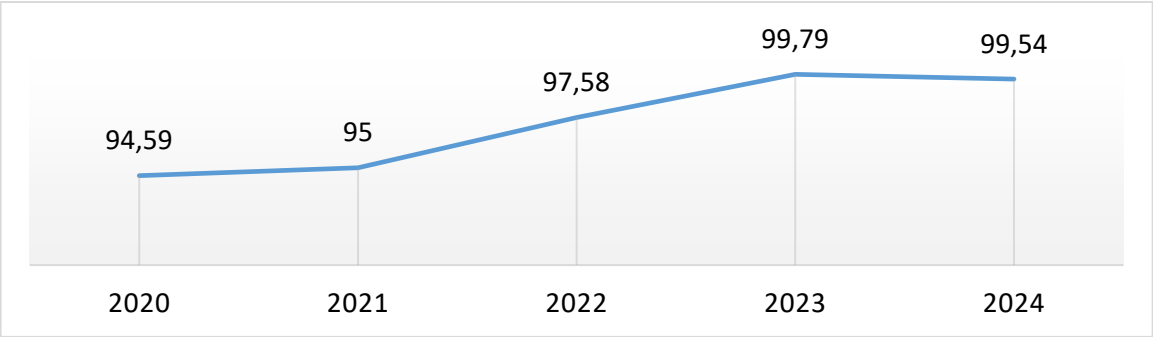


Gambar 2. 75 Cakupan Area Pelayanan Penanganan Sampah Kabupaten Batang Tahun 2019-2023

Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2024

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

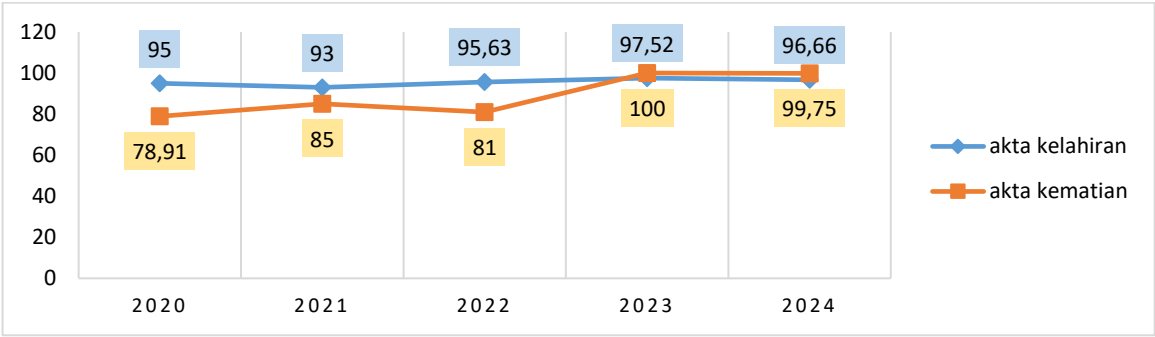
Rasio kepemilikan eKTP cenderung meningkat pada periode 2020-2024, tahun 2020 sebesar 94,59 persen kemudian meningkat menjadi 99,54 di tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan dalam proses perekaman dan penerbitan eKTP telah berjalan dengan baik melalui berbagai upaya inovatif seperti jemput bola ke masyarakat secara langsung serta meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan. Sebagaimana capaian Kepemilikan E-KTP dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 76 Rasio Penduduk ber KTP elektronik Kabupaten Batang (%)

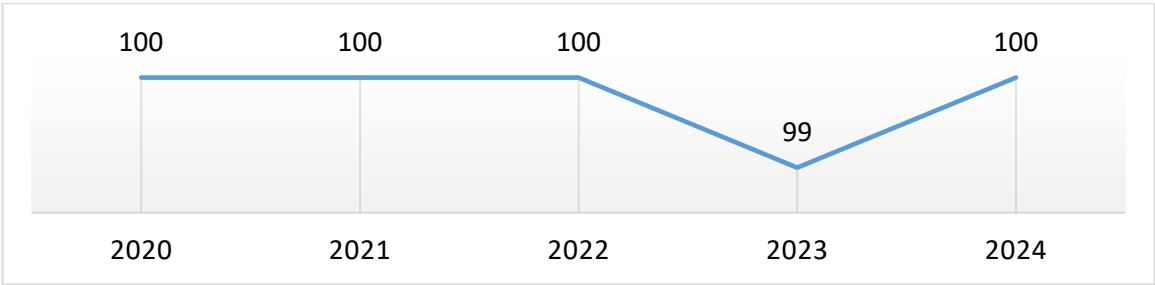
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

Kepemilikan akta kelahiran dalam periode lima tahun terakhir mengalami tren meningkat dari tahun 2020 sebesar 95 persen menjadi sebesar 97,52 persen pada tahun 2023 yang kemudian menurun menjadi 96,66 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan capaian akta kematian yang meningkat dari 78,91 persen tahun 2020 menjadi 99,75 persen ditahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai administrasi mulai meningkat namun kedepan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan diantaranya melalui sosialisasi dan meningkatkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan.



Gambar 2. 77 Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

Sedangkan untuk kepemilikan akta nikah, hingga tahun 2024 semua pasangan di Kabupaten Batang sudah memiliki akta nikah. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :

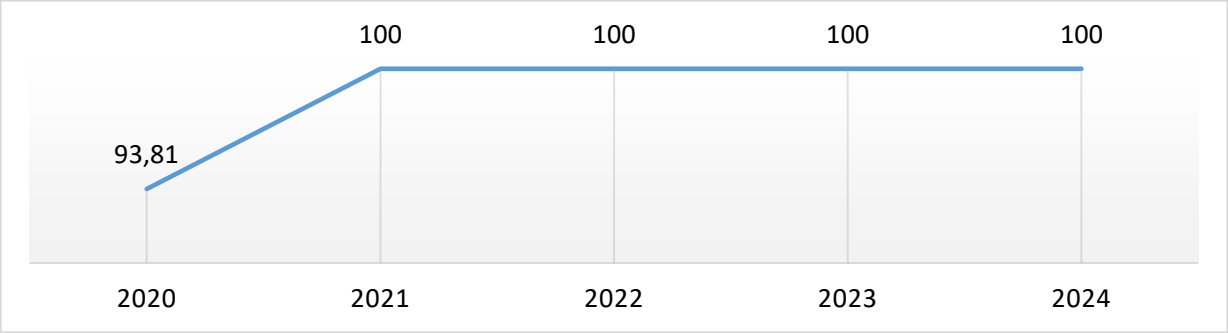


Gambar 2. 78 Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pembinaan kelompok oleh LPM. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun 2016-2018 sebanyak 5 kelompok dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 6 kelompok.

Persentase PKK Aktif dalam periode tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari 93,81 persen di tahun 2020 kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 100 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan.



Gambar 2. 79 Persentase PKK Aktif Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2025

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa dilaksanakan dengan upaya untuk menginisiasi pembentukan dan penguatan lembaga ekonomi yang terwujud dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pada Tahun 2024 di Kabupaten Batang sudah terbentuk 239 Bumdes namun yang mengikuti pemeringkatan dalam web Sidesa hanya sebanyak 211 Bumdes yang terbagi menjadi 4 klasifikasi seperti yang tercantum dalam Tabel 2.34.

Tabel 2. 31
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Batang Tahun 2024

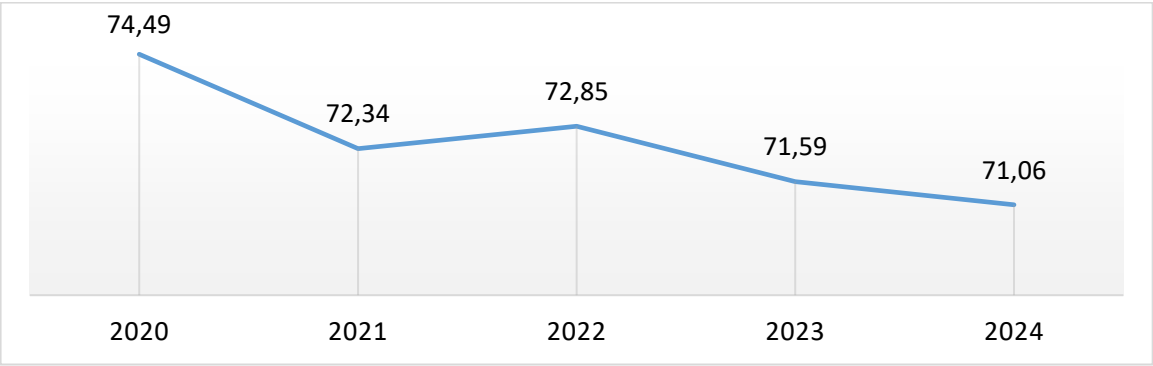
NO	KLASIFIKASI BUMDES	JUMLAH
1	Perintis	168
2	Pemula	17
3	Berkembang	24
4	Maju	2
JUMLAH		211

Sumber: Sidesa Dispermades, 2025

Berdasarkan data klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Batang, tercatat sebanyak 211 BUMDes yang tersebar di berbagai desa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih berada pada tahap awal pengembangan. BUMDes dengan klasifikasi "**Perintis**" mendominasi dengan jumlah sebanyak 168 unit, menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes masih dalam tahap pembentukan dan belum aktif menjalankan kegiatan usaha yang signifikan. Klasifikasi "**Pemula**" sebanyak 17 unit, menggambarkan BUMDes yang telah mulai menjalankan usaha namun masih terbatas dari segi kapasitas dan cakupan kegiatan. Sementara itu, terdapat 24 BUMDes yang masuk dalam klasifikasi "**Berkembang**", yaitu unit yang telah menunjukkan peningkatan dalam kegiatan usaha serta kontribusi terhadap perekonomian desa. Hanya 2 BUMDes yang telah mencapai klasifikasi "**Maju**", yang berarti telah memiliki kelembagaan yang kuat, usaha yang berkembang pesat, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan hasil-hasil pembangunan kurang bisa dirasakan masyarakat dan menjadi beban berat bagi pembangunan selanjutnya. Salah satu upaya menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana, diantaranya yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi.

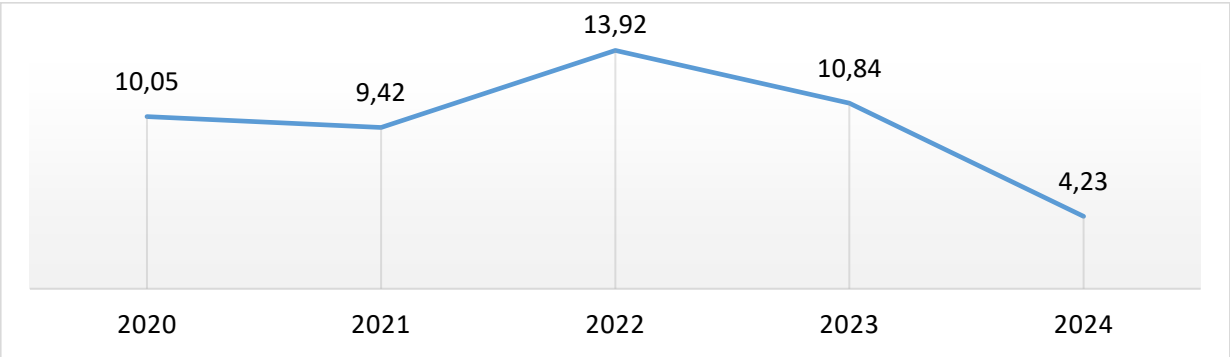


Gambar 2. 80 Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sebesar 74,49% persen mengalami penurunan di tiap tahun menjadi 71,06% pada tahun 2024. Sementara itu, masih ada sekitar 7,5% pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi modern.

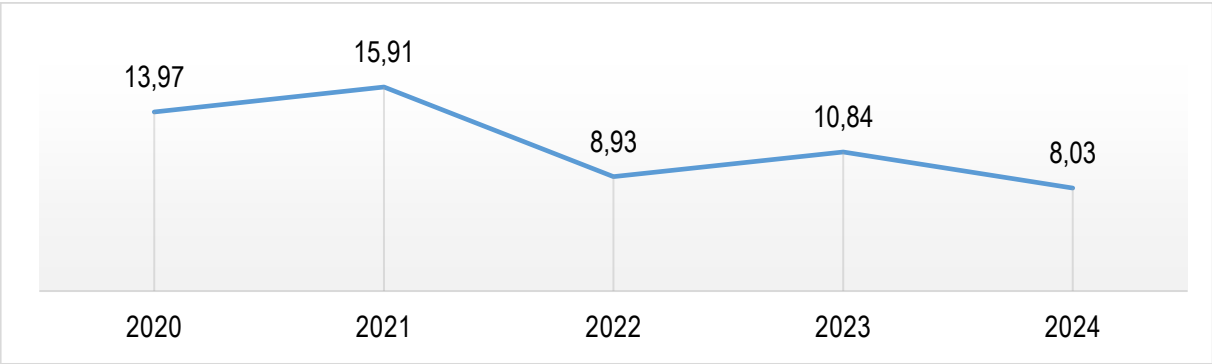
Demikian juga, akseptor KB pada kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan tiap tahunnya, tahun 2020 sebesar 10,05 persen, tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 9,42 persen di tahun 2021. Kemudian meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 13,92 persen dan menurun kembali hingga 4,23 persen di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran pasangan usia subur dalam ber KB. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :



Gambar 2. 81 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2025

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB (unmetneed KB) dari tahun 2020 – 2024 secara umum mengalami tren peningkatan, dari sebesar 13,97 di tahun 2020 menurun menjadi 8,93 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 10,84 persen pada tahun 2023 dan menurun kembali menjadi 8,03 persen di tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmetneed KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmetneed KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB. Semakin meningkatnya angka unmet need berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi perkembangan PUS di Kabupaten Batang selengkapnya tergambar dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 82 Unmetneed KB (%) di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2025

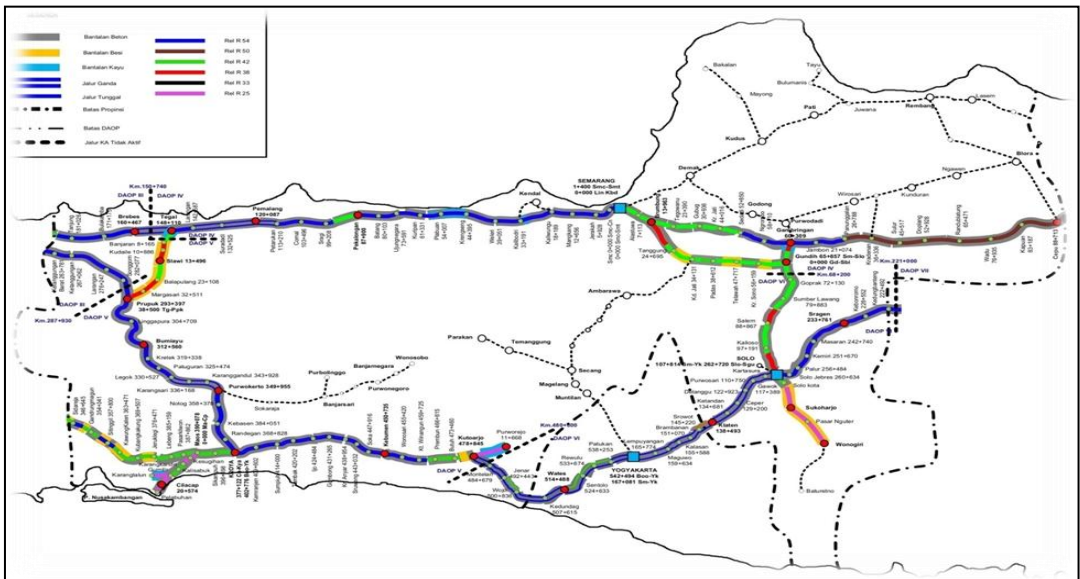
9. Perhubungan

9.1. Perkeretaapian

Untuk wilayah di Batang terdapat jaringan rel kereta api aktif digunakan sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan raya berkurang. Jika distribusi barang utamanya untuk jarak sedang dan jauh dapat dilayani

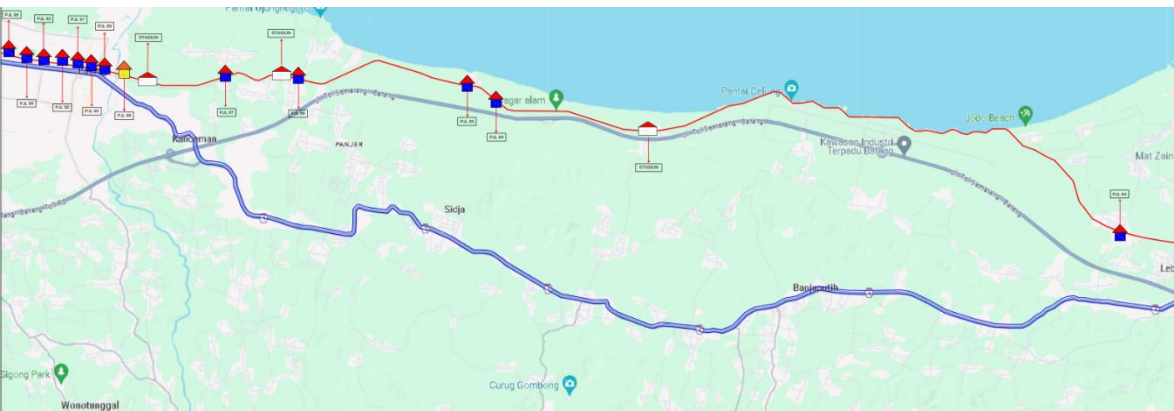
dengan jaringan rel kereta api dapat menurunkan biaya logistik sehingga daya saing daerah akan meningkat.

Total panjang jalur kereta api di Batang sampai dengan tahun 2021 sepanjang 41 km/sp, jalur rel aktif/operasional. 5 stasiun dengan perincian 1 stasiun (Batang Baru) berfungsi sebagai stasiun operasional dan komersial dan 4 stasiun (Ujungnegoro, Kuripan, Plabuan dan Krengseng) berfungsi sebagai stasiun operasional. Posisi Batang yang sangat strategis karena berada jalur utara pulau jawa (Jakarta - Surabaya), sehingga jalur rel di Batang cukup padat, dan kondisi rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara cukup baik dalam keselamatan perjalanan kereta api.



Gambar 2. 83 Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Jawa Tengah
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2019

Di Batang terdapat 12 titik perlintasan jalur kereta api yang sudah berpenjaga kurang lebih 5-6 orang.



Gambar 2. 84 Peta Titik Lokasi Pos PJI
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2024

Tabel 2. 32 Pos Penjagaan perlintasan kereta api yang dijaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

No.	NAMA POS	LOKASI POS PJI
1	POS PJI 95 Gabus	Desa Denasri Kec.Batang
2	POS PJI 94 GOR	Desa Denasri Kec.Batang
3	POS PJI 93 Kalisari	Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang
4	POS PJI 92 Tampangsono	Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang
5	POS PJI 91 Yosudarso	Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang
6	POS PJI 90 RE	Kelurahan Proyonanggan Kec. Batang
7	POS PJI 89 Pasar	Kelurahan Proyonanggan Kec. Batang
8	POS PJI 88 SAMSAT	ASET PT. KAI
9	POS PJI 87 Grugak	Desa Grugak Kec. Kandeman
10	POS PJI 86 UJUNGNEGORO	Desa Ujung Negro, Kec. Kandeman
11	POS PJI 85 ROBAN BARAT	Desa Kedungsego Kec. Tulis
12	POS PJI 84 ROBAN TIMUR	Desa Sengon Kec. Subah
13	POS PJI 83 KEBONDALEM	Desa Kebondalem Kec. Gringsing

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 2. 33
Persebaran Perlintasan Jalan Kabupaten Batang dengan Rel Kereta Api Tahun 2022

No	Tempat / Lokasi	Pos	Penjagaan	Kelengkapan	Sistem Pengoperasian	Keterangan
1	Kebon Dalem Gringsing	78	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
2	Stasiun Pelabuhan Banyuputih		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
3	Kuripan Timur Subah		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
4	Kuripan Barat Subah		Tidak Dijaga	Tidak Berpalang	-	
5	Roban Timur Subah		Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
6	Roban Barat Tulis		Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
7	Ujung Negro Kandeman	86	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
8	Grugak Kandeman	81	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
9	Samsat Batang	88	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	Milik KAI
10	Pasar Batang	89	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
11	RE Martadinata Batang	90	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
12	Yos Sudarso Batang	91	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	
13	Tampangsono Batang	92	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
14	Kalisari Batang	93	Di Jaga	Berpalang Pintu	Manual	
15	Gor Batang	94	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	

No	Tempat / Lokasi	Pos	Penjagaan	Kelengkapan	Sistem Pengoperasian	Keterangan
16	Gabus Batang	95	Di Jaga	Berpalang Pintu	Otomatis	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2025

9.2. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

Terminal angkutan merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal tipe A yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum secara nasional seperti angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal tipe B atau terminal regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Sedangkan Terminal tipe C atau sub-terminal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

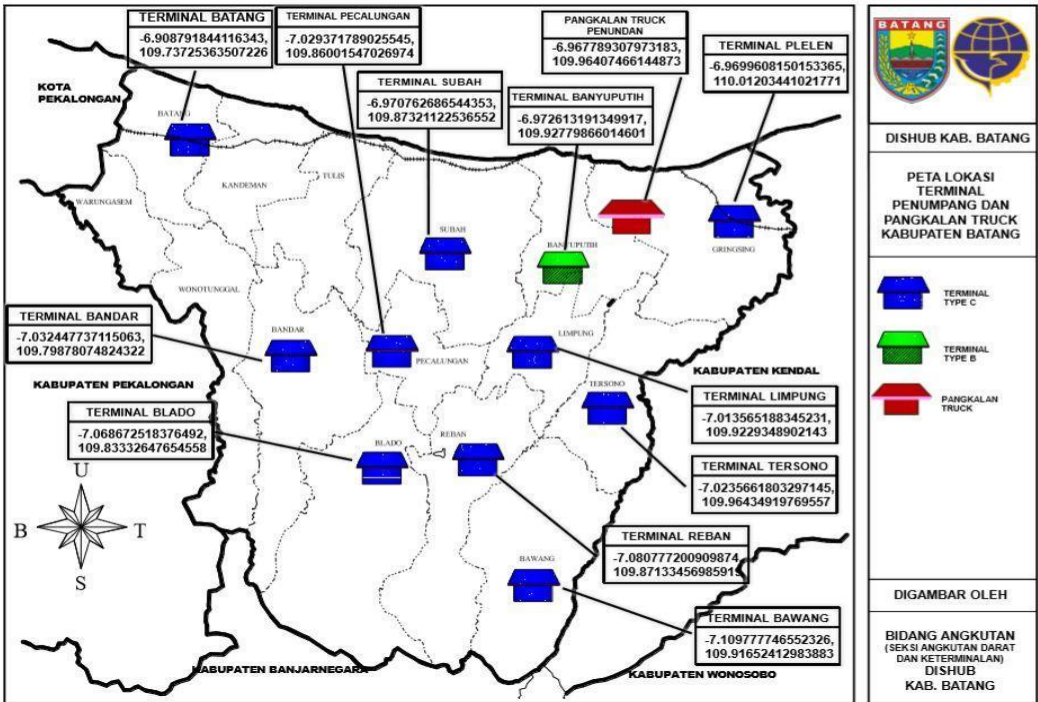
Pada Tahun 2024 terdapat 1 terminal tipe B, 10 terminal tipe C, dan 1 pangkalan truk. Terminal tipe B yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Banyuputih, sedangkan terminal tipe C yang berada di Kabupaten Batang tersebar di Kecamatan Batang, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Limpung, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tersono. Kemudian untuk pangkalan truk yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Banyuputih yaitu Pangkalan Truk Penundan dan Pangkalan Truk Petamanan, namun Pangkalan Truk Petamanan ini sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center. Persebaran terminal selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 34
Persebaran Terminal Tipe B, C, dan Pangkalan Truk
di Kabupaten Batang Tahun 2025

No	Nama Terminal	Type Terminal	Jenis Terminal	Lokasi
1	Terminal Banyuputih	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Banyuputih
2	Terminal Blado	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Blado
3	Terminal Batang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Batang
4	Terminal Bandar	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bandar

No	Nama Terminal	Type Terminal	Jenis Terminal	Lokasi
5	Terminal Bawang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bawang
6	Terminal Limpung	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Limpung
7	Terminal Pelen	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Pelen
8	Terminal Reban	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Reban
9	Terminal Subah	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Subah
10	Terminal Tersono	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Tersono
11	Pangkalan Truk Penundan (Banyuputih)	Tempat khusus parkir	Pangkalan Angkutan Barang	Banyuputih
12	Terminal Banyuputih	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Banyuputih

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2025



Gambar 2. 85 Persebaran Terminal Tipe B, Terminal Tipe C dan Pangkalan Truk

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2025

Berdasarkan kebutuhan, setidaknya terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Batang yang perlu pembangunan terminal baru tipe C yaitu di Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, dan Kecamatan Pecalungan.

Kondisi terminal tipe C Kabupaten Batang berdasarkan ketersediaan fasilitas yang meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, fasilitas uji kelayakan kendaraan, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan kelayakan kendaraan, fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan, informasi jadwal

dan rute trayek, kantor penyelenggaraan terminal, petugas operasional terminal, ruang/tempat tunggu penumpang, toilet, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, kios, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak angkutan, tempat merokok, drainase, lampu penerangan ruangan, lajur kedatangan, lajur keberangkatan, informasi pelayanan, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum/pribadi dan ruang menyusui masih terdapat gap yang cukup besar antara fasilitas yang dibutuhkan dengan fasilitas yang telah tersedia sebagaimana kondisi terminal tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 35 Kondisi Terminal di Kabupaten Batang

No.	NAMA TERMINAL	TIPE TERMINAL	LOKASI TERMINAL	KONDISI
1	Terminal Banyuputih	B	Kecamatan Banyuputih	BAIK
2	Terminal Batang	C	Kecamatan Batang	CUKUP BAIK
3	Terminal Limpung	C	Kecamatan Limpung	CUKUP BAIK
4	Terminal Reban	C	Kecamatan Reban	CUKUP BAIK
5	Terminal Bandar	C	Kecamatan Bandar	CUKUP BAIK
6	Terminal Tersono	C	Kecamatan Tersono	CUKUP BAIK
7	Terminal Plelen	C	Kecamatan Plelen	CUKUP BAIK
8	Terminal Bawang	C	Kecamatan Bawang	CUKUP BAIK
9	Terminal Blado	C	Kecamatan Blado	CUKUP BAIK
10	Terminal Pecalungan	C	Kecamatan Pecalungan	CUKUP BAIK
11	Terminal Subah	C	Kecamatan Subah	CUKUP BAIK

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2025

b) Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Parkir Ditepi Jalan Umum terdapat 204 titik parkir dengan persebaran sebagai berikut:

**Tabel 2. 36
Rekapitulasi Data Parkir Per Wilayah di Kabupaten Batang**

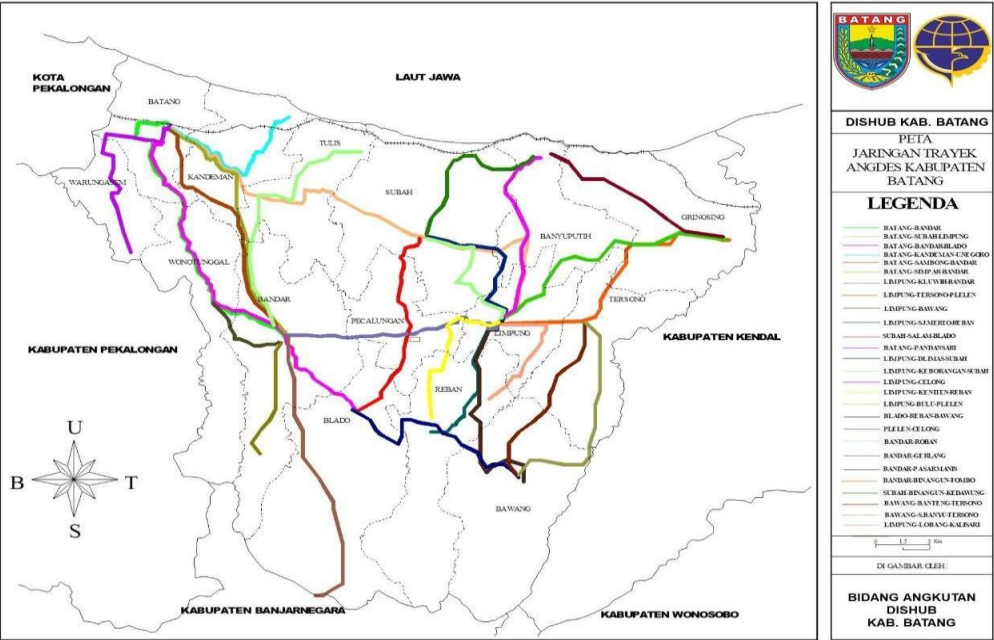
No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
1	Wilayah Warungasem	2
2	Wilayah Limpung	40
3	Wilayah Subah	11
4	Wilayah Tersono	4
5	Wilayah Blado	14
6	Wilayah Bawang	9
7	Wilayah Banyuputih	3
8	Wilayah Bandar	30
9	Wilayah Batang Kota	90
10	Wilayah Plelen	1

No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
	TOTAL	204

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2025

2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kinerja urusan perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dapat dilihat melalui capaian rasio ijin trayek cenderung meningkat dalam periode 2018-2024 Pada tahun 2018 sebesar 70 persen, kemudian terdapat penurunan hingga tahun 2020 menjadi 54,68 persen dan ada kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 81,83 persen. Namun pada tahun 2023 terdapat perbedaan cara perhitungan yang berdasar pada Permendagri 86/2017 dengan hasil hitungan sebesar 0,00002. Sedangkan pada Tahun 2024, rasio ijin trayek sebesar 0,00004. Turunnya capaian rasio ijin trayek disebabkan karena meningkatnya pengguna kendaraan pribadi yang berimbas pada menurunnya pengguna angkutan umum. Diperlukan adanya strategi yang secara tidak langsung mengarahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum serta dukungan secara berkelanjutan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan angkutan umum. Peta Jaringan Trayek Kabupaten Batang dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2. 86 Peta Jaringan Trayek Kabupaten Batang
 Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2025

Tabel 2. 37 Koridor Pelayanan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Kabupaten Batang

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
I	Yang Berpusat di Batang			
1	Batang-Wonotunggal-Bandar-Blado PP	Bus 16 Seat	35	4
2	Batang-Tulis-Subah-Banyuputih-Limpung PP	Bus 16 Seat	93	54
3	Batang-Wonotunggal-Bandar PP	Bus 12 Seat	48	30
4	Batang-Tulis-Botolambat-Sigayam-Simpar-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	15	9
5	Batang-Kandeman-Ujungnegoro PP	Bus 12 Seat	15	14
6	Batang-Sambong-Lawangaji-Botolambat-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	10	0
7	Batang - Kalisari - Karanganyar - Pesaren - Sidorejo - Pandansari PP	Bus 12 Seat	10	0
II	Yang Berpusat di Limpung			
1	Limpung — Sukorejo — Lobang — Kalisari PP	Bus 12 seat	8	0
2	Limpung — Tersono — Timbang — Plelen PP	Bus 12 seat	55	16
3	Limpung — Kalangsono — Timbang — Plelen PP	Bus 12 seat	15	3
4	Limpung — Sojomerto — Reban PP	Bus 12 seat	45	20
5	Limpung — Sojomerto — Bawang PP	Bus 12 seat	10	7
6	Limpung — Kalisalak — Sidomulyo — Salam — Kluwih — Bandar PP	Bus 16 seat	12	0
7	Limpung — Kalisalak — Dlimas — Petamanan — Subah PP.	Bus 12 seai	10	0
8	Limpung — Banyuputih — Kedawung - Mangunsari (Celong) PP	Bus 12 seat	15	0
9	Limpung — Sidomulyo — Plaosan — Keniten — Wonosobo — Reban PP	Bus 12 seat	8	0
III	Yang Berpusat di Bawang			
1	Bawang-Sangubanyu-Tersono PP	Bus 12 Seat	10	0
2	Bawang - Getas - Banteng - Gondo - Rejosari Timur - Tersono PP	Bus 12 Seat	16	2
IV	Yang Berpusat di Subah			
1	Subah — Gondang — Kemiri — Kedawung PP.	Bus 12 Seat	8	0

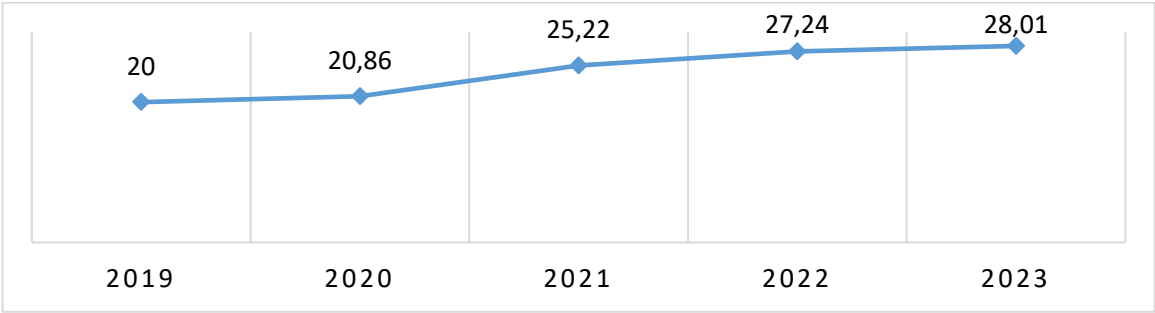
No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
	Subah — Keboangan — Menjangan — Karang Tengah — Kalisalak — Limpung PP	Bus 12 Seat	8	0
V	Yang berpusat di Bandar.			
1	Bandar - Binangun - Wonodadi - Tombo PP	Bus 12 Seat	7	0
2	Bandar - Pesalakan - Pasar Manis PP	Bus 12 Seat	9	0
3	Bandar - Kembanglangit - Gerlang PP	Bus 16 Seat	12	0
4	Bandar - Beji - Kenconorejo - Roban PP	Bus 12 Seat	12	0
VI	Yang berpusat di Blado.			
1	Pagilaran - Blado - Reban - Bawang PP	Bus 12 Seat	22	0
2	Blado - Siguci - Salam - Subah PP	Bus 12 Seat	15	3
VII	Yang berpusat di Plelen			
1	Plelen - Sawangan - Ketanggan - Celong PP	Bus 12 Seat	17	0
	Angkutan SK Bersama Kota Pekalongan			
	Batang — Pekalongan PP	Bus 12 seat	80	28
	Batang — Warungasem — Pekalongan PP	Bus 12 seat	25	0
	Pasir Kencana — Jl. Seruni — TPI Batang PP	Bus 12 seat	20	0
	Bandar — Warungasem — Pekalongan PP	Bus 12 seat	24	12
	Angkutan SK Bersama Kabupaten Kendal			
	Weleri — Kalikuto — Gringsing — Pancuran — Krengseng — Pancuran — Plelen PP	Bus 12/16 seat	12	0
	Weleri — Kalikuto — Gringsing — Lebo — Krengseng — Siklayu PP	Bus 12/16 seat	8	0
	"Weleri — Kalikuto — Gringsing — Pancuran — Plelen — Sentul — Surodadi— Timbang —	Bus 12/16 seat	27	6
	Sembung — Banyuputih — Limpung PP"	Bus 12/16 seat	3	0
	Sukorejo — Plantungan — Sangubanyu — Wirosari — Bawang PP	Bus 12/16 seat	5	1
	Sukorejo — Plantungan — Sangubanyu — Wirosari — Bawang — Limpung PP	Bus 12/16 seat	8	0

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
	"Bawang — Sangubanyu — Sumurbanger — Plosowangi — Pujut — Tersono — Pujut—	Bus 12/16 seat	6	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2025

3) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten diantaranya melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum. Pemasangan rambu-rambu dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 20 persen pada tahun 2019 hingga menjadi 28,01 persen pada tahun 2023. Namun demikian, kedepan masih perlu ditingkatkan, karena meskipun terus meningkat namun capaian tersebut masih di bawah 50%, terlebih hal ini berkaitan dengan keselamatan jalan.



Gambar 2. 87 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Batang
Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2024

Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Batang membutuhkan 95.000 titik dimana hingga tahun 2024 telah terpasang pada 46.977 titik atau sekitar 49,45% dari jumlah kebutuhan LPJU yang dibutuhkan dengan 42.353 titik dalam kondisi baik dan 1.750 titik dalam kondisi rusak. Kekurangan pemasangan LPJU pada 50.897 titik baik di jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, maupun pada lingkungan desa. Sebagaimana kondisi fasilitas LPJU tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 38
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang di Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang (titik)	40.593	41.693	42.193	44.103	46.977
2.	Tambahan LPJU Terpasang	500	1.100	500	1.910	2.874
3.	Prosentase fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang	42,7	43,9	44,4	46,4	49,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2025

Meskipun jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, namun jumlah tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing ruas jalan.

Tabel 2. 39
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Berdasar Ruas Jalan di Kabupaten Batang

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kebutuhan PJU (Titik)	Ada Terpasang	Selisih Kurang	%
1.	JALAN NASIONAL	52.839	2.042	769	1.273	62,34%
2.	JALAN PROVINSI	87.555	1.751	564	1.187	34,13%
3.	JALAN KABUPATEN	521.181	10.423	1.974	8.449	81,06%

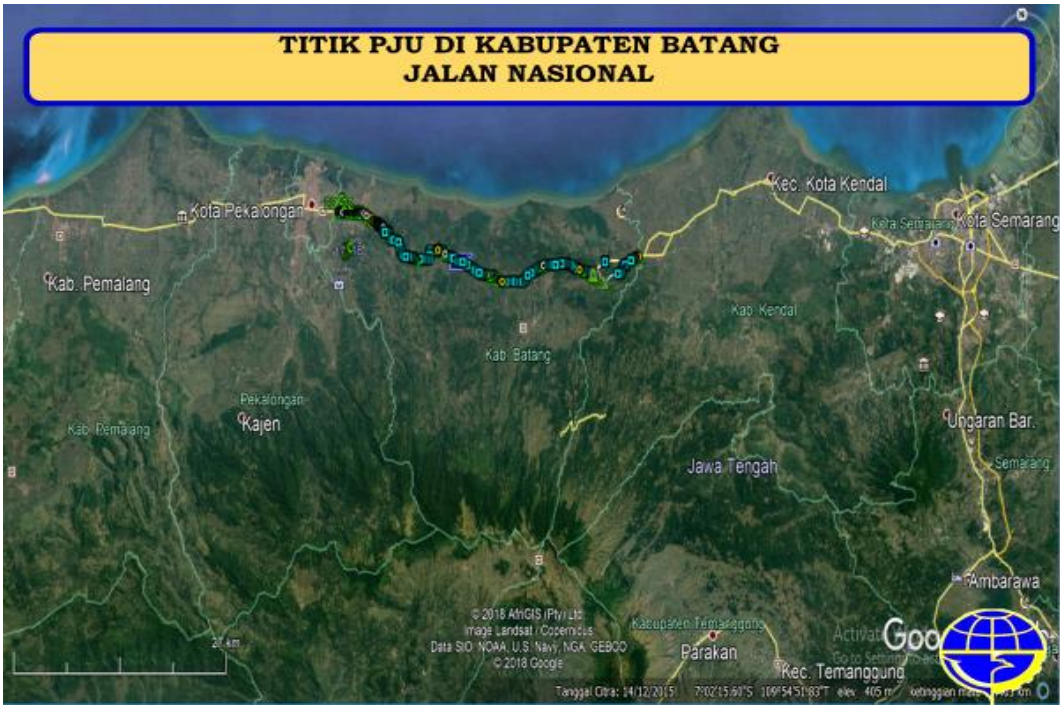
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2024



Gambar 2. 88 Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang di Kabupaten Batang
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020



Gambar 2. 89 Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Provinsi
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020



Gambar 2. 90 Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Nasional
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batang melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik, ditempuh melalui upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, membangun sarana komunikasi dua arah melalui *website* serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi terus meningkat dalam periode tahun 2020-2024, yaitu sebanyak 120 pada tahun 2020, meningkat menjadi sebanyak 130 jaringan hingga tahun 2024. Persentase perangkat daerah yang memiliki website aktif juga meningkat hingga tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan terus dilakukan terhadap 41 kelompok pada masing-masing kecamatan pada tahun 2020, dan ada peningkatan jumlah signifikan hingga tahun 2024 menjadi 78 kelompok. Kondisi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Batang juga semakin baik, dapat dilihat dari Indeks SPBE yang terus meningkat dari 3,29 pada tahun 2020 menjadi 3,55 pada tahun 2024.

Tabel 2. 40
Indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

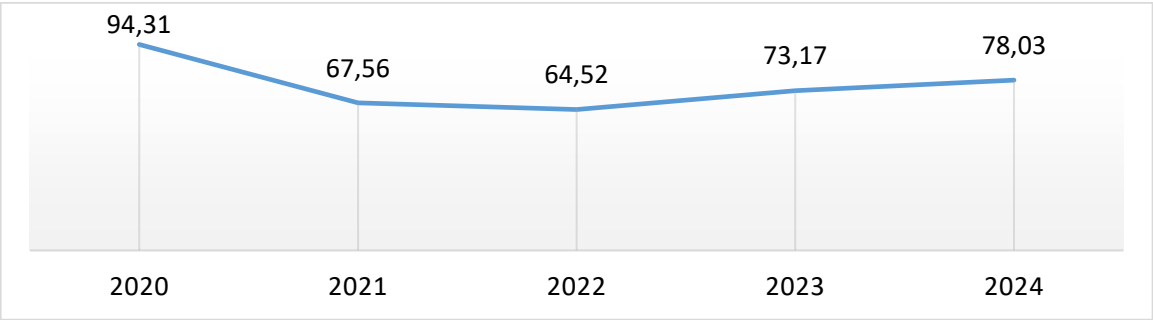
No	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8	
1	Jumlah jaringan komunikasi	titik	120	130	130	130	130
2	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	41	78	78	78	78
4	Indeks SPBE	skor	3,29	3,6	3,24	3,24	3,55

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2025

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari capaian indikator koperasi aktif, koperasi sehat serta pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Jasa sebanyak 13 unit, Koperasi Konsumen sebanyak 97 unit, Koperasi Pemasaran sebanyak 8 unit, Koperasi Produsen sebanyak 34 unit dan Koperasi

Simpan Pinjam sebanyak 52 unit sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 15 unit dengan total koperasi aktif hingga tahun 2024 sebanyak 78,03% dari keseluruhan koperasi di Kabupaten Batang.

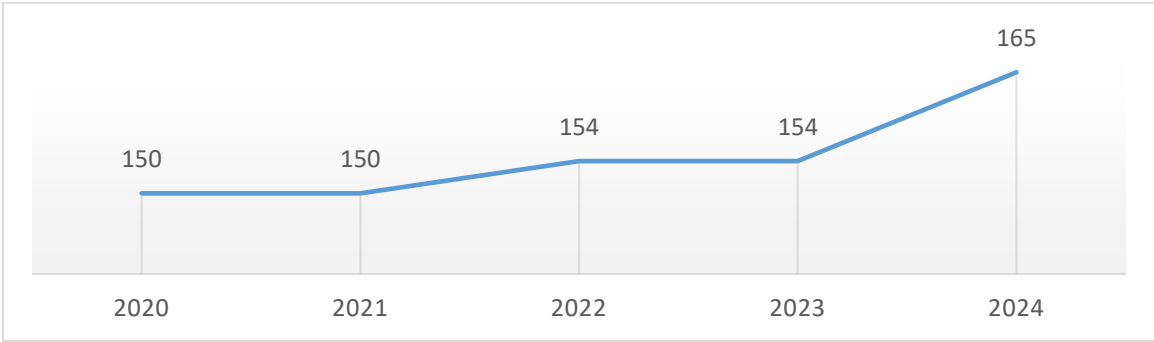


Gambar 2. 91 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2025

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi bonus demografi di Kabupaten Batang adalah melalui perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru, diantaranya dengan menciptakan wirausaha baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu pada jumlah wirausaha baru di Kabupaten Batang dalam periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, sebanyak 150 wirausaha baru pada tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 165 wirausaha baru di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dalam fasilitasi permodalan, kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dalam rangka pemberian izin Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di desa-desa secara online melalui Dana Desa. Namun pada tahun 2019 dan 2020 jumlah wirausaha baru mengalami penurunan menjadi sebesar 150 wirausaha baru yang disebabkan karena menurunnya minat masyarakat serta daya beli masyarakat yang menurun sehingga beberapa wirausaha baru tidak dapat bertahan. Sebagaimana perkembangan jumlah wirausaha baru di Kabupaten Batang selama tahun 2020-2024 tersaji dalam grafik berikut ini :



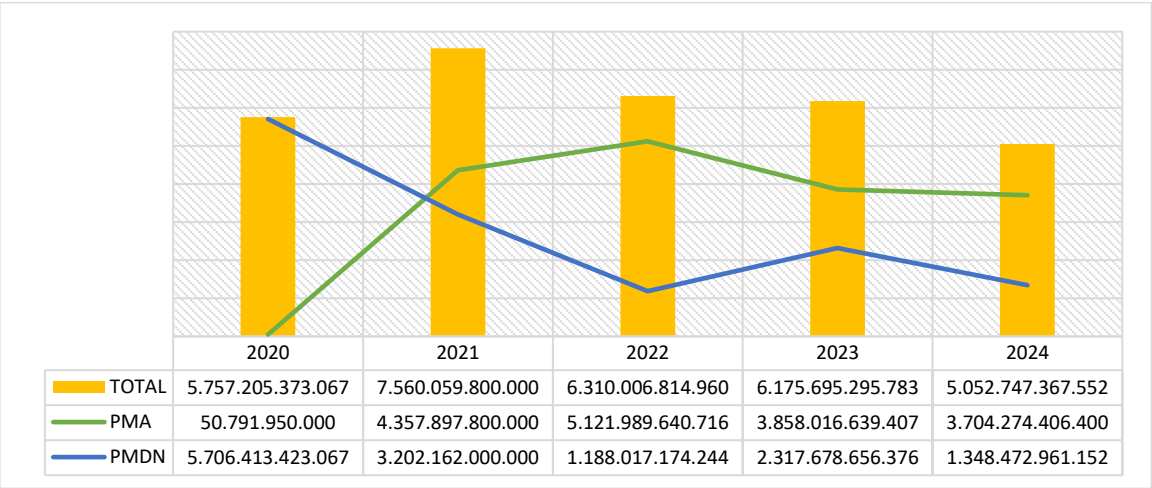
Gambar 2. 92 Jumlah Wirausaha baru Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2025

12. Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Batang, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang serta jumlah penyerapan tenaga kerja.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Batang dalam periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Dimana total investasi yang masuk di Kabupaten Batang tahun 2020 sebanyak 5.757,20 M dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 7.560,0 M kemudian menurun menjadi 6.310 M di tahun 2022 dan meningkat menjadi 6.175 M pada tahun 2023, dan menurun menjadii 5.052 M pada tahun 2024.



Gambar 2. 93 Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

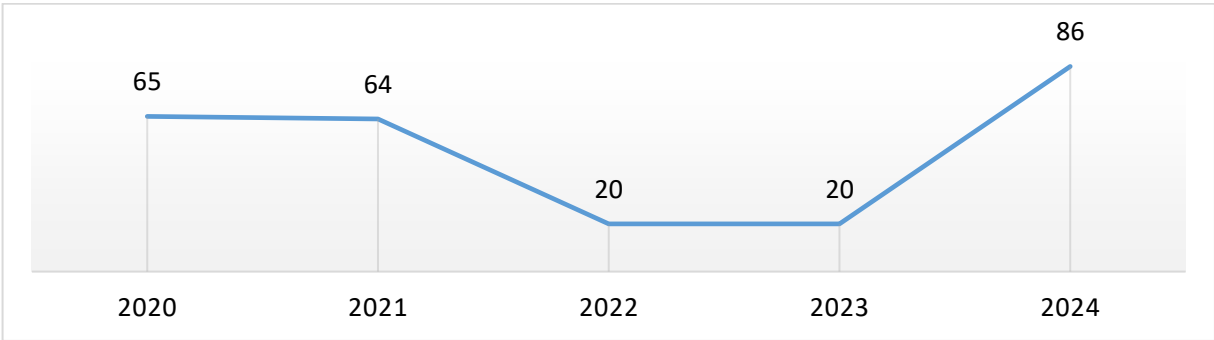
Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Batang Tahun 2025

Realisasi investasi di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024 dengan capaian investasi tertinggi terjadi pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan menjadi Rp. 3.202.162.000.000 dengan investasi terbesar berada di Kecamatan Warungasem dengan nilai investasi Rp. 1.844.954.700.000. Menurut sektor dan sub sektor, realisasi investasi terbesar berada pada sektor tersier dengan sub sektor transportasi, gudang, dan komunikasi dengan realisasi investasi

mencapai Rp. 1.836. 083.700.000. Sedangkan untuk penanaman modal asing mencapai Rp. 4.357.897.800.000 dengan nilai investasi terbesar berada di Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi mencapai Rp. 3.553.757.560.000. Jika dirinci menurut sektor dan sub sektor, sektor tersier dengan sub sektor listrik, gas, dan air menjadi sub sektor dengan penanaman modal asing terbesar di Kabupaten Batang pada tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.236.043.930.000.

Kondisi investasi pada tahun 2024 sebanyak 5.052 M dengan 1.348 M merupakan PMDN dan 3.704 M merupakan PMA yang diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.473 pekerja dengan 23.432 TKI dan 41 TKA.

Sementara itu, dari total investasi yang ada di Kabupaten Batang baik PMA maupun PMDN, jumlah perusahaan yang masuk sebanyak 86 perusahaan di tahun 2024 dengan total 6.404 proyek di Kabupaten Batang. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :

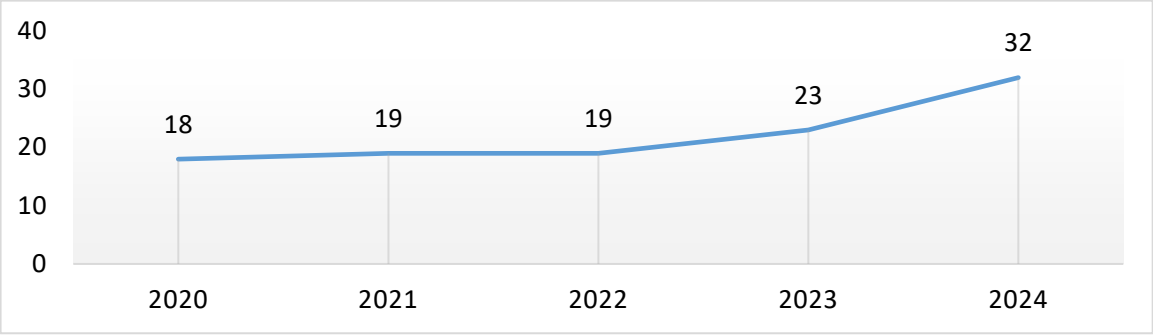


Gambar 2. 94 Jumlah Perusahaan Baru yang Berinvestasi di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025

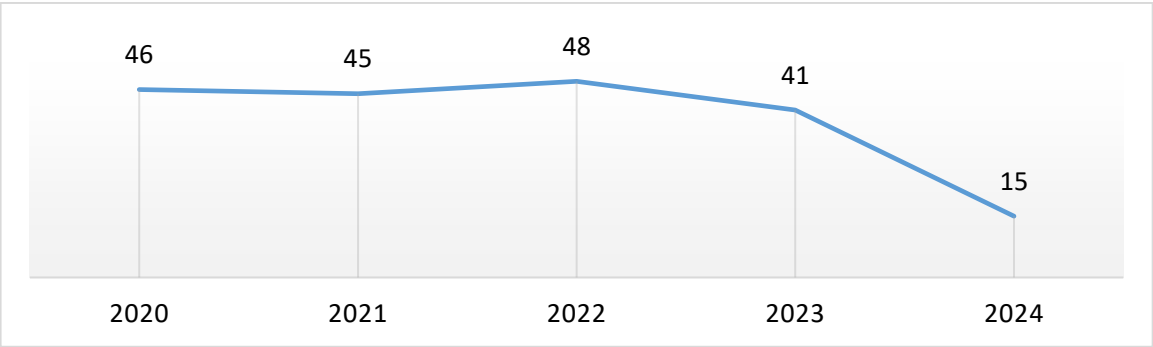
13. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja bidang kepemudaan pada 2020-2024 dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan persentase pemuda berwirausaha di Kabupaten Batang. Peran aktif kepemudaan sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Melalui peran serta pemuda dalam kewirausahaan diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru untuk menjawab tantangan bonus demografi di Kabupaten Batang.



Gambar 2. 95 Organisasi pemuda yang dibina di Kabupaten Batang
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2025

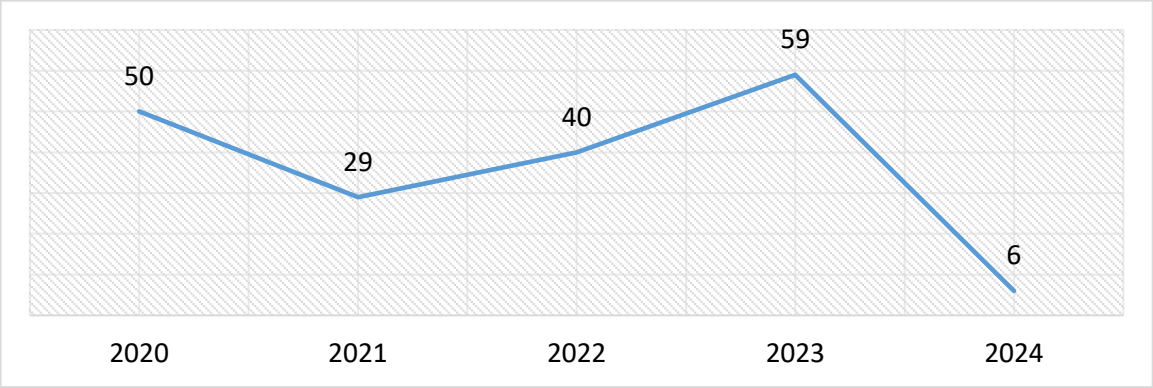
Berdasarkan data diatas, persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi di Kabupaten Batang meningkat dari tahun 2020-2024, yaitu sebanyak 18 organisasi kepemudaan pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 32 organisasi pemuda yang dibina pada tahun 2024.



Gambar 2. 96 Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Kabupaten Batang
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2023

Sedangkan kinerja bidang olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi olahraga yang dibina serta jumlah kejuaraan dalam bidang olahraga yang diraih di tingkat provinsi. Jumlah organisasi olahraga yang dibina berfluktuasi naik dari tahun 2020-2024, yaitu sebanyak 46 organisasi pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 15 organisasi pada tahun 2024.

Jumlah kejuaraan yang diikuti juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, dari 50 kejuaraan tahun 2020 menurun menjadi 29 pada tahun 2021 yang diakibatkan adanya pandemi Covid19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan di masyarakat. Namun perlahan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 40 kejuaraan yang diikuti dan hingga akhir tahun 2023 mengikuti 59 kejuaraan oleh altet Kabupaten Batang. Namun pada tahun 2024, kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti hanya 6 kejuaraan.



Gambar 2. 97 Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2025

Tabel 2. 41
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Atlet Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Medali	Jumlah
1	Emas	23
2	Perak	18
3	Perunggu	30
4	Total Medali	71

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2025

Pada tahun 2024 atlet Kabupaten Batang memperoleh total 71 medali dari berbagai cabang olahraga yang diikuti baik pada level provinsi dan Nasional dengan medali terbanyak dari kejuaraan PORPROV Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) terus mendorong prestasi olahraga sebagaimana disosialisasikannya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Upaya yang dilakukan untuk mendorong prestasi olahraga antara lain dengan tersedianya prasarana dan sarana olah raga di Kabupaten Batang seperti gelanggang atau balai remaja, lapangan olahraga, dan kolam renang. Sebagaimana berikut tersaji jumlah gelanggang dan lapangan olahraga di Kabupaten Batang pada tahun 2024 :

Tabel 2. 42
Jumlah Gelanggang dan Lapangan Olahraga Kabupaten Batang hingga Tahun 2024

No	Kecamatan	Gelanggang Olahraga	Lapangan Olahraga	Lap. Sepakbola	Lap. Basket	Lap. Volley	Lap. Bulu Tangkis	Kolam Renang	Jumlah
1	WONOTUNGGA L	0	-	9	-	2	1	-	12

No	Kecamatan	Gelanggang Olahraga	Lapangan Olahraga	Lap. Sepakbola	Lap. Basket	Lap. Volley	Lap. Bulu Tangkis	Kolam Renang	Jumlah
2	BANDAR	1	18	18	4	14	11	5	71
3	BLADO	-	9	11	-	15	7	2	44
4	REBAN	-	15	12	-	19	30	1	77
5	BAWANG	3	25	20	3	10	3	1	65
6	TERSONO	-	27	20	5	30	21	-	103
7	GRINGSING	1	15	15	5	15	7	2	60
8	LIMPUNG	1	-	12	1	34	34	6	88
9	SUBAH	2	-	13	3	27	24	-	69
10	TULIS	1	15	10	-	8	5	-	39
11	BATANG	7	7	1	8	18	12	4	57
12	WARUNGASEM	-	-	8	2	20	16	-	46
13	KANDEMAN		12	12	5	32	5	-	66
14	PECALUNGAN	-	-	5	1	20	15	-	41
15	BANYUPUTIH	-	11	11	-	12	8	2	44
	Kabupaten	13	154	175	37	274	199	18	882

Sumber : Disparpora Kab. Batang, 2025

Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang secara rutin menggelar *multi event* kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang diselenggarakan setiap tahun. Pengembangan wisata olahraga juga terus dilakukan, antara lain olahraga paralayang yang berlokasi di Desa Pagilaran Kecamatan Blado dan *mountain bike* yang berlokasi di Desa Kembanglangit Kecamatan Blado. Cabang olahraga andalan Kabupaten Batang adalah panjat tebing, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh dari cabang olahraga ini adalah mencetak rekor dunia kecepatan di kejuaraan dunia *World Cup International Sport Climbing (IFSC) di Salt Lake, Amerika Serikat, Kejuaraan IFSC di Chamonix, Perancis, Kejuaraan IFSC di Seoul Korea Selatan*, serta Kejuaraan *World Game di Birmingham* yang diraih oleh atlet panjat tebing Kiromal Katibin. Program peningkatan Kapasitas daya saing olahraga menjadi program utama peningkatan prestasi olahraga daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui organisasi kepemudaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) secara aktif melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Batang. Dalam hal jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan tercatat sebanyak 48 pelatih dengan 9 pelatih sertifikasi nasional yang terdiri dari cabang olahraga Tenis Meja, Taekwondo, Atletik, Dayung, Renang, Bulutangkis, Senam, Sepakbola, Pencak Silat, Karate, Panjat Tebing, Bridge, Anggar, Kempo, Sepatu Roda, Bola Basket, Tinju, dan Balap Sepeda.

14. Statistik

Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan *relevan* diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Hal ini sudah menjadi amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274 dimana, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi (*data based planning*) yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Pada tahun 2020-2024 capaian ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan sebanyak 100 persen. Capaian ini didukung adanya Satu Data Indonesia yang menjadi kebijakan tata kelola data pemerintahan yang bertujuan untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kemudahan akses dan dibagipakaikan antar instansi. Sebagaimana capaian indikator urusan statistik tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 43

Indikator kinerja urusan Statistik Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2025

15. Persandian

Tugas persandian daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Selama periode 2020-2024 sistem elektronik telah mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian dengan menggunakan fasilitas *Virtual Private Network* (VPN) untuk akses server perencanaan dan penganggaran/penatausahaan keuangan.

Tabel 2. 44

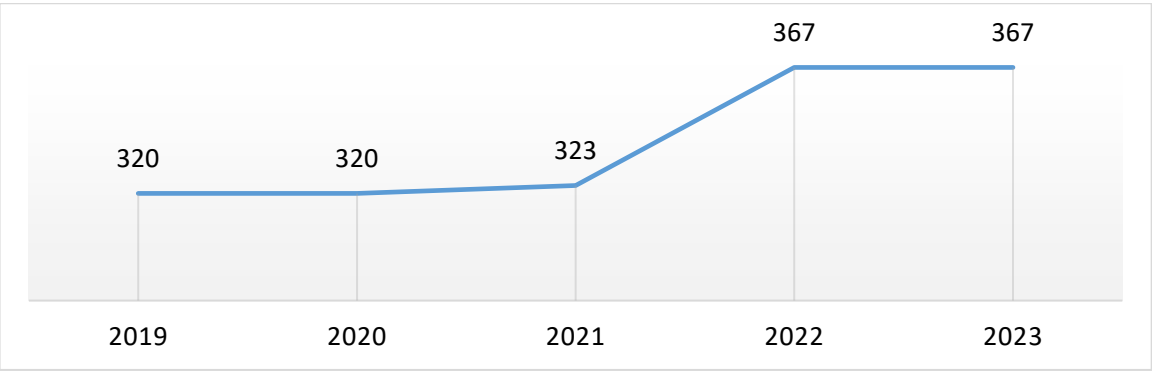
Indikator kinerja urusan Persandian Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2025

16. **Kebudayaan**

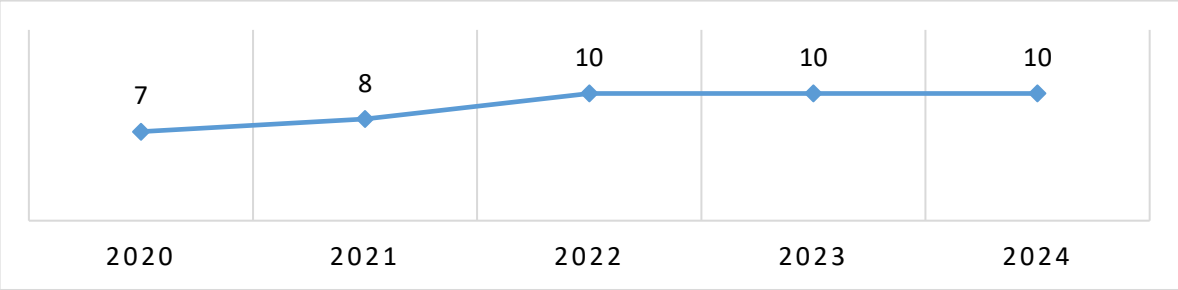
Kondisi layanan urusan Kebudayaan di Kabupaten Batang antara lain dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Batang. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2019 hingga 2020 jumlah situs dan cagar budaya sebanyak 320 situs kemudian meningkat menjadi 323 situs di tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 367 situs di tahun 2023 dimana seluruh situs benda dan kawasan cagar budaya dilestarikan langsung dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.



Gambar 2. 98 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2019-2023

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

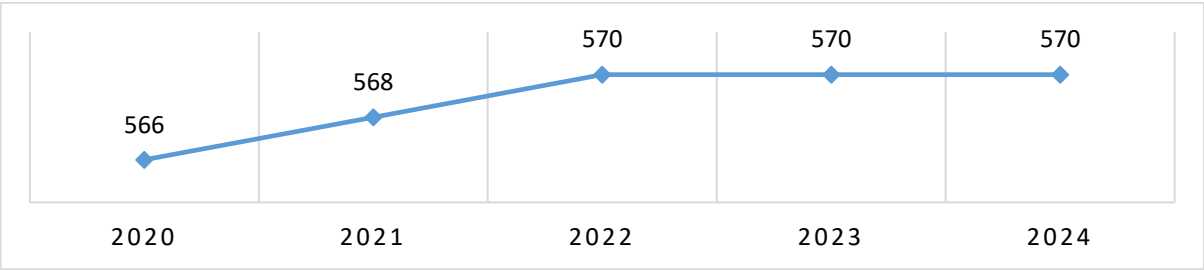
Selain pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, pembangunan budaya juga direalisasikan melalui penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya di kabupaten Batang pada periode tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya sebanyak 7 kali dalam setahun akibat adanya pandemi Covid 19 dan terus meningkat menjadi 10 kali dalam setahun selama 2022-2024.



Gambar 2. 99 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2020-2024

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2025

Pembangunan budaya juga direalisasikan melalui pembinaan grup-grup kesenian di Kabupaten Batang. Sebagaimana jumlah grup kesenian yang dibina selama tahun 2020-2024 tersaji dalam grafik berikut ini :



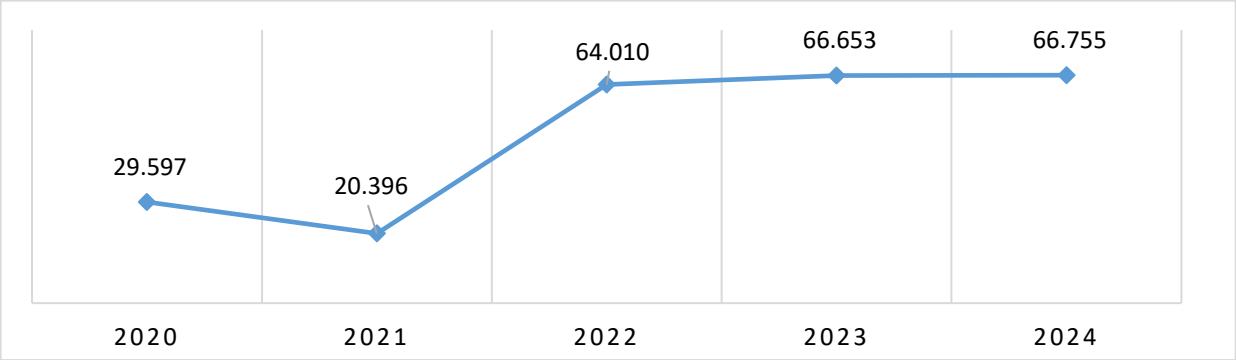
Gambar 2. 100 Jumlah grup kesenian yang dibina (grup) Tahun 2020-2024

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan perkembangan grup kesenian yang dibina dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai indikator tercatat sebesar 566, kemudian mengalami peningkatan menjadi 568 pada tahun 2021. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai 570 pada tahun 2022. Menariknya, setelah mencapai angka 570 di tahun 2022, nilai indikator tersebut stabil dan tidak mengalami perubahan selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2023 dan 2024. Kenaikan nilai dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya progres positif dalam indikator yang dimaksud. Namun, stagnasi pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan atau perkembangan telah mencapai titik jenuh atau membutuhkan strategi baru untuk mendorong peningkatan lebih lanjut.

17. Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung pada periode lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Batang 1 unit, dengan pengunjung terbanyak selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 66.755 pengunjung perpustakaan dengan rincian 15.020 pengunjung layanan perpustakaan umum, 49.870 pengunjung layanan perpustakaan keliling, 848 pengunjung layanan *car free day*, dan 1.017 pengunjung dari layanan perpustakaan digital. Dengan demikian, kedepan capain tersebut masih harus ditingkatkan lagi melalui penambahan dan pemeliharaan buku. Sebagaimana capaian jumlah pengunjung perpustakaan pertahun tersaji sebagai berikut :



Gambar 2. 101 Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun
Sumber: Disperpuska Kabupaten Batang Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, capaian tahun 2024 untuk pengunjung perpustakaan sebanyak 66.755 orang dengan rata-rata harian pemustaka sebesar 267 orang/hari. Untuk meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM dalam bidang perpustakaan. Kualitas SDM dilihat dari jumlah pustakawan dan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Pada periode 2020-2024 jumlah pustakawan sebanyak 2 orang tahun 2020 meningkat menjadi 8 orang pada tahun 2024. Sedangkan jumlah tenaga teknis di tahun 2020 sebanyak 23 orang meningkat menjadi 1.289 orang pada tahun 2024. Peningkatan jumlah pustakawan dan tenaga teknis di perpustakaan Kabupaten Batang disebabkan karena telah dilakukan perhitungan ulang di tahun 2022 pada berbagai jenis perpustakaan dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA).

Tabel 2. 45
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	8	8
1	Pustakawan	Orang	2	2	6	8	8
2	Tenaga teknis	Orang	23	23	1123	1148	1289

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2025

Untuk mendorong indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca akan dilakukan melalui peningkatan layanan perpustakaan dan optimalisasi taman baca masyarakat.

18. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta

bahan untuk perencanaan, juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturnya, bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui pengelolaan arsip secara baku serta penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna.

Kinerja kearsipan dilihat dari indikator persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dimana di Kabupaten Batang hingga tahun 2023 masih sebanyak 16,73% dari total keseluruhan perangkat daerah dan meningkat menjadi 21% dengan perhitungan yang melibatkan kearsipan pada pemerintah Desa se-Kabupaten Batang.

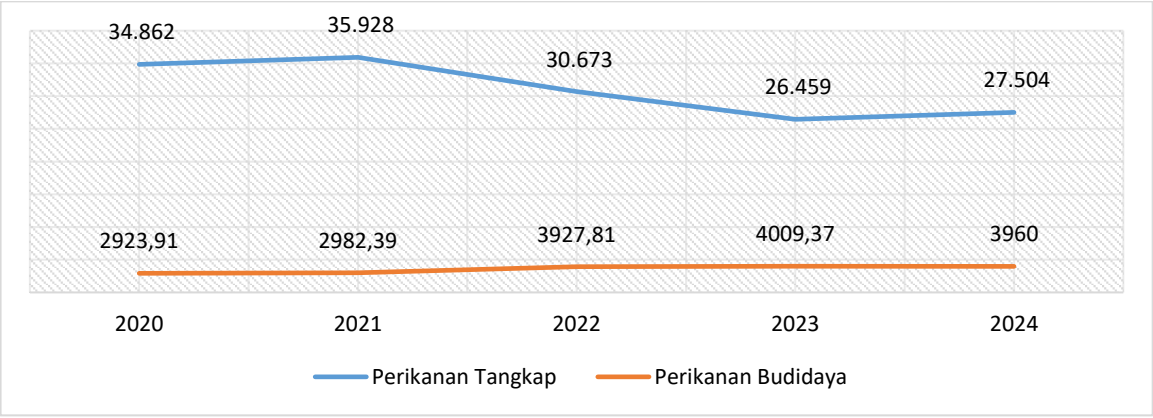
C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Batang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki Panjang garis pantai Kabupaten Batang 38,75 km dan lebar 4 mil yang ditunjang oleh iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada Bulan Oktober-April dan musim kemarau pada Bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau), dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air).

Jumlah produksi perikanan tangkap pada periode tahun 2020-2024 cenderung menurun, dari 34.862 ton pada tahun 2020 meningkat hingga 35.928 ton pada tahun 2021 yang didukung karena tidak adanya lagi peraturan yang melarang alat tangkap cantrang beroperasi di perairan laut Jawa serta meningkatnya jumlah kapal nelayan yang melakukan pelelangan ikan di TPI di wilayah Batang menyebabkan semakin meningkatnya produksi perikanan tangkap. Kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 30.673 ton dan menurun kembali menjadi 26.459 ton pada tahun 2023. Dan meningkat kembali menjadi 27.504 ton pada tahun 2024. Untuk produksi perikanan budidaya dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, dimana pada tahun 2020 sebesar 2923,91 ton. Hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas usaha budidaya sehingga mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya. Kemudian meningkat menjadi 4.009,37 ton pada tahun 2023 yang kemudian mengalami

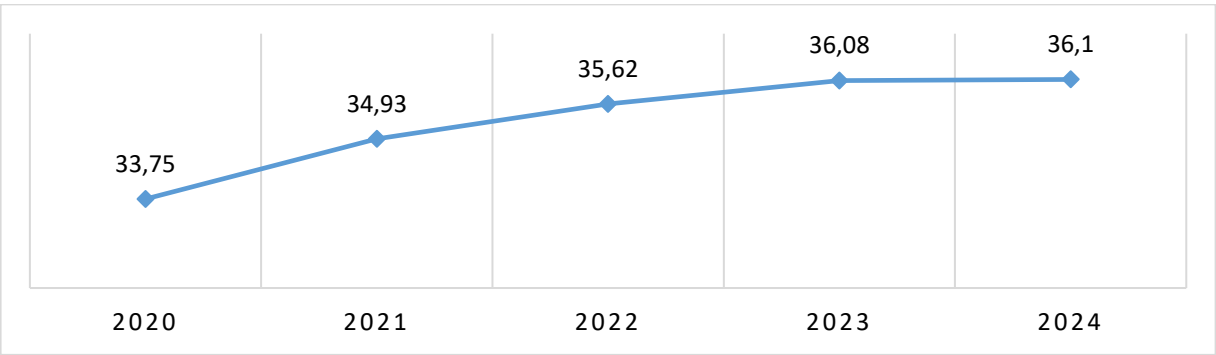
penurunan pada tahun 2024 menjadi 3960 ton. Sebagaimana capaian perikanan tangkap dan budidaya tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 102 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2025

Konsumsi ikan juga cenderung naik pada periode 2020-2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 33,75 kg/kapita/th menjadi 36,10 kg/kapita/th pada tahun 2024. Sebagaimana grafik capaian tingkat konsumsi ikan dalam 5 tahun terakhir tersaji sebagai berikut :



Gambar 2. 103 Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th) Kabupaten Batang

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2025

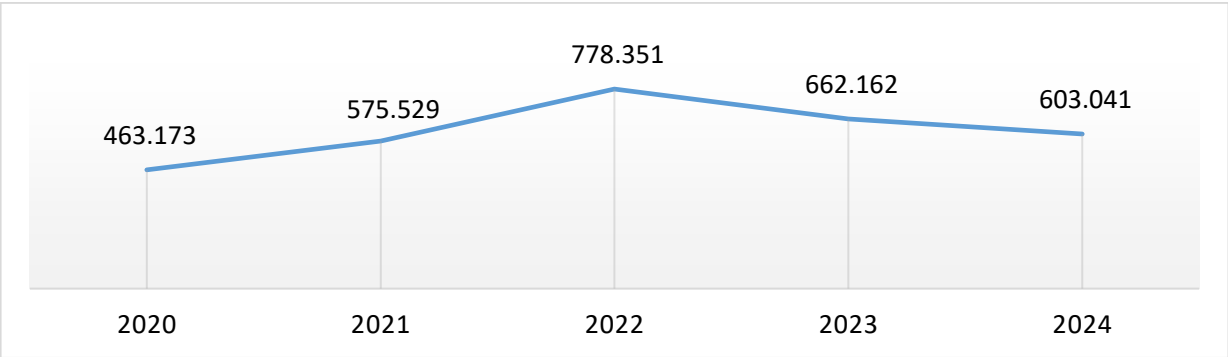
2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Batang mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Batang yang cukup besar baik wisata pantai, wisata pegunungan, wisata religi dan wisata budaya. Sektor Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa (Pokdarwis).

Beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Batang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, antara lain kolam renang Bandar, THR Kramat, pantai Ujungnegoro, pantai Sigandu, pantai Celong, pantai Jodo,

kebun teh Pagilaran, pemandian air panas Sangubanyu serta desa wisata Mentosari dan Pandansari.

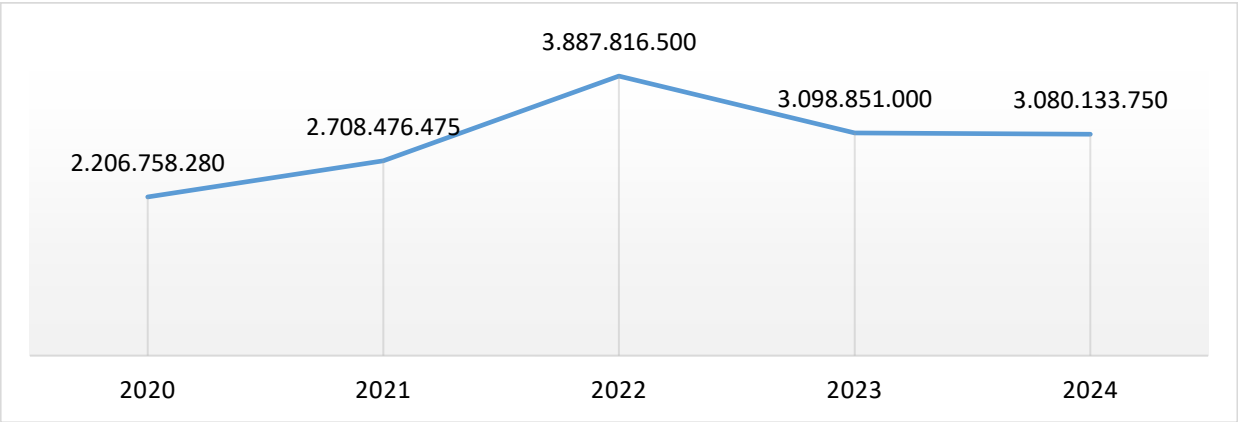
Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan pariwisata Batang diantaranya promosi melalui media sosial, televisi, dan media cetak; kalender event; mengikuti pameran pariwisata dan ekonomi kreatif serta kerjasama dengan stakeholder pariwisata (PHRI, BWI, ASPI), cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang sejak tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 463.173 orang. Penurunan terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga selama beberapa bulan destinasi wisata ditutup dan baru dibuka kembali pada awal Juli dengan penerapan protokol kesehatan. Hingga tahun 2022 dengan berangsur pulihnya kondisi akibat dampak Pandemi Covid-19 kunjungan wisata berangsur merangkak naik menjadi 778.351 orang dan menurun kembali di tahun 2024 menjadi 603.041 orang yang melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Batang. Sebagaimana jumlah kunjungan wisata Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 104 Kunjungan Wisata Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber: Disparpora Kabupaten Batang, 2025

Fluktuasi jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir selaras dengan kontribusi PAD terhadap sektor pariwisata dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 PAD sektor pariwisata sebesar Rp 2.206.758.280,- yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, dengan berangsur membaiknya kondisi akibat dampak Pandemi Covid-19 hingga tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.887816.500, diantara tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Pantai Sigandu masih menjadi favorit bagi masyarakat dalam berwisata. Kemudian menurun kembali menjadi Rp 3.098.851.000,- pada tahun 2023 dan kemudian menurun kembali menjadi Rp 3.080.133.750 pada tahun 2024 dengan sumbangan terbesar yaitu retribusi di Pantai Sigandu

sebanyak Rp 1.755.462.250. Kontribusi sektor pariwisata ini juga tak terlepas dari dukungan oleh upaya pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata, peningkatan akses jalan wisata serta fasilitas pendukungnya.

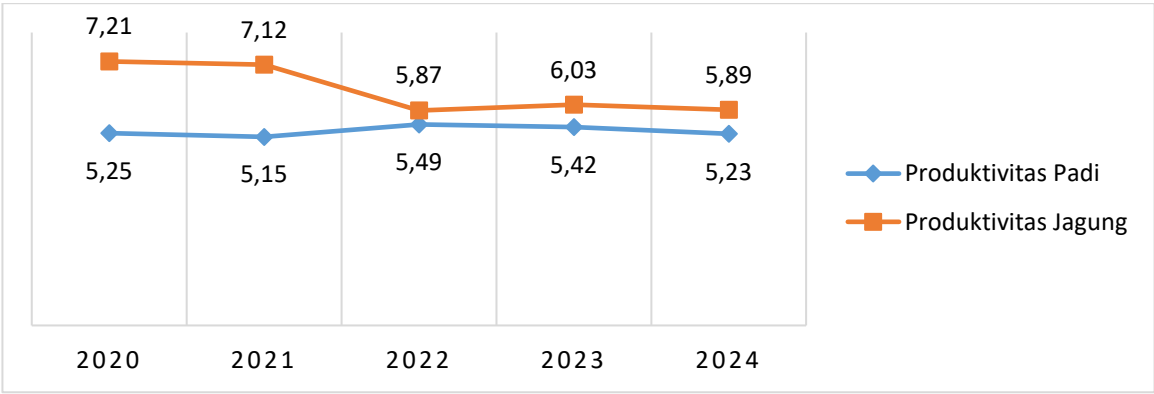


Gambar 2. 105 PAD sektor pariwisata Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang, 2025

3. Pertanian

Di sektor pertanian, konsep hilirisasi sebagai kebijakan pengembangan pertanian melalui konsep agro industri terus dikembangkan guna menopang ketahanan kebutuhan pangan daerah. Pada tanggal 30 Juni 2023, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki meresmikan lumbung pangan di Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing. Lumbung pangan diresmikan pada tiga lokasi yakni Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Tersono Kecamatan Tersono dan Desa Wonobodro Kecamatan Blado. Tujuan adanya lumbung pangan adalah untuk menopang ketahanan kebutuhan pangan di Kabupaten Batang. Luasan lahan padi di Desa Sidorejo sebesar 150 Hektar dari total di Kecamatan Gringsing yang mempunyai luas 1.275 Hektar.



Gambar 2. 106 Produktivitas Padi sawah dan Jagung (ton/ha) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2025

Produktivitas padi sawah per hektar dalam periode tahun 2020-2024 berfluktuasi meningkat, yaitu sebanyak 5,25 ton/ha pada tahun 2020

meningkat menjadi 5,42 ton/ha pada tahun 2023 namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,22 ton/ha. Sedangkan pada jagung, produktivitas jagung dari tahun 2020 sebesar 7,21 ton/ha terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 5,89 ton/ha. Penurunan produktivitas tak terlepas dari adanya Puso serta alih fungsi lahan, yang mengakibatkan penurunan kerusakan lahan kualitas lahan pertanian sehingga mengurangi produksi beras. Dalam hal ini berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi dan jagung terus dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, dilaksanakannya *Standard Operational Procedure Good Agricultural Practice* (SOP GAP), adanya bantuan alat mesin pertanian pra panen yaitu berupa Hand Sprayer, pompa air, cultivator, Hand Sprayer elektrik. Selain itu ada juga rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan besar untuk tanaman pangan, irigasi perpompaan untuk tanaman menengah, dan juga embung. Bantuan Pupuk dan benih maupun biopestisida juga tidak lupa ikut andil dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi maupun jagung dan juga banyaknya bantuan benih jagung dan padi dari pemerintah.

Tabel 2. 46
Data Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Batang
Tahun 2020-2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
TANAMAN PANGAN						
Padi	208.497	185.681	172.378	181.950	160.298	Ton
Jagung	79.950	77.047	81.143	77.163	89.659	Ton
Kedelai	33	57	119	-	0	Ton
Kacang Tanah	473	191	164	292	161	Ton
Ubi Kayu	27.310	22.639	15.517	27.440	12.444	Ton
Ubi Jalar	9.675	7.008	4.890	4.615	3.531	Ton
Kacang Hijau	6	31	36	-	0	Ton
HORTIKULTURA						
Bawang Merah	3.682	8.580	7834	2852	5372	Kw
Bawang Daun	58.145	23.874	35755	15705	23062	Kw

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
Cabai Besar	24.571	12.862	5.313	4626	3298	Kw
Kentang	357.470	79.175	3.718	155.744	213.902	Kw
Kubis	18.675	9.037	7.994	7.663	9.821	Kw
durian	28.038	29.378	32.557	39.792	27.961	Kw/qui
Mangga	69.593	55.477	37.579	28.766	24.457	Kw
nangka	150.318	68.184	70.795	44.574	58.103	Kw
Pisang	208.305	161.944	239.026	137.659	175.398	Kw
PERKEBUNAN						
Teh	1.493.803	1.498.694	1.445.493	1.428.830	1.436.245	Kg
Kakao	264.128	194.980	183.129	179.424	187.625	Kg
Kopi	789.182	811.296	701.473	727.898	734.323	Kg
Kapuk	106.834	80.565	54.388	39.042	35.210	Kg
Cengkeh	761.822	294.788	338.687	336.161	372.157	Kg
Kelapa	581.497	10.119.906	990.206	989.313	996.892	Kg

Sumber : Disaperta Kabupaten Batang 2025

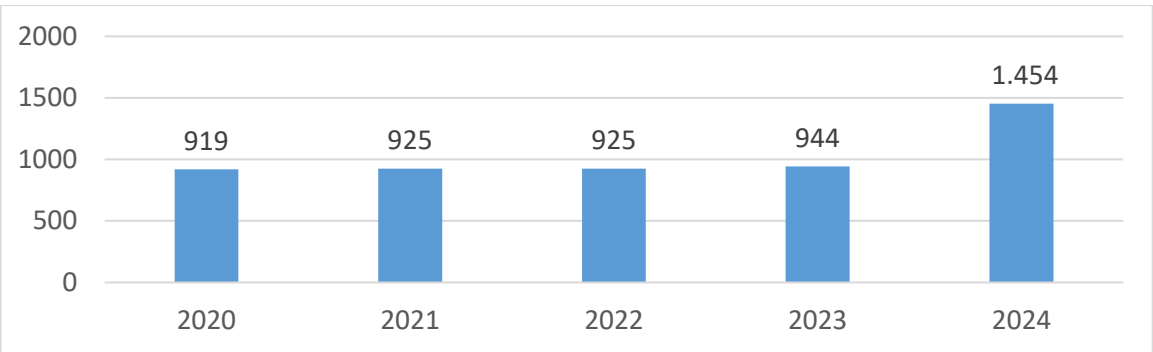
Dari tabel diatas terlihat bahwa produksi tanaman pangan terbagi menjadi 3 jenis tanaman utama yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jenis tanaman pangan masih didominasi oleh komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Pada jenis tanaman hortikultura, meskipun mengalami penurunan, pisang masih menjadi komoditas dengan produksi tertinggi. Sementara pada jenis tanaman perkebunan, produksi tertinggi masih didominasi oleh 3 komoditas utama yaitu teh, kelapa, dan kopi. Capaian panen komoditas tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan dari grafik diatas cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024, hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya luas lahan dan luas panen dari masing masing komoditas.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kemandirian petani, pembentukan kelompok tani binaan sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan taraf hidup mereka. Kenaikan jumlah kelompok tani binaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesamaan kepentingan, kondisi

lingkungan sosial dan ekonomi yang serupa, ketersediaan sumber daya, serta tingkat keakraban antarpetani dalam mengembangkan usaha bersama.

Kelompok tani binaan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian petani, mendorong penerapan inovasi, serta membantu dalam menganalisis usaha tani, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan taraf hidup petani.

Jumlah kelompok tani binaan di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 887 kelompok, meningkat menjadi 924 kelompok pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 jumlahnya menurun menjadi 918 kelompok. Penurunan ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman petani mengenai pentingnya peran kelompok tani, sehingga belum semua petani tergabung dalam kelompok. Meski demikian, jumlah kelompok tani binaan kembali meningkat dan mencapai 1.454 kelompok pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kelompok tani binaan di Kabupaten Batang dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2. 107 Jumlah Kelompok Tani Binaan Kabupaten Batang
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2023

Selain itu di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Komoditas Pertanian yaitu 1) Koperasi Pemasaran Tani Maju Jaya Batang (komoditas Edamame, Bawang Merah, Bawang Putih, Jahe Emprit, Jeruk Lemon), 2) Koperasi Pemasaran Pusaka Tani Sejahtera (komoditas Jagung, Kedelai, Padi, Ubi Jalar), dan 3) Koperasi Pemasaran Kebun Berkah Makmur (komoditas Kakao, Nilam, Sereh Wangi).

Sementara itu, di sektor peternakan, produksi hasil peternakan khususnya daging dan telur cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 47 Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

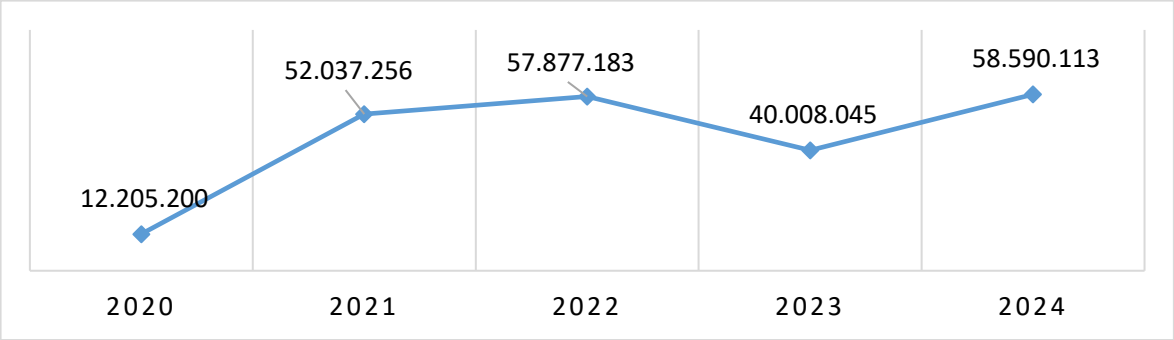
NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produksi Hasil Ternak						
1	- Daging	kg	12.807.003	12.893.125	17.099.906	9.050.000	17.758.967
2	- Telur	kg	14.585.205	14.585.205	14.089.530	10.536.445	19.407.369
3	- Susu	Lt	120.412	122.845	129.467	83.672	218.708

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang Tahun 2024

Produksi hasil ternak di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Produksi daging sempat turun pada 2023 namun meningkat tajam di 2024 menjadi 17.758.967 kg. Produksi telur relatif stabil hingga 2022, menurun di 2023, lalu melonjak pada 2024 mencapai 19.407.369 kg. Sementara itu, produksi susu terus meningkat dengan puncaknya pada 2024 sebesar 218.708 liter.

4. Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, tahun 2020 ekspor bersih Kabupaten Batang mencapai US\$ 12.205.200 di tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2022 nilai ekspor bersih Kabupaten Batang kembali mengalami kenaikan menjadi US\$ 57.877.183 menurun kembali menjadi US\$ 40.008.045 pada tahun 2023 dan kemudian meningkat menjadi US\$ 58.590.113 . Hal ini disebabkan didukung dengan tumbuhnya pelaku usaha yang melakukan ekspor walaupun masih terkendala dengan belum adanya pengepul ekspor dan tarif ekspor yang cenderung mahal. Sebagaimana capaian ekspor bersih perdagangan Kabupaten Batang tersaji dalam grafik berikut ini :

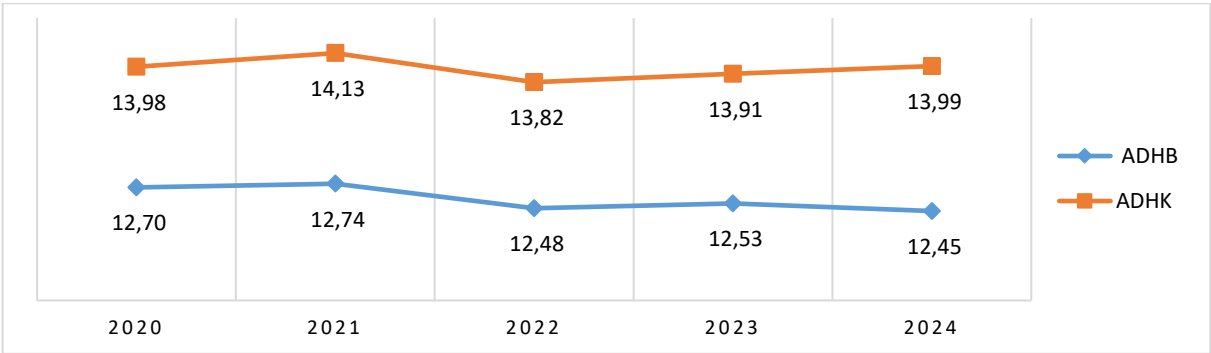


Gambar 2. 108 Ekspor Bersih Perdagangan (US \$) Kabupaten Batang

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kab Batang, 2025

Selain itu, urusan perdagangan juga digambarkan melalui indikator kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB baik ADHB maupun ADHK fluktuatif dalam periode 2020-2024. Secara umum, kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) cenderung stabil, dengan nilai tertinggi sebesar 14,13% pada tahun 2021 dan terendah 13,82% pada tahun 2022, kemudian kembali naik menjadi 13,99% pada tahun 2024. Sementara itu, kontribusi berdasarkan harga konstan (ADHK) mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2020, kontribusi sebesar 12,70%, dan menurun secara bertahap hingga mencapai 12,45% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perdagangan masih memberikan kontribusi yang cukup stabil terhadap PDRB secara nominal, namun secara riil pertumbuhannya cenderung melamba. Sebagaimana capaian tersebut tersaji pada grafik berikut ini :

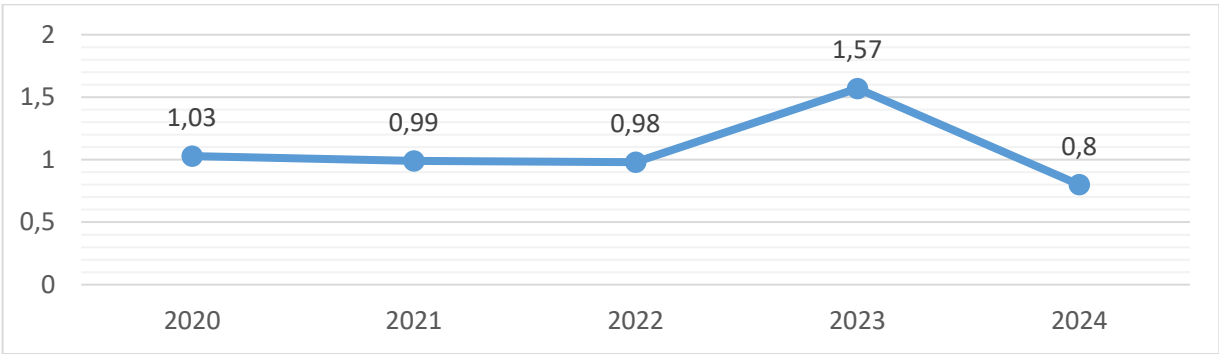


Gambar 2. 109 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2025

5. Perindustrian

Berikut capaian urusan perindustrian di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir :



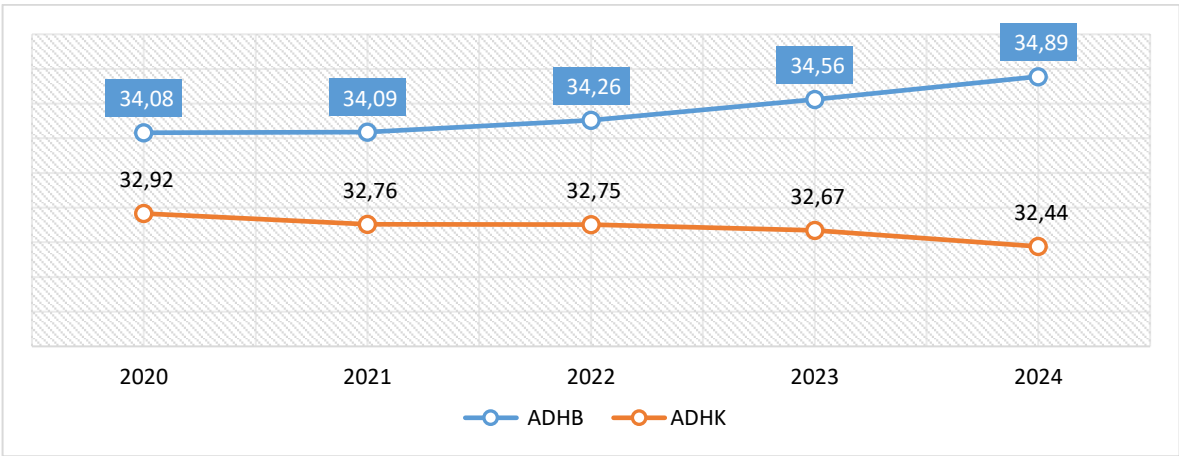
Gambar 2. 110 Pertumbuhan Industri Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2023

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kabupaten Batang pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Urusan Perindustrian. Pertumbuhan industri di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir, pada tahun 2020 sebesar 1,03 persen menjadi 0,9 persen pada tahun 2022 dan meningkat

menjadi 1,53 persen pada tahun 2023 dan kemudian menurun menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Capaian ini didukung adanya kemudahan perizinan industri di Kabupaten Batang.

Sementara itu, indikator lain yang menggambarkan urusan perindustrian yaitu Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB dan ADHK, sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini :



Gambar 2. 111 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB dan ADHK pda tahun 2020-2024

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2024

Dari sisi ADHB, kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 34,08%, kemudian naik tipis menjadi 34,09% di tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut menjadi 34,26% pada tahun 2022, kemudian 34,56% pada 2023, dan mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar 34,89%. Peningkatan ini mencerminkan nilai tambah sektor industri pengolahan yang terus tumbuh secara nominal.

Sebaliknya, berdasarkan ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan riil (menghilangkan pengaruh inflasi), kontribusi sektor ini justru menunjukkan tren penurunan. Dari 32,92% pada tahun 2020, turun menjadi 32,76% di 2021, dan sedikit menurun lagi menjadi 32,75% pada 2022. Penurunan berlanjut di tahun 2023 dengan 32,67%, dan mencapai titik terendah di tahun 2024 yaitu 32,44%.

Perbedaan tren antara ADHB dan ADHK menunjukkan bahwa meskipun secara nominal sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan, secara riil pertumbuhannya melambat atau bahkan menurun. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan nilai kontribusi sektor ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi), bukan peningkatan volume produksi atau produktivitas. Fenomena ini penting untuk dicermati oleh pemerintah daerah agar strategi pengembangan industri pengolahan tidak hanya fokus

pada pertumbuhan nilai tetapi juga pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, sehingga pertumbuhan sektor ini bisa berkontribusi lebih besar secara riil terhadap perekonomian daerah.

6. Transmigrasi

Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan". Tujuan resmi program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain luar pulau Jawa. Perkembangan pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Batang ke daerah transmigran selama tahun 2020-2024 fluktuatif, hingga tahun 2024vhanya ada 1 KK yang berhasil ditempatkan pada daerah transmigrasi dikarenakan kuota dari Kementerian melalui Disnakertrans Prov Jateng, Kuota Pemberangkatan, Peserta Transmigrasi baru diberangkatkan di Bulan Desember Tahun 2024 sejumlah 1 KK serta rendahnya Minat warga untuk mengikuti transmigrasi. Sebagaimana Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi selama 5 tahun terakhir tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 48
Jumlah KK yang mengikuti Transmigrasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi	KK	0	0	0	1	1

Sumber: Disnaker Kabupaten Batang, 2025

c. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Evaluasi terhadap capaian perencanaan pembangunan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana target-target pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Sebagaimana berikut capaian unsur perencanaan selama tahun 2020-2024 :

Tabel 2. 49 Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Tahun 2020- 2024							
NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	90	90	100	100	100

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang, 2025

Kinerja fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2020-2024 relatif sangat baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD maupun ke dalam APBD terus mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir. Disamping itu juga peran serta masyarakat yang relatif tinggi dalam pelaksanaan musrenbang, dimana tingkat kehadirannya dalam periode lima tahun terakhir terus meningkat, dari sebesar 90 persen di tahun 2020 menjadi 100 persen di tahun 2024.

2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan yang berperan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kinerja urusan keuangan mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana capaian urusan keuangan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 50 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2020 - 2024							
NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan PAD	%	4,70	25,30	-6,77	-5,5	9,76
2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	00	0	0	0
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32,14	32,11	31,32	31,18	32,001
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	16,04	23,14	21,55	22,48	24,89

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025, LRA 2024 per tanggal 15 Januari 2025

Kinerja fungsi Penunjang Keuangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Fungsi Penunjang Keuangan dimana persentase peningkatan PAD selama rentang tahun 2020-2024

mengalami fluktuatif dari peningkatan sebesar 4,70 pada tahun 2020 menjadi minus 5,5 ditahun 2023. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* selain itu adanya pelimpahan kewenangan pajak daerah yang dilimpahkan ke Provinsi, objek pajak yang berkurang, serta terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang merupakan salah satu pendapatan terbesar baru dicetak bulan April yang mana pada tahun - tahun sebelumnya dicetak pada bulan Januari, sehingga pendistribusian ke Wajib Pajak agak terlambat. Namun pada tahun 2024 peningkatan PAD sebesar 9,76%. Sedangkan persentase belanja pendidikan telah melebihi *mandatory* yang ditetapkan atau sebesar 20%. Namun hingga tahun 2024 persentase belanja pendidikan di kabupaten Batang telah mencapai 32%. Sementara untuk persentase belanja kesehatan telah mencapai 24,89% dengan *mandatory spending* yang ditetapkan sebesar 10%.

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki peran penting ialah sumber daya aparturnya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan komitmen dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan. dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 2. 51
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019- 2023

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2018-2022				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	85	90	55	162,50	90,10

Sumber: BKD Kabupaten Batang, 2023

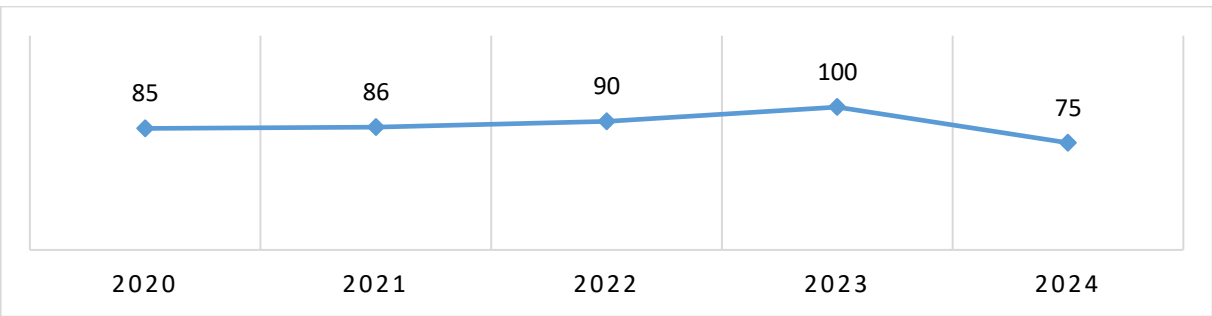
Berdasarkan tabel diatas, kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dimana capaian tahun 2023 mencapai 90,10 persen dari target tahunan yang mengikuti diklat formal. Sementara itu, pada tahun 2023, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 17% dari seluruh

pejabat structural di Kabupaten Batang. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 15,60%.

4. Penelitian dan pengembangan

Pada pasal 209 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan penelitian dan pengembangan. Dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembinaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Badan Perencana dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Kinerja fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Dari tahun 2020, Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam pembangunan mencapai 85% yang kemudian meningkat hingga tahun 2023 menjadi 100% yang artinya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan telah maksimal, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 75%. Hal ini disebabkan dalam penelitian membutuhkan dana yang cukup besar terutama untuk pengembangan dan implementasi hasilnya. Capaian pemanfaatn hasil kelitbangan tersaji dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. 112 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2020-2024

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang Tahun 2025

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari

Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/*roadmap* sistem inovasi daerah.

Tabel 2. 52
Realisasi Capaian IID (Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2020	2.952	Sangat Inovatif
2021	46,84	Inovatif
2022	58,58	Inovatif
2023	43,76	Inovatif
2024	57,46	Inovatif

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2025

**Catatan: Kematangan inovasi diperoleh dari data dukung tiap inovasi daerah baik berupa regulasi, dokumentasi dan manfaat inovasi daerah*

Selama lima tahun terakhir, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Batang menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 2,952 dengan kategori "Sangat Inovatif". Nilai ini tampak tidak proporsional jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, kemungkinan karena adanya perubahan metode pengukuran atau sistem penilaian dari pemerintah pusat.

Mulai tahun 2021, nilai indeks meningkat signifikan menjadi 46,84 dan dikategorikan sebagai "Inovatif". Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022, mencapai nilai tertinggi selama periode lima tahun yaitu 58,58, tetap dalam kategori "Inovatif".

Namun, pada tahun 2023, nilai indeks menurun menjadi 43,76, meskipun masih berada dalam kategori yang sama. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan dengan nilai sebesar 57,46, mendekati capaian terbaik pada 2022. Secara umum, Kabupaten Batang konsisten berada dalam kategori "Inovatif" dari tahun 2021 hingga 2024. Penurunan sementara pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian untuk evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor penghambat inovasi di tahun tersebut. Kenaikan kembali di tahun 2024 merupakan sinyal positif bahwa langkah-langkah perbaikan dan penguatan kapasitas inovasi daerah mulai menunjukkan hasil.

Dengan mempertahankan dan meningkatkan ekosistem inovasi, Kabupaten Batang memiliki potensi besar untuk mencapai kembali kategori "Sangat Inovatif" di masa mendatang.

5. Pengawasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelesaian LHP sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 100 persen yang kemudian menurun menjadi 90 persen pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 mencapai 100 persen tindak lanjut temuan. Namun menurun pada tahun 2024 menjadi 85 persen yang disebabkan karena ketidaktepatan waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah dan Desa. Meningkatnya kinerja pengawasan juga ditunjukkan oleh predikat WTP atas laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir dengan semua temuan dari BPK-RI sudah ditindaklanjuti dengan baik. Sebagaimana capaian urusan pengawasan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 53
Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	100	91,69	90,00	100	85
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang, 2024

6. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) perumusan kebijakan teknis dan administratif oleh Perangkat Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; 3) pembinaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah; 5) pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Sekretariat Daerah yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 54
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP	%	66,14	66,3	67,27	68,06	68,95

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,96	85,14	85,27	86,64	86,91

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2025

7. Sekretariat Dewan

Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Batang selama kurun waktu dilihat dari Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Kinerja Unsur Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 55
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, 2025

2.1.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

1. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 56
Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2020-2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 th yg blm menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dlm Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Tabel diatas menyajikan capaian kinerja pelayanan dasar di bidang pendidikan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Fokus utama pelayanan ini meliputi tiga jenis pendidikan dasar, yaitu Pendidikan Dasar formal, Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah partisipasi warga negara pada rentang usia tertentu dalam mengikuti masing-masing jenis pendidikan tersebut.

Hasil capaian menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dalam ketiga jenis pendidikan tersebut berhasil dipertahankan pada angka 100% setiap tahunnya, menandakan upaya yang konsisten dalam memastikan akses

pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pendidikan dalam menjamin inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan sejak usia dini hingga tingkat pendidikan dasar dan kesetaraan

2. Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 57 Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	96,43	93,64	94,83	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	99,49	99,60	99,78	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	99,39	99,30	99,36	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan	72,58	80,01	92,51	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	31,92	47,79	98,81	98,97	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	58,94	62,04	81,34	83,46	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang	41,41	64,09	90,81	100	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali					
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41,04	34,76	55,59	65,80	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,26	94,70	100	99,57	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,03	82,11	90,61	99,20	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	45,32	38,88	93,39	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	78,68	103,58	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Tabel diatas menyajikan capaian persentase kinerja berbagai jenis pelayanan dasar kesehatan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pelayanan yang dipantau meliputi layanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, hingga pelayanan kesehatan pada berbagai kelompok usia seperti anak usia pendidikan dasar, usia produktif, dan usia lanjut. Selain itu, juga terdapat indikator pelayanan untuk penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, serta layanan bagi kelompok berisiko tinggi terhadap infeksi HIV.

Dari data capaian, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan di hampir seluruh jenis pelayanan kesehatan, dengan beberapa indikator telah mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan

keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sesuai standar yang berlaku. Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian awal yang bervariasi, komitmen yang kuat dan peningkatan berkelanjutan telah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerima layanan kesehatan yang optimal sesuai kebutuhan mereka.

3. Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 58
Capaian Spm Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
			%	%	%	%	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86,31	83,13	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,92	85,69	100	100	100
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100	0	0	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Tabel diatas menyajikan capaian persentase kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyediaan layanan dasar terkait kebutuhan pokok air minum dan penyediaan rumah layak huni bagi warga negara, khususnya yang terdampak oleh bencana dan relokasi program pemerintah daerah, selama periode 2020 hingga 2024.

Data menunjukkan bahwa penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan layanan pengolahan air limbah domestik berhasil mencapai target 100% mulai tahun 2022, menandakan tercapainya akses penuh bagi masyarakat terhadap layanan tersebut. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana juga konsisten mencapai 100% setiap tahun, mencerminkan komitmen kuat dalam pemulihan pascabencana.

Sementara itu, fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah mengalami fluktuasi capaian, dengan capaian 0 pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan upaya pemulihan dan perbaikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat

4. Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman dan ketertiban umum

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 59 Capaian SPM Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2020-2024

NO	JENIS LAYANAN SPM	Indikator	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2023
			%	%	%	%	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,99	100	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9,42	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target 100% pada SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah belum memadainya jumlah pos/unit damkar di Kabupaten Batang. Jumlah pos/unit damkar yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat Kabupaten Batang di bidang Damkar sebanyak 5 pos/unit, sedangkan saat ini baru tersedia 3 pos/unit yang berada di 1) Kantor Damkar Kabupaten Batang, 2) Kantor Kecamatan Bandar, dan 3) Kantor Kecamatan Limpung.

5. Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja SPM Bidang Sosial tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 60
Capaian SPM Urusan Sosial dari Tahun 2020-2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25,14	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	58,33	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	0	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	85	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Tabel diatas menyajikan capaian persentase kinerja pelayanan dasar dalam bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial pada periode 2020 hingga 2024. Jenis pelayanan yang dipantau meliputi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, yang semuanya dilakukan di

luar panti. Selain itu, juga diukur pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana.

Terlihat bahwa sejak tahun 2021, seluruh jenis pelayanan rehabilitasi sosial berhasil mencapai target 100%, menunjukkan peningkatan signifikan dari capaian awal yang bervariasi, bahkan ada yang pada 2020 masih sangat rendah. Hal ini menandakan keberhasilan program dan upaya pemerintah dalam memperluas akses dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan di masyarakat. Sementara itu, perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana secara konsisten telah mencapai 100% sepanjang periode 2020-2024 yang mencerminkan komitmen penuh dalam memberikan bantuan yang tepat waktu dan memadai bagi masyarakat terdampak bencana.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024, rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 61
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan
Kabupaten Batang Terhadap target akhir RPD 2023-2026

No	Status Pencapaian Indikator	Tahun 2024	
		Jumlah Indikator	Persentase
1.	Sangat Tinggi	180	74,38
2.	Tinggi	20	8,26
3.	Sedang	9	3,72
4.	Rendah	9	3,72
5.	Sangat Rendah	24	9,92
Jumlah		238	100

Dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	ST
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	T
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang	S
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah	R
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri 87/2017

Tabel 2. 62 Rata- Rata Realisasi Capaian Kinerja terhadap RKPD dan RPD Hingga Tahun 2024

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024			
	Realisasi terhadap Target RKPD 2024	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2024	Realisasi terhadap Target RPD	Tingkat capaian thdp Target RPD
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan	101,39	ST	96,50	ST
Kesehatan				
- Dinkes	100,32	ST	98,14	ST
- RSUD Batang	94,36	ST	92,39	ST
- RSUD Limpung	93,50	ST	93,50	ST
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92,19	ST	81,87	T
Perumahan dan Permukiman	100,00	ST	100,00	ST
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
- Satpol PP	93,34	ST	93,34	ST
- BPBD	100,00	ST	100,00	ST
Sosial	100,00	SR	100,00	SR
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja	100,00	ST	100,00	ST
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	73,44	S	69,64	S
Pangan	100,00	ST	100,00	ST
Pertanahan	100,00	ST	100,00	ST
Lingkungan Hidup	91,55	ST	77,04	T
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,55	ST	93,65	ST
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	153,08	ST	100,65	ST
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90,01	ST	91,76	ST
Perhubungan	100,00	ST	100,00	ST
Komunikasi dan Informatika	100,00	ST	100,00	ST
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104,29	ST	91,00	ST

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024			
	Realisasi terhadap Target RKPD 2024	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2024	Realisasi terhadap Target RPD	Tingkat capaian thdp Target RPD
Penanaman Modal	94,67	ST	90,00	T
Kepemudaan dan Olahraga	152,50	ST	125,70	ST
Statistik	102,25	ST	102,25	ST
Persandian	100,00	ST	100,00	ST
Kebudayaan	105,30	ST	105,14	ST
Kearsipan	99,75	ST	99,62	ST
Perpustakaan	100,00	ST	100,00	ST
Urusan Pilihan				
Transmigrasi	100,00	ST	100,00	ST
Kelautan dan Perikanan	77,92	T	74,45	S
Pertanian				
- Dispaperta	100,75	ST	98,04	ST
- Dislutkannak	100,00	ST	100,00	ST
Pariwisata	96,99	ST	78,75	T
Perindustrian	91,65	ST	91,01	ST
Perdagangan	83,33	T	71,59	S
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	106,31	S	105,40	S
Kuangan	100,00	ST	100,00	ST
Penelitian dan Pengembangan	100,00	S	115,38	S
Pendidikan dan Pelatihan	100,00	ST	100,00	ST
Kepegawaian	100,00	ST	100,00	ST
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
Sekretariat Daerah	107,68	ST	105,34	ST
Sekretariat DPRD	100,00	ST	100,00	ST
Unsur Pengawasan				
Pengawasan	103,33	ST	109,22	ST
Unsur Pemerintahan Umum				
Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	ST	100,00	ST
Kewilayahan				
Kecamatan Batang	85,00	T	85,00	T
Kecamatan Warungasem	100,00	ST	100,00	ST
Kecamatan Pecalungan	95,75	ST	91,86	ST
Kecamatan Wonotunggal	96,22	ST	94,00	ST
Kecamatan Bandar	20,00	SR	20,00	SR
Kecamatan Tersono	102,82	ST	95,86	ST
Kecamatan Blado	108,89	ST	97,00	ST
Kecamatan Tulis	100,00	ST	97,80	ST
Kecamatan Banyuputih	90,20	ST	83,20	T
Kecamatan Kandeman	47,36	SR	42,20	SR
Kecamatan Limpung	100,00	ST	97,00	ST
Kecamatan Subah	85,20	T	85,20	T
Kecamatan Reban	92,10	ST	90,69	ST
Kecamatan Bawang	24,00	SR	23,00	SR

Urusan	Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024			
	Realisasi terhadap Target RKPD 2024	Tingkat capaian thdp Target RKPD 2024	Realisasi terhadap Target RPD	Tingkat capaian thdp Target RPD
Kecamatan Gringsing	87,89	T	79,00	T
RATA RATA CAPAIAN TAHUN 2023	95,58	ST	91,95	ST

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pendidikan tahun 2024 :

Tabel 2. 63 Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Stn	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Pendidikan									Disdikbud
	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	100	100	ST	100	ST	
	Persentase Capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100	100	100	ST	100	ST	
2	Program Penembangan Kurikulum									Disdikbud
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	90	100	95	106	ST	86	T	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan									Disdikbud
	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	100	100	100	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN						101	ST	97	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan pendidikan sebesar 101 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dan berstatus capaian sangat tinggi serta telah mencapai 97 persen jika dibandingkan dengan target akhir RPD. Urusan pendidikan terdiri dari 4 indikator dalam 3 program yang keseluruhan indikatornya berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

cukup tinggi, pendidikan dasar bebas pungutan, bantuan pendidikan dari Pemerintah, Kartu Indonesia Pintar, Program BOS dan BOSDA serta banyaknya event pelatihan kompetensi bagi guru.

b. Urusan Kesehatan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan kesehatan tahun 2024 :

Tabel 2. 64 Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Stn	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									Dinkes
	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									Dinkes
	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Berijin	%	99	99,5	91,44	92,36	ST	91,90	ST	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman									Dinkes
	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Berijin	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									Dinkes
	Rasio Posyandu Mandiri Terhadap Balita	%	12,24	13,24	13,33	108,91	ST	100,68	ST	

No	Program/ Indikator Program	Stn	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									RSUD Batang
	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di RSUD Yang Sesuai Standar /Jumlah Gedung, Sarana Dan Prasarana Yang Diadakan / Jumlah Gedung Yang Dibangun	%	86	90	76,30	88,72	T	84,78	T	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									RSUD Batang
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (indikator SPM)	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									RSUD Limpung
	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (indikator SPM)	%	100	100	87	87,00	T	87,00	T	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									RSUD Limpung
	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						96,06	ST	94,68	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2024 yang diampu oleh tiga perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Batang, dan RSUD Limpung, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2024 sebesar 96

persen dengan predikat sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD, capaian urusan kesehatan sebesar 94,68% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian ini didukung karena adanya keharusan pada standar pelayanan minimal mencapai 100 persen pada setiap tahunnya sehingga mengharuskan kinerja berfokus pada pelayanan minimal kepada masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 :

Tabel 2. 65 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)									DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	4,25	17,06	3,922	92,28	ST	22,99	SR	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase									DPUPR
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	64,41	77,4	63,790	99,04	ST	82,42	T	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									DPUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									DPUPR
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional									DPUPR
	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi									DPUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	12,5	100	0	0,00	SR	0,00	SR	
7	Program Pengembangan Permukiman									DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	56,04	62,04	57,7	102,96	ST	93,00	ST	
8	Program Penataan Bangunan Gedung									DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
9	Program Penyelenggaraan Jalan									DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	60,5	70,5	75,26	124,40	ST	106,75	ST	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	52,4	52,4	50	95,42	ST	95,42	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						92,19	ST	81,87	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PUPR terhadap target tahun 2024 sebesar 92,19% (Tinggi). Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 81,87% (sedang). Hal ini didukung adanya koordinasi efektif dan tepat terkait pembangunan infrastruktur serta adanya dukungan tenaga profesional fasilitator lapangan dalam membantu pelaksanaan pekerjaan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2024 :

Tabel 2. 66 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									DPRKP
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	63	64	38,49	61,10	R	60,14	R	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									DPRKP
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	81	86	85,93	106,08	ST	99,92	ST	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									DPRKP
	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah (indikator SPM)	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						89,06	T	86,69	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan PRKP sebesar 89,06 (tinggi). Capaian penanganan pengurangan kawasan kumuh tidak mencapai target karena kurangnya intervensi penanganan kumuh yang tepat sasaran.

e. Urusan Sosial

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan sosial tahun 2024 :

Tabel 2. 67 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									Dinsos
1)	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	Persen	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan									Dinsos
1)	Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	Persen	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pemberdayaan Sosial									Dinsos
1)	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	persen	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Rehabilitasi Sosial									Dinsos
1)	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan									Dinsos

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	persen	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
6	Program Penanganan Bencana									Dinsos
1)	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sosial tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan sosial sebesar 100 persen (sangat tinggi). Kinerja Urusan Sosial terdiri dari 6 program 6 indikator dengan keseluruhan indikator status sangat tinggi. Hal ini didukung adanya komitmen Pemkab dalam memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS serta korban bencana alam dan juga membantu pemulangan bagi tenaga kerja migran.

f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 :

Tabel 2. 68
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									Satpol PP
1)	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									Satpol PP
1)	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	100	86,67	86,67	T	86,67	T	
3	Program Penanggulangan Bencana									BPBD
1)	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2)	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						96,67	ST	96,67	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Satpol PP, BPBD Kabupaten Batang Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh 2 SKPD yaitu Satpol PP dan BPBD pada tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan trantibum sebesar 96,67

(Sangat Tinggi) dengan 3 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus Tinggi. Capaian ini didukung adanya kerjasama penegak hukum, dan OPD terkait dalam menyelesaikan aduan masyarakat atas gangguan trantibum namun terkendala karena Jumlah pos/unit damkar yang belum ideal dengan wilayah di Kabupaten Batang.

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan tenaga kerja tahun 2024 :

Tabel 2. 69 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja									Disnaker
	Persentase Kegiatan Yang Mengacu Rtk	%	100	100	96,43	96,43	ST	96,43	ST	
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja									Disnaker
	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	72	76	76,62	106,42	ST	100,82	ST	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja									Disnaker
	Persentase Pencari Pekerja Yang Mendapat Pekerjaan	%	36	46	98,08	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Hubungan Industrial									Disnaker
	Penurunan Jumlah Perselisihan Hi	Rasio	15	14,2	1,26	100	ST	100	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,71	ST	99,3	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Tenaga Kerja tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan tenaga kerja berstatus sangat tinggi yang terdiri dari 4 indikator dengan 4 indikator berstatus sangat tinggi yang didukung oleh adanya kesesuaian pendidikan, keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta semakin rendahnya rasio indikator tersebut maka semakin sedikitnya jumlah perusahaan yang mengalami sengketa di Kabupaten Batang.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2024 :

Tabel 2. 70 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan									DP3AP2KB
	Persentase ARG Pada Belanja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di APBD	Persen	3,20	3,50	2,81	87,81	T	80,29	T	
2	Program Perlindungan Perempuan									DP3AP2KB
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga									DP3AP2KB
	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan	Persen	21,43	28,57	25,00	116,66	ST	87,50	T	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak									DP3AP2KB
	Cakupan Data Pilah Gender Dan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)									DP3AP2KB

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Kecamatan Layak Anak	Persen	80,00	93,33	90,00	112,50	ST	96,43	ST	
6	Program Perlindungan Khusus Anak									DP3AP2KB
	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						102,83	ST	94,04	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 102% dengan status sedang sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 94 persen dengan status sedang. Capaian ini didukung dengan adanya sistem layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan telah berjalan dengan baik. Namun terkendala dengan adanya perbedaan budaya dan nilai dalam masyarakat yang kurang mendukung program peningkatan kualitas keluarga.

c. Pangan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pangan tahun 2024 :

Tabel 2. 71 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN : PANGAN									
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									Dispaperta
	Skor Pola Pangan Harapan	%	89,50	89,8	97,4	108,87	ST	108,51	ST	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan									Dispaperta
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	16,00	18	15,06	94,13	ST	83,67	T	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan									Dispaperta
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan									Dispaperta
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	12,5	12,5	12,50	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,19	ST	95,17	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pangan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pangan jika dibandingkan dengan target RKPD 2024 sebesar 100 pesen (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD

sebesar 95,17 persen (sangat rendah). Capaian ini didukung adanya bantuan pangan untuk desa rawan pangan agar menjadi desa mandiri pangan

d. Pertanahan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pertanahan tahun 2024 :

Tabel 2. 72 Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									DPRKP
	Persentase permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanahan mencapai 100%. Capaian ini melebihi target tahunan yang ditetapkan. Hal ini didukung adanya peran aktif dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang terkait dengan fasilitasi pertanahan di Kabupaten Batang.

e. Lingkungan Hidup

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan lingkungan hidup tahun 2024 :

Tabel 2. 73 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap target RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3									DLH
1)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)									DLH
1)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	60	70	40	66,67	S	57,14	R	
3	Program Pengelolaan Persampahan									DLH
	Persentase penanganan sampah	%	70	100	70,00	100,00	ST	70,00	S	
4	Program Perencanaan lingkungan hidup									DLH
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	100	100	80	80,00	T	80,00	T	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup									DLH
	Indeks Kualitas Air	Indek	50	80	70,00	140,00	ST	87,50	T	
	Indeks Kualitas Udara		80	80	70,00	87,50	T	87,50	T	
6	Program pengelolaan keanekaragaman hayati									DLH
	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	60	70	40	66,67	S	57,14	R	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023	Status Capaian terhadap target RKPD	Tingkat Capaian kinerja terhadap target RPD (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat									DLH
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat									DLH
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	60	70	40	66,67	S	57,14	R	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						91,55	ST	77,04	T	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan target RKPD 2024 sebesar 91,55 (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 77,04(tinggi). Hal ini dikarenakan terdapat target kinerja dari program yang tidak tercapai secara maksimal.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 :

Tabel 2. 74 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pendaftaran Penduduk									Disudkcapil
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	85	100	82	96,47	ST	82,00	T	
2	Program Pencatatan Sipil									Disudkcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	97,4	97,5	97	99,59	ST	99,49	ST	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									Disudkcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	95,4	95,5	95	99,58	ST	99,48	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						98,55	ST	93,65	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 98,5 (sangat tinggi) namun jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 93,65% (sangat tinggi). Ketercapaian indikator pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil didukung dengan adanya peningkatan pelayanan hingga di tingkat

kecamatan guna memudahkan masyarakat dalam mengurus adminitrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus adminitrasi kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pemberdayaan masyrakat desa tahun 2024 :

Tabel 2. 75 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penataan Desa									Dispermades
	Persentase Budaya Desa Yang Dilestarikan	%	40	80	100	250,00	ST	100,00	ST	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa									Dispermades
	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	%	46,03	56,49	47	102,11	ST	83,20	T	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat									Dispermades
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif Dalam Pemberdayaan Desa	%	70	80	75	107,14	ST	93,75	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						153,08	ST	92,32	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 153% atau berstatus

sangat tinggi sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 92,32 persen. Capaian ini didukung dengan adanya peran aktif dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga adanya pendampingan dari Kecamatan.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2024 :

Tabel 2. 76 Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana yang tersedia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	ST	
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									DP3AP2KB
1)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	73,84	74,84	68,33	92,54	ST	91,30	ST	
2)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13,36	11,66	8,71	65,19	S	74,70	S	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	Persen	78,21	79,21	80,03	102,33	ST	101,04	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						90,01	ST	91,76	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 90,01 persen dengan status sangat tinggi sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 91,76 persen (sangat tinggi). Capaian ini didukung dengan data kependudukan terkait keluarga berencana telah tercatat dengan lengkap serta Program keluarga berencana telah berjalan efektif. Masyarakat sudah banyak menggunakan kontrasepsi modern. Namun beberapa hambatan dalam pencapaian indikator ini antara lain Masih ada sekitar 7,5% pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi modern dan masih banyak pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya. Perlu ditingkatkan akses terhadap pelayanan KB.

i. Perhubungan

Gambaran kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 77 Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									Dinas Perhubungan
	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	87	87	100	100	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perhubungan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perhubungan sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program. Capaian ini didukung Komitmen dari sebagian besar Stake Holder Angkutan Darat yang mendukung RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas) Pilar 3 yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan dibuktikan dengan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dari segi jumlah dalam tingkatan stabil tidak mengalami penurunan.

j. Komunikasi dan Informasi

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan komunikasi dan informasi tahun 2024 :

Tabel 2. 78 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	%								Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	69	100	108,25	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	%								Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	100	100	122,25	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 2 indikator dalam 2 program. Capaian ini didukung adanya kerjasama yang baik dengan para awak media dan pihak ke tiga (sumber berita) serta adanya pelatihan dari pemerintah pusat dan propinsi dalam bidang IT namun beberapa kendala dalam proses pencapaian indikator tersebut antara lain berita terkadang tidak sampai tepat waktu di redaksi dan kurangnya tenaga tenaga IT yang berkompeten dalam pembuatan aplikasi.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2024 :

Tabel 2. 79 Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koperasi dan UKM									
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi									Disperindagkop dan UKM
	Presentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	%	24	50,53	24,00	100,00	ST	47,50	SR	
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Koperasi Aktif	%	68	70	78,04	114,76	ST	111,49	ST	
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Peserta Pelatihan Dengan Predikat Baik	%	90	100	96	106,67	ST	96,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)									Disperindagkop dan UKM

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	10	20	20	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pengembangan Umkm									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Produk UMKM Yang Terstandarisasi	%	15	20	17	113,33	ST	85,00	T	
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi									Disperindagkop dan UKM
	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	24	50,53	24,00	100,00	ST	47,50	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						106,95	ST	88,00	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 106,95 (Sangat Tinggi). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 88 (Tinggi). Capaian ini didukung dengan tingkat legalitas Koperasi yang berbadan hukum banyak.

1. Penanaman Modal

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan penanaman modal tahun 2024 :

Tabel 2. 80 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									DPMPTSP
1)	Persentase peningkatan jumlah investor	%	60	80	40	66,67	S	50,00	SR	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									DPMPTSP
1)	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									DPMPTSP
3)	Persentase ijin yang diterbitkan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									DPMPTSP
	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	7,5	8	7,5	100,00	ST	93,75	ST	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									DPMPTSP
	Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	45	45	45	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						93,33	ST	88,75	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penanaman Modal 93,33 atau berstatus sangat tinggi yang terdiri dari 5 indikator dalam 5 program dengan 4 program berstatus sangat tinggi dan 1 program berstatus sangat rendah. Capaian ini didukung adanya dukungan sistem OSS namun terkendala adanya Undang - undang cipta kerja yang belum dipahami oleh para investor.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2024 :

Tabel 2. 81 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	
	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan									Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	Persen	32	45	32	100,00	ST	71,11	S	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan									Disparpora
	Capaian Medali Kejuaraan	medali	40	50	71	100	ST	100	ST	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan									Disparpora
	Penghargaan yang diterima	%	10	10	10	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	90,37	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga jika dibandingkan dengan target RKPD 2024 sebesar 100% (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 sebesar 90,37% (sedang) yang terdiri dari 3 indikator yang keseluruhan berstatus sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan semakin berkembangnya komunitas kepemudaan serta semakin meningkatnya daya saing antar daerah.

n. Statistik

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan statistik tahun 2024 :

Tabel 2. 82 Kinerja Urusan Statistik Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STATISTIK									
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor									Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Statistik tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Statistik sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program berstatus tinggi. Hal ini didukung Adanya kerjasama yang intens dengan pihak produsen data dan instansi vertikal (BPS).

o. Persandian

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan persandian tahun 2024 :

Tabel 2. 83 Kinerja Urusan Persandian Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERSANDIAN									
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi									Diskominfo
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Persandian tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Persandian sebesar 100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan status sangat tinggi. Capaian ini didukung adanya pelatihan persandian dari Pusat.

p. Kebudayaan

Beberapa kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Batang sampai Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 84 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Pengembangan Kebudayaan									Disdikbud
	Persentase Festival Seni Yang Dilaksanakan	%	100	80	100	100,00	ST	125,00	ST	
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional									Disdikbud
	Persentase Komunitas/Sanggar Kesenian Yang Difasilitasi	%	70	80	75	107,14	ST	93,75	ST	
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya									Disdikbud
	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	80	90	87	108,75	ST	96,67	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEBUDAYAAN						105	ST	105	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kebudayaan tahun 2024 , rata-rata tingkat capaian kinerja urusan kebudayaan sebesar 105 persen berstatus sangat tinggi jika dibandingkan dengan target RKPD 2024 namun jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 105 persen dengan status tinggi. Capaian ini didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat untuk mencintai budaya daerah.

q. Perpustakaan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan perpustakaan tahun 2024 :

Tabel 2. 85 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembinaan Perpustakaan									Disperpuska
	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	persen	0,16	4,13	0,15	93,75	ST	3,63	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						93,76	ST	3,63	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perpustakaan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perpustakaan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 93,76 (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 3,63 (sangat rendah). Ketercapaian indikator berstatus sangat tinggi ini didukung dengan adanya layanan mobil keliling dan perpustakaan digital (*eperpus* dan *i-batang*).

r. Kearsipan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan kearsipan tahun 2024 :

Tabel 2. 86 Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Pengelolaan Arsip									Disperpuska
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	indeks	75,4	75,60	75,03	99,51	ST	99,25	ST	
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip									Disperpuska
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	indeks	22,40	22,80	53,43	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						99,75	ST	99,62	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kearsipan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kearsipan sebesar 99,76 persen (sangat tinggi) yang terdiri dari 2 indikator dalam 2 program dengan 2 indikator berstatus sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan adanya pengolahan arsip sudah tertata dari level Unit Pencipta Arsip (UPA) sampai dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Transmigrasi

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan transmigrasi tahun 2024 :

Tabel 2. 87 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Taun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									Disnaker
	Persentase Transmigran yang berhasil ditempatkan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Transmigrasi tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Transmigrasi sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program dengan 1 indikator berstatus sangat tinggi yang dikarenakan banyaknya minat warga untuk menjadi transmigran, Banyaknya kuota pemberangkatan.

b. Kelautan dan Perikanan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan kelautan dan perikanan tahun 2024 :

Tabel 2. 88 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kelautan dan Perikanan										
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap									Dislutkan
	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	96,00	98,00	95,32	99,29	ST	97,27	ST	
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan									Dislutkan
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	100,00	100,00	0,00	0,00	SR	0,00	SR	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									Dislutkan
	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	93,00	100,00	104,56	112,43	ST	104,56	ST	
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan									Dislutkan
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	96,00	100,00	95,97	99,97	ST	95,97	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						77,92	T	74,45	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan sebesar 77,92 % (Tinggi) terhadap target RKPD 2023 sedangkan jika dibandingkan dengan target RPD 2023-2026 sebesar 74,46 (Sedang). Capaian ini didukung dengan 1. Sosialisasi Gemar Makan Ikan belum menjangkau ke seluruh wilayah kecamatan non perikanan (produksi perikanan rendah).

c. Pertanian

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pertanian tahun 2024 :

Tabel 2. 89 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertanian										
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian									
	Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan	%	85	85	130,07	100,00	ST	153,02	ST	Dislutkan
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	0,0103	0,0106	0,1200	100,00	ST	100,00	ST	Dispaperta
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian									
	Capaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	Dislutkan
	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	Dispaperta
3	Program Perizinan Usaha Pertanian									
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	100	100	100,00	100,00	ST	100,00	ST	Dislutkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
	Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati		100	100	520,61	100,00	ST	100	ST	Dislutkan
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian									
	Persentase Capaian Vaksin ternak	%	100	100	132,14	100,00	ST	132,14	ST	Dislutkan

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	Dispaperta
6	Program Penyuluhan Pertanian									
1)	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, petani, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	Dispaperta
2)	Persentase validitas data dan kelembagaan pertanian	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	Dispaperta
3)	Persentase kenaikan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	Dispaperta
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pertanian tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pertanian sebesar 100% (sangat tinggi) yang terdiri dari 11 indikator dalam 6 program yang SKPD yang diampu oleh 2 perangkat daerah yakni Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan dan terdiri dari 6 program dengan 11 indikator.

d. Pariwisata

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan Pariwisata tahun 2024 :

Tabel 2. 90 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PARIWISATA									
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									Disparpora
	Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata	%	17	20	14	82,35	T	70,00	S	
2	Program Pemasaran Pariwisata									Disparpora
	Persentase Peningkatan Wisatawan	%	20	25	20	100,00	ST	80,00	T	
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual									Disparpora
	Persentase Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Memiliki HAKI	%	20	30	27	135,00	ST	90,00	T	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif									Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat	persen	35	45	131	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						104,34	ST	85,00	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pariwisata jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 104 (sangat tinggi) sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 85 (tinggi). Hal ini didukung adanya peningkatan kualitas layanan dan manajemen pengelolaan destinasi .

e. Perindustrian

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan perindustrian tahun 2024 :

Tabel 2. 91 Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perindustrian									
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									Disperingdagkop dan UKM
	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	0,78	0,78	1,01	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									Disperingdagkop dan UKM
	persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	84	88	38	45,24	SR	43,18	SR	
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA									Disperingdagkop dan UKM
	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	84	88	88	104,76	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						83,33	T	71,59	S	

Sumber : *Evaluasi Renja Tahun 2024*

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perindustrian tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perindustrian sebesar 72,62(rendah) yang terdiri dari 3 indikator dalam 3 program dengan 1 indikator berstatus sangat rendah dan 2 indikator berstatus sangat tinggi. Capaian ini terkendala oleh banyaknya prosedur yang harus dilalui serta perbedaan otorisasi antar instansi tak jarang membuat para pelaku usaha kebingungan untuk mengumpulkan data.

f. Perdagangan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan perdagangan tahun 2024 :

Tabel 2. 92 Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perdagangan									
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	36,36	36,36	36,38	100,06	ST	100,06	ST	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Yang Stabilitas Harganya Terjaga	%	75	75	75	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pengembangan Ekspor									Disperindagkop dan UKM
	Nilai Ekspor Perdagangan	nilai/ USD	59.034.726	61.419.729,00	58.590.113	99,25	ST	95,39	ST	
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen									Disperindagkop dan UKM
	Persentase Alat2 Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	75	75	38	50,67	R	50,67	R	
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri									Disperindagkop dan UKM

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pelaksanaan Pameran Dagang Dalam Negeri Di Kabupaten Batang	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						91,65	ST	91,01	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perdagangan sebesar 91,66 persen dengan predikat tinggi. Capaian ini terkendala dengan berkurangnya konsumen, waktu buka pasar dan omset atau penerimaan penjualan pedagang pasar tradisional serta banyaknya kejadian kelangkaan gas dan bahan pokok.

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Berikut tersaji capaian kinerja renja unsur perencanaan tahun 2024 :

Tabel 2. 93 Kinerja Fungsi Urusan Perencanaan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah									Bapelitbang

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPd 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPd 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	100	100	100	100,00	z	100,00	ST	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	90,5	92	129,92	143,56	T	141,22	ST	
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	90,5	92	63,74	70,43	T	69,28	S	
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	90,5	92	112,13	123,90	T	121,88	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						106,31	S	105,40	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Perencanaan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Perencanaan sebesar 106% (sangat tinggi). Kendala pencapaian indikator pada urusan perencanaan yaitu adanya dinamika perubahan aturan dari pemerintah pusat dan mandatory yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten namun didukung dengan ketersediaan sdm yang kompeten;intensitas koordinasi yang semakin baik; serta tim koordinasi bidang pemerintahan yang optimal.

b. Keuangan

Berikut tersaji capaian kinerja renja unsur keuangan tahun 2024 :

Tabel 2. 94 Kinerja urusan keuangan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									BPKPAD
1)	Penyampaian Raperda APBD Tepat Waktu	status	tepat waktu	tepat waktu	100	100,00	ST	100	ST	
2)	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	tepat waktu	tepat waktu	100	100,00	ST	100	ST	
3)	Persentase Realisasi Serapan Belanja terhadap Anggaran Belanja	%	90	90	93,29	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									BPKPAD
1)	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									BPKPAD
1)	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	2,03	2,25	107,19	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Keuangan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Keuangan sebesar 100% (Sangat Tinggi). Capaian ini didukung dengan Kecepatan dan keakuratan SKPD - SKPD dalam penyusunan Laporan keuangan SKPD serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah berhasil menaikkan pendapatan.

c. Kepegawaian

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan kepegawaian tahun 2024 :

Tabel 2. 95 Kinerja Fungsi Urusan Kepegawaian Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									BKD
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100,00	ST	100	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Kepegawaian tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Kepegawaian sebesar 100% (Sangat Tinggi) yang terdiri dari 1 indikator dalam 1 program berstatus tinggi. Ketercapaian pada didukung dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian didukung oleh alokasi anggaran yang cukup serta Standar Pelayanan yang dipahami oleh seluruh SDM layanan dengan baik.

d. Pendidikan Pelatihan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan pendidikan dan pelatihan tahun 2024 :

Tabel 2. 96 Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									BKD
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 100% (Sangat Tinggi. Capaian ini didukung dengan Penyelenggaraan dan pengiriman diklat didukung anggaran dan rencana kerja yang telah disusun dengan baik.

e. Penelitian dan Pengembangan

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan penelitian dan pengembangan tahun 2024 :

Tabel 2. 97 Kinerja Fungsi Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPd TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPd 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPd 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah									Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	55	65	75	100,00	ST	115,38	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	115,38	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan jika dibandingkan dengan target RKPd 2024 sebesar 100 (sangat tinggi) yang terdiri dari 3 indikator dalam 1 program yang berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya minat Perangkat Daerah terhadap inovasi.

E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sekretariat Daerah

Berikut tersaji capaian kinerja renja Sekretariat Daerah tahun 2024 :

Tabel 2. 98 Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									Setda
1	Persentase rata rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persen	90	90	126,2	100,00	ST	100,00	ST	
2	Persentase rata rata Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah	Persen	90	90	94,51	105,01	ST	105,01	ST	
3	Cakupan layanan Operasional Kantor	Persen	85	85	117,63	100,00	ST	100,00	ST	
4	Persentase kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Persen	90	90	110,8	100,00	ST	100,00	ST	
5	Persentase ASN yang telah mengikut diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Persen	90	90	117,08	100,00	ST	100,00	ST	
6	Persentase Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	Persen	90	90	134,32	100,00	ST	100,00	ST	
7	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Skor	32	48	34,01	106,28	ST	70,85	S	
8	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	100	100	223	100,00	ST	100,00	ST	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									Setda
9	Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal)	persen	15	15	32	213,33	ST	213,33	ST	
11	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	persen	96	98	98	102,08	ST	100,00	ST	
12	Persentase lelang melalui e-procurement	persen	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									Setda
13	Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	0	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
14	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
15	Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
16	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	95	95	91,4	96,19	ST	96,19	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						107,68	ST	105,34	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah sebesar 107 persen dengan predikat sangat tinggi. Hal ini didukung adanya Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait serta di dukung Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yan memadai, tersedianya sdm pada OPD

pengampu paket pekerjaan dan Sumber Daya Manusia JFPBJ serta tersedianya Sumber Daya Manusia JFPBJ yang melaksanakan proses tender dan adanya beberapa paket pekerjaan yang dikonsolidasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Namun terkendala adanya salah satu BUMD masih belum dapat menghasilkan laba sehingga tidak dapat memberikan deviden kepada pemerintah daerah, paket pekerjaan dilaksanakan tergantung pada kecepatan OPD melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang jasa, dan terbatasnya jumlah penyedia konsultan perencanaan di Kabupaten Batang sehingga menghambat OPD dalam memasukkan dokumen yang akan ditenderkan.

b. Sekretariat DPRD

Berikut tersaji capaian kinerja renja Sekretariat Daerah tahun 2024 :

Tabel 2. 99 Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									Set.DPRD
1)	Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2)	Persentase KUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3)	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4)	Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5)	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
6)	Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
7)	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
8)	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	100,00	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD jika dibandingkan dengan target RKPD 2024 sebesar 100,00 persen dengan predikat sangat tinggi. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2023-2026 capaian unsur Sekretariat DPRD sebesar 100,00 persen dengan status sedang. Hal ini didukung adanya jadwal pelaksanaan kegiatan anggota dewan yang terlaksana tepat waktu.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut tersaji capaian kinerja renja urusan Pengawasan tahun 2024 :

Tabel 2. 100 Kinerja Pengawasan Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pengawasan										
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan									Inspektorat
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	persen	100	100	110	110,00	ST	110,00	ST	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi									Inspektorat
	Level SPIP	kategori	3	3	3	100,00	ST	100,00	ST	
	Persentase kapabilitas APIP	persen	80	85	100	100,00	ST	117,65	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						103,33	ST	103,33	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan Pengawasan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja urusan Pengawasan sebesar 103,33 (sangat tinggi). Ketercapaian indikator pengawasan didukung dengan adanya kolaborasi antar Perangkat Daerah yang baik serta kapasitas SDM cukup memadai.

G. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Batang

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Batang tahun 2024 :

Tabel 2. 101 Kinerja Kecamatan Batang Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Batang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	75	75,00	S	75,00	S	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Batang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	50	50,00	SR	50,00	SR	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Batang
	Persentase lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						85,00	T	85	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Batang sebesar 85 persen.

b. Kecamatan Warungasem

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Warugasem tahun 2024 :

Tabel 2. 102 Kinerja Kecamatan Warungasem Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									Kec. Warungasem
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	200	100,00	ST	200,00	ST	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									Kec. Warungasem
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100,00	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									Kec. Warungasem

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									Kec. Warungasem
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	90	90	100,00	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									Kec. Warungasem
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	85	100	170	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Warungasem sebesar 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Capaian ini didukung Koordinasi antara Kecamatan dan Desa berjalan baik, meningkatnya kesadaran desa mengenai tertibnya administrasi Pemerintahan Desa.

c. Kecamatan Wonotunggal

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Wonotunggal tahun 2024 :

Tabel 2. 103 Kinerja Kecamatan Wonotunggal Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Wonotunggal
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	75	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Wonotunggal
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Wonotunggal
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	70	70,00	S	70,00	S	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Wonotunggal
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	90	100	100	111,11	ST	100,00	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Wonotunggal
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						96,22	ST	94	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Wonotunggal sebesar 96,22 persen dengan predikat sangat tinggi. Hal ini didukung telah terbentuknya sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN, Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas keamanan wilayah.

d. Kecamatan Bandar

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Bandar tahun 2024 :

Tabel 2. 104 Kinerja Kecamatan Bandar Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Bandar
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	75	118	157,33	ST	118	ST	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Bandar
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	398	398,00	ST	398	ST	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	50	50,00	SR	50	SR	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	TARGET RKPD TAHUN 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RKPD 2023 (%)	Status Capaian terhadap RKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja RPD s.d 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Bandar
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	85	100	117,65	ST	100	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Bandar
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	85	50	58,82	R	50	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						131,97	ST	121,33	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bandar jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 131,97 persen dengan predikat sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan telah terbentuknya Sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN, Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas keamanan wilayah.

e. Kecamatan Limpung

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Limpung tahun 2024 :

Tabel 2. 105 Kinerja Kecamatan Limpung Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Reban
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Reban
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Reban
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	85	100	85	100,00	ST	85,00	T	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap RPD s.d 2023	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,00	ST	97,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Limpung tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Limpung sebesar 100% (sangat tinggi). Capaian ini didukung dengan telah terbentuknya Sinergitas Aparatur TNI/Polri, ASN, Pemerintahan Desa, Linmas Tokoh masyarakat dalam menegakkan dan menjaga stabilitas keamanan wilayah. Namun terkendala kurangnya SDM yang menangani urusan di kecamatan.

f. Kecamatan Blado

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Blado tahun 2024 :

Tabel 2. 106 Kinerja Kecamatan Blado Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Blado
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Blado

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	100	133,33	ST	100,00	ST	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Blado
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Blado
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	100	100	111,11	ST	100,00	ST	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Blado
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	85	100	85	100,00	ST	85,00	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						108,89	ST	97,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Blado tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Blado sebesar 108 persen dengan predikat sangat tinggi.

g. Kecamatan Kandeman

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Kandeman tahun 2024 :

Tabel 2. 107 Kinerja Kecamatan Kandeman Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Kandeman
	Persentase Pelayanan Paten Yang Sesuai Sop	%	75	100	50,00	66,67	S	50,00	SR	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Kandeman
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	25,00	25,00	SR	25,00	SR	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Kandeman
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	90	100	100,00	111,11	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Kandeman
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	100	25,00	25,00	SR	25,00	SR	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Kandeman
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	75	100	50,00	66,67	S	50,00	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						47,36	SR	42,20	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Kandeman sebesar 47,36 persen dengan predikat sangat rendah.

h. Kecamatan Tulis

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Tulis tahun 2024 :

Tabel 2. 108 Kinerja Kecamatan Tulis Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									Kec. Tulis
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	89	100,00	ST	89,00	T	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									Kec. Tulis
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									Kec. Tulis
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									Kec. Tulis
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									Kec. Tulis
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	85	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						85,20	T	75	S	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tulis sebesar 85,20 persen dengan predikat tinggi.

i. Kecamatan Subah

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Subah tahun 2024 :

Tabel 2. 109 Kinerja Kecamatan Subah Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Subah
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	100	52	52,00	R	52,00	R	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Subah
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	100	110	110,00	ST	110,00	ST	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									Kec. Subah
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Subah
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	64	64,00	R	64,00	R	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Subah
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						85,20	T	85,20	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah tahun 2024 , rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Subah sebesar 85,20 persen dengan predikat tinggi.

j. Kecamatan Pecalungan

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Pecalungan tahun 2024 :

Tabel 2. 110 Kinerja Kecamatan Pecalungan Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Pecalungan
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	Persen	75	100	58	77,73	T	58,30	R	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Pecalungan
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Persen	100	100	101	101,00	ST	101,00	ST	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Pecalungan
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	Persen	85	90	107	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Pecalungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	90	102	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Pecalungan

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	140	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						95,75	ST	91,86	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Pecalungan sebesar 95 persen dengan predikat sangat tinggi.

k. Kecamatan Banyuputih

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Banyuputih tahun 2024 :

Tabel 2. 111 Kinerja Kecamatan Banyuputih Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	51,0	51,00	R	51,00	R	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									Kec. Banyuputih
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	75	100	75	100,00	ST	75,00	S	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									Kec. Banyuputih

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	90	100	90	100,00	ST	90,00	T	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	85	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%								Kec. Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						90,20	ST	83,20	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Banyuputih sebesar 90,20 persen dengan predikat sangat tinggi .

1. Kecamatan Bawang

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Bawang tahun 2024 :

Tabel 2. 112 Kinerja Program Kecamatan Bawang tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Bawang
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	75	100	15	20,00	SR	15,00	SR	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Bawang
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	90	100	0	0,00	SR	0,00	SR	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Bawang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	100	0	0,00	SR	0,00	SR	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Bawang
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	0	0,00	SR	0,00	SR	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Bawang
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	85	100	100	100	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						24,00	SR	23	SR	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bawang tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Bawang sebesar 24 persen dengan predikat sangat rendah.

m. Kecamatan Reban

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Reban tahun 2024 :

Tabel 2. 113 Kinerja Program Kecamatan Reban Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Reban
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	90	100	63,53	70,59	S	63,53	R	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Reban
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	75	75	67,45	89,93	T	89,93	T	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Reban
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	85	85	128,00	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Reban
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Reban

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						92,10	ST	90,69	ST	

Sumber : Evaluasi Renja 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Reban sebesar 92,10 persen dengan predikat sangat tinggi.

n. Kecamatan Tersono

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Tersono tahun 2024 :

Tabel 2. 114 Kinerja Program Kecamatan Tersono Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Tersono
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	100	90,00	90,00	T	90,00	T	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Tersono

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	95	100	100,00	105,26	ST	100,00	ST	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	100	85,00	85,00	T	85,00	T	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Tersono
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	90	100	99,86	110,96	ST	99,86	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Tersono
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	85	100	104,44	122,87	ST	104,44	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						102,82	ST	95,86	ST	

Sumber : Evaluasi Renja 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tersono tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Tersono sebesar 102,82 persen dengan predikat sangat tinggi.

o. Kecamatan Gringsing

Berikut tersaji capaian kinerja renja Kecamatan Gringsing tahun 2024 :

Tabel 2. 115 Kinerja Program Kecamatan Gringsing Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									Kec. Gringsing
	Persentase Pelayanan PATEN Yang Sesuai SOP	%	100	100	51,0	51,00	R	51,00	R	
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									Kec. Gringsing
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	75	100	75	100,00	ST	75,00	S	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									Kec. Gringsing
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	90	100	90	100,00	ST	90,00	T	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									Kec. Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dengan Baik	%	85	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Kec. Gringsing
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						90,20	ST	83,20	T	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja unsur kewilayahan pada Kecamatan Gringsing sebesar 90,20 persen dengan predikat sangat tinggi.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Berikut tersaji capaian kinerja renja Bakesbangpol tahun 2024 :

Tabel 2. 116 Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan									Bakesbangpol
	Persentase Masyarakat Yang Mengamalkan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa Yang Bagus	%	100	100	132	100,00	ST	100,00	ST	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									Bakesbangpol
	Persentase Parpol Dan Lembaga Pendidikan Yang Berperan Aktif Mendukung Pemerintah	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									Bakesbangpol
	Persentase Masyarakat Yang Paham Tentang Ketahanan Ekososbud	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									Bakesbangpol
	Persentase Ormas Yang Mendapatkan Fasilitas Dan Pembinaan	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir Periode s/d 2026	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja RKPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target RKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja RPD 2024 (%)	Status Capaian terhadap target akhir RPD	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial									Bakesbangpol
	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	100	100	100,00	ST	100,00	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100	ST	100,00	ST	

Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2024, rata-rata tingkat capaian kinerja diatas 100% dengan status sangat tinggi. Capaian ini didukung dengan adanya partisipasi dan minat masyarakat yang aktif dalam kemasyarakatan.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mendasari Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam Pasal 163 ayat (2)-(3) berbunyi Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Permasalahan ini dapat bersumber dari hasil kajian review capaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan maupun dari isu isu berkembang nasional dan/atau provinsi.

2.2.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan permasalahan yang timbul dalam pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja utama (IKU) pembangunan menurut RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Adapun capaian sasaran pembangunan dan IKU dengan capaian kurang dari 100% pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 117 Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		Stn	Capaian Sasaran Pembangunan		%
					Target	Realisasi	
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan							
		PDRB per Kapita (ADHK)		juta Rp	21,7	20,15	92,86
		Indeks Daya Saing Daerah		indeks	3,4721	3,878	111,69
	1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas						
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	69,66	70,2	100,78
			Indeks Pembangunan Gender	indeks	91,86	92,48	100,67
			Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	63,9	65,63	102,71
	2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah						
			Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97-5,0	5,53	111,27

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Stn	Capaian Sasaran Pembangunan		%
				Target	Realisasi	
		Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan	(Rp.000/ta hun)	9.710	10.470	107,83
	3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran					
		Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	21,5	20,17	93,81
		Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,93	6,06	97,85
		Persentase Penduduk Miskin	%	8,4	8,92	94,17
	4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi					
		Indeks Infrastruktur	indeks	191,49	202,68	105,84
	5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan					
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	64,94	68	104,71
	2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel					
		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	67,36	66,01	98,00
	6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					
		Nilai SAKIP	skor	69,62	68,06	97,76
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	level 3	Level 2	66,67
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	78	77,95	99,94
	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)					
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,3	86,24	101,10
	3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif					
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	160	143,13	89,46
		Indeks Rasa Aman	indeks	4	4,47	100,00
	8. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana					
		Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,71	0,47	66,20
	9. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat					
		Indeks Demokrasi	indeks	70	83,18	100,00
	10.Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang					
		Angka kriminalitas	%	0,016	0,007	100,00
Rata-rata capaian IKU						97,42

Sumber : Bapelitbang, diolah

Tabel 2. 118 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	7,1	7,08	99,72
		Angka Harapan Sekolah	tahun	12,4	12,17	98,15
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	80	85,2	100,00
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100,00
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	70	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	90,21	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77,5	76,5	98,71
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	136	98,4	-
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	8,08	13,99	100,00
		Angka prevalensi balita stunting	%	13,72	9,59	69,90
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,89	75,01	100,00
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	89	98,62	100,00
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	80,95	66,67	82,36
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	70	91,24	100,00
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	11,69	37,9	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	83,61	94,21
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	79,6	99,50
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	86	80,2	93,26
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	86	87,53	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99,25	80,75	81,36
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	67,3	84,13
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	87	87	100,00
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	85	84,32	99,20
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99	88,42	89,31
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	69,7	87,13
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	71,2	70,57	99,12
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	69,87	68,43	97,94
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	88,5	85,31	96,40

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	77,01	77,01	100,00
		Persentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	11,07	11,07	100,00
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	28,87	25,6	88,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	88,95	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	66,56	79,6	100,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	63	81,12	100,00
		Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	81	82,92	100,00
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	63	71,65	100,00
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	63	38,49	61,10
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	85	100	100,00
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	65	84,44	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	66,5	74,65	100,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75	82,56	100,00
		Persentase penanganan gangguan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	75	82,56	100,00
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	4	0,355	8,88
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	72	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	72	77,6	100,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	75	71,95	95,93
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70,8	76,6	100,00
		Persentase demo tertangani	%	100	100	100,00
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	91,04	100,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	67,44	100	100,00
		Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	100	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	81,53	91,86
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	73,8	92,25
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,	%	74	100	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
		jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial				
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	85	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,71	87,27	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	86	76,95	89,48
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	88,82	100,00
		Tingkat Kesempatan kerja	%	97	94,33	97,25
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	31,17	71,02	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	76,1	100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	100	100,00
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	3	1,44	48,00
		Ratio KDRT	Rasio	0,0071	0,71	100,00
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0	0,0004	-
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	4,2747	0	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	0,0163	0,02
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	85,87	100,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	60	73,76	100,00
		Indeks Kualitas Air	Indeks	50	56,5	100,00
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	80	56,5	70,63
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	68,5	84,61	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62	68,21	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	72,75	80,83
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	23	96,04	100,00
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,56	41,42	100,00
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,78	1,079	100,00
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	0,48	2,59	100,00
		Persentase pkk aktif	%	50,21	10,7	21,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	55,3	62,13
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	67	81,41	100,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91,45	75	82,01
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	85	92,13	100,00
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	2,3	84,46	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	62	2	3,23
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	1,5	77,4	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	0,5	0,00012	0,02
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	0,43	0,48
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	86,88	100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,5	74,6	100,00
		Indeks Smart City	Indeks	3,47	3,55	100,00
		Indeks Keamanan Informasi	%	100	3,59	3,59
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100	100,00
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	74	100	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	78,65	88,62
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	12,75	86,68	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	67	12,53	18,70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	77,2	95,31
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	75	84,51	100,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	40	96,55	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,5	57,89	65,41
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	91,42	100,00
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	21	75,8	100,00
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	10	19,35	100,00
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	10	15	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71	18,8	26,48
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	35	0	-
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	4	71	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	75,35	84,90
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	66,33	84,72	100,00
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	2,8	73,95	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60,8	13,82	22,73
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,66	74,05	84,47
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	75,4	88,26	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	22,4	75,03	100,00
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	84,5	79,25	93,79
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	21,9	87,08	100,00
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	93,3	19,03	20,40
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	96	119,88	100,00
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	87	95,97	100,00
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	100	150,49	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	508,85	100,00
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	0,024	68,4	100,00
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)			5,56	-
		a. Beras	Ton	119.615,00		-
		b. Jagung	Ton	71.156,00	160.298,00	100,00
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	10,6	87365	100,00
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	24,76	123023	100,00
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,0103	19,03	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	75,3	0,04	0,05
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	67	93.96	-
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	90	77,01	85,57
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	97,27	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor		88	-
		Nilai EKPPD	Skor	2,98	80	100,00
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	78	3	3,85
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	78	82,78	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	62,5	78,55	100,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	78	0	-
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	90,5	0	-
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	2024		Kondisi Akhir Kinerja
				Target	Realisasi	
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,10	57,46	95,61
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100,00
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	62.50	80,05	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,7	88,78	100,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	WTP	WTP	100,00
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100	100,00
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	0,5	7,71	100,00
		Persentase Peningkatan PAD	%	2,03	9,68	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	64	93,21	100,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	200	274,5	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	69	80,5	100,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	86	90,07	100,00
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	100	100	100,00
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	70	100	100,00
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	85	85,11	100,00
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	85	100	100,00
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	85	80	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,75	88,3	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80	80,2	100,00

Sumber : Bapperida, 2025 diolah

Berdasarkan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dapat disimpulkan secara garis besar beberapa bidang pengelompokkan permasalahan utama yang masih perlu perhatian dalam mendukung pencapaian indikator kinerja diatas antara lain :

- Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sesuai standar;
- Sumber daya aparatur dan pengendalian internal pemerintah daerah;
- Daya saing ekonomi daerah;
- Mitigasi dan penanggulangan bencana;

- Pengembangan Infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- Pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak;
- Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pembinaan kepemudaan dan Pengembangan prestasi olahraga;
- Budaya literasi masyarakat;
- Pengelolaan sumber pendapatan daerah;
- Pemberdayaan PMKS;
- Distribusi komoditas pangan dan pertanian dan penguatan cadangan pangan daerah;
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- Pengembangan wawasan kebangsaan dan kebudayaan daerah.

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang dikelompokkan berdasarkan pembagian urusan yaitu permasalahan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, permasalahan urusan pilihan dan permasalahan urusan penunjang. Secara rinci permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam peran meningkatkan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

- a) Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SD/Sederajat;
- b) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana minimal pendidikan seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair, khususnya sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang belum semuanya dalam kondisi baik;
- c) Belum optimalnya ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
- d) Masih adanya satuan PAUD yang belum terakreditasi B;
- e) Belum semua guru memahami dan mendapatkan pelatihan kurikulum muatan lokal;

- f) Belum semua guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi.

2. Urusan Kesehatan

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan terlihat masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan untuk kedepan yaitu:

- a) Tingginya AKI yang disebabkan karena preeklamsia/eklamsia;
- b) Meningkatnya kasus BBLR dan asfiksia yang menjadi penyebab peningkatan Angka Kematian Bayi dan Balita;
- c) Belum optimalnya skrining pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, TB, DM;
- d) Belum optimalnya penanganan gizi buruk;
- e) Masih adanya kasus *Stunting*;
- f) Belum optimalnya sarana dan prasarana bidang kesehatan;
- g) Belum optimalnya skrining kesehatan bagi warga Negara usia 15-59 tahun;

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Banyaknya asset tanah pengairan yang dipergunakan masyarakat secara illegal;
- b) Masih adanya luasan irigasi dalam kondisi rusak;
- c) Rendahnya akses air minum dan sanitasi aman;
- d) Rendahnya Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e) Belum seluruh ruas jalan kabupaten tersedia drainase serta banyaknya drainase belum terkelola dengan baik;
- f) Kondisi geometri jalan kabupaten, terutama yang berada di daerah selatan banyak yang ekstrim (belokan tajam, tikungan, naik, turun);
- g) Minimnya tenaga perawat jalan/mantri jalan yang berada di UPTD DPUPR Kabupaten Batang;
- h) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan dalam menerima beban muatan;
- i) Belum adanya implementasi dan regulasi tentang penataan bangunan dan lingkungan;
- j) Belum terintegrasinya perencanaan pengembangan dan penataan Perkotaan Batang;

- k) Peta ruang yang tidak sesuai fakta dilapangan dengan peta existing RTRW sehingga menimbulkan ketidak pastian investasi yang ingin masuk ke Batang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam masyarakat, terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang aman dan sehat sangat diperlukan. Namun dalam upaya pemenuhannya masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- b) Belum adanya *database* perumahan;
- c) Terdapat *backlog* perumahan;
- d) Belum tersusunnya perda perumahan dan permukiman.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a) Terbatasnya jumlah SDM Linmas untuk mendukung upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- c) Rendahnya kecepatan respon yang diberikan kepada masyarakat.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan permasalahan yang perlu diperhatikan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a) Belum optimalnya penanganan PMKS;
- b) Masih sedikitnya panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial;
- c) Masih rendahnya bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS;
- d) Validasi dan verifikasi data penerima bantuan yang dilaksanakan oleh desa belum optimal.

b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan sektor tenaga kerja menjadi sangat penting guna menjawab bagaimana tantangan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga. Dengan begitu, beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dari sektor tenaga kerja yaitu:

- a) Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang;
- b) Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batang;
- c) Ketidakcocokan Antara Permintaan dan Penawaran Pekerjaan;
- d) Jumlah lowongan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pada jumlah angkatan kerja;

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam pelaksanaan pembangunan dengan perspektif gender masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya perwujudan kesetaraan gender dan anak;
- b) Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak.

3. Urusan Pangan

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan pangan yaitu

- a) Belum optimalnya penanganan *food loss and food waste* (pemborosan pangan);
- b) Menurunnya ketersediaan beras.

4. Urusan Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja urusan Pertanahan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu masih rendahnya lahan yang bersertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data capaian kinerja Lingkungan Hidup, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan masih belum baik;
- b) Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pengendalian limbah B3 di Kabupaten Batang;
- c) Rendahnya cakupan penanganan persampahan;
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan *online* dalam pembuatan dokumen kependudukan;

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Rendahnya tingkat pemahaman aparatatur desa terkait pelestarian budaya desa;
- b) Belum optimalnya peran PKK di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Kurang aktifnya pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan;
- d) Belum optimalnya peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:

- a) Menurunnya PUS yang menjadi peserta KB aktif;
- b) *Unmetneed* KB yang masih relatif tinggi;
- c) Menurunnya angka partisipasi KB (akseptor KB) di Kabupaten Batang;
- d) Belum optimalnya akses dan pelayanan KB di Kabupaten Batang.

9. Urusan Perhubungan

Berdasarkan data capaian kinerja Perhubungan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya rambu-rambu dan penerangan jalan umum;
- b) Pesatnya pertambahan kendaraan pribadi;
- c) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perhubungan;
- d) Penurunan rasio ijin trayek karena peningkatan penggunaan kendaraan pribadi.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data capaian kinerja Komunikasi dan Informatika, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja Pemerintah;
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
- c) Belum optimalnya tata kelola dan layanan SPBE;
- d) Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data capaian kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan UMKM;
- b) Ketidakteriban koperasi dalam pelaporan keuangan dan hasil RAT;
- c) Minimnya permodalan UMKM yang menyebabkan UMKM dan wirausaha baru yang tidak dapat bertahan dalam guncangan/isu ekonomi.

12. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan data capaian kinerja Penanaman Modal, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Menurunnya nilai realisasi investasi;
- b) Kurang minatnya investor untuk menggunakan lahan KITB;
- c) Belum optimalnya penyediaan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data capaian kinerja kepemudaan dan Olahraga, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan prestasi pemuda dan atlet dalam keolahragaan;
- b) Rendahnya kemampuan dan pengetahuan pemuda dalam berwirausaha, berorganisasi;
- c) Rendahnya sertifikasi pelaku ekonomi kreatif;

14. Urusan Statistik

Berdasarkan data capaian kinerja urusan statistik, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah dan juga BPS dalam pengelolaan data statistik serta produsen data sektoral yang terlambat dalam memberikan *update* data.

15. Urusan Persandian

Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) adanya *hacker* yang berusaha menembus sistem keamanan informasi pemerintah;

- b) Minimnya tenaga ahli dalam menangani keamanan sistem informasi.

16. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan komunitas sanggar seni di Kabupaten Batang;

17. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan data capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Penurunan pengunjung perpustakaan;
- b) Pergeseran minat baca buku fisik ke buku digital.

18. Urusan Kearsipan

Berdasarkan data capaian kinerja Kearsipan, pada urusan kearsipan masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya perangkat daerah yang belum memahami kearsipan.

c. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Dampak perubahan iklim yang berimbas pada hasil penangkapan ikan dan daya dukung lingkungan perairan darat;
- b) Pendangkalan di muara/jalan masuk ke TPI sehingga kapal kesulitan untuk masuk dan melaksanakan bongkar muat ikan di TPI Kab Batang dan memilih untuk melakukan bongkar muatan ikan di TPI lain di luar Kab. Batang;
- c) Belum optimalnya binaan kelompok usaha kelautan dan perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Pariwisata, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Terdapat produk ekonomi kreatif terdata dan terdaftar secara resmi.
- b) Masih adanya destinasi wisata yang belum bekerjasama dengan Disparpora Kabupaten Batang;
- c) Belum optimalnya kapasitas Pokdarwis dan SDM Pelaku Pariwisata;
- d) Minimnya aksesibilitas menuju objek wisata dan konektivitas antar lokasi wisata
- e) Belum optimalnya kolaborasi multipihak dalam promosi pariwisata dan eksplorasi destinasi baru wisata

- f) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- g) Belum terintegrasinya pemasaran paket wisata daerah.

3. Urusan Pertanian

Pembangunan urusan pertanian diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dan produktivitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Adanya gap persepsi SOP Tanaman;
- b) Kemarau panjang efek el nino yang menyebabkan masa tanam mundur dan pengurangan hasil produksi;
- c) Harga komoditas pertanian yang cenderung fluktuatif;
- d) Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi terhadap petani.

4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung kelancaran perekonomian yang mana saling berkaitan dan menunjang dengan sektor lain. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Keterbatasan informasi jenis barang, persaingan dan lokasi produksi produk perdagangan;
- b) Lemahnya jaringan usaha dan akses pasar
- c) Pembatasan tarif ekspor;
- d) Masih adanya perusahaan yang belum berizin;
- e) Rendahnya kontribusi pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD Kabupaten Batang.

5. Urusan Perindustrian

Sebagai salah satu sektor yang menjadi penopang dalam struktur ekonomi di Kabupaten Batang, urusan perindustrian masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Industri Kecil Menengah (IKM) masih banyak yang belum memiliki perijinan dalam usahanya
- b) Rendahnya kesadaran akan pentingnya perijinan bagi IKM.

6. Urusan Ketrasmigrasian

Permasalahan dalam transmigrasi karena rendahnya minat masyarakat untuk transmigrasi.

d. Permasalahan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Berdasarkan data capaian kinerja Perencanaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan salah satu kendalanya adalah dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah telah memahami mekanisme dan manfaat perencanaan;
- b) Dinamika perubahan regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang cepat.

2. Keuangan

Berdasarkan data capaian kinerja Keuangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Kurang kolaborasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait persyaratan pelayanan pajak;
- c) Banyaknya wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pajak yang ditagihkan;
- d) Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya;
- e) Belum optimalnya kepengurusan aset milik daerah (status kepemilikan, kondisi, dan persebaran aset).

3. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan data capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a) Kurangnya pengintegrasian data dari Organisasi Perangkat Daerah agar dapat diakses dengan mudah dan cepat;
- b) Belum adanya ekosistem inovasi;
- c) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kelitbangan daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Berdasarkan data dan capaian kinerja kepegawaian, belum terdapat permasalahan dominan yang menghambat kinerja kepegawaian di Kabupaten Batang.

5. Sekretariat Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja sekretariat daerah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b) Masih adanya Perangkat Daerah yang belum berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan SAKIP;
- c) Belum optimalnya penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah;
- d) Belum optimalnya implementasi manajemen kinerja.

6. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam urusan sekretaria DPRD yaitu

- a) Kurangnya pemahaman anggota dewan pentingnya program kerja dan rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan dewan sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sbg tolok ukur akuntabilitas kinerja dewan

7. Pengawasan

Berdasarkan data capaian kinerja Pengawasan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Rendahnya transisi digitalisasi data pengawasan di Kabupaten Batang;
- b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Batang;
- c) Sinkronisasi perubahan rencana *Mandatory* pengawasan.

e. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan data capaian kinerja kewilayahan, secara umum masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu jumlah usulan banyak yang belum terakomodir dengan baik hal ini dikarenakan usulan tidak termasuk dalam prioritas pembangunan daerah.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional serta isu strategis dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Batang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Kemandirian Keuangan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan daerah otonom sendiri harus mampu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dengan adanya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara prinsip mampu mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mengutamakan asas desentralisasi dimana Kabupaten/Kota bertindak sebagai penggerak sedangkan Pemerintah Provinsi sebagai koordinator.

Namun pada pelaksanaannya, daerah belum mampu mengoptimalkan kemampuan fiskalnya sendiri. Ketergantungan kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari rasio PAD dalam APBD yang masih cukup rendah.

2. Penyiapan Tenaga Kerja Lokal dalam menghadapi KITB

Daya saing semakin mencuat seiring berkembangnya inovasi dan kebijakan dalam pengelolaan daerah. Dalam memenuhi komponen daya saing setiap daerah perlu bersaing dan “berkompetisi” dengan daerah lain guna meningkatkan daya tawar daerah. Daya saing sendiri digambarkan sebagai produktivitas dan kemampuan daerah terhadap wilayah lainnya. Beberapa faktor utama daya saing terdiri dari infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kelembagaan daerah dalam hal ini pemerintah yang bergerak sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaannya.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Batang sudah mencakup diatas 75% dalam kondisi baik. Pembangunan manusia Kabupaten Batang yang direpresentasikan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tren yang selalu meningkat. Terlihat dari tahun 2018 IPM Kabupaten Batang capaiannya sebesar 67,86 dan terus meningkat sampai tahun 2022 mencapai sebesar 69,45.

Kawasan Industri Terpadu Batang menjadi *Major Project* Nasional pengembangan kawasan strategis serta mendukung pencapaian

transformasi wilayah Jawa Bali yang tercantum RKP yang beroperasi di Kabupaten Batang akan berdampak bagi perekonomian daerah. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dengan adanya KITB bagi daerah adalah penyiapan tenaga kerja lokal agar mampu dalam bersaing dan andil dalam kawasan industri tersebut. Tenaga kerja lokal diharapkan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah.

3. Penanggulangan kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung meningkat pada kisaran 4,9 – 5,97 persen. Namun kenaikan ini tidak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan daerah yang hanya menurun dari 8,98% tahun 2022 menjadi 8,92% tahun 2023 atau sekitar 0,06%. Capaian tersebut menandakan masih adanya tugas berat bagi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah.

4. Stunting

Persoalan stunting masih menjadi dalam pembangunan daerah yang cukup krusial karena berpotensi mengganggu tingkat dan kualitas kesehatan bahkan hingga kematian pada anak. Penanganan rawan stunting diperlukan mulai dari anak remaja, calon pengantin, hingga ibu hamil guna menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga daerah. Intervensi stunting perlu dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada ibu hamil dan anak. Percepatan penurunan stunting dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan kementerian/lembaga pemerintah pusat.

5. Permasalahan lingkungan dan penanganan kawasan kumuh

Permasalahan lingkungan masih menjadi isu penting dalam setiap pembangunan daerah. Dalam pembangunan infrastruktur pasti akan bertolak belakang dengan dampak terhadap lingkungannya. Hingga saat ini Infrastruktur sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan karena mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan kawasan industri pun tak lepas dari adanya potensi kawasan kumuh yang muncul disekitar kawasan penyangga industri serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari adanya proyek KI hingga saat

beroperasi. Menyeimbangkan antara menjaga lingkungan dengan pembangunan wilayah masih menjadi isu penting dalam setiap pembangunan.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang perlu mendapat perhatian antara lain belum optimalnya pelayanan publik serta belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan adalah kemandirian fiskal daerah. Melalui optimalisasi teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penerapan prinsip reformasi birokrasi.

7. Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa terdapat empat aspek pengembangan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Upaya pengembangan pariwisata sendiri harus berdasar pada pendekatan perencanaan kolaboratif pemerintah, swasta dan *stakeholders* yang diharapkan mampu menyasar pada daya tarik industri pariwisata daerah. Dalam pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik setidaknya mampu memenuhi komponen atraksi, Aksesibilitas, Amenitas (fasilitas pendukung), dan *Ancillary* (layanan tambahan).

Pada tahun 2022, besar kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat kecil yaitu 1,29%. Kabupaten Batang yang mencakup daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan membuka peluang luas untuk pengembangan berbagai jenis wisata. Keberagaman potensi pariwisata terlihat dari wisata alam yang meliputi pantai, perbukitan, dan pegunungan, serta wisata budaya yang kaya akan warisan lokal. Selain itu, keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan potensi besar untuk pengembangan pariwisata.

Tantangan utama Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Batang adalah rendahnya aksesibilitas menuju objek wisata. Infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan rusak, penerangan yang kurang, dan akses jalan yang terlalu sempit pada beberapa lokasi wisata potensial, menjadi hambatan bagi kendaraan pariwisata berukuran besar. Masalah lain yang dihadapi adalah kapasitas Sumber

Daya Manusia (SDM) pelaku pariwisata yang masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengunjung. Selain itu, kurangnya konektivitas antar lokasi wisata juga menyebabkan keterbatasan pilihan bagi wisatawan, yang cenderung memilih destinasi yang lebih mudah dijangkau. Dari segi promosi, kurangnya kolaborasi multipihak menjadi kendala utama. Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, masyarakat setempat, dan sektor swasta belum optimal, menghambat upaya promosi yang efektif. Eksplorasi dan inventarisasi destinasi wisata baru juga perlu dioptimalkan untuk memperluas penawaran wisata dan menciptakan pengalaman yang lebih beragam bagi wisatawan. Pentingnya peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung seperti akomodasi, restoran, tempat istirahat, dan fasilitas umum lainnya juga merupakan faktor penting. Pengembangan sektor pariwisata harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kabupaten Batang.

8. Peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan

Daya saing menjadi keunggulan yang kompetitif suatu daerah untuk mendorong penciptaan nilai tambah daerah guna menghasilkan produktivitas daerah yang lebih lagi. Peningkatan daya saing daerah menjadi tantangan untuk menonjolkan karakteristik dan potensi daerah untuk mampu menjadi daya tarik investasi sesuai dengan prioritas daerah.

Sementara itu dalam menyinergikan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas lingkungan perlu mendorong peluang investasi baru yang berbasis lingkungan (*green investment*) serta mendukung penerapan ekonomi hijau (*green economy*) yang terbukti mampu menyumbang lebih banyak manfaat bagi daerah maupun negara. Paradigma Ekonomi hijau merupakan model pengembangan ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan daya saing daerah juga tidak terlepas dari komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Daya saing daerah harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rangka pembangunan inklusif.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

a. Arah pembangunan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen. Pada tahun 2021 Ekonomi Indonesia mulai tumbuh sebesar 3,69 persen (y-o-y). Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

Peningkatan ekonomi juga memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran menurun menjadi 4,76 persen pada tahun 2024, dari sebelumnya 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57 persen pada tahun 2024, dibandingkan 9,36 persen pada tahun 2023. Dengan mempertimbangkan potensi keberlanjutan pembangunan ekonomi tersebut, tema Pembangunan RKP Tahun 2026 difokuskan pada **Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**.

b. Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2024, perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,98 persen, mengalami penurunan sebesar 0,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tetap ditopang oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sebesar 34,02 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,23 persen.

Perbaikan kondisi ekonomi juga tercermin dari membaiknya indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah menurun dari 5,13 persen pada tahun 2023 menjadi 4,78 persen pada tahun 2024. Angka kemiskinan pun menunjukkan tren penurunan, dari 10,77 persen di tahun 2023 menjadi 10,47 persen di tahun 2024.

Selain itu, inflasi di Jawa Tengah pada bulan Desember 2024 tercatat sebesar 1,67 persen (year-on-year), menurun dibandingkan inflasi pada Desember 2023 yang mencapai 2,83 persen (year-on-year). Mendasari kondisi tersebut, selaras dengan tema pembangunan nasional tahun 2026, pembangunan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**. Dari tema tersebut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada 5,00 - 5,80 persen, tingkat kemiskinan diproyeksikan 8,67-7,28 persen, sedangkan pada Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,90 - 4,30 persen.

a. Tantangan dan Arah Pembangunan Perekonomian Kabupaten Batang

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami peningkatan, dengan capaian pertumbuhan sebesar 6,03 persen, MENINGKAT dari 5,53 persen pada tahun 2023. Selama periode 2020–2024, struktur perekonomian Kabupaten Batang masih didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha utama, yaitu:

1. Industri Pengolahan sebesar 34,89%
2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,35%
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,45%

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2024 masih menunjukkan dominasi konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sebesar 69,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 26,22 persen. Secara keseluruhan, 77,32 persen dari total produk atau jasa yang tersedia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir, termasuk oleh rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRPT), dan pemerintah, sementara sisanya digunakan untuk investasi fisik dan perubahan inventori.

Melihat ke belakang, perekonomian Kabupaten Batang sempat berkontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,29 persen akibat pandemi Covid-19. Namun, pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,88 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 5,67 persen pada 2024.

Peningkatan ekonomi ini memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Batang menurun dari 6,06 persen pada tahun 2023 menjadi 5,67 persen pada tahun 2024. Sementara itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 8,92

persen pada tahun 2023 menjadi 8,73 persen pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah. Selain itu dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan indentifikasi tandangan, peluang, dan arah kebijakan dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Tantangan ekonomi di Kabupaten Batang diantaranya :

- Peningkatan investasi, yang didorong untuk selalu tumbuh. Penguatan kelembagaan hingga prosedur investasi yang efisien akan mampu mendorong investor masuk untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang;
- Kualitas Sumber Daya Manusia, secara kuantitas, penduduk Kabupaten Batang sudah cukup potensial untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Namun dalam sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Batang belum cukup unggul untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Hal ini didasari oleh capaian rata-rata lama sekolah serta pendidikan penduduk terakhir ditamatkan yang masih didominasi pada tamatan SD-SMP.
- Ketersediaan Bahan Baku Industri, dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Batang seharusnya daerah mampu dalam menyediakan/men-supply dalam jumlah yang banyak untuk menjamin kelangsungan produksi di kawasan industri.
- Kemandirian keuangan daerah yang masih cukup rendah
- Laju inflasi cenderung fluktuatif
- Potensi peningkatan ketimpangan daerah mengingat adanya pembangunan industri baru di Kabupaten Batang

Melihat adanya tantangan ekonomi di Kabupaten Batang, dalam sisi lain pasti terdapat peluang yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Batang, antara lain :

- Investasi yang akan terus tumbuh mengingat adanya kawasan industri di Kabupaten Batang yakni KIT dan BIP
- Kebijakan Pengembangan aglomerasi Petanglong
- Dukungan perkembangan teknologi informasi
- Potensi Pariwisata yang cukup banyak di Kabupaten Batang, dari adanya wisata gunung hingga pantai. Dampak pariwisata terhadap perekonomian mampu memberi efek penggandaan (*multiplier effect*).

- Penguatan industri dan potensi lokal, pengembangan industri lokal serta potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal Kabupaten Batang.
- Kemudahan dalam perijinan perusahaan serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah

Memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi daerah serta dorongan untuk peningkatan perekonomian daerah pada kisaran 5-6 persen pada tahun 2026 dilakukan strategi sebagai berikut :

- a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif
- b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura)
- c) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata
- d) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian
- e) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat
- f) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah
- g) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi
- h) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
- i) pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2026 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung

kebijakan Kabupaten Batang tahun 2026 yang difokuskan melalui Tema pembangunan “**Penguatan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan**” dengan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2026 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2026

NO	Indikator	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,35-6,5
2.	IPM	71,20
3.	Kemiskinan	8,30-8,21
4.	TPT	5,54-5,1
5.	Indeks Ketahanan Pangan	85,12
6.	PoU	6,11

Sumber: Rakortekbang 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum kinerja pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Batang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2026 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan potensi

daerah yang dapat dikembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

- a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2026, didasarkan atas *baseline* tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan mempertimbangkan potensi Pajak dan retribusi di daerah. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pajak Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026 sebesar Rp. 240.691.000.000.
- b) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi Pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun 2026 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan menjadi sebesar Rp 166.921.354.446.
- c) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bapera dan PDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup signifikan. Sehingga pada tahun 2026 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 16.736.744.828.
- d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2021-2023. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD Pemerintah Kabupaten Batang dan Puskesmas, namun demikian sesuai regulasi pendapatan ini selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2026 diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 10.262.653.991.

2) **Pendapatan Transfer**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2025. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan tahun 2022-2024 :

Tabel 3. 2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
tahun 2022-2024

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.965.726.271,01	327.784.151.481,65	359.778.837.359,30
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	129.078.191.268,00	146.490.281.630,00	162.562.189.075,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	22.354.240.158,00	25.913.239.170,00	170.234.277.164,30
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.058.044.717,00	14.301.507.571,00	16.607.120.002,00
01.01.04	Lain-lain PAD	136.475.250.128,01	141.079.123.110,65	10.375.251.118,00
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.448.970.833.931,00	1.478.516.034.327,00	1.598.080.062.300,00
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.096.299.986.931,00	1.105.133.484.669,00	1.452.173.365.406,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	41.909.578.554,00	43.594.414.126,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4.189.088.638,00	2.524.982.000,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	734.763.251.000,00	772.544.083.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	315.438.068.739,00	286.470.005.543,00	
	Dana Perimbangan			1.219.107.071.406,00
	Dana Desa			227.521.941.000,00
	Insentif Fiskal			5.544.353.000,00
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	208.032.695.000,00	223.279.438.000,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)	7.839.277.000,00		
1.2.2.4	Pendapatan Dana Desa	200.193.418.000,00	223.279.438.000,00	

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.638.152.000,00	150.103.111.658,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	133.251.678.000,00	139.035.697.158,00	
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	11.386.474.000,00	11.067.414.500,00	
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.020.475.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	1.002.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	
01.03.03	Pendapatan Lainnya	18.475.000,00	-	
	Jumlah Pendapatan	1.750.957.035.202,01	1.806.800.185.808,65	1.958.338.899.659,30

Sumber : BPKPAD Kab Batang, 2025 *unaudited 2024

Tabel 3. 3
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Batang Tahun 2025-2026

Uraian	TAHUN	
	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	407.759.182.058	434.611.753.265
Pajak Daerah	230.125.000.000	240.691.000.000
Retribusi Daerah	154.733.598.738	166.921.354.446
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.783.126.320	16.736.744.828
Lain-lain PAD yang Sah	6.117.457.000	10.262.653.991
PENDAPATAN TRANSFER	1.566.288.258.378	1.640.341.107.500
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578	1.553.849.256.700
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800	86.491.850.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	480.000.000	0
Jumlah Pendapatan	1.974.527.440.436	2.074.952.860.765

Sumber : Bapperida, 2025

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi (penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi,

serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah);

- Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;
- Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah;
- Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.
- Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Batang.
- Gebyar pajak dengan samsat (opsen PKB dan bbnkb)
- Sosialisasi **SENGKUYUNG** prioritas dan *launching* pantang sambat (pajaknya batang bersama samsat batang);
- *samsat corporate* kerjasama lewat koperasi bpkpad utk pbayaran pajak kendaraan bermotor.

B. Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka

- belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 935.336.527.100.
2. Belanja Barang Jasa

Belanja Barang Jasa diasumsikan menjadi Rp 501.375.676.966. Belanja ini dianggarkan untuk barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 3. Belanja Hibah

Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2026 belanja hibah di proyeksikan sebesar Rp. 77.286.237.753.
 4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin. Belanja Bantuan Sosial tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 14.295.650.000.

b. Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 207.231.514.303. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tahun 2026 sebesar Rp. 12.00.000.000.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer pada tahun 2026 diproyeksikan menjadi sebesar Rp 379.927.254.643.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
02.01	BELANJA OPERASI	1.267.645.675.943,00	1.288.856.540.877,00	1.395.297.308.693,00
02.01.01	Belanja Pegawai	728.689.787.535,00	727.519.485.187,00	808.924.356.457,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	440.412.460.908,00	439.445.809.479,00	476.784.495.553,00
02.01.05	Belanja Hibah	85.009.607.500,00	109.050.596.211,00	98.128.650.683,00
02.01.06	Bantuan Sosial	13.533.820.000,00	12.840.650.000,00	11.459.806.000,00
02.01.07	Bantuan Keuangan			

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
02.02	BELANJA MODAL	183.195.271.255,00	139.566.988.711,00	176.258.634.060,00
02.02.01	Belanja Tanah	49.000.000,00	313.120.881,00	-
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	33.491.783.408,00	48.610.030.041,00	44.895.586.594,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	58.779.585.910,00	42.805.231.598,00	55.266.619.898,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.951.704.275,00	36.048.267.476,00	62.829.046.044,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	923.197.662,00	11.790.338.715,00	12.730.146.582,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	537.234.942,00
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	4.170.055.600,00	3.514.581.828,00	
2,4	BELANJA TRANSFER	346.902.433.685,00	367.903.546.431,00	370.073.158.365,00
	Belanja Bagi Hasil	9.576.624.904,00	10.251.862.223,00	11.185.892.973,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	9.576.624.904,00	10.251.862.223,00	11.185.892.973,00
	Belanja Bantuan Keuangan	337.325.808.781,00	357.651.684.208,00	358.887.265.392,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	337.325.808.781,00	357.651.684.208,00	358.887.265.392,00
	Jumlah Belanja	1.801.913.436.483,00	1.799.841.657.847,00	1.942.886.362.996,00
	Surplus/Defisit	- 50.956.401.280,99	6.958.527.961,65	15.452.536.663,30

Sumber : BPKPAD, 2025 *2024 Unaudited

Tabel 3. 5
Proyeksi Belanja Tahun 2025-2026

Uraian	TAHUN	
	2025	2026
BELANJA		
BELANJA OPERASI	1.488.676.679.523	1.528.294.091.819
Belanja Pegawai	905.659.544.885	935.336.527.100
Belanja Barang dan Jasa	504.167.409.085	501.375.676.966
Belanja Hibah	69.005.437.553	77.286.237.753
Belanja Bantuan Sosial	9.844.288.000	14.295.650.000
BELANJA MODAL	170.283.413.975	207.231.514.303
Belanja Modal Tanah	100.000.000	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.119.970.223	27.870.228.118
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.572.307.077	75.304.778.136
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.907.212.675	91.236.901.387
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.924.000	11.941.106.661
Belanja Modal Aset Lainnya	-	778.500.001
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	12.000.000.000
BELANJA TRANSFER	363.567.346.938	379.927.254.643
Belanja Bagi Hasil	19.743.886.738	21.041.005.230
Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200	358.886.249.413
JUMLAH BELANJA	2.034.527.440.436	2.127.452.860.765
Total Surplus/(Defisit)	(60.000.000.000)	(52.500.000.000)

Sumber : SIPD RI Renja 2026

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026 diarahkan pada :

- Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
- Pengembangan kawasan pariwisata;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- Percepatan penurunan stunting;
- Penanggulangan kemiskinan;
- Pembangunan infrastruktur persampahan, jalan jembatan, dan irigasi;
- Peningkatan produktivitas pertanian dan pencegahan pemborosan pangan;
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengendalian Inflasi;
- Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan
- Pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
- Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui, bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil realisasi pembiayaan tahun 2022-2024 dan proyeksi dan Belanja Kabupaten Batang tahun 2024-2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.751.265.851,77	144.458.319.116,78	143.719.568.550,43
6,2	PENGELUARAN			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.342.000.000,00	7.700.000.000,00	7.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	195.409.265.851,77	7.700.000.000,00	7.500.000.000,00
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	144.452.864.570,78	148.502.230.651,45	136.219.568.550,43

Sumber : BPKPAD, 2025 *2024 unaudited

Tabel 3. 7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2026

Uraian	TAHUN	
	2025	2026
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000	60.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.000.000	60.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	7.500.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	7.500.000.000
Pembiayaan Netto	60.000.000.000	52.500.000.000

Sumber : SIPD RI Tahun 2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mempedomani amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 secara khusus amanat pembangunan Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan khususnya dalam amanat RKP Tahun 2025, serta amanat pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

4.1. Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045

Berdasarkan Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota serta menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat Bulan Agustus Tahun 2024. Mendasari hal tersebut maka dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 menetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2025-2045 dengan frasa pokok sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Batang
Sumber : RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045, 2024

Bersatu diartikan dengan terciptanya karakter yang guyub dan rukun, terjaganya kondusivitas wilayah, tidak terpecah dan tercerai berai serta mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kondisi ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dioptimalkan, peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh aktor/stakeholders pembangunan di Kabupaten Batang.

Mandiri diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu mencukupi dan memprioritaskan kebutuhan daerah serta mampu memberikan kontribusi kepada pihak lain. Kondisi ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan daya saing daerah yang belum optimal, perwujudan kemandirian berbagai sektor utamanya sektor unggulan sesuai potensi daerah.

Berdaya Saing diorientasikan sebagai daerah Maju dimana daerah mampu tumbuh dan berkembang dengan unggul dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pembangunan Infrastruktur yang harapannya disertai dengan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan dengan tetap menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta ketahanan terhadap resiko bencana secara berkesinambungan. Hal ini disertai dengan kinerja birokrasi yang adaptif dan inovatif dalam mengakselerasi kinerja pembangunan di Kabupaten Batang.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi pada Periode 2025-2029

Visi Batang	Sasaran Visi Batang	Indikator	Satuan	Baseline (2025) *)	Target Periodesasi *)
					2025-2029
Kabupaten Batang yang Bersatu, Mandiri, Berdaya Saing dan Membangun yang berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita	Jt/Rp	36,45-36,70	36,71-76,68
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,10	5,3-5,8
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	35,55	36,66
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	8,27-8,34	6,47
	Birokrasi yang Adaptif dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	67,09	70,5
		Kapabilitas Inovasi	Angka	1,85	1,85-2,25
		Indeks Rasa Aman	Indeks	89,9	89,6-89,9

Visi Batang	Sasaran Visi Batang	Indikator	Satuan	Baseline (2025 ^{*)}	Target Periodesasi ^{*)}
					2025-2029
	Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,75	73,2
	Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,66	70,84

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang, 2025-2045

Sementara itu dalam rangka mencapai Visi tersebut, ditetapkan 6 Misi guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Batang Yang Berkualitas
2. Akselerasi Ekonomi
3. Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan
4. Pemerintahan Yang Dinamis
5. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sebagaimana keterkaitan misi dan arah pembangunan Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode pertama pada pembangunan jangka panjang diarahkan pada **Penguatan Modal Dasar Pembangunan Daerah.** Pada periode ini dilakukan dengan penguatan fondasi transformasi pembangunan ekonomi dan sosial yang didukung dengan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Kebijakan ini perlu didukung melalui dukungan pembiayaan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif berbasis pelayanan pada masyarakat dan pembangunan wilayah yang adil merata serta mampu memberikan rasa nyaman aman bagi masyarakat Batang.

Pada periode pertama, Misi **Sumber Daya Manusia Batang yang berkualitas** diarahkan pada Pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidik, peningkatan layanan kesehatan masyarakat di tingkat primer, pemerataan akses dan jaminan kesehatan, penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial secara menyeluruh, peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, serta peningkatan partisipasi pemuda dan anak dalam pembangunan.

Pada misi **Akselerasi Ekonomi** diarahkan pada Penguatan produksi pada sektor unggulan di Kabupaten Batang yang didukung pada peningkatan

infrastruktur dan kelembagaannya, Pengembangan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, serta Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Misi **Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan** diarahkan pada penguatan penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapannya, penanganan kawasan kumuh, serta Penguatan kolaborasi kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pada Misi **Pemerintahan yang Dinamis** diarahkan pada Penguatan implementasi tata kelola pemerintahan dalam pemenuhan pelayanan publik, penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis pemerintahan, peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, Penguatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan, serta peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan desa.

Pada Misi **Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah** diarahkan pada penguatan ketentraman dan ketertiban umum dalam menciptakan rasa aman nyaman bagi masyarakat, penguatan nilai nilai demokrasi Pancasila dalam masyarakat, penguatan stabilitas daerah berupa terkendalinya inflasi dan stabilitas harga dalam menjaga daya beli masyarakat.

Pada Misi **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** diarahkan pada penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan kebudayaan, penguatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, penguatan cadangan pangan, pengendalian dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan pengelolaan dan cakupan pelayanan persampahan, Penguatan resiliensi dampak perubahan iklim, serta penguatan kemampuan daerah yang tangguh dalam mitigasi bencana.

Selanjutnya berikut tersaji tabel keterkaitan visi misi, sasaran pokok, dan indikator beserta target pada periode pertama 2025-2029 RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 :

Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan beserta target periode pertama dalam RPJPD Kab. Batang tahun 2025-2045

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	Baseline 2025	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabupaten Batang yang Bersatu, Mandiri, Berdaya Saing dan Membangun yang berkelanjutan	1. Sumber Daya Manusia Batang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Batang secara holistik	Akses dan Kualitas Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,14	75,31

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	Baseline 2025	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	13	13
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,38	8,84
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92,5
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	91,25
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,84	98
			Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	0	0	0
				a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,04	86,65
				b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	62,26	86,45
				c) Numerasi SD/Sederajat	%	51,06	70,1
				d) Numerasi SMP/Sederajat	%	36,83	63,25
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,66	8,2925
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	13,04
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,62	5,59
				Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	96,99	100
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,11	19
			Pemerataan Kesempatan dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8-5,27	5,27-4,55
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,94	67,92
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang menyeluruh	Akselerasi pemenuhan Perlindungan Sosial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34	36
	2. Akselerasi ekonomi	Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Peningkatan Sektor Unggulan Daerah yang berdaya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	35,55	36,66
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,21	4,79
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	75	100
			Pemerataan Pembangunan	Distribusi Pengeluaran	%	20,77-20,97	21,75

Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	Baseline 2025	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6	7	8
			ekonomi masyarakat	Berdasarkan Kriteria Bank Dunia			
			Peningkatan iklim investasi dan produktivitas ekonomi daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,97	4,14
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	6,22	7,13
				Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,69	3,6
				Disparitas Harga	%	±10	±10
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,08	28,25
	3. Pembangunan Wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan	Terwujudnya pemerataan kualitas pelayanan infrastruktur	Pemerataan akses dan infrastruktur perekonomian	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83	86
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	22,45	25,45
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	57,5	59
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	60	70
			Pemenuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,84	10,34
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	54,9	58,5
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	32,48	41,3
	4. Pemerintahan yang dinamis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, tanggap dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (<i>agile governance</i>)	Pelayanan Publik yang berkualitas dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,51	83
				Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,15	4,37
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,53	3,7
		Terwujudnya pemerintahan desa yang Berdaya saing	Pembangunan dari Desa	Persentase Desa Mandiri	%	3,97	31
	5. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah	Terciptanya lingkungan yang stabil, aman dan kondusif	Stabilitas ekonomi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,74-0,75
				Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,93	1,1
				Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,6	0,64
			Penguatan keamanan,	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	n/a	0

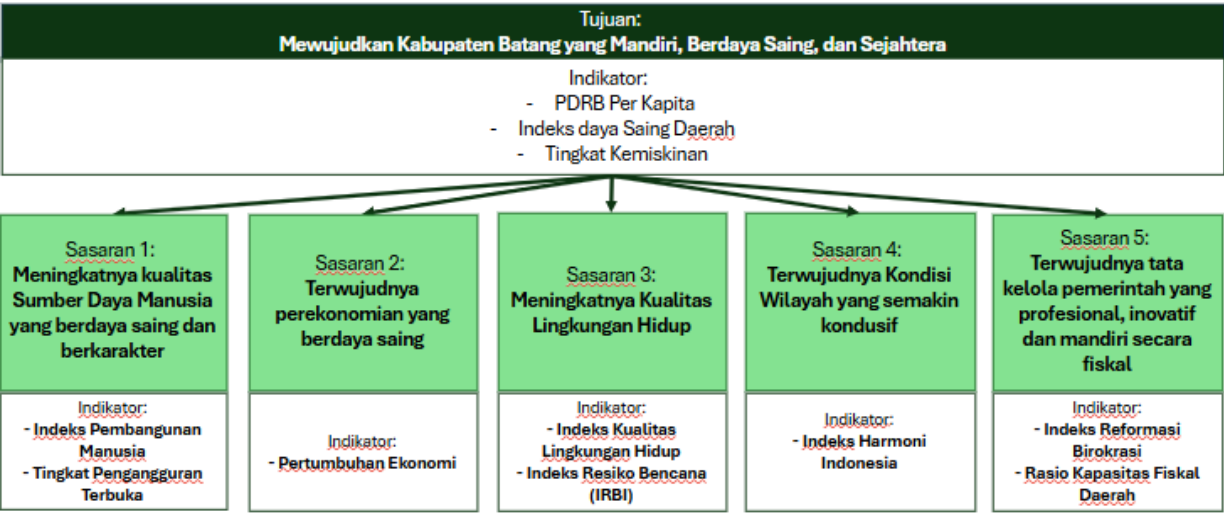
Visi Batang	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	Baseline 2025	Target 2025-2029
1	2	3	4	5	6	7	8
			ketertiban, dan demokrasi				
				Indeks Reformasi Hukum	Angka	58,7	71,2
	6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terciptanya masyarakat yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan wawasan dan karakter budaya masyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	19,28	23,19
				Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	15034	15395
				Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,1	26,33
				Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100
			Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender secara inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,38 - 0,37	0,38-0,42
				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,16-65,77	69,68
		Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan	Keutamaan Lingkungan Berkelanjutan dalam Pembangunan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2e q	1572902,67	707822
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	5	20
		Terciptanya kemampuan daerah yang tangguh dalam mitigasi bencana	Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	148,98 - 147,58	145,6-138,9
			Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	83,6	84,51
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	8,81	6,64

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045

4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2025-2029. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan

data tren capaian 5 tahun terakhir dengan diasumsikan kondisi perekonomian telah mulai pulih, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029
Sumber : Bapperida, 2025

Tujuan Pembangunan Kabupaten Batang dalam lima tahun kedepan adalah **Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera**. Kabupaten Batang yang “**Mandiri**” merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pihak luar selain itu diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah secara fiskal.

Kabupaten Batang yang “**Berdaya Saing**” merujuk pada kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai faktor kunci dalam pembangunan. Daya saing daerah sendiri diharapkan dapat menjadi magnet pembangunan yang mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kabupaten Batang yang “**Sejahtera**” merujuk pada kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan dimana masyarakat Kabupaten Batang mengalami peningkatan kualitas hidup baik secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan pembangunan yang merata, pemerintahan yang baik, dan masyarakat yang mandiri serta berdaya saing.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Batang yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan digunakan 3 indikator kinerja yaitu PDRB Perkapita, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dan Tingkat Kemiskinan. Sementara itu guna mendukung pencapaian tujuan

pembangunan, ditetapkan 5 (lima) Sasaran pembangunan Daerah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter

Dalam mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan manusia menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** diarahkan tidak hanya pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, cerdas, sehat, dan produktif.

Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** harus didorong melalui berbagai aspek secara inklusif. Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM antara lain melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, kesehatan untuk semua, penyediaan perlindungan sosial yang adaptif, mendorong kesetaraan gender pada berbagai sektor pembangunan, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter yang berakhlak dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan dan pembentukan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperkuat ketahanan budaya yang tak terbatas pada seni dan warisan budaya saja namun juga mendorong penguatan budaya hidup sehat jasmani serta budaya literasi masyarakat pada berbagai aspek.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**.

Sasaran 2 : Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

Dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian Kabupaten Batang, ditetapkan sasaran pembangunan Perekonomian yang berdaya saing. Hal ini menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor- sektor unggulan ekonomi serta peningkatan produktivitas yang dikolaborasikan dengan pengembangan inovasi dan teknologi.

Perekonomian yang berdaya saing difokuskan pada optimalisasi potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas produk unggulan daerah,

pengembangan sektor industri secara berkelanjutan menuju *Clean Industrial City*, serta pengembangan industri/ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan daya saing yang mampu menarik investasi baru di Kabupaten Batang, memperkuat keberlangsungan pembangunan perekonomian daerah serta menciptakan kemudahan akses pasar secara luas.

Kawasan Industri yang berkembang pesat di Kabupaten Batang tidak hanya menjadi pusat kegiatan produksi, tetapi juga menjadi magnet bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui kehadiran industri baru yang mendorong tumbuhnya sektor pendukung pembangunan daerah seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan penyediaan bahan baku yang secara simultan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi secara inklusif dan pengembangan kawasan industri secara tidak langsung dapat memberikan *Multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunannya sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Pertumbuhan Ekonomi (PE)**.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Langkah ini terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, konservasi air, dan penghijauan menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran ini.

Kabupaten Batang yang memiliki karakteristik geografis, menjadikannya rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan juga didukung oleh penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan penguatan tata kelola lingkungan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Batang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Sinergi antara pembangunan lingkungan dan kebencanaan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan lingkungan dengan dokumen kebijakan penanggulangan bencana, serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui berbagai kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas air, udara, dan tanah sehingga risiko bencana lingkungan dapat ditekan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dan **Indeks Resiko Bencana (IRB)**.

Sasaran 4 : Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif

Pencapaian sasaran terwujudnya kondisi wilayah yang semakin kondusif difokuskan pada penguatan ketahanan sosial dan menjaga stabilitas daerah dari potensi konflik sosial, kriminalitas, serta ancaman yang dapat menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, iklim wilayah yang kondusif juga ditopang oleh peningkatan kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum yang adil. Pemerintah Kabupaten Batang terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, memperluas akses informasi, serta membangun budaya toleransi dan gotong royong ditengah masyarakat.

Kondisi wilayah yang kondusif menjadi pondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang aman, tertib, dan stabil menjadi syarat mutlak bagi terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi wilayah

yang kondusif mencakup aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, harmonisasi kehidupan sosial, kepastian hukum, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi masyarakat, investor, dan pelaku usaha, sehingga mendukung terwujudnya daerah yang maju, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)**.

Sasaran 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan mandiri secara fiskal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang responsif, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan pembangunan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance*. Untuk mendukung hal tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur terus dilakukan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Di sisi lain, tata kelola yang inovatif menekankan pentingnya pembaruan dan kreativitas dalam pelayanan publik serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Penggunaan teknologi digital serta transformasi layanan berbasis data menjadi prioritas guna menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Kemandirian fiskal juga menjadi bagian penting dari sasaran ini. Dengan memperkuat potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi belanja, Kabupaten Batang diarahkan untuk tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan dari sumber daya lokal. Strategi ini ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang produktif.

Dengan terwujudnya tata kelola yang profesional, inovatif, dan mandiri secara fiskal, Kabupaten Batang akan memiliki pondasi pemerintahan yang kuat dan

modern dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** dan **Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Rasio KFD)**.

Perwujudan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten telah ditentukan target dalam empat tahun kedepan. Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 yang akan diwujudkan tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN
					2026
Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera		PDRB Perkapita	36,26	42,05
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,59	3,89
			Angka Kemiskinan	8,73	8,30-8,21
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,73	71,2
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,67	5,54 - 5,10
	Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis Misi 2 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial				
		Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	6,35 – 6,50
	Misi 3 : Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan Misi 4: Akselerasi Ekonomi Misi 5 : Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi				

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN 2026
	Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa. Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial				
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,47	70,7
			Indeks Resiko Bencana (IRB)	128,7	124,7
	Misi 3 : Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan Misi 6 : Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan				
		Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	81,71	82
			Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	0,962	0,992
	Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial Misi 8 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas				
		Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	NA	6,7
	Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis				

Sumber : Rankhir RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.3.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178 yang menyatakan bahwa pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prinsip pembangunan serta ketersediaan kapastitas riil anggaran. Dalam memberikan usulan pokir, anggota dewan menangkap aspirasi dari masyarakat melalui beberapa kegiatan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Batang. Sebagaimana berikut tersaji Pokok pikiran DPRD Kabupaten Batang tahun anggaran 2026 :

Tabel 4. 4 Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Batang Tahun 2026

NO	SARAN DAN PENDAPAT BERUPA POKOK PIKIRAN DPRD	KETERANGAN
1	Urusan Pendidikan - Membangun dan memperbaiki ruang kelas serta laboratorium yang memadai. - Pembangunan dan perbaikan perpustakaan yang berkualitas. - Penyediaan fasilitas olahraga seperti lapangan dan perlengkapannya di sekolah. - Memastikan akses internet cepat dan stabil, serta menyediakan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran digital. - Perbaikan serta pembangunan toilet dan fasilitas kesehatan di sekolah.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
2	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlin- dungan Masyarakat - Mengadakan pelatihan peningkatan peran ormas dan LSM dalam Pembangunan; - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah dan nilai nasionalisme. - Mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan yang memperkuat rasa nasionalisme.	Meningkatakan Indeks Rasa Aman
3	Urusan Kelautan dan Perikanan - Membangun fasilitas seperti kandang, tambak, atau kolam ikan yang memadai. - Memberikan bantuan pakan berkualitas sesuai kebutuhan nutrisi. - Mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
4	Urusan Tenaga Kerja - Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan industri. - Mengadakan pelatihan berbasis proyek secara online maupun in-house untuk meningkatkan keterampilan pekerja. - Memberikan pelatihan terkait teknologi baru yang relevan dengan pekerjaan.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
5	Urusan Kepemudaan dan Olahraga - Mengembangkan ruang terbuka publik untuk menyediakan fasilitas olahraga baru. - Melengkapi fasilitas olahraga dengan alat-alat yang memadai. - Memperluas fasilitas olahraga untuk menampung	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

NO	SARAN DAN PENDAPAT BERUPA POKOK PIKIRAN DPRD	KETERANGAN
	lebih banyak peserta. - Melakukan perawatan rutin lapangan olahraga agar fasilitas tetap dalam kondisi baik.	
6	Urusan Koperasi dan UKM - Memberikan bantuan kepada UMKM untuk meningkatkan variasi produk atau layanan. - Mengembangkan atau memperluas tempat usaha agar lebih menarik dan nyaman bagi pelanggan. - Mengadakan etalase atau alat produksi lainnya yang mendukung usaha kecil menengah.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, batas wilayah, tanggul saluran air, sanitasi, dan listrik. - Memperbaiki jaringan jalan desa untuk meningkatkan mobilitas. - Membangun SPAM, sumur bor, atau sistem distribusi air bersih bagi sarana pertanian dan masyarakat. - Menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
8	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Memastikan standar kualitas pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
9	Urusan Komunikasi dan Informatika - Mengadakan CCTV dan jaringan internet di desa. - Membuat aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa.	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
10	Urusan Sekretariat Daerah - Merenovasi dan memperluas fasilitas keagamaan seperti masjid atau mushola. - Mengembangkan fasilitas keagamaan yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. - Membangun fasilitas pendukung seperti parkir, sanitasi, dan transportasi. - Menyediakan ruang belajar madin, toilet, ruang wudhu, dan kanopi yang memadai.	Menurunkan angka kriminalitas
11	Urusan Pertanian - Memperluas akses kelompok tani ke sumber daya lahan, air, benih, dan pupuk berkualitas. - Mengembangkan teknologi pertanian seperti sistem irigasi modern dan alat pertanian. - Meningkatkan infrastruktur pertanian, termasuk gudang dan fasilitas pasca panen. - Memperbaiki sistem transportasi untuk distribusi hasil tani.	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi - Menurunkan Persentase Penduduk Miskin
12	Urusan Perhubungan - Menyediakan penerangan jalan umum (PJU).	Meningkatkan Indeks Infrastruktur
13	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten.	Meningkatkan Indeks Infrastruktur

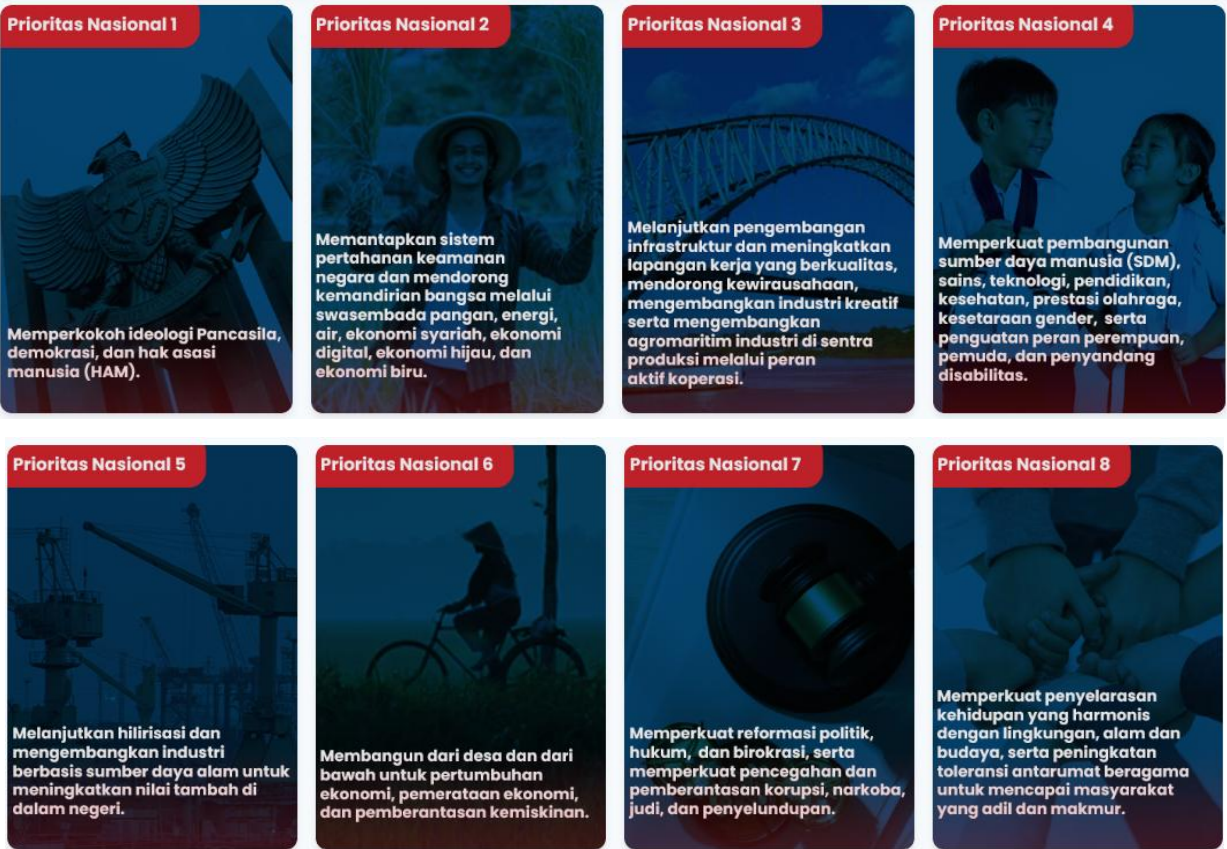
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Batang Tahun 2025

4.3.3 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Perkuatan Fondasi Transformasi, dengan Visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” yang terbagi dalam 5 sasaran utama sebagai berikut :

1. Pendapatan Per Kapita Setara dengan Negara Maju
2. Kemiskinan menurun dan Ketimpangan Berkurang
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
4. Peningkatan Daya saing Sumber Daya Manusia
5. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju Net Zero Emission

Sebagaimana dalam mendukung pencapaian Visi tersebut ditetapkan 8 Misi atau yang sering disebut dengan ASTA CITA sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini :



Gambar 4. 2 Prioritas Nasional/ Asta Cita Presiden dalam RPJMN 2025-2029

Sumber : <https://rpjmn.bappenas.go.id/>

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menetapkan 17 program prioritasdengan delapan program hasil terbaik cepat untuk dicapai pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih. Sebagaimana tersaji sebagai berikut :

1. Swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

5. Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.



Gambar 4. 3 Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029

Sumber : <https://rpjmn.bappenas.go.id/>

Selain 17 program prioritas tersebut, terdapat delapan program hasil terbaik cepat yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran. 8 program hasil terbaik cepat

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen

Dalam Perpres nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Kabupaten Batang masuk dalam lokasi strategis di Jawa Tengah sebagai Kawasan Pertumbuhan yang tergabung dalam regional wilayah Petanglong (Lokasi prioritas: Kota Pekalongan, Kab. Batang, dan Kab. Pekalongan). Selain itu, Kabupaten Batang juga masuk Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal (Lokasi Prioritas: Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, dan Kab. Batang).

Kawasan Pertumbuhan yang dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang. Dalam kawasan ini terdapat beberapa Indikasi Intervensi yaitu:

- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekalongan-Batang, antara lain melalui:
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;

- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH;
- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
- Pembangunan rumah murah beransitasi bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekalongan-Batang (PHTC);
- Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang;
- Pembangunan SPAM Regional Pekalongan-Batang;
- Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengamanan pantai pesisir Pekalongan-Batang;
- Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel);
- Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air minum, telekomunikasi, dry port, pelabuhan, dsb;
- Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang;
- Perencanaan dan Persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakada-Surabaya;
- Pengembangan kota Agropolitan Pekalongan; dan
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

Kemudian Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali Comal yang terdapat beberapa Indikasi Intervensi yaitu:

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Waduk Malahayu, D.I. Kumisik, D.I. Pemali Bawah, D.I. Cacaban, D.I. Cipero, D.I. Gung, D.I. Sungapan, D.I. Comal, D.I. Kupang Krompeng, D.I. Sragi, dan D.I. Kaliwadas;
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;
- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
- Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);
- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura;

- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura;
- Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto;
- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan dam, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Progo Hulu, Waduk Wadiaslintang, Waduk Sempor, Waduk Mrica;
- Pembangunan Bendungan Kedunglanggar;
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, Penyelamatan dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan, dan Optimalisasi dan modernisasi lahan pertanian;
- Peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan dan peningkatan pemasaran produk, antara lain melalui: Penyediaan fasilitasi dan promosi hasil pertanian, Pengembangan hilirisasi/pupuk dan pestisida hayati berbasis OPT dan residu peternakan/perikanan, dan Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan hilirisasi pertanian, penyediaan sistem logistik pertanian, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani, antara lain: Penguatan dan perbaikan manajemen usaha petani, Penyediaan akses pasar bagi petani, Pengembangan dan peningkatan infrastruktur logistik dan jalan akses bagi petani, dan Peningkatan sistem penyediaan dan pelayanan hasil pertanian; dan
- Penguatan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

4.3.4. Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan**

Nasional”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Tahap pertama ini juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
 - a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, risiko, dan riset;
 - c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
 - e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
 - f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;

- h. kelembagaan pangan efektif;
 - i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - p. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
- a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029
 - d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;

- m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
 - n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
 - o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan; serta
 - p. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
 - b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
 - c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
 - d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying;
 - e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
 - g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
 - h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
 - i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
 - j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
 - k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
 - l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
 - m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
 - n. peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;

- p. pemetaan kerja sama dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
- q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
- r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
- s. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
- t. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- u. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- v. peningkatan ketahanan keluarga;
- w. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4.3.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026

Arah kebijakan pembanguann daerah tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan **“Penguatan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan”** dengan upaya prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
2. Pengembangan *cold storage* dan sistem logistik ikan segar dan olahan;
3. Perluasan akses pangan dan Pemanfaatan Pangan yang Aman, Bergizi, dan Berkelanjutan;
4. Peningkatan infrastruktur pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
5. Pencegahan pemborosan pangan;
6. Penyediaan pangan lokal dan berkelanjutan;

7. Peningkatan konsumsi ikan melalui kampanye gizi dan edukasi masyarakat (gemarikan);
8. Mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berkelanjutan;
10. Penguatan cadangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System*);

Tahap pertama ini juga diarahkan untuk penguatan pondasi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang meliputi :

1. Penguatan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter :
 - Pemerataan akses layanan pendidikan yang inklusif dan merata termasuk bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun;
 - Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
 - Peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
 - Penguatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pemetaan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
 - Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
 - Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;
 - Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
 - Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
 - Penyusunan dukungan regulasi dan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;

- Pemetaan kebutuhan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
- Penguatan pembangunan keolahragaan dan kepemudaan;
- Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
- Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan.

2. Penguatan perekonomian yang berdaya saing :

- Pemetaan potensi ekonomi lokal di sektor unggulan (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan, dan UMKM);
- Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
- Mendorong percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga);
- Integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri;
- Pemerataan infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat miskin;
- Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;
- Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain*) dan infrastruktur pelabuhan;
- Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
- Pembentukan inkubasi wirausaha dan ekonomi kreatif;
- Penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan;
- Promosi potensi investasi daerah;
- Penguatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih;
- Penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;

- Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
 - Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal.
 - Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (Transjateng).
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup :
- Pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi Perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang;
 - Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri;
 - Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL;
 - Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - Mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi;
 - Penguatan Ketahanan Daerah terhadap Dampak Perubahan Iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan alternatif pemanfaatan;
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
 - Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - Integrasi Adaptasi Iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam Perencanaan Tata Ruang dan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK.
4. Penguatan Kondusivitas wilayah :
- Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
 - Penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
 - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;

- Menumbuhkan kesadaran hukum dan toleransi di masyarakat.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan :

- Peningkatan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
- Penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
- Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan;
- Peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
- Optimalisasi kualitas belanja daerah;
- Penguatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
- Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
- Penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan;
- Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
- Perbaikan tata kelola dan basis data kemiskinan;
- Penyempurnaan regulasi serta memperkuat kerjasama kolaboratif dan multisektor (Pemerintah dalam pencapaian pembangunan daerah);
- Peningkatan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
- Penguatan tata kelola pemerintahan desa;
- Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Strategi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang. Terletak di jalur strategis Pantai Utara Jawa (Pantura) dan berdekatan dengan Kota Semarang serta Pelabuhan Tanjung Emas, Batang memiliki keunggulan dalam aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Batang telah mengalami peningkatan investasi, terutama dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Kehadiran KITB diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi

daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, serta penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

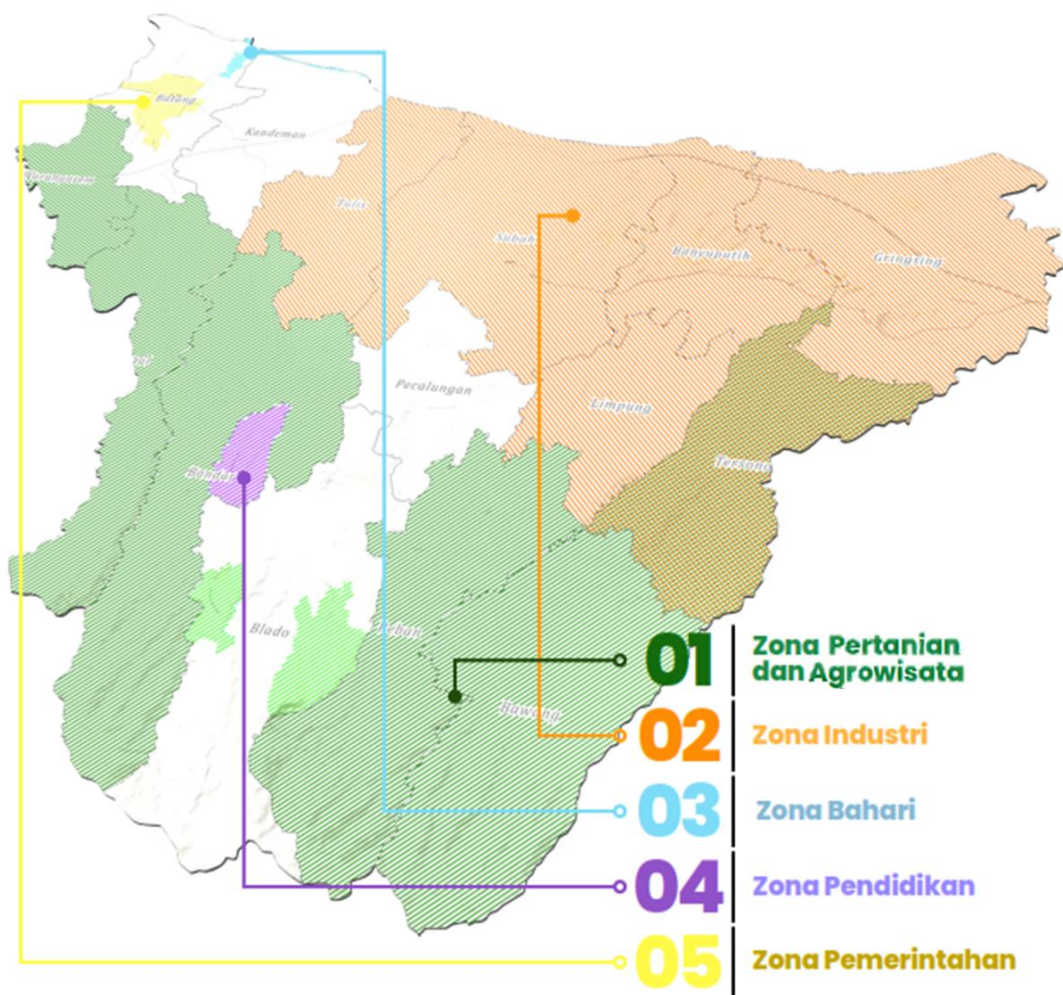
Selain sektor industri, Kabupaten Batang juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata, perikanan, dan pertanian. Destinasi wisata seperti Pantai Sigandu, Ujung Negro, serta potensi wisata agro di daerah perbukitan memberikan peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya. Sementara itu, sektor perikanan dan pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk, memerlukan penguatan dalam hal modernisasi, rantai distribusi, dan akses pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif telah disusun masterplan pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Batang yang membagi wilayah ke dalam lima zona pengembangan utama, yaitu:

- 1) Zona Pertanian dan Agro Wisata – Zona ini berlokasi di wilayah Kecamatan otunggal, Warungasem, Bandar, Blado, Reban, Bawang, dan Tersono, yang berfokus pada pengembangan sektor agroproduksi dan agroindustri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemasaran komoditas lokal unggulan. Selain itu juga mengembangkan sektor pariwisata berbasis pertanian dengan konsep wisata edukasi, perkebunan, dan peternakan. Kawasan ini akan menjadi daya tarik wisata alternatif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor agrowisata yang terintegrasi.
- 2) Zona Industri – Sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi nasional, KITB menjadi motor utama penggerak ekonomi Kabupaten Batang dengan sektor manufaktur, otomotif, elektronik, dan industri berbasis teknologi tinggi. Zona ini mencakup wilayah Kecamatan Subah, Banyuputih, Gringsing, Limpung, Tersono, dan Tulis
- 3) Zona Bahari – Berfokus pada pengembangan wisata bahari dan sektor perikanan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya tarik wisata serta kesejahteraan nelayan. Kawasan ini mencakup destinasi seperti Pantai Sigandu dan Ujung Negro, dengan rencana penguatan ekowisata dan konservasi pesisir. Selain itu juga terdapat arahan untuk pengembangan perikanan tangkap melalui peningkatan pelabuhan. Zona ini berlokasi di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman.
- 4) Zona Pendidikan – Dirancang sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dengan fasilitas pendidikan berkualitas, baik tingkat dasar,

menengah, maupun perguruan tinggi. Penguatan kawasan ini diharapkan dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di sektor industri dan ekonomi kreatif. Zona ini berada di Kecamatan Bandar sebagai pusat pengembangan akademik.

- 5) Zona Pemerintahan – Difokuskan sebagai kawasan perkantoran dan pusat layanan publik yang terintegrasi, dengan konsep tata ruang yang efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Zona ini berlokasi di wilayah Kecamatan Batang.



Gambar 3. 11 Zona Pengembangan Utama

Dengan adanya pembagian zona ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Batang dapat lebih terarah dan optimal, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan. Masterplan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, mendorong pertumbuhan industri dan investasi, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk menjadikan 5 zona tersebut dapat bersinergi perlu adanya integrasi. Integrasi ini dipengaruhi oleh Sistem jaringan transportasi merupakan elemen krusial dalam mendukung konektivitas dan mobilitas

suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Batang, perencanaan sistem transportasi mencakup Rencana Pengembangan Terminal dan Rencana Pengembangan Trayek Angkutan umum. Diarahkan pengembangan Trayek angkutan BRT Trans Jateng dengan trayek Gringsing-Batang-Terminal Kota Pekalongan.

Melalui Strategi Pengembangan Wilayah ini, Kabupaten Batang diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan, serta mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Program Kepala Daerah

Program prioritas dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Program Prioritas Kepala Daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebanyak 8 program yang terdiri dari :

1. Menyiapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Program ini diarahkan untuk mencetak generasi yang cerdas, sehat, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan global di masa mendatang.

2. Menurunkan Pengangguran Melalui Pelatihan Berbasis Industri

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, pelatihan kerja akan difokuskan pada pendekatan berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri akan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelatihan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar kerja.

3. Afirmasi Kepada UMKM

Dengan memberikan perhatian khusus terhadap penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. Afirmasi dilakukan melalui pemberian akses permodalan, pelatihan manajerial dan digitalisasi, serta fasilitasi pemasaran produk. Diharapkan UMKM dapat tumbuh berkelanjutan, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

4. Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih menjadi prioritas utama guna membuka keterisolasian wilayah serta mendorong efisiensi distribusi barang dan jasa, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Infrastruktur yang handal akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Program/aktivitas yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **Batang Terang dan Saber Lubang**. Program ini bertujuan dalam peningkatan kualitas pencahayaan (LPJU) dan sapu bersih jalan berlubang.

5. Batang Hijau dan Bersih (Kelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah yang Menyeluruh)

Program ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara holistik. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan akan terus diupayakan agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Program/aktivitas yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **Batang Hijau dan Bersih**. Program ini bertujuan dalam peningkatan kualitas udara dan alam Batang.

6. Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program perlindungan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin akan dilakukan dengan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan serta menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial secara signifikan.

7. Penciptaan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, program ini menitikberatkan pada penguatan integritas aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi

prinsip utama dalam mewujudkan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

8. Pembinaan dan Pengembangan Pengamalan Agama dan Kelestarian Budaya

Untuk menjaga harmonisasi sosial dan memperkuat jati diri daerah, pemerintah daerah akan terus membina kehidupan beragama yang moderat serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan keagamaan dan kebudayaan akan difasilitasi secara inklusif sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas daerah dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman.

Program Strategik RPJMD Kabupaten Batang 2025–2030

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi – Transjateng

Program ini berfokus pada penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Batang melalui kehadiran layanan Transjateng. Pengoperasian transportasi publik ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang efisien, aman, dan terjangkau, serta menunjang akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan jaringan Transjateng, mobilitas masyarakat dari wilayah pinggiran ke pusat kota atau kawasan industri akan semakin lancar. Program ini merupakan Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Peningkatan Infrastruktur Pengairan

Infrastruktur pengairan yang memadai menjadi kebutuhan utama dalam mendukung produktivitas pertanian. Program ini meliputi rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi yang ada di Kabupaten Batang. Dengan memperkuat jaringan irigasi, lahan pertanian akan memiliki pasokan air yang stabil, sehingga mampu meningkatkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Program ini mendukung petani lokal sekaligus menekan dampak kekeringan akibat perubahan iklim.

3. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program ini diarahkan pada penguatan penerangan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Batang melalui Penerangan Jalan Umum Kabupaten Batang berdasarkan hasil dokumen *baseline* PJU. Penambahan titik lampu di ruas-ruas strategis akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, memperlancar arus kendaraan di malam hari, dan mendukung aktivitas ekonomi malam. Program ini juga mendukung kenyamanan serta menurunkan

potensi kriminalitas di ruang publik. Pada proyek ini terdapat alternatif pembiayaan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Badan Usaha atau KPBU dalam pemenuhan infrastruktur ini. PJU yang digunakan juga merupakan alat yang hemat energi sehingga termasuk dalam infrastruktur konservasi energi.

4. Infrastruktur Sekolah dan Bantuan Pendidikan

Program ini terdiri dari beberapa inisiatif penting:

- Rehabilitasi sekolah, terutama bangunan yang sudah tidak layak.
- Beasiswa bimbingan belajar bagi siswa berprestasi untuk masuk perguruan tinggi negeri.
- Bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
- Dukungan terhadap Program Sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu, sebagai bentuk inklusi pendidikan.

Kombinasi program ini bertujuan meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga Batang, khususnya kelompok rentan.

5. Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Pemerintah akan melakukan penataan kawasan strategis meliputi:

- Ruang Terbuka Hijau
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
- Fasilitas Umum dan Olahraga

6. Taman dan Videotron di tiap Kecamatan

Setiap kecamatan akan dilengkapi ruang terbuka hijau sebagai tempat masyarakat berkumpul, beraktivitas, dan berinteraksi sosial. Selain itu, akan dibangun videotron sebagai media promosi, destinasi wisata, serta sarana sosialisasi program pemerintah. Program ini menggabungkan aspek estetika, komunikasi publik, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem tata ruang yang terpadu.

7. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Beberapa inisiatif penting dalam program ini:

- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul dan Peningkatan TPA Randukuning menjadi TPST Randukuning
- Penertiban TPS ilegal
- Mendorong tiap desa memiliki TPS dan sistem pengelolaan mandiri

- Sosialisasi dan edukasi gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- Implementasi sistem pengelolaan sampah mandiri di setiap pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Program ini menekankan prinsip partisipatif dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan Batang.

8. Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan difokuskan pada kawasan wisata alam dan buatan. Setiap destinasi akan dikembangkan secara tematik dengan memperlihatkan aktivitas khas, pemandangan alam, serta pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan *travel vlogger*. Selain konten, penguatan infrastruktur dan sistem transportasi akan menjadi penunjang utama dalam mendongkrak sektor pariwisata.

9. Ketenagakerjaan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Program ini mencakup:

- Perancangan Perda tentang serapan tenaga kerja lokal dengan mencantumkan persentase minimum.
- Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di balai pelatihan kerja.
- Pengembangan platform Aplikasi Ketenagakerjaan, yang memungkinkan warga lokal mendapat prioritas melalui sistem *layering* berdasarkan jarak tempat tinggal, serta integrasi sistem informasi melalui media sosial untuk mempercepat informasi lowongan kerja.

10. Government Integrated Management System (GIMS)

Pemerintah Kabupaten Batang akan mengembangkan sistem manajemen terintegrasi berbasis data center yang digunakan untuk memonitor *Key Performance Indicator* (KPI) setiap perangkat daerah. Sistem ini akan memperkuat analisis pengambilan keputusan berbasis data objektif.

Mendasari arah kebijakan 2026 yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta Mendukung Asta Cita maka dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas, penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial secara menyeluruh, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, kesetaraan gender, penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, serta penguatan pendidikan karakter, budaya dan vokasi;

2. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang didukung dengan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan;
3. Perwujudan pelayanan publik yang berbasis *agile governance*;
4. Peningkatan stabilitas wilayah dan ketahanan daerah.

Tabel 4. 5 Program Prioritas Kabupaten Batang Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera			PDRB Perkapita
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
				Angka Kemiskinan
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis Misi 2: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh Misi 3 : Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan Misi 4: Akselerasi Ekonomi Misi 5 : Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa. Misi 6 : Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial Misi 8 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah APS
				Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)
				Persentase ketersediaan obat essensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
				Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berijin
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Luar Panti
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan
			Program Pemenuhan Hak Anak PHA	#N/A
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan pangan
			Program Pengendalian Penduduk	Prevalensi penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	TFR
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
				ASFR (15-19 tahun)
				MUKP (Median Usia Kawin Pertama)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Mandiri
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase atlet yang dibina
			Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh kelompok marginal
		Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum aman
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya infrastruktur pengelolaan sampah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sesuai standar teknis
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik aman (IUP)
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan strategis yang memiliki akses terhadap infrastruktur dasar
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perwujudan rencana tata ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah bagi korban bencana atau terdampak program pemerintah kabupaten
			Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Presentase rumah tidak layak huni
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase Jumlah cadangan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
			Program Penataan Desa	Persentase budaya desa yang dilestarikan
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ	#N/A
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pembinaan koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi produk dan layanan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi di Kabupaten Batang
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Capaian produksi perikanan tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian produksi perikanan budidaya
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian masyarakat pengawas sumberdaya perikanan yang diberdayakan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pendapatan sektor pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase tamu wisatawan mancanegara
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Penanganan bencana pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan
			Program Penyuluhan Pertanian	persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga/terpantau
			Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan sumber pencemaran
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati	Persentase jumlah RTH yang dikelola
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH	Persentase dokumen UKL-UPL yang diselesaikan
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani
		Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif		Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud
			Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
		Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
			Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
				Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya
			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum
				Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu
				Persentase fasilitasi kerjasama daerah
				Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Perkembangan Harga Pangan
				Persentase ketercapaian deviden BUMD
				Indeks Tata Kelola PBJ
				Persentase OPD yang melaporkan pelaksanaan pembangunan sesuai target

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu
				Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan
				Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA
				Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu
				Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
				Persentase Realisasi Serapan Belanja terhadap Anggaran Belanja
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya laporan BMD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang tahun 2025-2029

Adapun berikut **Kebijakan Sektoral** Kabupaten Batang dalam mendukung ketercapaian tujuan sasaran Kabupaten Batang

1. Kebijakan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan prioritas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan tersedianya layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dalam dokumen perencanaan ini, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan layanan dasar sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Arah Kebijakan secara umum

- 1) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
 - Penguatan sistem tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung pencapaian SPM.
- 2) Penguatan Infrastruktur Layanan Dasar
 - Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - Penyediaan aksesibilitas layanan untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
- 3) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan
 - Memperluas cakupan layanan imunisasi, pendidikan dasar, air bersih, dan hunian layak.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang terukur dan berbasis kebutuhan lokal.
- 4) Optimalisasi Anggaran Berbasis Kinerja
 - Alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis hasil (outcome-based budgeting).
 - Mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya untuk mendukung pencapaian indikator SPM.
- 5) Kolaborasi dengan Stakeholder

- Membangun kemitraan dengan sektor swasta (melalui program CSR), organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor untuk mempercepat pemenuhan layanan dasar.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan dasar.
- 6) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan bersinergi antar perangkat daerah penyelenggara SPM untuk memastikan capaian indikator SPM dapat diukur secara real-time dan akuntabel.
 - Menyusun laporan hasil koordinasi kinerja pemenuhan SPM secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Sektorar Bidang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal :

1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Capaian SPM bidang pendidikan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 78,56 persen dengan kategori "Tuntas Pratama", naik menjadi sebesar 89,04 persen dengan kategori "Tuntas Madya" di tahun 2023. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 96,19 persen dengan kategori "Tuntas Utama". Meskipun indeks SPM pendidikan semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa indikator SPM yang perlu mendapat perhatian karena capaiannya yang masih rendah yaitu proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak pada jenjang pendidikan dasar serta kemampuan literasi dan kemampuan numerasi pada jenjang pendidikan kesetaraan. Sedangkan sebagian indikator lainnya meskipun capaiannya tidak terlalu rendah, namun masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan difokuskan pada:

- a) Pemenuhan standar pendidikan.
- b) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik, dilaksanakan melalui pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif; kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik,

dan guru/pamong belajar/tutor serta **peningkatan profesionalitas** guru/pendidik dan tenaga kependidikan.

- c) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik juga dilaksanakan melalui: a. pemberian bantuan biaya pendidikan **(beasiswa) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu**; b. Peningkatan pemenuhan layanan pendidikan jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; serta d. penyediaan layanan pendidikan di wilayah kantong kemiskinan.
- Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan pelaksanaan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah, pemberian **biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu**; penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
- d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui: sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi; fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan; pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak; pemeliharaan dan **perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak** sedang dan rusak berat; pemberian **tunjangan kepada guru honorer** jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan, **serta pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak**.

Sementara itu, indikator capaian layanan SPM Pendidikan diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS);
- b. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS);
- c. Rata rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional;
- d. Rata-rata kemampuan Numerasi berdasarkan asesmen nasional;
- e. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan assesmen nasional;
- f. Rata rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional;
- g. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B;
- h. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV;
- i. Rasio pengawas dan penilik PAUD.

2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian SPM bidang kesehatan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 88,50 persen dengan kategori "Tuntas Madya", meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 99,63 persen dengan kategori "Tuntas Utama". Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan SPM bidang kesehatan menjadi "Tuntas Paripurna" maka arah kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan layanan kesehatan pada semua siklus kehidupan dengan difokuskan pada : a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di setiap desa serta pelaksanaan ILP di semua desa; b) **Meningkatkan kualitas layanan RSUD dan puskesmas**, melalui peningkatan dukungan **sarpras** dan **tenaga kesehatan** yang memadai; c) Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; dan d) Penanganan dan penuntasan TB dan HIV.

Layanan program kesehatan gratis yang berupa **Layanan Gawat Darurat 24 Jam Ambulan Gratis, berobat gratis**, serta **bantuan persalinan dan sunat gratis**, utamanya pada keluarga rentan dan kurang mampu.

Sementara itu sasaran pelayanan sebagai berikut : a) Pelayanan kesehatan ibu hamil; b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir; d) Pelayanan Kesehatan balita; e) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar; f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; f) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; g) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; h) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa

berat; i) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; serta j) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

3) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4) Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5) Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 sub urusan, yaitu :

- 1) Sub Urusan Pemadam Kebakaran
- 2) Sub Urusan Bencana

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang trantibumlinmas, meliputi;

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
- b. yang terdampak penegakan hukum atas pelanggaran perda dan perkara berupa pemberian:
- c. Ganti rugi materiil bagi warga negara yang terdampak baik kerugian materiil ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkara;
- d. Pengobatan bagi warga negara yang terdampak baik cacat ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkara.
- e. Pelayanan kebakaran kepada masyarakat yang mengalami kejadian
- f. kebakaran berupa pelayanan respon time maksimal 15 menit sejak laporan diterima sampai dengan aparaturnya tiba di tempat kejadian.

6) Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Bidang Urusan Sosial, Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Rujukan, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat penyandang disabilitas berupa hibah uang sebesar Rp.3.000.000,- per/orang.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti diberikan bantuan sosial berupa hibah uang sebesar Rp. 1.000.000,- per/anak kepada anak Yatim, anak Piatu, dan anak Yatim Piatu di lingkungan kabupaten Batang.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti diberikan bantuan sosial berupa hibah uang sebesar Rp. 200.000,- per/orang selama 10 bulan kepada lanjut usia terlantar di lingkungan kabupaten Batang.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberiana akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan dan pemberian layanan rujukan;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota diberikan bantuan penyediaan sandang dan pelaksanaan Kampong Siaga Bencana.

b. Arah Kebijakan *Stunting* Kabupaten Batang Tahun 2026

Dalam kebijakan penurunan *stunting* tak lepas dari peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara konvergen hingga tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan penurunan *stunting* tahun 2025 di Kabupaten Batang diprioritaskan pada upaya mewujudkan *zero new stunting* melalui pencegahan dari hulu, terutama pada remaja putri dan ibu hamil agar

tidak melahirkan balita stunting baru. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Batang, diantaranya cakupan kehadiran balita di Posyandu dan cakupan layanan intervensi spesifik dan sensitif yang belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor pola asuh yang tidak tepat serta masih kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita sehingga masih enggan membawa balitanya ke Posyandu, sehingga pertumbuhan balita tersebut tidak dapat terpantau secara berkala dan tidak terintervensi secara optimal. Faktor kurangnya asupan gizi juga masih menjadi masalah utama khususnya pada keluarga miskin. Faktor berikutnya adalah SDM tenaga terlatih yang masih terbatas, serta belum semua rumah tangga mendapatkan akses sanitasi dan air minum layak. Oleh karena itu, intervensi prioritas untuk upaya menjawab permasalahan tersebut adalah peningkatan cakupan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, utamanya pemberian pendampingan dan edukasi kepada keluarga beresiko stunting, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting selama 90 hari dengan melibatkan peran swasta melalui program CSR, pelatihan dan peningkatan kapasitas kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta pemberian akses sanitasi berupa stimulan jamban dan akses air minum layak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan cakupan kunjungan balita ke posyandu dilakukan melalui program "jemput bola" dengan menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas.

Konvergensi Percepatan Penurunan stunting di Kabupaten Batang juga telah dilaksanakan melalui kolaborasi *Pentahelix* dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, akademisi dan media. Keterlibatan swasta dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Batang diantaranya melalui CSR dalam bentuk pemberian makanan tambahan baik berupa bantuan susu, telur dan makanan berprotein tinggi lainnya kepada keluarga yang memiliki balita Stunting dengan lokasi prioritas di desa lokus stunting selama 3 (tiga) bulan; Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melalui pemberian makanan tambahan untuk 18 anak stunting selama 3 bulan; serta dukungan perusahaan untuk edukasi pemenuhan gizi bagi karyawan perempuan guna pencegahan stunting. Sementara keterlibatan akademisi diwujudkan melalui keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam upaya penurunan stunting diantaranya penempatan KKN Tematik di Desa lokus stunting dan lokus

Kemiskinan Ekstrim. Sedangkan peran media dalam percepatan penurunan stunting adalah sebagai sumber informasi untuk para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terbaru dalam upaya pencegahan stunting. Informasi terbaru yang disajikan dapat digunakan sebagai sumber rujukan, untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan stunting yang telah dilaksanakan.

Tabel 4. 6
Strategi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum optimalnya layanan intervensi spesifik dan sensitif untuk percepatan penurunan stunting	pemenuhan 29 indikator esensial sesuai Perpres 72/2021	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri	Dinkes
		layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) untuk Remaja putri	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Calon pengantin /calon ibu	Dinkes
		Pemberian bantuan tunai bersyarat untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah kepada calon Pasangan Usia Subur (PUS)	DP3AP2KB
		Pemberian bantuan pangan nontunai untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinsos
		Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	Dinsos
		Pemberian tambahan asupan gizi untuk Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Dinkes
		Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet kepada ibu hamil	Dinkes
		Peningkatan pelayanan keluarga berencana	DP3AP2KB
		Pemenuhan asupan gizi balita melalui optimalisasi pemberian	Dinkes

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		(ASI) eksklusif dan MP ASI	
		Pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk untuk Anak balita gizi buruk	Dinkes
		tambahan asupan gizi untuk anak balita dengan status gizi kurang	Dinkes, Dispermades
		Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita	Dinkes
		penuntasan BABS	Dinkes, DPUPR
		Peningkatan penerapan PHBS	Dinkes
		Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri kepada Keluarga berisiko stunting, serta pemberian bantuan olahan ikan, susu dan telur bagi keluarga berisiko stunting	Dislutkannak
		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	DP3AP2KB
		Pelaksanaan pendampingan kepada Keluarga berisiko stunting	DP3AP2KB
		Pemanfaatan sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Keluarga berisiko stunting	Dispaperta
		Peningkatan akses air minum layak	DPUPR
		Peningkatan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	DPUPR
		Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tentang kesehatan dan gizi kepada Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinsos
		Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta	Dinsos
Kapasitas KPM yang belum merata serta belum optimalnya peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan kapasitas KPM dan peran desa dalam percepatan penurunan stunting	Peningkatan Kapasitas KPM	Dispermades
		Peningkatan dukungan DD dan Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tk Desa	Dispermades
		kebijakan pemberian dukungan operasioal	Dispermades

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
		bagi KPM dan kader Posyandu	
belum optimalnya Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tk Kabupaten	Bapelitbang
		Perbaikan Manajemen Data	Bapelitbang
		Pelaksanaan Rembug Stunting	DP3AP2KB
belum teridentifikasinya akar masalah penyebab stunting	Audit Kasus Stunting	Audit Kasus Stunting	DP3AP2KB

Sumber : Bapelitbang, 2024

Upaya percepatan penurunan stunting juga diwujudkan melalui inovasi-inovasi penurunan stunting diantaranya ;

1. Gerakan Terpadu Cegah Stunting (GERDU CETING)

Gerdu Ceting merupakan gerakan secara bersama-sama untuk mencegah stunting melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemkab, Masyarakat, Ormas, Swasta & Akademisi dengan 4 sasaran prioritas yaitu Remaja, Catin, Bumil & Balita, yang meliputi :

- Pendampingan Bagi Remaja, Calon Pengantin, Keluarga Muda dan Pencegahan Perkawinan Anak
- Pendampingan Bagi Remaja, Calon Pengantin, Keluarga Muda dan Pencegahan Perkawinan Anak
- Bimbingan Remaja Usia Sekolah Mandiri “Penghulu & Penyuluh Mengajar”
- Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (Konseling, mediasi, pendampingan, advokasi & Konsultasi), Lestari (Layanan Bersama ketahanan keluarga indonesia)
- Pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi, konseling dan pemberian makanan tambahan
- Keluarga Peduli Stunting dengan cara ber KB
- Desa Binaan Asi Eksklusif

2. D'Basinem (Desa Binaan Asi Thok Nem wulan)

Merupakan inovasi dalam memberikan Edukasi Asi Eksklusif yang sekaligus dipadukan dengan perbaikan gizi balita melalui aktivitas memasak menu gizi seimbang untuk diberikan kepada balita, yang dilanjutkan dengan makan bersama balita di posyandu sambil bermain & Brain storming. Inovasi ini telah berhasil meningkatkan cakupan layanan

intervensi spesifik pada indikator balita yang mendapatkan ASI eksklusif dari 47,62% tahun 2017 menjadi 64,31% pada tahun 2022.

3. Bambang Tilang (Balita Ditimbang Stunting Hilang)

Merupakan kegiatan pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin A, imunisasi, konseling dan pemberian makanan tambahan untuk balita, sehingga berhasil meningkatkan cakupan intervensi spesifik pada indikator balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dari sebesar 73,56 (2021) menjadi 83,84 (2022), balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi dari 91,25% (2021) menjadi 100% (2022), Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dari 78,29% (2021) menjadi 97,15% (2022).

4. GEMATI (Gerakan Makan Telur Tiap Hari)

Merupakan inovasi untuk menekan angka stunting di Kabupaten Batang dengan memberikan telur kepada sasaran setidaknya 1 telur 1 hari selama 3 bulan berturut-turut sebagai intervensi pencegahan stunting.

5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan

Merupakan inovasi untuk meningkatkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kecamatan.

c. Arah kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Batang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan diharapkan mampu memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah

harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak sehingga mampu meningkatkan peran anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

Tingginya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap berbagai kesepakatan internasional untuk melakukan perlindungan terhadap anak perlu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4. 7 Strategi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual	Pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan pemberian perlindungan terhadap anak	pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial	DP3AP2KB, Dinkes, RSUD
		Pemberian pendampingan antara lain dalam pemberian psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan	DP3AP2KB
		pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu	DINSOS
		Kolaborasi dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak	DP3AP2KB, Dispermades
		Edukasi dan promosi terkait kesadaran tentang kekerasan seksual dan memotivasi masyarakat untuk bertindak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.	DP3AP2KB, Disdikbud
		Pembentukan UPTD PPPA	DP3AP2KB
		Pembentukan Forum Anak Kecamatan	DP3AP2KB
Belum optimalnya dukungan regulasi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Penyusunan PerBup tentang Komite aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;	DP3AP2KB
		Penyusunan Perbup tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	DP3AP2KB

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum optimalnya dukungan Dunia Usaha dalam menunjang program dan Kegiatan Pemenuhan Hak anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak anak	Peningkatan kerjasama dengan Dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Dinkes
		Pelatihan Konvensi Hak Anak pada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan Dunia Usaha	DP3AP2KB
		Penyediaan Data Pilah Gender dan Anak	DP3AP2KB
Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	fasilitasi kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil
		Kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Kerjasama dengan lembaga masyarakat dan PT dalam upaya percepatan kepemilikan akte kelahiran anak	Disdukcapil
Belum semua Sekolah Ramah Anak	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah dasar menuju ramah anak	Disdikbud
		pembangunan sarana, prasarasna dan utilitas sekolah menengah pertama menuju ramah anak	Disdikbud

Sumber : Bapelitbang, 2024

Disamping memaksimalkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah juga diwajibkan responsif terhadap isu perempuan. Hal ini menjadi amanat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDG’s) guna pencapaian target di tahun 2030. Pembangunan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Paradigma gender saat ini sudah berkembang dan tidak lagi terbatas pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan saja, namun juga termasuk didalamnya keadilan dan kesetaraan untuk kaum rentan.

Berikut pemetaan permasalahan serta strategi dalam rangka pemenuhan kesetaraan gender di Kabupaten Batang Tahun 2026 :

Tabel 4. 8 Strategi Pengarustamaan Gender Kabupaten Batang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
Belum semua Perangkat Daerah mengakomodir Program/kegiatan/subkegiatan responsif yang gender	Penguatan peran tim teknis Pokja PUG untuk mendorong dan mengimplementasi-kan Perencanaan dan	Kebijakan satu OPD minimal dua subkeg yang di ARG kan	Bapelitbang

Permasalahan	Strategi	Intervensi	PD
	penganggaran responsif gender pada OPD	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender kepada OPD (rekom hasil evaluasi PUG dari inspektorat)	DP3AP2KB
		Penyusunan profil gender dan penyediaan data pilah gender	DP3AP2KB
		Penyusunan analisis gender dan Sinkronisasi analisis gender dalam dokumen perencanaan	Bapelitbang
Masih adanya kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	meningkatkan peran perempuan dan kaum rentan dalam akses, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan	Meningkatkan implementasi anggaran responsif gender dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan gender	Bapelitbang, BPKPAD, Inspektorat
Adanya stereotip gender, marginalisasi perempuan, <i>sub ordinary</i> dan <i>double burden</i>	Mengatasi stereotip gender, marginalisasi perempuan, <i>sub ordinary</i> dan <i>double burden</i>	Sosialisai, edukasi serta meningkatkan pendidikan dan keahlian SDM perempuan	DP3AP2KB, Disnaker

Sumber : Bapelitbang, 2024

d. Arah Kebijakan Kemiskinan Kabupaten Batang Tahun 2024

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kabupaten Batang cenderung menurun. Hingga tahun 2024 persentase kemiskinan di Kabupaten Batang kembali mengalami penurunan sebesar 0,19 poin dari tahun 2023 menjadi 8,73 persen.

Penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama *Sustainable Developments Goals (SDGs)* yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ini dapat dilaksanakan dengan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yang berkolaborasi dengan CSR dan Program Pemerintah Pusat.

Program Pemerintah Pusat melalui Kemensos, Kemendikbudridtek dan Kemenkes memberikan bantuan berupa PKH, BPNT, Program Indonesia Pintar, dan juga PBI Jaminan Kesehatan Nasional.

Sedangkan melalui CSR (BUMD & Swasta) melalui Bank jateng, PT Bhimasena Power Indonesia dan juga PT Nestle memberikan bantuan berupa Bantuan Makanan Tambahan, Jambanisasi, Pembagian Sembako, Pengembangan kapasitas guru dan kesetaraan, pemberian

demplot tanaman obat keluarga serta pemberian bantuan sosial kepada warga rentan.

b. peningkatan pendapatan masyarakat

Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Batang berkolaborasi dengan CSR (BUMD & Swasta) yang menyediakan kemitraan dengan KUB dalam penyediaan bibit pada program *green belt* serta penyediaan lowongan kerja bagi tenaga kerja di desa sekitar; dan Pemerintah Pusat dengan menyediakan Program Kartu Prakerja.

c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Dalam upaya menurunkan kantong kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Batang berkolaborasi dengan CSR (BUMD & Swasta) dengan menyediakan program renovasi RTLH, Pembangunan taman literasi, renovasi penataan drainase lingkungan sekolah, program bank sampah berbasis desa serta kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat melalui program PKK dan pelatihan kepada masyarakat desa.



Gambar 4. 4 Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan dengan CSR (BUMD & Swasta) dan Pemerintah Pusat

Sumber : Bapelitbang, 2024

Strategi kebijakan penghapusan kemiskinan tersebut didukung dengan inovasi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan. Inovasi tersebut diantaranya adalah

1. Perbaikan akurasi data, yang dilaksanakan melalui proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data warga miskin sebagai sasaran program,
2. Perbaikan mekanisme program,

3. Konvergensi program, yang dilaksanakan dengan metode kolaborasi multipihak (Pentahelix) antara pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha melalui dana CSR dan filantropi, perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat/komunitas dan media massa sebagai sarana untuk edukasi publik.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan kemiskinan pada Tahun 2025 adalah pembangunan inklusif yang melibatkan dan memberi manfaat bagi semua orang, termasuk kaum wanita, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Ketersediaan data yang akurat dapat mendorong terwujudnya pembangunan inklusif tersebut. Ketersediaan data tersebut diantaranya adalah data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data perkawinan dan lain-lain. Ketersediaan data yang terpilah dapat menunjukkan kondisi keberagaman gender, ras, suku, agama, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, dan kelompok rentan. Ketersediaan data terpilah ini juga dapat mendorong ketepatan sasaran program dan memberi kesempatan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan.

Perubahan paradigma perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Misalnya, untuk penyandang disabilitas. Bila sebelumnya penyandang disabilitas merupakan objek pembangunan, mendapat perlakuan khusus dengan pendekatan *charity based*, hanya berpartisipasi di bidang sosial dan menjadi tanggung jawab Kementrian/Dinas Sosial, maka pada pembangunan inklusif penyandang disabilitas akan menjadi subyek pembangunan yang tidak mengalami diskriminasi dengan pendekatan *human right based*, dapat berpartisipasi pada semua sektor (multi sektor) dan menjadi tanggung jawab semua kementrian/lembaga/instansi/perangkat daerah.

e. Kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang

Dalam mengamankan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Batang sebagai dasar serta upaya untuk memenuhi tata Kelola pengelolaan statistik sektoral yang sesuai

dengan prinsip Satu Data Indonesia. Tindak Lanjut dari Perbup tersebut akan dibentuk Forum Satu Data Indonesia yang terdiri dari :

- a. Pembina SDI yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang;
- b. Koordinator SDI yaitu Bapelitbang Kabupaten Batang;
- c. Walidata SDI yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang; dan
- d. Produsen Data yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Batang.
- e.



Gambar 4. 5 Forum Satu Data Indonesia

Sumber : Bapelitbang, 2024

Forum Satu Data di Kabupaten Batang rencananya dilakukan satu kali dalam setahun. Selain Forum SDI, Kabupaten Batang juga telah melaksanakan kegiatan Forum tematik SDI dan kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan perangkat daerah sebagai produsen data bersama BPS dan Diskominfo Kabupaten Batang. Kegiatan pembinaan yang berupa visitasi tersebut dalam rangka untuk mewujudkan tata Kelola data statistik sektoral di Kabupaten Batang yang sesuai dengan 4 prinsip SDI melalui media online yaitu *Open Data* (data.batangkab.go.id) serta sistem informasi statistik sektoral (*sitika*) kabupaten batang (sitika.batangkab.go.id) dan Geoportal (geoportal.batangkab.go.id) data spasial yang juga merupakan data sektoral sudah dapat didesiminasikan dan sudah terintegrasi dengan tingkat provinsi dan pusat pada portal SDI (data.go.id). Jumlah data Prioritas tahun 2024 sesuai hasil kesepakatan forum Satu Data Indonesia sebanyak 1346 data.

Sementara itu, aplikasi Sitika terus dilakukan pengembangan dan hingga saat ini telah mengakomodir ± 4500 data yang bersumber dari eWalidata dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini

dilakukan guna memastikan sinkronisasi indikator prioritas nasional dan program kerja daerah.

2. Kebijakan Sektorar Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Penataan Kota

Penataan perkotaan di Kota Batang bertujuan untuk mewujudkan wajah kota yang lebih indah, humanis, dan nyaman ditinggali. Konsep penataan ini mempertimbangkan keseimbangan antara aktivitas masyarakat urban, perputaran ekonomi, ketertiban, serta estetika lingkungan. Dengan penataan yang terencana, diharapkan kualitas lingkungan perkotaan semakin baik tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat umum.

Fokus penataan perkotaan Kota Batang diarahkan pada beberapa kawasan strategis, yaitu:

- Kawasan Alun-Alun Batang;
- Koridor Jalan Jendral Soedirman (Exit Tol Kandeman – Alun-Alun Batang);
- Lapangan Dracik;
- Koridor Jalan Yos Sudarso;
- Koridor Jalan RE. Martadinata;
- Kawasan Pantai Sigandu-Ujungnegoro; serta
- Kawasan GOR & Stadion.

Dengan prioritas pada titik-titik tersebut, penataan diharapkan mampu mendongkrak daya tarik Kota Batang, mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan estetik bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Pengembangan Jaringan Prasarana Permukiman

1) Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

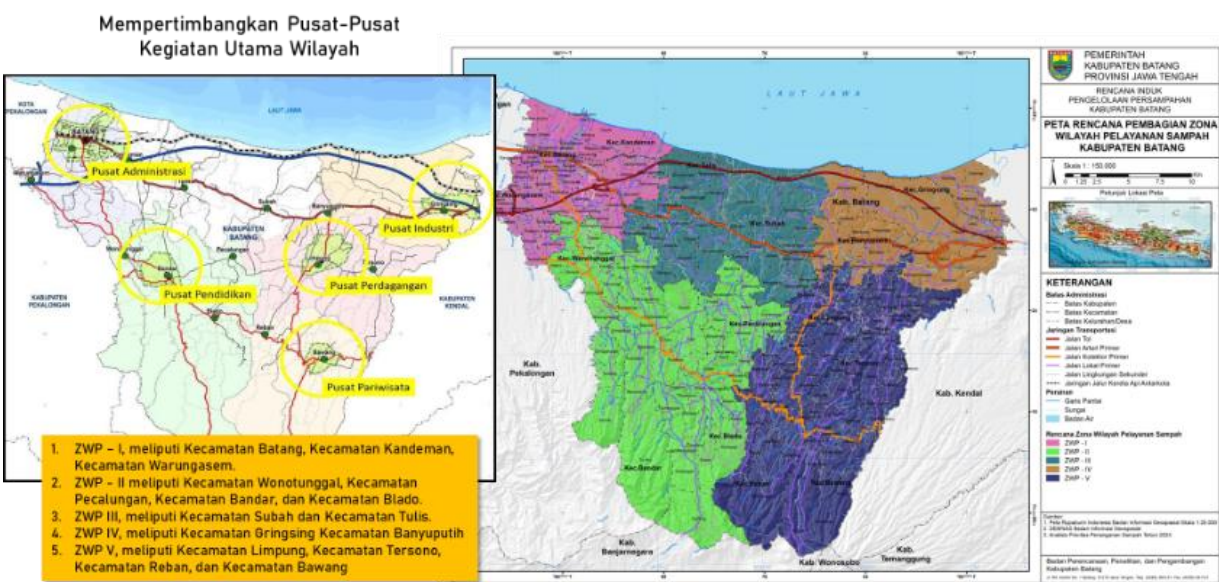
Mendasari kondisi sampah yang telah menggunung serta *overload*, TPA Randukuning Kabupaten Batang, perlu dilakukan upaya guna menangani sampah di Kabupaten Batang yang kian melonjak. Penggunaan metode *Open Dumping* mengakibatkan pencemaran lingkungan, *overload*, dan Risiko Kesehatan.

Konsep pengelolaan sampah dilakukan melalui pendekatan hulu-hilir difokuskan pada upaya pengurangan sampah dan pengolahan sampah semaksimal mungkin (dengan pemanfaatan teknologi) untuk

mengurangi sisa residu sampah yang dilakukan antara lain melalui pembangunan TPS3R skala desa, TPST lokal/ kawasan, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah.

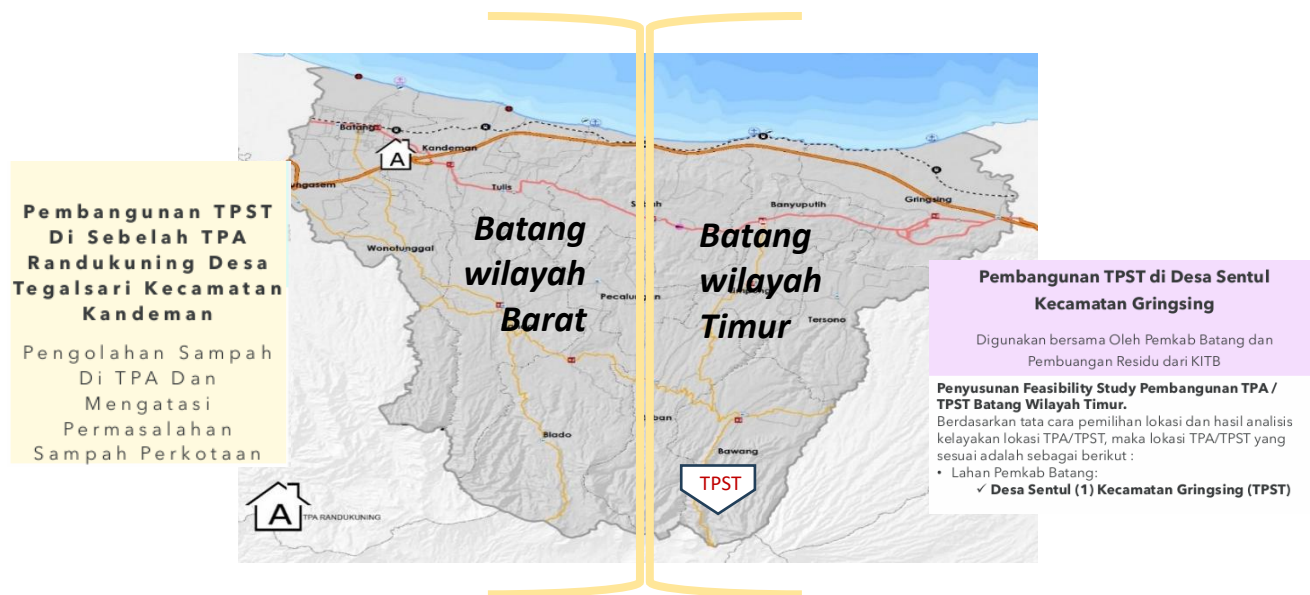
Strategi Jangka Pendek yang akan dilakukan :

- a) Memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan desa;
- b) Memperkuat kerja sama dengan swasta/ dunia usaha/ akademisi;
- c) Meningkatkan kemitraan pemanfaatan hasil pengolahan sampah (kompos, RDF, daur ulang sampah plastik,kertas, dll) oleh UMKM dan/atau industri;
- d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,
- e) serta pembinaan dan pendampingan bank sampah;
- f) Memperkuat regulasi baik perda maupun perdes.



Gambar 4. 6 Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Batang 2025-2045
Sumber : Bapelitbang, 2024

Penyiapan Sarana Pendukung TPST SENTUL dan RANDUKUNING



Gambar 4. 7 Pembagian wilayah persampahan dan penanganannya di Kabupaten Batang
Sumber : Bapelitbang, 2024

2) Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Strategi rencana pengembangan sistem penyediaan air minum terbagi dalam dua wilayah sebagai berikut :

Wilayah Perkotaan :

- ✓ Penambahan sambungan rumah disetiap tahunnya untuk meningkatkan persentase pelayanan;
- ✓ Pengendalian kebocoran yang dilakukan melalui penurunan kebocoran secara bertahap;
- ✓ Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; dan
- ✓ Peningkatan efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan.



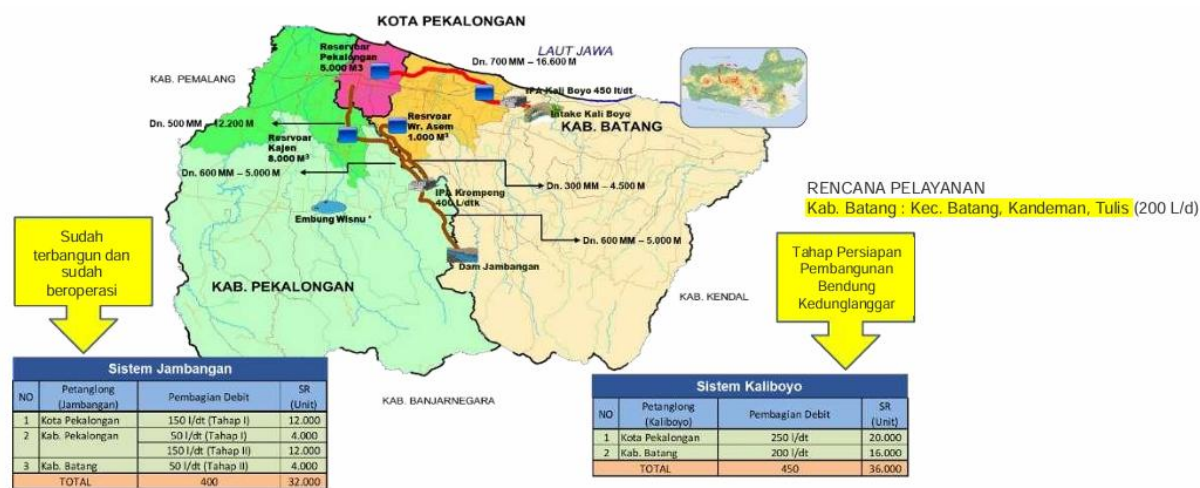
Gambar 4. 8 Prinsip Penyediaan Air Minum
Sumber : Tercantum

Wilayah Perdesaan :

- ✓ Sosialisasi program penyediaan air bersih kepada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum jaringan perpipaan maupun akses air minum aman;
- ✓ Menjadikan lokasi BJP (Bukan Jaringan Perpipaan) masuk ke dalam jaringan perpipaan (melalui program PAMSIMAS, DAK, dan/atau Hibah Air Minum).

3) Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Rencana Pengembangan SPAM Regional tersaji pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4. 9 Rencana Pengembangan SPAM Regional
Sumber : Bapelitbang, 2024

4) Jalan dan Drainase Lingkungan

Isu Permasalahan dan Kebutuhan Penanganan sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Penanganan Jalan dan drainase Lingkungan

Aspek	Isu Permasalahan	Kebutuhan Penanganan
Jalan Lingkungan	- Jalan lingkungan dalam kondisi sedang – buruk - Pengembangan jalan coastal road	- Pengaturan pembangunan dan pemanfaatan jalan lingkungan - Pembangunan jalan lingkungan baru - Perbaikan jaringan alan yang mengalami kerusakan
Drainase	- Kurang baiknya kondisi drainase lingkungan - Sedimentasi sungai - Sistem drainase tercampur oleh air hujan dan air buangan rumah tangga - Sebagian besar saluran drainase dalam keadaan kurang memadai - Banyak saluran yang tidak berfungsi - Terdapat beberapa kawasan jalan yang belum memiliki drainase - Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase masih rendah	- Penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan - Membangun drainase baru - Memisahkan saluran drainase dari saluran air limbah - Memperbaiki saluran drainase yang rusak

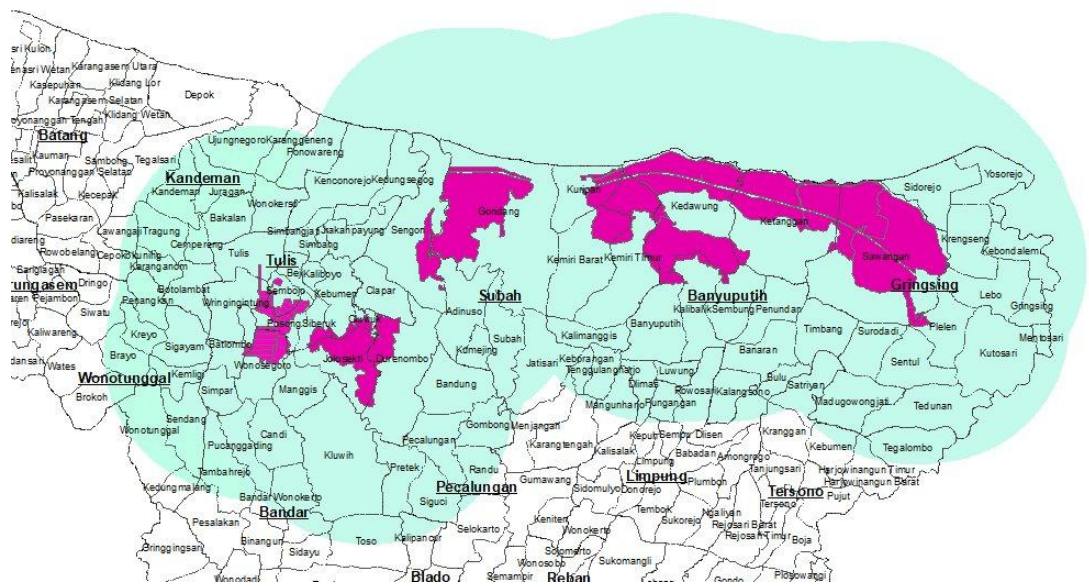
Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

c. Pengembangan Jaringan SPAM IKK Banyuputih

Banyuputih merupakan satu-satunya Ibu Kota Kecamatan yang belum ada jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Kecamatan Banyuputih sebagai salah satu kawasan penyangga penting KITB yang diperkirakan bertambah penduduk yang mengakibatkan bertambah-nya kebutuhan prasarana permukiman dimana Kecamatan Banyuputih juga sering terjadi kekeringan saat musim kemarau.

Pembangunan SPAM Di Kec. Banyuputih Yang Merupakan Penyangga KIT Batang rencananya (1) Menggunakan Mata Air

Bangkangan dengan debit 100 ltr/dtk, (2) Dalam proses penyusunan Review FS dan DED (oleh PERUMDAM) serta (3) Rencana pemanfaat untuk 2000 SR

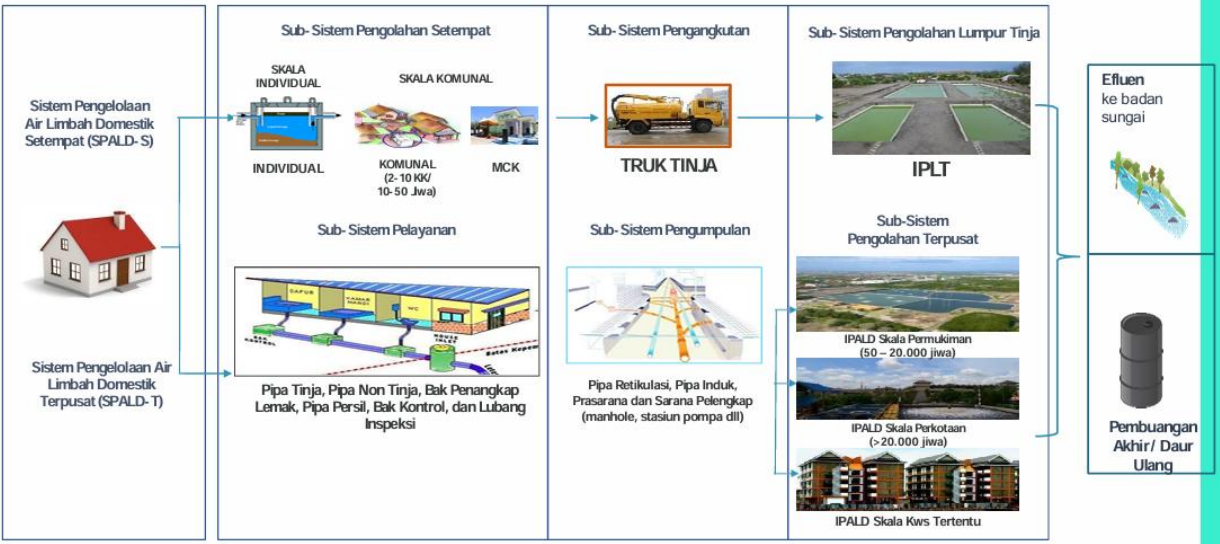


Gambar 4. 10 Rencana SPAM IKK Banyuputih
Sumber : RISPAM (review 2022), Jakstrada AM (2023)

d. Rencana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)

Dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik disusun strategi Jangka Pendek antara lain:

- ✓ Peningkatan akses sanitasi layak (kloset menggunakan leher angsa dan menggunakan tangki septik) dan sanitasi aman (rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 3-5 tahun terakhir);
- ✓ Peningkatan sarana prasarana layanan pengelolaan air limbah (Optimalisasi IPLT Randukuning);
- ✓ Penguatan kerja sama dan pola pendanaan;
- ✓ Pembentukan kelembagaan manajemen pengelolaan air limbah domestik (UPTD PAL);
- ✓ Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
- ✓ Penyusunan dokumen RISPALD Kabupaten Batang;
- ✓ Updating dokumen EHRA (Environment Health Risk Assessment) (rencana 2025) dan updating dokumen SSK (Rencana 2026)



Gambar 4. 11 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 3027 tentang Penyelenggaraan SPALD

e. Rehabilitasi Sistem Irigasi (Bendung dan Jaringan Irigasi)

Rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi air ke lahan pertanian, menurunkan risiko kekeringan, serta memperkuat produktivitas sektor pertanian sebagai kunci ketahanan pangan daerah. Dengan sistem irigasi yang baik, petani dapat mengelola musim tanam dengan lebih teratur dan hasil panen lebih optimal, sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan daerah. kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi, mencakup bendung dan jaringan irigasi eksisting serta koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan pihak terkait lainnya..

f. Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan identifikasi lokasi-lokasi kawasan kumuh yang disusun oleh masing-masing daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi wewenang. Kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektar ditangani oleh Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 Ha ditangani oleh Pemerintah Pusat.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Batang telah dilakukan pemutakhiran data dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah dan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Jawa III, serta diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Lokasi kumuh di Kabupaten Batang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/422/2023 tertanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang. Lokasi kumuh meliputi 64 (enam puluh empat) lokasi yang tersebar di 11 (sebelas) desa/kelurahan, di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman, dengan luas total sebesar 105,38 (seratus lima koma tiga puluh delapan) hektar. SK tersebut ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Batang, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

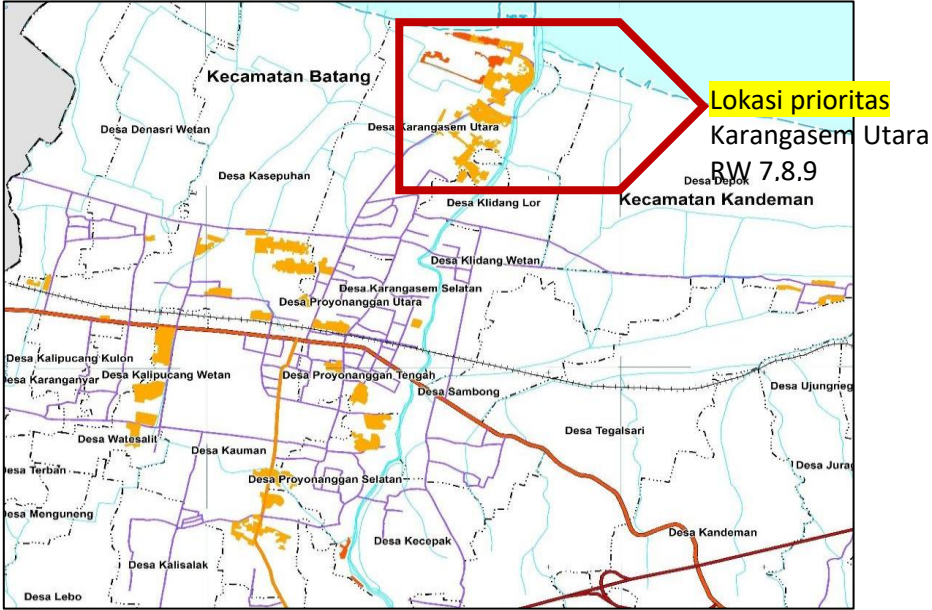
Berdasarkan hasil Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 dengan mempertimbangkan perhitungan kolaborasi penanganan kumuh (APBD II, APBD I, APBN, dan pihak lainnya) bersama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), telah dihitung capaian penanganan kawasan kumuh tingkat Kabupaten sebesar 20,94 ha dengan luas kumuh awal 95,58 ha. Terdapat 3 desa/ kelurahan di Kabupaten Batang yang telah mencapai luas kumuh 0 ha. Sehingga total luasan kumuh di Kabupaten Batang pada awal tahun 2024 adalah sebesar 74,64 ha meliputi 11 desa/ kelurahan dalam 2 kecamatan. Luasan kumuh dapat bertambah jika dilakukan pendataan ulang (update baseline survey). Lokasi kumuh di Kabupaten Batang pada awal tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 10 Lokus Kawasan Kumuh Kabupaten Batang

No.		Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh (ha)	Kewenangan
A.	1.	Batang	Denasri Wetan	0,51	
	2.	Batang	Karangasem Selatan	2,26	
	3.	Batang	Karangasem Utara	34,78	Pusat
	4.	Batang	Kasepuhan	20,87	Pusat
	5.	Batang	Kauman	9,34	
	6.	Batang	Klidang Lor	0,87	
	7.	Batang	Proyonanggan Selatan	10,75	Provinsi
	8.	Batang	Proyonanggan Tengah	4,21	
	9.	Batang	Proyonanggan Utara	3,09	
	10.	Batang	Watesalit	15,32	Pusat
B.	11.	Kandeman	Depok	3,38	

Total	105,38	

Sumber : SK Bupati Batang Nomor 050/422/2023 dan BA Pengurangan Kumuh Tahun 2023.



Gambar 4. 12 Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Batang
 Sumber : SK Bupati Nomor 050/422/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batang

Sementara itu, kawasan Karangasem Utama yang berada di Kecamatan Batang dengan luas kumuh terluas yaitu 33,15 Ha. Kawasan ini memiliki nilai strategis dalam penanganan kumuh di Kabupaten Batang karena berada di Ibukota Kabupaten Batang dan memiliki potensi dalam pembangunan Kabupaten Batang yaitu Kawasan Pelabuhan. Arah pengembangan penanganan kumuh pada kawasan ini yaitu peningkatan dan pengembangan wisata muara sungai sambong serta pembangunan *coastal road* pencegah abrasi.

g. Aksesibilitas dan Prasarana-Sarana Jalan

- Aksesibilitas Menuju Kawasan Industri Dengan Kawasan Penyangga

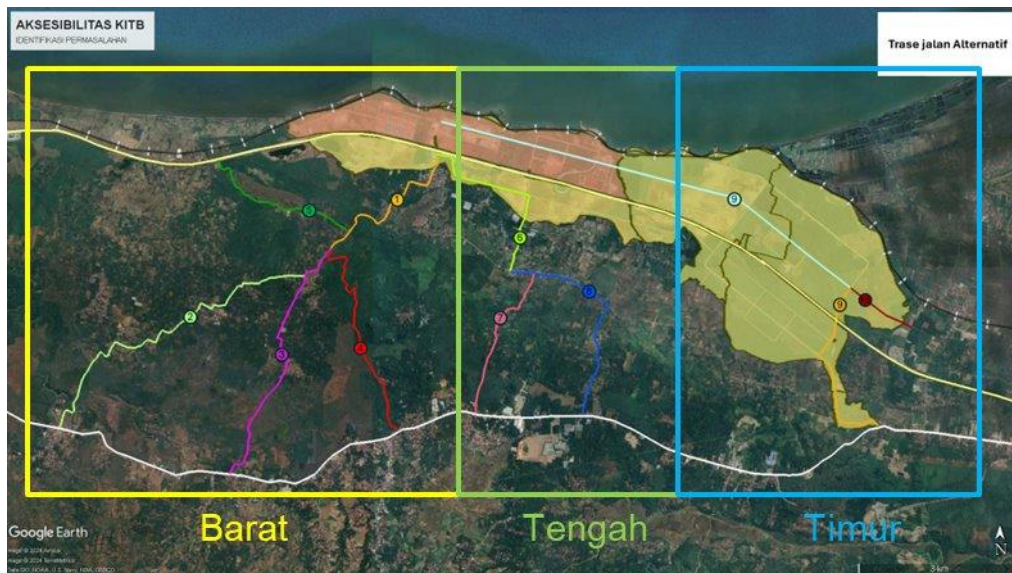
Rencana Pembangunan akses jalan dan transportasi :

- Pembangunan akses jalan khusus industri**
 - Dapat mengakomodir masyarakat dari sisi barat dan Selatan KITB
 - Tidak melewati permukiman (lewat Perhutani)
 - Langsung menuju jalan pantura
- Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa**
 - Peningkatan dimensi dan kualitas perkerasan
 - Penambahan rambu-rambu

- Pertimbangan peningkatan kelas jalan
- Penataan permukiman di Kaw. Penyangga

3. Pengembangan Transportasi Umum

- Mudah diakses, Terjangkau, Nyaman
- Integrasi antar moda



Gambar 4. 13 Akses Jalan Ke KITB

Sumber : Bapelitbang, 2025

- **Peningkatan Jalan Kabupaten**

Kabupaten Batang memiliki total panjang jalan 553.995 meter, dengan kondisi jalan saat ini terdiri dari 59% dalam kondisi baik, 27% sedang, 10% rusak, dan 4% rusak berat. Data ini menunjukkan pentingnya percepatan peningkatan kualitas jalan untuk mendukung kebutuhan aksesibilitas masyarakat dan pembangunan daerah. Melalui program peningkatan jalan kabupaten, pemerintah fokus pada peningkatan jalan-jalan strategis dengan konstruksi beton untuk mendukung prioritas pembangunan nasional maupun kebutuhan lokal. Berikut adalah beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian:

1. Banyuputih – Kedawung sepanjang 7.791 meter dengan alokasi Rp19,282 miliar, menjadi akses pendukung PSN KITB.
2. Subah – Kedawung sepanjang 10.420 meter dengan anggaran Rp25,789 miliar, berfungsi sebagai jalur utama menuju PSN KITB.
3. Kalimanggis – Kedawung Pos sepanjang 5.050 meter dengan anggaran Rp12,498 miliar, mendukung PSN KITB.

4. Kasepuhan – Sicepit sepanjang 2.700 meter dengan anggaran Rp120 miliar, mendukung pelabuhan Batang dan akses pariwisata.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan jalan kabupaten ini mencapai Rp313,366 miliar. Dengan fokus pada konstruksi beton yang tahan lama, program ini bertujuan untuk menciptakan aksesibilitas yang lebih baik menuju pusat-pusat ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta destinasi pariwisata.

Program ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, memudahkan distribusi hasil produksi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan peningkatan jalan kabupaten, Kabupaten Batang siap melangkah maju menjadi daerah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi

h. Drainase dan Penanganan Banjir

Dalam penanganan banjir di perkotaan Batang Khususnya di Kecamatan batang (Desa Kalipucang Wetan, Desa Kalipucang Kulon, dan Kelurahan Watesalit), dilakukan dengan beberapa tahap penanganan, yaitu:

1. Penanganan Sub DAS Kali Gabus. terdiri dari 9 Sub DAS . pekerjaan bisa dilakukan dengan normalisasi sungai Gabus, serta perencanaan dimensi baru saluran di Jl. Perintis Kemerdekaan.
2. Penanganan Rencana Embung. terdiri dari tubuh embung, bangunan Pelimpah, Bangunan Pengambilan, Bangunan Rumah Pompa,

Dari 2 tahapan ini, pada 2026 dapat dilakukan penanganan Sub Das Kaligabus.

i. Kebencanaan dan Adaptasi Perubahan Iklim

1) Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Program - RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA 2023-2027
kebencanaan dan upaya mitigasi bencana belum menjadi prioritas	1) Program penanggulangan bencana, 2) Pelayanan informasi rawan bencana, 3) Program Pengembangan Perumahan, 4) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, 5) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, 6) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, 7) Program penanganan bencana, 8) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten, 9) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten
Tata ruang belum mempertimbangkan harmonisasi hulu hilir	1) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten, 3)
Alih fungsi lahan di kawasan berfungsi lindung atau penyangga	1) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh), 2) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, 3) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
Sistem kesiapsiagaan dan pemulihan pasca bencana di daerah masih rendah	1) Program penanggulangan bencana, 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) Program penataan bangunan dan lingkungannya, 4) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten, 5)
Meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian bencana	1) Program peningkatan kerjasama antar desa, 2) Fasilitas kerjasama antar desa, 3) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, 4) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten, 5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 6) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten

Gambar 4. 14 Renaksi Penanggulangan Bencana 2023-2027
Sumber : Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027

2) Rencana Aksi Perubahan Iklim

Rencana Aksi Daerah Adaptasi perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Pesisir antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Pesisir
 2. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Adaptasi Pesisir
 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pesisir
 4. Edukasi, Kesadaran, dan Riset
 5. Pembangunan Responsif Gender
- **Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Air**, antara lain :
 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Air
 2. Manajemen Air dan Ketahanan Bencana
 3. Akses Air Minum dan Pengelolaan Air Bersih
 4. Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem
 5. Peninjauan dan Penyesuaian Tata Ruang
 6. Membangun Sistem Peringatan Dini Bencana
 - **Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan iklim Sektor Ketahanan Pangan**, antara lain :
 5. Ketahanan Pangan
 6. Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
 7. Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Pertanian
 - **Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan**, antara lain :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan
2. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit terkait iklim
3. Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih.

j. Penataan Pesisir

Kerusakan terparah terjadi di sepanjang Pantai Sigandu hingga Ujungnegero. Abrasi ini telah merusak bangunan milik pelaku dan menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian. Jika dibiarkan, maka kerusakan lingkungan menjadi semakin parah. Hasil identifikasi dari tahun 2009 hingga 2017 garis pantai mengalami kemunduran antara 50 m - 100 m. Garis pantai terbagi dalam 3 segmen dengan kondisi sebagai berikut :

1. Segmen 1 : batas Kabupaten Pekalongan - dermaga batang dengan 3 titik abrasi sebagai berikut :
 - Abrasi 1 seluas 87,287 m² di desa Denasri Kulon
 - Abrasi 2 seluas 9.533 m² di desa Kasepuhan
 - Abrasi 3 seluas 10.103 m² di desa Karangasem Utara
 Kondisi Eksisting Intrusi Air Laut desa Luas Area genangan 3,022,841 m² didesa Denasri kulon, Denasri Wetan.
2. Segmen 2 : dari pantai Sigandu – Ujungnegero dengan 4 titik abrasi sebagai berikut :
 - Abrasi 4 seluas 48.408 m² di desa Klidang Lor
 - Abrasi 5 seluas 5.791 m² di desa Klidang Lor
 - Abrasi 6 seluas 76.493 m² di desa Depok
 - Abrasi 7 seluas 4.844 m² di desa Ujungnegero Tulis
 Kondisi Eksisting Kerusakan Bangunan disekitar pantai sigandu.
3. Segmen 3 : dari Ds Kenconorejo Kec Tulis - Ds Yosorejo Kec Gringsing dengan 1 titik abrasi sebagai berikut :
 - Abrasi 8 seluas 27.585 m² di desa Gondang Kec Subah
 Kondisi Eksisting Pencemaran Lingkungan tidak ada hanya sebagian titik titik lokasi sampah di pantai.

Kondisi Eksisting Sedimentasi berada di pantai Roban

Rencana Penanganan Banjir, Rob dan Abrasi Pantai sebagai berikut :

○ Penataan permukiman/ fasilitas umum dan Kawasan	○ Instrumen AMDAL, UKL UPL Program Kali Bersih
○ Perlu penataan kawasan pertanian dan perkebunan	○ Program Pantai Lestari
	○ Penyediaan air bersih

- Konservasi dan rehabilitasi mangrove
- Pembatasan pembuatan sumur dalam
- Perbaiki system drainase
- Penataan Kawasan pantai
- Dilakukan kegiatan perawatan alur
- Dilakukan kegiatan perawatan dan monitoring
- Dilakukan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan bangunan
- Perlu dibuatkan bangunan pantai sebagai pelindung
- Penyuluhan masyarakat Pantai mengenai pentingnya terumbu karang
- Penyuluhan manfaat hutan mangrove terhadap pengamanan Pantai
- Pembangunan bangunan penghambat laju erosi disesuaikan penyebabnya

Adaptasi lingkungan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penanaman Mangrove
2. Relokasi Bangunan
3. Pemasangan Batu
4. Pemasangan Trucuk Bambu
5. Pemasangan Geotube
6. Reklamasi Pantai

3. Kebijakan Sektoral Bidang Perekonomian dan SDA

a. Arah Kebijakan yang mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Batang

Ketahanan pangan di Kabupaten Batang melibatkan kerjasama dari berbagai lintas sektoral. Ketahanan pangan ditujukan untuk mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan di daerah karena suatu kondisi serta untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Kebijakan ketahanan pangan ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Batang.

Selain dukungan dari terbitnya Perbup tersebut, beberapa kebijakan spesifik yang mendukung ketahanan pangan daerah antara lain :

1) Food Loss dan Food Waste

Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang untuk menurunkan angka Food Loss dan Food Waste dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang kepada masyarakat untuk meningkatkan praktik penanganan pangan yang baik (good handling practices) dengan selalu menghabiskan makanan yang dimakan atau makan sesuai porsi yang dibutuhkan. Penurunan angka food loss dan food waste menjadi hal yang penting dilakukan karena syarat tercapainya

ketahanan pangan suatu daerah adalah adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan gizi bagi penduduk. Bahan pangan yang dapat diproduksi di dalam daerah diupayakan tetap menjadi pilar utama dalam penyediaan pangan daerah

2) Pengembangan Pertanian dan Peternakan untuk mendukung ketahanan pangan daerah

Pengembangan pertanian dan peternakan merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Batang. Dengan potensi lahan yang luas dan sumber daya alam yang mendukung, sektor pertanian dan peternakan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi dan diversifikasi usaha tani serta peternakan. Melalui penguatan kapasitas petani dan peternak, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Batang mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pertanian dan peternakan dilaksanakan melalui 4 paket kebijakan yaitu:

a. Peningkatan Produksi

- Mendorong penerapan *integrated farming* untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumber daya pertanian secara terpadu.
- Melaksanakan diversifikasi pangan alternatif, seperti singkong, ubi jalar, jagung, sukun, talas, porang, dan sorgum, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
- Mengembangkan peternakan sapi perah melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan.

b. Pengembangan Infrastruktur Pertanian

- Melakukan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi agar ketersediaan air untuk lahan pertanian tetap terjaga.
- Membangun lumbung dan gudang penyimpanan hasil panen untuk mengurangi kehilangan hasil dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

- Membangun dan memperbaiki jalan usaha tani (JUT) guna memperlancar distribusi hasil pertanian dari lahan ke pasar.
- c. Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan
- Mengoptimalkan hasil pertanian lokal sebagai rantai pasok utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung kecukupan gizi masyarakat.
 - Melakukan stabilisasi harga pangan pokok di pasar agar tetap terjangkau dan adil bagi petani serta konsumen.
 - Mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bersama Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan strategis di tingkat daerah.
- d. Pemberdayaan Petani
- Memberikan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani.
 - Menyediakan akses ke pembiayaan, benih unggul, pupuk bersubsidi, dan alat mesin pertanian (alsintan) agar petani dapat berproduksi secara efisien dan berkelanjutan.

3) Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Batang menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah serta posisi geografis yang strategis, sektor ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong inovasi dan kolaborasi di bidang kelautan dan perikanan. Strategi yang dilakukan antara lain:

- Dukungan dalam peningkatan status Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan daya tampung kapal nelayan.
- Pembangunan fasilitas *cold storage* guna meningkatkan kualitas dan masa simpan hasil perikanan sehingga produk perikanan tetap segar dan bernilai jual tinggi.
- Normalisasi sungai dan muara untuk memperlancar lalu lintas kapal nelayan serta mendukung kelancaran distribusi hasil tangkapan.

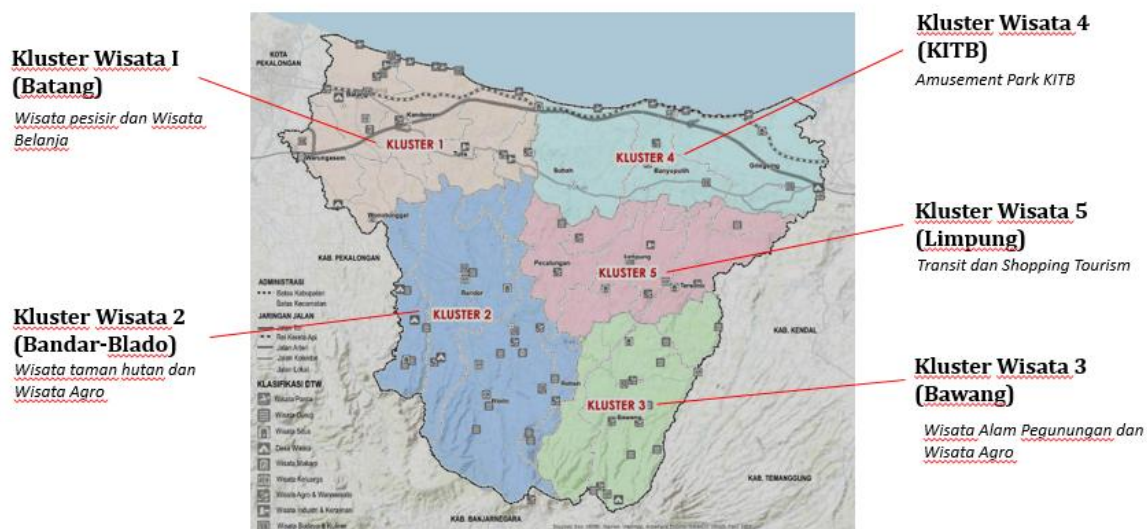
- Menerapkan sistem e-retribusi di Balai Benih Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi sektor perikanan.
- Pembangunan sentra pengolahan hasil kelautan dan perikanan, penguatan UMKM olahan laut, serta fasilitasi pemasaran melalui digitalisasi dan integrasi dengan *e-commerce*.

b. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata juga difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendukung destinasi wisata, integrasi paket wisata tematik yang menggabungkan potensi alam, desa wisata, budaya, kuliner, dan kearifan lokal, serta perluasan promosi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan akses jalan menuju objek wisata, penyediaan akses internet di kawasan wisata, pengembangan wahana wisata baru, dan optimalisasi media promosi wisata yang lebih efektif. Selain itu, penyusunan kalender pariwisata, penambahan jadwal kereta api di Stasiun Batang, serta perluasan rute transportasi umum dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan memastikan keberlanjutan event wisata sepanjang tahun. Penawaran paket wisata *short trip* dan *transit tour*, penyelenggaraan *event* pariwisata berskala regional hingga nasional, serta kolaborasi dengan *influencer*, komunitas, dan *travel agency* menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan pasar wisatawan

1) Pengembangan Kluster Pariwisata

Pengembangan kluster pariwisata Kabupaten Batang yang terbagi dalam 5 kluster pengembangan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini :



Gambar 4. 15 Pengembangan Kluster Pariwisata Kabupaten Batang
Sumber : Kajian Pariwisata Kabupaten Batang

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Batang difokuskan pada revitalisasi lokasi unggulan dan pengembangan lokasi potensial. Lokasi unggulan diarahkan pada kawasan wisata Pantai Sigandu-Ujungnegoro yang merupakan penopang utama pariwisata daerah. Sementara itu, lokasi potensial yang akan dikembangkan adalah Bandar *Ecopark* yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar. Strategi pengembangan pariwisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Revitalisasi Wisata Unggulan

Sebagai salah satu destinasi wisata utama, pantai Sigandu memerlukan bangunan ikonik yang berfungsi sebagai daya tarik wisata dengan arsitektur yang mencerminkan budaya lokal. Selain itu, penataan area pantai yang mencakup peningkatan fasilitas umum, seperti toilet bersih dan tempat sampah, serta penyediaan area istirahat yang nyaman bagi pengunjung juga menjadi prioritas pengembangan. Dalam satu kawasan terintegrasi yang masih menjadi bagian dari kawasan wisata pantai Sigandu, Pantai Ujungnegoro juga akan mendapatkan perhatian khusus dalam penataan amenitas. Peningkatan fasilitas umum dan pengembangan area komersial untuk penjual makanan dan souvenir lokal yang dapat memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung.

b) Pengembangan Lokasi Potensial

Lokasi potensial yang akan dikembangkan yaitu Bandar *Ecopark*. Bandar *Ecopark* ditingkatkan dengan penataan area parkir yang luas dan terorganisir, serta pembangunan *playground* yang aman dan ramah lingkungan bagi anak-anak. Penambahan area hijau dan tempat duduk untuk para pengunjung akan menciptakan lingkungan yang lebih

nyaman bagi keluarga, menjadikannya sebagai destinasi yang menarik untuk rekreasi dan edukasi lingkungan.

c. Pengembangan Peternakan Sapi Perah

Pengembangan peternakan sapi perah di Kabupaten Batang bertujuan untuk meningkatkan produksi susu, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan, dengan fokus pengembangan di Desa Pacet dan Desa Semampir, Kecamatan Reban. Kebutuhan utama dalam pengembangan ini meliputi pengadaan mesin pencacah untuk penyediaan pakan ternak dan Tempat Penampungan Susu yang memadai untuk menjaga kualitas susu. Keberadaan Nestlé Bandaraya Factory di Batang Industrial Park (BIP) berfungsi sebagai mitra strategis, menyerap hasil produksi susu dari peternak lokal dan memberikan dukungan teknis. Selain itu, pelatihan bagi peternak diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen peternakan dan pengolahan susu.

d. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kabupaten Batang diarahkan pada penguatan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, koperasi, komunitas UMKM, dan media untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan modal, teknologi, pemasaran, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah menempatkan penguatan UMKM dan koperasi sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Melalui kebijakan afirmasi yang terarah, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar dan jaringan distribusi produk lokal. Upaya ini juga didukung dengan penyediaan berbagai fasilitas dan sarana pendukung di lokasi-lokasi strategis, sehingga UMKM dan koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Strategi pengembangan UMKM dan Koperasi tahun 2026 dilakukan melalui:

Strategi Pengembangan UMKM

UMKM memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi, penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas

utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Strategi pengembangan UMKM dilakukan dengan:

- Melaksanakan pendampingan dan inkubasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.
- Mengembangkan ekosistem digital guna memperluas akses pasar dan memperkuat adaptasi UMKM terhadap teknologi.
- Mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan permodalan dan pemasaran UMKM.
- Mendorong pembentukan minimarket berbasis komunitas untuk memperluas jaringan distribusi produk UMKM secara lokal.
- Menyediakan sentra UMKM di berbagai lokasi strategis, seperti Asrama Polisi Alun-Alun, Sepadan Sungai Sambong, BTP, Pujasera RSUD, dan Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) KITB, sebagai pusat aktivitas, promosi, dan pemasaran produk UMKM.

Strategi Pengembangan Koperasi

Strategi pengembangan koperasi diarahkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, solusi permodalan, serta motor penguatan ekonomi desa dan UMKM. Langkah ini dilakukan dengan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, guna memastikan setiap desa memiliki koperasi yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi warga, mulai dari layanan simpan pinjam, lumbung pangan, gudang logistik, hingga pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan manajemen, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan usaha berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil perikanan dan pertanian, agar koperasi mampu menghasilkan produk unggulan yang layak bersaing di pasar modern. Pemberdayaan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi perizinan, peningkatan tata kelola, pengawasan kesehatan koperasi, serta digitalisasi layanan koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan anggota.

Pengembangan koperasi juga diarahkan untuk menjadi solusi akses permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sehingga tidak lagi bergantung pada tengkulak dan dapat memperkuat posisi tawar dalam rantai distribusi hasil panen. Koperasi didorong untuk membangun kemitraan dengan perbankan, pemerintah, dan sektor swasta, serta

mengembangkan unit usaha baru berbasis kebutuhan desa. Strategi pengembangan koperasi dilakukan melalui:

- Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.
- Optimalisasi peran koperasi sebagai penyerapan hasil pertanian dan perikanan langsung dari petani dan nelayan.
- Penyediaan pelatihan manajemen, pelatihan teknis pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta sertifikasi kompetensi bagi pengurus dan anggota koperasi.
- Fasilitasi perizinan, meningkatkan tata kelola, dan melakukan pengawasan kesehatan koperasi secara berkala.
- Digitalisasi layanan koperasi, termasuk sistem keuangan, pemasaran, dan pelaporan.
- Pengembangan unit usaha koperasi berbasis kebutuhan desa.
- Kemitraan koperasi dengan perbankan, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperluas akses permodalan, pemasaran, serta memperkuat jejaring usaha koperasi di tingkat daerah maupun nasional.
- Perlindungan terhadap koperasi dan UMKM dari persaingan tidak sehat dengan toko modern melalui kebijakan pengaturan jam operasional minimarket dan swalayan, sehingga pasar tradisional dan koperasi tetap dapat berkembang.
- Pelibatan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja koperasi di setiap desa untuk memastikan keberlanjutan, dampak ekonomi, dan kontribusi terhadap kemandirian desa serta pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Sebagai salah satu daerah yang kini menjadi pusat pertumbuhan industri nasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Pemerintah Kabupaten Batang menempatkan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Kehadiran KEK tidak hanya menghadirkan peluang investasi besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja baru yang harus direspons dengan

peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk itu, pemerintah daerah merancang strategi kebijakan penurunan pengangguran yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di KEK, sekaligus memastikan masyarakat Batang mampu bersaing dan berperan aktif dalam ekosistem industri modern. Strategi penurunan pengangguran di Kabupaten Batang antara lain:

- Menyelenggarakan Program DAKER (Dapat Kerja) berupa pelatihan keterampilan dan penempatan kerja yang terfokus pada kebutuhan sektor industri.
- Menetapkan aturan serapan tenaga kerja lokal melalui penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan perusahaan di kawasan industri, guna memastikan prioritas tenaga kerja Batang dalam setiap rekrutmen.
- Melaksanakan program kejar paket untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal, sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.
- Menyediakan program beasiswa dan bimbingan belajar (bimbel) bagi generasi muda Batang agar dapat lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik, sehingga tercipta SDM unggul yang siap bersaing di dunia kerja.

Mengoptimalkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pelaku industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah pusat, untuk memperluas akses pelatihan, magang, dan penempatan tenaga kerja lokal di KEK Industropolis Batang.

f. Peningkatan Investasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dari investor nasional maupun internasional. Dalam upaya ini, pemerintah merumuskan kebijakan strategis yang berfokus pada promosi potensi investasi daerah, dengan penekanan khusus pada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). KITB dirancang sebagai pilar utama dalam kebijakan investasi, menawarkan lokasi strategis di jalur transportasi utama, serta fasilitas lengkap yang mendukung operasional industri. Pemerintah memberikan dukungan penuh dalam bentuk kemudahan perizinan dan layanan satu atap bagi investor. Untuk menarik minat investor, pemerintah melakukan berbagai kegiatan promosi, seperti

pameran dan forum investasi, serta menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk memperkenalkan potensi investasi di Kabupaten Batang. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Melalui langkah-langkah terencana ini, Kabupaten Batang berupaya menjadi destinasi investasi yang menarik dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

4. Arah Kebijakan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Batang diarahkan kepada pengembangan kawasan yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan industri. Diharapkan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan industri dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, mendorong kemandirian daerah dalam kemampuan keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Kawasan industri di Kabupaten Batang yang telah berdiri dan sedang dikembangkan yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berada di Kecamatan Banyuputih dan Gringsing, dan Batang Industrial Park (BIP) yang berada di Kecamatan Tulis. Di samping itu masih ada rencana pengembangan kawasan industri baru yang juga berlokasi di Kecamatan Tulis.

Berdasarkan tinjauan lokasi kawasan industri di Kabupaten Batang memiliki akses yang baik dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang serta dengan adanya jalan tol Trans Jawa. Akses melalui jalan non-tol juga tersedia khususnya menuju lokasi tapak yaitu jalan raya Pantura. Hal ini juga mendorong bertumbuhnya kawasan penyangga di sekitar kawasan industri, terutama sektor perumahan dan penyediaan barang jasa yang membutuhkan infrastruktur pendukung kawasan. Kebutuhan *supply chain* (semisal penyediaan kardus untuk bungkus produk tertentu) dalam kawasan juga berpotensi untuk dikerjakan oleh investor lokal sehingga dapat meningkatkan usaha UMKM. Keberadaan

kawasan industri akan membutuhkan kurang lebih 300 ribu tenaga kerja dan secara demografi mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat di sektor agraris menuju sektor industri. Untuk itu diperlukan pelatihan agar siap untuk dipekerjakan. Isu lingkungan juga tetap menjadi perhatian utama agar keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang dapat dipertahankan kualitasnya.

Strategi pengembangan kawasan industri

Upaya dan strategi dalam mencapai tujuan sasaran pengembangan kawasan industri :

1. Kesesuaian arah pengembangan industri/UMKM dengan kawasan atau zona peruntukannya.:
 - Pengembangan industri kecil disesuaikan dengan zonasi (Kecamatan memiliki RDTR) dan Kawasan (kecamatan yang belum memiliki RDTR).
 - Pengaturan ketentuan Terbatas dan Bersyarat pada zonasi perdagangan jasa yang difokuskan pada pengembangan UMKM Lokal.
2. Pengembangan Infrastruktur pendukung, melalui :
 - Peningkatan kualitas akses jalan raya dan jembatan (lebar jalan, drainase, dll)
 - Penyiapan jaringan air bersih, energi listrik ramah lingkungan dan telekomunikasi
 - Penyiapan pengelolaan sampah terpadu
3. Pengembangan Sarana Transportasi, melalui
 - Pengkajian studi MRL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas)
 - Penyediaan moda transportasi massal yang terintegrasi
 - Penyediaan halte yang nyaman, aman dan ramah bagi kaum rentan
4. Menyiapkan UMKM dan BUMDes agar menjadi pendukung secara langsung maupun tidak langsung keberadaan kawasan ekonomi melalui :
 - Pelatihan pengembangan aspek manajerial
 - Pelatihan pelayanan prima
 - Pelatihan Pemasaran Produk
 - Pemahaman tentang dokumen kerjasama
 - Pelatihan mengembangkan usaha dari peluang yang ada

- Pengembangan ekonomi lokal berbasis penguatan rantai usaha
 - Identifikasi rantai usaha sektor unggulan di luar kawasan industri.
 - Pengembangan ekonomi dengan konsep klaster usaha
5. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikasi sesuai kebutuhan, melalui:
- Penyiapan Unit Karir yang menjadi penghubung bagi perusahaan yang membutuhkan pegawai dengan spesifikasi, kriteria dan persyaratan tertentu.
 - Pelatihan keterampilan bagi calon karyawan atau karyawan, baik yang bersertifikasi BNSP maupun yang tidak bersertifikasi.
6. Mengembangkan Kerjasama dengan berbagai pihak melalui :
- Penyipian kerjasama dalam nemtuk : Bangun-Operasi-Serahkan (*Built, Operate, and Transfer*), Bangun Serah (*Built and Transfer*), Bangun Kelola Miliki (*Built, Operate and Own*) Konsensi (*Concession*), Leasing, Bagi Hasil, Kontrak Pelayanan, Management Contract, terutama dalam desain dan bangun; desain, bangun dan kelola; desain, bangun, kelola dan mendanai, pembangunan.
 - Pengembangan kerjasama dengan berbagai Non governmental organization (NGOs) dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan.

Aksesibilitas Kawasan Industri dengan Kawasan Penyangga

Jalan Kabupaten cukup penting sebagai akses menuju KITB dan juga digunakan masyarakat dalam setiap hari, terdapat dengan kondisi jalan yang rusak karena dilewati kendaraan berat dalam masa pembangunan KITB. Selain itu lebar jalan yang hanya 4 meter diperkirakan akan menghambat aksesibilitas dan berpotensi terjadi kemacetan di waktu mendatang, terlebih belum tersedianya moda angkutan umum yang pasti dan menjangkau Kawasan Industri.

Jalan yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja BIP, dengan kondisi saat ini:

- Jalan Bandar – Tulis, panjang 10 Km lebar 4 m. Jalan ini membelah KI BIP, menghubungkan pantura Kec Tulis dan bandar.

- Jalan Tulis – Batiombo, panjang 4,3 Km lebar 4 m. menghubungkan pantura tulis dari arah barat
- Jalan Cempereng – Botolambat, panjang 5 Km lebar 4 m. menghubungkan pantura Kandeman

Jalan yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja KITB, dengan kondisi saat ini:

- Jalan Plelen – Kedawung, panjang 11,6 Km lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Gringsing
- Jalan Banyuputih – Kedawung, panjang 7,35 Km lebar 4 m. merupakan jalan masuk dari Pantura Banyuputih
- Jalan Kedawung – Mangunsari, merupakan jalan yang melewati KI menghubungkan Dukuh Mangunsari dan Pantai Celong.
- Jalan Kalimanggis – Kedawung Pos, panjang 5.5 Km lebar 3 m. merupakan jalan masuk dari Pantura Subah
- Jalan Subah – Kedawung, panjang 10,2 Km lebar 4 m merupakan jalan masuk dari Pantura Subah



Gambar 4. 16 Aksesibilitas menuju Kawasan Industri
Sumber : Bapelitbang, 2023

Agar strategi yang disiapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu disusun kebijakan. Kebijakan yang di maksud diantaranya adalah :

- a. Kajian Master Plan Kawasan penyangga keberadaan kawasan industri di Batang
- b. Regulasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah terkait Implementasi dari UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah

- c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan sekitar industri untuk mengantisipasi pengembangan kawasan permukiman
- d. Kajian MRL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) pada jaringan jalan sekitar kawasan industri
- e. Mendorong perusahaan yang ada di Kabupaten Batang (yang di dalam kawasan Industri maupun di luar kawasan) untuk menggunakan produk UMKM (Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
- f. Mendorong perusahaan yang ada di Kabupaten Batang (yang di dalam kawasan Industri maupun di luar kawasan) untuk menggunakan tenaga kerja asli Batang.
- g. Mendorong munculnya moda transportasi massal yang mampu melayani berbagai rute dan jalur serta terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi massal yang sudah ada.
- h. Mendorong payung hukum dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Inovasi Kabupaten Batang

Pada tahun 2023, terdapat 70 Perangkat Daerah yang memiliki inovasi daerah yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan masing-masing kategori sebagai berikut:

Gambar 4. 17 Daftar Inovasi di Kabupaten Batang Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
1	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG	SINAWAS (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan) LAKONE (Lapor dan Konsultasi Elektronik)
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG	JDIH DPRD Batang Terintegrasi E-Aspirasi Digital Library DPRD Pojok UMKM DPRD Kabupaten Batang
3	SATPOL PP KABUPATEN BATANG	MAS-Linmas LAPOR-PP
4	BAPELITBANG KABUPATEN BATANG	(DELIMA) Digitalisasi Izin Magang dan Penelitian Sentra Kekayaan Intelektual (HKI)
5	BPKPAD KABUPATEN BATANG	E-BPHTB E-PBB (Implementasi Digitalisasi Pelaporan dan Elektronifikasi Pembayaran pajak Bumi Bangunan) E-SPTPD GEBYAR PAJAK SIMPATDA

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		SP2D ONLINE
		SIKEND (SISTEM INFORMASI KENDARAAN)
		E-LAYANAN (Digitalisasi Pelayanan Perubahan Pajak Bumi Bangunan)
		SENSUS PAJAK
		BILLING CENTER
		BULAN KEPATUHAN PAJAK
		EPERBEND (Sistem Informasi Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah)
		SIM Aset (Sistim Informasi Pengelolaan Aset Daerah Terintegrasi)
6	BKD KABUPATEN BATANG	E-Kinerja
		E-Presensi
		SIMPEG Plus Pelayanan Kepegawaian Online
		Portal Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang
		Channel YouTube : BKD Kabupaten Batang
		E-Jabatan
7	BAKESBANGPOL KABUPATEN BATANG	Si-Elang
		SIOPA (Sistem Informasi Pengawasan Ormas, Parpol dan Orang Asing)
8	BPBD KABUPATEN BATANG	SIPITUNG (Siaga Pitulungan)
		SILADNA
		Alibaba (Aplikasi Layanan dan Informasi Bencana Batang)
		BASKOMLOG (Bantuan Satu Komando Logistik Penanggulangan Bencana)
9	DISDIKBUD KABUPATEN BATANG	Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang SMP
		Bandikmenti (Aplikasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah dan mahasiswa berprestasi)
		PAUD Holistik Integratif (Penurunan Stunting melalui kegiatan PAUD Holistik Integratif secara berkala)
		Transisi PAUD ke SD untuk menjembatani dan tidak menciptakan halangan tumbuh kembang anak
10	DINAS KESEHATAN BATANG	E-Logis (Elektronik Logistik Obat Di Puskesmas)
11	DPUPR KABUPATEN BATANG	Batang Smart Spasial Sistem (BS3)
		Sijantan (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan) Kab. Batang
		Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha Online
12	DPRKP KABUPATEN BATANG	CIAMIK (Citra Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman)
		Mas Darsani (Masyarakat Sadar Sanitasi dalam rangka percepatan ODF Memfasilitasi Masyarakat memiliki jamban sehat)
13	DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG	Sistem Informasi Santunan Kematian (e-Sakti)
		Sistem Informasi Santunan Kematian (e-Sakti)
		PUSKESSOS (Pusat Kesejahteraan Sosial)
14	DISNAKER KABUPATEN BATANG	Batang Career
		Sistem Informasi Data Hubungan Industrial (SIDAHI)
		Sistem Seleksi Online Peserta Pelatihan di Era Pandemi (SILENI)
15	DP3AP2KB KABUPATEN BATANG	TERAJANA (Integrasi Laporan Jejaring Dan Jaringan Keluarga Berencana)
		SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak)
		NGOPI KENCANA (Ngobrol Pagi Keluarga Berencana)
		CETING NGANTEN (Cegah Stunting Melalui Pendampingan Pengantin)
		NYANTING (Nyambangi Kasus Stunting)
		SAPA KELUARGA (layanan informasi dan konsultasi terkait permasalahan perempuan, anak, dan keluarga)
		EMPING GARING (Elektronik Monitoring Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting)
16	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG	Budidaya Coro Pedang dan Budidaya Talas Pratama
		Penelitian Pupuk Organik
		e-Pertanian

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		SIKEP
		E- Farming
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG	Pembentukan Pasukan Got
		Aplikasi Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan
		Pengelolaan Bank Sampah
		Inovasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
		Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Kerajinan
		Pengolahan Limbah dengan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah)
		Pengolahan Limbah dengan Biodigester
		Gerakan Setor Sampah Setiap Jum'at di OPD Kab. Batang
18	DISDUKCAPIL KABUPATEN BATANG	SIPPADUKA (Integrasi Pelayanan Pengadilan Agama, Disdukcapil dan KUA dalam hal perubahan status perkawinan)
		Podcast (Pelayanan Online Disdukcapil dengan Smathphone baik berbasis mobile)
		SISUK SARAHAN (SIK Masuk Desa Kelurahan)
		Calon Manten (Catatan Sipil Online untuk Masyarakat Kabupaten Batang)
		Cekatan (Cetak dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa turun dari Kendaraan (drive thru))
		Susis Bakpia (Semua Siswa Bakal Punya Kartu Identitas Anak)
19	DISPERMADES KABUPATEN BATANG	Pengisian Perangkat Desa Sistem CAT
20	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG	ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM)
		Penyelenggaraan Layanan KIR Online
21	DISKOMINFO KABUPATEN BATANG	SIGADIS (Desiminasi Data Statistik Sektoral dengan Infografis)
		Dashboard Sistem Informasi Eksekutif
		Penyelenggaraan Integrasi Layanan Panggilan Darurat 112 di Wilayah Kabupaten Batang
		Penerapan Sistem Perkantoran Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)
		Pembuatan E-Kliping Berita Daerah
		Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Android
		Podcast Special Bincang Batang
		Batangkab CSIRT
		Media Analytics
		SI TIKA (Sistem Informasi Statistik Sektoral)
		Perluasan Pengawasan Area Publik dengan CCTV
		Perluasan Jaringan Komunikasi Radio Komunitas
22	DISPERIDAGKOP & UKM KABUPATEN BATANG	CINTA PRODUK Batang
		KLINIK BISNIS (Sistem informasi dan sentra layanan konsultasi dan fasilitasi bisnis bagi Industri Kecil dan Menengah)
		E-Retribusi (Pengoptimalan retribusi darimenggunakan sistem elektronik)
23	DPMPSTP KABUPATEN BATANG	Mal Pelayanan Publik Kab. Batang
		Percepatan Pelayanan SIM Drive Thru Perpanjangan SIM A dan SIM C di Mal Pelayanan Publik Kab. Batang
		SIPUAS (Gerakan Setor Sampah Setiap Jum'at di OPD Kab. Batang)
		Service Point Pelayanan Perizinan Usaha
24	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG	Pembuatan buku E-katalog Ekonomi Kreatif
		Penerapan E-Tiketing
		Sinergitas Sistem Data Dan Pelaporan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Branding Batang melalui Kalender Event/Kalender Pariwisata
25	DISPERPUSKA KABUPATEN BATANG	SIMARDI (Sistem Manajemen Arsip Dinamis)
		JIKD (Jaringan Informasi Kearsipan Daerah)
		e-Perpus Batang
		Soleha (Strategi Olah Arsip Efektiv Dan Handal)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		Rasah Tuku (Gerakan Satu Orang Hibah Satu Buku)
		Sapu Geni (Saka Pustaka untuk Gerakan Literasi Berbasis Inklusi Sosial)
		ARTIS (Layanan Peminjaman Arsip Statis)
		TELENOVELA (Memasyarakatkan Literasi dengan Program satu Desa Satu Perpustakaan)
26	DISLUTKANNAK KABUPATEN BATANG	APLIKASI PENERBITAN REKOM BBM SUBSIDI
		APLIKASI PROFIL NELAYAN KECIL
		Aplikasi Profil Unit Pengolahan Ikan (UPI)
		Demplot Budidaya Ikan Air Payau (Polikultur Kerapu dan Bandeng) di Tambak
		Penandaan dan Pendataan Hewan menggunakan eartag berbasis aplikasi dengan scan barcode
		Pengelolaan Limbah Batubara Menjadi Rumah Ikan
27	BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG	Pembuatan Aplikasi Penyusunan Data Base LPPD dan LKPJ tahun 2024
28	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG	LAKON (Layanan Konsultasi) JDIH Kabupaten Batang
		Podcast JDIH
		Lomba menulis esai hukum
		Lomba Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa
		Lomba menulis esai hukum
		Ebook JDIH
		E-Sakip
		Penyelenggaraan dan Pengembangan Layanan Simpelbang (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan)
		SIPemerintahan Batang
		e-Agenda
		DIGITAL Kliping Internal Prokomin
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BATANG	Simpelbang NG (Sistem Informasi Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan New Generation) alamat web: simplerbang.Batangkab.go.id
30	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN BATANG	BPR BAPERA VIRTUAL ACCOUNT
31	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BATANG	E-Sakip
32	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BATANG	CILOG (LOMBA CIPTA LOGO DALAM RANGKA HUT KABUPATEN Batang)
		DIKENAL Prokomin (DIGITAL Kliping Internal Prokomin)
33	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BATANG	e-Agenda
34	KECAMATAN BATANG	SISTEM INFORMASI DESA (SID)
		Program Digitalisasi Buku Letter C Desa (PROTADES)
		PERMADANI (Persaudaraan Madani)
		ANTI GRATIFIKASI, SUAP dan KORUPSI
35	KECAMATAN TULIS	SISTEM INFORMASI DESA (SID)
		Program Digitalisasi Buku Letter C Desa (PROTADES)
		One Point Service
36	KECAMATAN WONOTUNGGAL	GERTAK PBB (Gerakan Serentak Pembayaran PBB)
37	KECAMATAN WARUNGASEM	LAPOR CAMAT WARAS
38	KECANATAN BLADO	Cepat Halalin
39	KECAMATAN BANDAR	Warung Pelayanan
40	KECAMATAN REBAN	Gebyar Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Serentak
41	KECAMATAN KANDEMAN	Monev SERASI (Senyum Ramah Selalu Inovatif)
42	KECAMATAN TERSONO	MANIS LEGIT SI GULA SEMUT
43	KECAMATAN GRINGSING	Desa LUK (Laboratorium Unit Kerja)
		GAPS (Gringsing Ayo Pilah Sampah)
		KETAN (Kecamatan Ramah Anak)
44	KECAMATAN BAWANG	Percepatan Pelayanan Perijinan melalui Klinik OSS menuju optimalisasi pemberdayaan UKM di Kecamatan Bawang Kab.Batang

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
45	KECAMATAN BANYUPUTIH	Kegiatan Gerakan Serentak Lunas Pajak PBB (GERTAK LUPA PBB)
46	KECAMATAN LIMPUNG	Gebyar PBB Serentak
47	KECAMATAN PECALUNGAN	Creative Farm
48	KECAMATAN SUBAH	Digitalisasi UMKM "Angkringan Ijin Usaha Mikro dan Kecil" Melalui pelayanan keliling ke Desa dan tempat keramaian (pasar)
49	RSUD BATANG	My RSUD Batang
50	RSUD LIMPUNG	Si Emping RSUD Limpung Elektronik Rekam Medis (ERM) RSUD Limpung
51	PUSKESMAS GRINGSING 1	SABTU BERKAH (abtu Bersama Makan Buah) SINGSET PUBER (Gringsing Sehat Pantau Bersama) SENIN AMUNISI SELASA AKRAB
52	PUSKESMAS BATANG 2	SUKET BIRU (Suluh Kesehatan Berhenti Merokok Yuk) KULTUM KIA (Kuliah Tujuh Menit buku KIA) BIOPORI ALAS ROBAN (Atasi Limbah Sampah Organik Karo Banjir) AKU GEMES (Aksi Menuju Generasi Merdeka Stunting) DIGAJI HEBAT (Gangguan Jiwa Harus Minum Obat) NYEDAK RONDHO (Nyetor Dahak Loro TBC Endho) PORA CETAR (PojoK Ramah Anak Cerdas Pintar)
53	PUSKESMAS BANDAR I	SIGITAR TUA (Implementasi Gigitan Ular Terkini dan Aktual) SAIFA (Sahabat Ibu Nifas) SADESAWAT (Satu desa satu perawat) KOPI PINTAR (Program Promkes dengan melakukan pemberian fotocopi materi saat penyuluhan kepada peserta agar bisa di baca dan dipelajari dengan baik) JEJAMA (Jelajah jamban masyarakat) KURMA MANIS (Kunjungan rumah ibu nifas dan bayi baru lahir) UBER SI MIKO (Berburu dengan investigasi microbacterium) KAMPAS (Kampanye peduli stunting) GREBEG MIKORESA PLUS PLUS GEPREK PITIK GEPREK BASO
54	PUSKESMAS BAWANG	BINA ASI (Bapak Ibu Nenek, Aku Mau Asi Eksklusif ini) CETING MAS (Cegah Stunting dengan Wong Meteng, ASI Eksklusif dan Sanitas) JUS TOMAT (Jumat Sehat Temukan Obat TB Masyarakat)
55	PUSKESMAS PECALUNGAN	JBRET (Jumat Berkah Entuk Sehat) SADESAPER GREBEG TIK-TOK (Tim gerak cepat terhadap kejadian penyakit menular (DBD))
56	PUSKESMAS REBAN	GEMBIL (Gerakan Bersama Jaga Ibu Hamil) POSYANDU CENDIKIA PLESIR
57	PUSKESMAS SUBAH	DE BASINEM (Desa binaan ASI thok nem wulan) PIJAT MESRA (Pijat mesra berupa pijat oksitocin yang merupakan pemijatan pada sepanjang tulang belakang) GERAK PESAT (Gerakan Serentak Pesan Singkat) SI GESIT IRIT (Diskusi gerakan komunikasi interaktif dan deteksi resiko tinggi)
58	PUSKESMAS BLADO I	BAMBANG TILANG (balita ditimbang stunting Hilang) JABAT KASIH (Jamban Sehat,kaline bersih) LASEGAR (Lansia Sehat dan Bugar) ANTI BAPER (Ayo Tingkatkan Imun bebaskan penyakit Tidak menular) SIDIKJARI (Sistim Informasi Dini Kesehatan Jiwa Mandiri) PIPI BAPAO (Pijat Pijat buat anak sehat tanpa obat) JAHE CANTING (Remaja Hebat Cegah Stunting) SIBUNTAR (Kelas Ibu Pintar)
59	PUSKESMAS BLADO II	Goyang Ibu Hamil Mantap

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		Susu Sapi (Susunan Surat Satu Pintu)
		Jebol Gravitasi (Jemput Bola dengan Gerakan Bersama melawan Covid-19 melalui Tanggap Vaksinasi)
		Sambar Nasehat (Senam Bersama Guna Sehat Bersama dan Jum'at bersih)
		Sisuper Limbad (Aplikasi Surat Perjalanan Dinas Puskesmas Blado Dua)
		Safari Kesehatan (Pelayanan peningkatan upaya promotif, preventif Puskesmas di Luar gedung dengan cara Jemput Bola ke Desa Binaan secara berkala)
		Gemindu (Gerakan Mobile Posbindu)
60	PUSKESMAS BATANG 1	Gerak Berjuang (Gerakan ber KB jangka panjang)
		Siduta (Pemberian ASI 2 tahun)
61	PUSKESMAS BANDAR 2	GERSANG JIWA (Program Kesehatan Jiwa yang dilatarbelakangi banyaknya kasus gangguan jiwa)
		KAKA DESI (Kader kesehatan deteksi tuberkulosis)
62	PUSKESMAS KANDEMAN	SIMAMAT (Pengisian Materi 5 menit)
		PONLINE (PENDAFTARAN ONLINE)
		Media sehat Puskesmas Kandeman
63	PERUMDA AIR MINUM SENDHANG KAMULYAN	Aplikasi Banyu
		Tim ULC (Unit Layanan Cepat)
		Sistem Informasi Pelanggan Baru (SIMPB)
		Web GIS SPAM dan Pelanggan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan
		Sistem Informasi Skematik SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan Monitoring Data Logger
64	PUSKESMAS BATANG 3	BUCIN (Rabu Cerita Informasi Kesehatan)
		SPIK (Seputar Informasi Kesehatan)
		Desa Binaan "Sego Ceting ASIEX"
65	PUSKESMAS BANYUPUTIH	PENTOL PUTIH (Pendaftaran Online Puskesmas Banyuputih)
66	PUSKESMAS LIMPUNG	TIGER PATAS Puskesmas Limpung
		MAS DAESANI Puskesmas Limpung
		MAIN GASING Puskesmas Limpung
		KURAS ANIK Puskesmas Limpung
67	PUSKESMAS GRINGSING 2	Saking Cinta (Deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA)
		Pijat Oksitosin (Kegiatan memijat punggung ibu paska bersalin)
		Kebuli dalam Ceting (Kegiatan pembelajaran kelompok balita dengan sasaran ibu)
		Jamali TB (Kegiatan deteksi dini/penemuan kasus TBC)
		Kejar Bumil (Kegiatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB)
		Gebrak DB (kunjungan keluarga kasus (pe) dan gerakan kader untuk pemantauan jentik berkala di RT keluarga)
68	PUSKESMAS TULIS	PUSKESMAS SANTUN LANSIA
		PUSKESMAS RAMAH ANAK
		SI PITUNG (Edukasi kesehatan dalam gedung durasi 7 menit)
		PAJERO SIDIA (PELAYANAN JEJARING SOSIAL MEDIA)
		Jumatik (Pelacakan dan pemberantasan jentik nyamuk)
		PEGANG GRAJI (Pemeriksa Orang Dengan Gangguan Jiwa)
		POTENSI (Pemeriksa Dengan Hipertensi)
		DESI ASIK (Desa Binaan ASI EKSCLUSIF)
		PASUTRI HAMIL (Pelayanan USG Trimester 1 & 3 Ibu Hamil)
		GADIS MANIS (Gerakan Deteksi Dini Metode IVA & Sadanis)
		KADUS NINGRAT (Keluarga Peduli Skrining Bayi Baru Lahir Sehat)
		GEMPITA NING RATRI (Gerakan Minum Table FE dan Skrining Remaja Putri)
69	PUSKESMAS TERSONO	MISTORMIL (Kamisan Monitor ibu Hamil. Kegiatan bertujuan untuk menekan angka kematian ibu bersalin)
		GRABS (Gerakan Anti Buang air besar Sembarangan)

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI
1	2	3
		PDKT (Penyuluhan dan edukasi kesehatan Terpadu, penyuluhan ke desa dengan berbagai disiplin ilmu atau tenaga kesehatan)
		KAMPUNG IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat merupakan salah satu metode deteksi dini untuk kanker serviks)
		TEBAS TB (Tersono Bebas TB)
70	PUSKESMAS WARUNGASEM	Inisiasi Kader Desa Siaga Sehat Jiwa
		Kepiting Cabe (Keluarga Peduli Stunting Cegah dengan Berkabe)
71	PUSKESMAS WONOTUNGGAL	PURA BALI (Puskesmas ramah balita dan lansian)
		SI - GOLAN (Pelayanan jemput bola pada pelayanan Posyandu Lansia bagi Lansia yang tidak bisa datang ke Posyandu)

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Kerangka Pendanaan Tahun 2026 Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2026 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 1
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2026

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	434.611.753.265
Pajak Daerah	240.691.000.000
Retribusi Daerah	166.921.354.446
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.736.744.828
Lain-lain PAD yang Sah	10.262.653.991
PENDAPATAN TRANSFER	1.640.341.107.500
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.553.849.256.700
Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.491.850.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Jumlah Pendapatan	2.074.952.860.765
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	1.528.294.091.819
Belanja Pegawai	935.336.527.100
Belanja Barang dan Jasa	501.375.676.966
Belanja Hibah	77.286.237.753
Belanja Bantuan Sosial	14.295.650.000
BELANJA MODAL	207.231.514.303
Belanja Modal Tanah	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.870.228.118
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.304.778.136
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.236.901.387
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.941.106.661
Belanja Modal Aset Lainnya	778.500.001
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000
BELANJA TRANSFER	379.927.254.643
Belanja Bagi Hasil	21.041.005.230
Belanja Bantuan Keuangan	358.886.249.413
Jumlah Belanja	2.127.452.860.765
Total Surplus/(Defisit)	(52.500.000.000)
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000

URAIAN	JUMLAH
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000
Pembiayaan Netto	52.500.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
TOTAL APBD	2.134.952.860.765

Sumber : SIPD RI, 2025

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Mendasarkan kerangka pendanaan, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 5.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) urusan pengawasan, serta 15 (limabelas) unsur kewilayahan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal

serta Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah serta penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin Fasilitas Kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian SPM Bidang Kesehatan serta mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pemberian jaminan kesehatan pada masyarakat miskin.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian kefarmasian, penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT, serta tindak lanjut pengawasan dan penyediaan tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu.

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan dan jembatan kewenangan daerah.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang dan diarahkan juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

d. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pelayanan SPM Trantibum melalui Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; serta Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung ketercapaian SPM Urusan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan serta Pemberian Layanan Rujukan. Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian layanan pemenuhan SPM sosial.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah serta Pemberdayaan

perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.

b. **Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

c. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak.

d. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data.

e. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. **Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

b. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga keamanan pangan. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

4. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan** yang diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan program ini juga berfokus pada kelembangaan GTRA serta penataan akses dan aset oleh pemerintah daerah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 serta verifikasi lapangan untuk

memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta

pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** yang diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada terselenggaranya pengelolaan *E-Government* di lingkup pemerintah daerah dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah.

b. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam satu daerah Kabupaten.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

g. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan serta penyusunan peta potensi investasi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda serta penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral serta pengembangan infrastruktur.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik.

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota serta Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten.

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata, baik dalam dan luar negeri, peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri, serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana Pertanian, pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian meliputi rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan hewan dan produk hewan daerah, serta pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian.

4. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; serta penerbitan tanda daftar gudang.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan metrologi legal.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

6. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi yang diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** yang diarahkan pada kegiatan

pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Riset dan Inovasi Daerah** yang diarahkan pada Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; serta Inovasi dan Inovasi.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan, pengawasan dan asistensi urusan pemerintah daerah.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakanteknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

H. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitas, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan Program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator kinerja layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah; Berikut ini pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Secara rinci untuk penjabaran program beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Program Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			662.764.223.451	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			659.240.223.451	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			659.240.223.451	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	494.668.002.409	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.551.404.739	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	730.130.439	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.771.274.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	97.50 %	488.274.629.392	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7666 Orang/bulan	485.711.056.392	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.869.946.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	43.627.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	85.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	181 orang	225.000.000	
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	499 dokumen	759.245.000	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	432.424.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.821.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	100.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	25 orang	1.760.022.278	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	392.234.278	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	234.580.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.128.208.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	98 %	997.701.000	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	585.073.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	26.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	86.628.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah APS	100 %	161.022.221.042	
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP Angka Putus Sekolah SD Prosentase SD yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	100 % 0.025 % 90 % 98.00 %	82.773.321.005	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	547.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	760.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	660.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	59.928 Peserta Didik	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	456 Satuan Pendidikan	15.060.046.005	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	456 Satuan Pendidikan	57.383.900.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	241 Orang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.895.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	456 Satuan Pendidikan	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	33 Ruang	2.568.375.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	1.398.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat Angka Putus Sekolah (APS) SMP Prosentase SMP yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	90 % 0.065 % 90 % 84.00 %	47.110.114.021	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	585.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	2.903.286.410	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	388.564.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	942.296.727	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	24,843 Peserta Didik	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	75 Satuan Pendidikan	8.428.098.157	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	75 Satuan Pendidikan	25.956.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29 Orang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	75 Satuan Pendidikan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	13 Ruang	4.542.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1.273.068.727	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	1.041.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase TK Negeri yang kondisi bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 % 87 %	22.466.458.416	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	14 Unit	735.975.863	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	23.023 Peserta Didik	334.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	553 Satuan Pendidikan	16.959.612.553	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	41 Orang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket	747.970.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	553 Satuan Pendidikan	1.401.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	712.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	40 %	8.672.327.600	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4.904 Peserta Didik	119.316.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan	7.127.504.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4.904 Peserta Didik	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit	413.507.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	512.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	95 %	1.600.000.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah	100 %	1.600.000.000	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	3 Buku	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	59 %	1.950.000.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	60 %	1.950.000.000	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	1.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	850.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.524.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.524.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	0 %	800.000.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	8 buah	200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional	75 %	600.000.000	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	0 %	2.492.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional	70 %	2.492.000.000	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	2.492.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	0 %	232.000.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	5 buah	232.000.000	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	232.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DINAS KESEHATAN			209.112.516.067	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			209.112.516.067	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			209.112.516.067	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	134.255.764.561	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	154.074.615	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.681.450	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.252.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	110.141.165	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	132.298.371.795	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	820 Orang/bulan	131.603.052.637	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	689.119.158	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	14 Dokumen	25.000.000	
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	25.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	3 Paket	343.274.600	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.236.700	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	108.441.600	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	18.346.300	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	84.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	29.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	14 Unit	38.534.650	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	33.426.850	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.107.800	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	6 Jenis	842.032.964	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	474.770.850	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	16.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	349.512.114	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	54 Unit	554.475.937	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	196.869.362	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	287.076.575	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	25.530.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	73.769.683.430	
		Persentase ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)			
		Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	21 unit	11.894.557.350	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	1.740.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2.270.051.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	28.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	7.797.207.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	9.299.350	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah balita stunting Jumlah Desa ODF Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue Jumlah kasus kematian balita Jumlah kasus kematian bayi Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	5.300 bayi 181 desa/kelurahan 37 orang 160 orang 95 balita 90 bayi 11 orang 21 puskesmas 1.040 orang	61.613.738.080	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11000 Orang	41.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10000 Orang	57.760.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10500 Orang	75.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55000 Orang	57.393.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114529 Orang	52.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	546248 Orang	55.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109000 Orang	34.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231850 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14189 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2153 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8000 Orang	55.635.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11000 Orang	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	44.375.400	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Dokumen	105.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	83.277.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	310.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	122.777.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	184.502.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	140 Orang	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	15.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	368.453.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	57.305.866.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	42.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	518.200.180	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Tahun Unit	30.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	40.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Tahun Unit	803.324.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1500 Orang	70.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	58.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	22 Dokumen	671.717.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	17.008.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	2 aplikasi 1 dok	111.036.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	111.036.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang berijin	58 fasyankes	150.351.500	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	20 Unit	9.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit	141.351.500	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berijin	95 %	420.269.150	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan	700 orang 700 Orang 200 orang 200 Orang	22.000.000	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	12.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	1 dokumen 1 Dokumen	145.368.400	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	9.399.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2020 Orang	47.911.400	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	88.058.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	40 nakes 40 Nakes	252.900.750	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	252.900.750	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100 %	433.448.526	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek yang berijin Jumlah Apotek yang berijin Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin Jumlah Toko Obat yang berijin Jumlah Toko Obat yang berijin	75 apotek 75 Apotik 13 Toko alkes/optikas 13 Toko Alkes / Optikas 4 Toko obat 4 Toko Obat	89.873.000	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	106 Dokumen	89.873.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat Jumlah PIRT yang mendapatkat sertifikat	220 sertifikat 220 Sertifikat	113.749.000	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	100 Dokumen	113.749.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	480 TPM	25.000.000	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	35 PIRT 35 PIRT	204.826.526	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	204.826.526	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	233.350.400	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	37 desa	41.388.800	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	41.388.800	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	2 dokumen	100.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	750 Posyandu	91.961.600	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	91.961.600	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS WONOTUNGGAL			2.998.619.053	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.998.619.053	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.998.619.053	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.200.869.053	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.200.869.053	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	792.233.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	792.233.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	117.900.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	17.250.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	4.200.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	6.600.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125 Dokumen	314.014.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	72 Dokumen	3.600.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	7.100.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Dokumen	9.800.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	88 Orang	4.400.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	117.065.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	171.962.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	30 Dokumen	6.342.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	30 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	216 Dokumen	10.800.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	5.517.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	5.517.000	PUSKESMAS WONOTUNGGAL
	PUSKESMAS BANDAR 1			5.262.795.300	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.262.795.300	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.262.795.300	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.350.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.350.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.350.000.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	909.642.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	909.642.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	139.680.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	23.800.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	1.500.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1.600.000	PUSKESMAS BANDAR 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	358.978.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.000.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	3.050.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.750.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.200.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	153.436.300	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	198.503.700	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.294.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	750.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1.100.000	PUSKESMAS BANDAR 1
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.153.300	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.153.300	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.153.300	PUSKESMAS BANDAR 1
	PUSKESMAS BANDAR 2			0	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.835.680.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.182.500.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.182.500.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	649.548.300	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	649.548.300	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	49.727.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	24.700.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	9.200.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	9.800.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	274.884.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	6.500.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	11.400.000	PUSKESMAS BANDAR 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	14.400.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	7.200.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	79.492.700	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	141.954.600	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	11.790.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	100.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	8.400.000	PUSKESMAS BANDAR 2
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.632.400	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.632.400	PUSKESMAS BANDAR 2
	PUSKESMAS BLADO 1			3.212.043.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.212.043.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.212.043.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.532.300.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.532.300.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.532.300.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	677.543.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	677.543.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	74.232.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	15.400.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	9.600.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	2.000.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	293.980.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	2.500.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	15.912.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	8.000.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	94.833.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	149.282.000	PUSKESMAS BLADO 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	2.380.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	624.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1.800.000	PUSKESMAS BLADO 1
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	2.200.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.200.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2.200.000	PUSKESMAS BLADO 1
	PUSKESMAS BLADO 2			1.844.083.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.844.083.500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.844.083.500	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.245.200.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.245.200.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.245.200.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	598.587.800	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	598.587.800	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	86.790.000	PUSKESMAS BLADO 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 BULAN Orang	3.000.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Bulan Orang	1.500.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Bulan Orang	400.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan Dokumen	219.367.300	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan Dokumen	250.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan Dokumen	6.600.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan Dokumen	1.050.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Bulan Orang	2.400.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan Dokumen	97.474.100	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan Dokumen	132.013.600	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Bulan Dokumen	41.592.800	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Bulan Dokumen	150.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Bulan Dokumen	6.000.000	PUSKESMAS BLADO 2
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	295.700	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	295.700	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Bulan Dokumen	295.700	PUSKESMAS BLADO 2
	PUSKESMAS REBAN			3.860.075.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.860.075.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.860.075.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.035.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.035.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.035.000.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	817.287.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	817.287.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	140.600.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5364 Orang	23.500.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	5.400.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	4.000.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	214 Dokumen	321.886.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11 Dokumen	1.100.000	PUSKESMAS REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen	8.000.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64 Dokumen	10.550.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	2.400.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	179 Dokumen	122.830.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	174.218.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	603.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	10 Dokumen	1.000.000	PUSKESMAS REBAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	7.788.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.788.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.788.000	PUSKESMAS REBAN
	PUSKESMAS BAWANG			5.309.512.184	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.309.512.184	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.309.512.184	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.402.415.684	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.402.415.684	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	4.402.415.684	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	903.521.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	903.521.200	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	128.340.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	49.800.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	7.500.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	13.000.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	353.019.700	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	1.000.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.000.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	11.750.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	2.000.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	128.081.900	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	197.024.400	PUSKESMAS BAWANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.505.200	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	700.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	1.800.000	PUSKESMAS BAWANG
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.575.300	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.575.300	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	3.575.300	PUSKESMAS BAWANG
	PUSKESMAS TERSONO			3.440.111.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.440.111.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.440.111.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.646.800.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.646.800.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	781.622.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	781.622.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	104.518.000	PUSKESMAS TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	29.250.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	6.000.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	10.000.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	327.610.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	3.500.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	8.200.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	5.400.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	2.000.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	116.192.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	163.802.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	750.000	PUSKESMAS TERSONO
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	2.000.000	PUSKESMAS TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	11.689.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	11.689.000	PUSKESMAS TERSONO
	PUSKESMAS GRINGSING 1			4.184.090.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.184.090.600	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.184.090.600	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.300.120.600	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.300.120.600	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.300.120.600	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	879.393.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	879.393.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	120.120.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	34.200.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	3.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	360.044.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	750.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	8.100.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	5.057.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	4.600.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	136.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	193.941.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.320.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	4.461.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	1.800.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	4.577.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.577.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	4.577.000	PUSKESMAS GRINGSING 1
	PUSKESMAS GRINGSING 2			1.667.391.250	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.667.391.250	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.667.391.250	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.050.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.050.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.050.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	614.913.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	614.913.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	41.400.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	15.200.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	4.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	4.400.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	273.653.850	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.500.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.600.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.800.000	PUSKESMAS GRINGSING 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	7.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	90.985.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	134.214.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	18.660.150	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	500.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	6.000.000	PUSKESMAS GRINGSING 2
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	2.478.250	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.478.250	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.478.250	PUSKESMAS GRINGSING 2
	PUSKESMAS LIMPUNG			3.201.258.715	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.201.258.715	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.201.258.715	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.347.015.715	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.347.015.715	PUSKESMAS LIMPUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	847.639.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	847.639.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1768 Orang	110.840.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166 Orang	24.950.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	1.300.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34 Orang	3.400.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	370.224.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	700.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	94 Dokumen	9.400.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68 Dokumen	12.819.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	130 Orang	2.600.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	124.900.000	PUSKESMAS LIMPUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	94 Dokumen	181.837.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	1.069.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS LIMPUNG
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	6.604.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 Dokumen	6.604.000	PUSKESMAS LIMPUNG
	PUSKESMAS SUBAH			4.873.045.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.873.045.500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.873.045.500	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.907.390.500	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.907.390.500	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.907.390.500	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	961.734.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	961.734.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	113.780.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	34.300.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	3.000.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	420.826.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	750.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	12.000.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	9.330.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	2.800.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	144.820.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	211.646.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	4.000.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	882.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS SUBAH
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.921.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.921.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	3.921.000	PUSKESMAS SUBAH
	PUSKESMAS TULIS			2.813.833.035	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.813.833.035	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.813.833.035	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.005.153.035	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.005.153.035	PUSKESMAS TULIS
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	798.547.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	798.547.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Orang	137.037.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3980 Orang	11.200.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	4.200.000	PUSKESMAS TULIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	2.800.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	558 Dokumen	311.263.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34 Dokumen	8.500.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84 Dokumen	8.400.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	76 Dokumen	10.550.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	105 Orang	6.800.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	390 Dokumen	120.741.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	85 Dokumen	171.656.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	3.900.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	300.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS TULIS
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	10.133.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36 Dokumen	10.133.000	PUSKESMAS TULIS
	PUSKESMAS BATANG 1			2.325.320.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.325.320.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.325.320.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.668.004.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.668.004.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.668.004.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	651.347.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	651.347.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	57.960.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.400.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	12.300.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	8.000.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	282.452.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	700.000	PUSKESMAS BATANG 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	10.600.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	11.550.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	4.600.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	84.926.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	141.099.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	4.223.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.137.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	9.000.000	PUSKESMAS BATANG 1
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	5.969.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.969.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	5.969.000	PUSKESMAS BATANG 1
	PUSKESMAS BATANG 2			2.210.139.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.210.139.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.210.139.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.520.160.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.520.160.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.520.160.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	685.135.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	685.135.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17 Orang	41.400.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5581 Orang	20.700.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	6.000.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	4.800.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	292.605.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	7.550.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4.000.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	12.711.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	23 Orang	6.900.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	97.395.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	146.019.000	PUSKESMAS BATANG 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	15.150.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	27.360.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.345.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS BATANG 2
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	4.844.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.844.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	4.844.000	PUSKESMAS BATANG 2
	PUSKESMAS BATANG 3			2.349.636.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.349.636.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.349.636.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.615.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.615.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.615.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	731.006.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	731.006.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	51.800.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	25.700.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	9.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	336.812.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	2.500.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	8.500.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	17.069.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	6.000.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	99.875.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	158.926.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	7.200.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.824.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	1.800.000	PUSKESMAS BATANG 3
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.630.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.630.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	3.630.000	PUSKESMAS BATANG 3
	PUSKESMAS BATANG 4			2.192.845.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.192.845.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.192.845.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.544.265.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.544.265.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.544.265.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	641.530.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	641.530.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	78.400.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12.100.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	3.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	8.000.000	PUSKESMAS BATANG 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	275.621.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	4.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	6.700.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	3.681.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	8.000.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	95.900.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	137.023.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	6.900.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.005.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	1.200.000	PUSKESMAS BATANG 4
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	7.050.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.050.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	7.050.000	PUSKESMAS BATANG 4
	PUSKESMAS WARUNGASEM			3.703.281.700	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.703.281.700	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.703.281.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.700.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.700.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.700.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	999.911.700	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	999.911.700	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	133.200.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	28.400.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	4.700.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	415.569.650	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	2.500.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	6.200.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	4.700.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	3.600.000	PUSKESMAS WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	160.879.800	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	218.947.700	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	12.114.550	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.700.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.370.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.370.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	3.370.000	PUSKESMAS WARUNGASEM
	PUSKESMAS KANDEMAN			3.542.218.050	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.542.218.050	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.542.218.050	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.583.840.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.583.840.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.583.840.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	950.426.850	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	950.426.850	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	152.921.300	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.192 Orang	31.500.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	5.200.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	513 Orang	11.100.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	371.746.500	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	500.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen	8.000.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	20.404.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	8.000.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	129.364.200	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	206.060.850	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13 Dokumen	1.430.000	PUSKESMAS KANDEMAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	1.800.000	PUSKESMAS KANDEMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	7.951.200	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.951.200	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	7.951.200	PUSKESMAS KANDEMAN
	PUSKESMAS PECALUNGAN			2.873.470.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.873.470.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.873.470.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.158.500.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.158.500.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.158.500.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	711.846.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	711.846.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13200 Orang	82.800.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	23.600.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	3.000.000	PUSKESMAS PECALUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	7.000.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	308.307.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	1.800.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	7.100.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	10.489.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	2.000.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	101.390.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	154.694.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.400.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	666.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	6.600.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	3.124.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.124.000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	3.124.000	PUSKESMAS PECALUNGAN
	PUSKESMAS BANYUPUTIH			2.338.785.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.338.785.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.338.785.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.613.172.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.613.172.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	716.353.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	716.353.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	91.080.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	19.350.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	4.000.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	13.300.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	292.952.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.185.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.100.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.700.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	3.900.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	90.754.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	151.906.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.376.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.750.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	6.000.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota memiliki kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	1 %	9.260.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.260.000	PUSKESMAS BANYUPUTIH
1.02.05.2.03.0001	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.			2.500.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.500.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.500.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.500.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.500.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.500.000.000	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.
1.02.01.2.10.0001	RSUD BATANG PEMKAB BATANG			76.580.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			76.580.000.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			76.580.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	76.550.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	2.550.000.000	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1.800.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	750.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	100 %	74.000.000.000	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	74.000.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berijin	95 %	30.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 %	30.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	25 Orang	30.000.000	RSUD BATANG PEMKAB BATANG
1.02.03.2.03.0001	RSUD LIMPUNG			22.170.200.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.170.200.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			22.170.200.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	100 %	22.140.200.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 %	2.250.000.000	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	1.500.000.000	RSUD LIMPUNG
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	750.000.000	RSUD LIMPUNG
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit	100 %	19.890.200.000	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	19.890.200.000	RSUD LIMPUNG
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berijin	95 %	30.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 %	30.000.000	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	30.000.000	RSUD LIMPUNG
1.02.03.2.03.0001	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			155.300.468.735	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			155.300.468.735	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			155.300.468.735	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	15.752.044.248	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	25.034.800	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	25.034.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah dokumen penatausahaan verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	13.209.350.307	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12.588.246.307	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	621.104.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	399.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket listrik yang disediakan, Alat Tulis Kantor, makan minum, cetak penggandaan,	1 Tahun	235.609.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		surat kabar/majalah serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.203.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.151.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	41.754.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung /pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	23 Unit	571.545.138	
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	284.738.738	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	286.806.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	488.107.500	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.025.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	425.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	56.082.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayarkan pajaknya dan peralatan mesin yang dipelihara serta jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	595 Kendaraan/barang	798.037.503	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	300 Unit	299.788.651	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	363.248.852	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	135.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 %	12.401.442.276	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pemelihara serta Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	5,00 Km	12.401.442.276	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,4 KM	8.601.442.276	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,6 KM	3.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum aman	51,08 %	3.600.000.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum	89 %	3.600.000.000	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1000 Liter/Detik	3.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik aman (IUP)	6,16 %	6.900.000.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah penduduk yg memperoleh layanan pengelolaan air limbah	83 %	6.900.000.000	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	600 M ³ /Hari	6.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik	69,086 %	2.706.277.784	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2,59 Km	2.706.277.784	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	9 Sistem Drainase Perkotaan	2.706.277.784	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemanfaatan bangunan gedung negara yang sesuai dengan peruntukan	99,92 %	35.659.775.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengawasan dan pemeliharaan, jumlah regulasi terkait bangunan gedung, jumlah konsultasi bangunan teknis bangunan gedung, jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan serta jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah derat yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	26 Dokumen/unit	35.659.775.000	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	2.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	32.689.775.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen	170.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	69,04 %	77.204.141.427	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhab, dipelihara secara berkala maupun secara rutin maupun informasi terkait kondisi jalan/jembatan diKab Batang	120,85 Km	77.204.141.427	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	10 Meter	483.540.255	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	55 KM	27.344.088.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	29.667.031.108	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	100 Meter	17.825.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 KM	1.884.482.064	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perwujudan rencana tata ruang	81,04 %	1.076.788.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	10 Dokumen	476.788.000	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	391.788.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	85.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk kajian pendukung RTRW dan RRTR yang disusun	11 Dokumen	0	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan data informasi penataan ruang	31 Dokumen	400.000.000	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	25 Dokumen	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban pelaksanaan penataan ruang	24 Dokumen	200.000.000	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0004	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG			750.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			750.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			750.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 %	200.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	69,04 %	550.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	550.000.000	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	550.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BATANG
1.03.10.2.01.0051	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR			750.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			750.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			750.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 %	200.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	69,04 %	550.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	550.000.000	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	550.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BANDAR
1.03.10.2.01.0051	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH			750.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			750.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			750.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 %	200.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	69,04 %	550.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	550.000.000	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	550.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH SUBAH
1.03.10.2.01.0051	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG			750.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			750.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			750.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 %	200.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	69,04 %	550.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	550.000.000	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	550.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH BAWANG
1.03.10.2.01.0051	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG			750.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			750.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			750.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0 %	200.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	-	-	200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	200.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	69,04 %	550.000.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	550.000.000	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	550.000.000	UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH LIMPUNG
1.03.10.2.01.0051	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			20.839.644.933	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.814.644.933	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			20.814.644.933	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.741.153.873	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Laporan	10.735.000	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.735.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	4.139.339.933	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.003.055.933	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	136.284.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	158.040.000	
1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	158.040.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	25.000.000	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	25.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	99.168.030	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.192.430	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.088.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.929.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.761.800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.196.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun	1 Laporan	16.078.600	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.786.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.292.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	1 Laporan	118.537.800	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.300.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.903.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.334.300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	174.254.510	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	161.629.510	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	7.625.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah bagi korban bencana atau terdampak program pemerintah kabupaten	100 %	175.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani	100 %	65.000.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi site plan yang dilayani	1 Dokumen	75.000.000	
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	24 Dokumen	75.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	38,79 %	3.965.000.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen Baseline Penanganan Kumuh dan BA Pengurangan Kumuh	2 Dokumen	75.000.000	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	75.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Data jalan lingkungan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik	2 Dokumen	3.890.000.000	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	3.890.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase rumah tidak layak huni	9,58 %	3.969.355.660	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.969.355.660	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	160 Unit Rumah	3.969.355.660	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	#N/A	#N/A	7.964.135.400	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	7.964.135.400	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	75.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	7.889.135.400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			25.000.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan untuk pembangunan	100 %	25.000.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000	
2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05.2.01.0007	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			13.714.957.977	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.714.957.977	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.714.957.977	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	9.676.801.777	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	169.417.001	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	169.417.001	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	6.902.236.121	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.864.232.121	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.004.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	272.700.000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	179.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	93.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	4 Laporan	188.366.255	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.043.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.202.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	129.119.955	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah sarpras gedung yang dibeli	5 Unit	1.262.711.400	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.061.345.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	201.366.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	2 Paket	158.651.000	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.875.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.776.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 Unit	722.720.000	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	537.680.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.040.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada	100 %	3.096.016.200	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	12 Laporan	2.620.692.000	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	598.310.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	651.008.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100 Orang	69.520.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	1.251.854.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perbup	60 Kasus	475.324.200	
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	199.998.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	204.495.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	70.829.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100 %	942.140.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	842.128.000	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	24.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	811.028.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	6.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan kebakaran	120 Orang	100.012.000	
1.05.04.2.04.0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	3 Desa/Kelurahan	100.012.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.04.0007	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			4.719.951.083	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.719.951.083	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.719.951.083	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.876.840.983	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	45.779.000	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	45.779.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.210.251.823	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.167.052.823	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.656.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	8.543.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	25.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	156.968.560	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.286.300	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.244.400	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.200.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.910.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	93.327.860	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	68.586.600	
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	68.586.600	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	117.451.500	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.375.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	93.450.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.626.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	252.803.500	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	214.303.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	38.500.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	843.110.100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	63.579.000	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	360 Orang	63.579.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	208.101.500	
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan	6.625.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	21.720.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	10.595.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	92.291.500	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	8.125.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	3.975.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	64.770.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	324.697.600	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	11.385.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	7 Dokumen	191.744.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	18.900.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135 Orang	84.598.600	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	6.360.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Laporan	11.710.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	246.732.000	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen	40.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	25 Orang	25.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	76.732.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	0	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	25.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0016	DINAS SOSIAL			11.050.524.752	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.050.524.752	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			11.050.524.752	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.561.983.972	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	14.473.000	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	14.473.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	18 Laporan	2.930.484.233	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.678.384.233	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	240.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12.100.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	111.565.200	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.200	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	565.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	60.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	80.000.000	
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	80.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Laporan	195.461.539	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3570 Laporan	2.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	92.961.539	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	1315 Unit	230.000.000	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	10.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	110.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	87 %	533.824.200	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-		533.824.200	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	160522 Keluarga	200.609.200	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	502 Lembaga	41.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	82 Orang	66.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	283 Orang	226.215.000	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	1.500.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-		1.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	1.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Luar Panti	97,5 %	936.850.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-		936.850.000	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	9.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	12.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	400.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	450.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	520 Orang	595.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	2,37 %	5.881.166.580	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-		1.650.000.000	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1540 Orang	1.650.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		4.231.166.580	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	170867 Orang	257.599.780	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2020 Orang	2.993.566.800	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	76551 Usulan	30.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang	600.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	30 Orang	150.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	56.000.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	31.000.000	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	7.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	5.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	5.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	14.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-		25.000.000	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	25.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemenuhan Standar Nasional Taman Makam Pahlawan Kabupaten	100 %	79.200.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		79.200.000	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	60.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.200.000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0003	DINAS KETENAGAKERJAAN			12.897.805.168	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.838.556.768	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			12.838.556.768	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.691.371.913	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.030.748.208	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.816.687.168	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	214.061.040	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	
2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	25.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	86.926.564	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.814.800	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.272.700	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.660.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.816.064	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.363.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.955.000.000	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	955.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	295.571.020	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.375.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.196.020	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	293.126.121	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	8.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	135.445.450	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	12 0	109.180.671	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	40.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio Penduduk yang Bekerja	78 Rasio	5.719.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	5.050.000.000	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1152 Orang	5.050.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	10.000.000	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	95 Lembaga	10.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	659.000.000	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	140 Perusahaan	659.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan	85 %	220.839.340	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	220.839.340	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	8416 Orang	220.839.340	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	12,3 %	207.345.515	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80.758.110	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	19 Perusahaan	37.623.450	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	116 Laporan	43.134.660	DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	126.587.405	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	126.587.405	DINAS KETENAGAKERJAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			59.248.400	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			59.248.400	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Ditempatkan	100 %	59.248.400	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	59.248.400	
3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	1 Kepala Keluarga	59.248.400	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.32.03.2.01.0003	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			20.027.965.195	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.027.965.195	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.085.559.195	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.710.559.195	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	15.105.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.105.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.854.676.834	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.773.062.834	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.614.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	443.818.501	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.695.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	232.260.538	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.080.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.877.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	162.905.163	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	784.963.860	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	629.963.860	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	586.995.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	215.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	347.745.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	24.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,81 %	125.660.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	67.825.000	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	5 Laporan	67.825.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	57.835.000	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 orang	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	30 Orang	7.835.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,003 Rasio	35.000.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	17 orang	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	0 %	58.735.000	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	58.735.000	
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	35 Lembaga	58.735.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	#N/A	#N/A	20.080.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.080.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20.080.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan	0 %	80.000.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Lembaga	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	45.000.000	
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	60 Orang	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pesentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	0 %	55.525.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	55.525.000	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	23 Orang	55.525.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.942.406.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prevalensi penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	71,5 Angka	461.400.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	100 %	461.400.000	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	188.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	213.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TFR	2,07 %	7.231.726.000	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,55		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,86		
		ASFR (15-19 tahun)	27,1		
		MUKP (Median Usia Kawin Pertama)	21,2		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Bangga Kencana)	4,9 %	1.101.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	411.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	255.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase jml PKB/PLKB (1 PKB/PLKB mengampu 2 Desa)	56.45 %	3.287.421.000	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	248 Orang	1.366.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1.921.221.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan	37 Faskes	2.372.905.000	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34 Laporan	29.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6540 Orang	2.178.805.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35 Laporan	164.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas yang berperan serta	3 ormas	470.400.000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	84 Kampung	470.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Mandiri	98,06 %	6.249.280.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kegiatan	2.129.600.000	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	5 Laporan / Dokumen	57.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	1.942.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah ormas	3 ormas	4.119.680.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	1.851.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	2.268.680.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			25.136.916.722	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.414.940.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.414.940.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Jumlah cadangan Pangan	100 %	6.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring Kegiatan Penyediaan Infratsruktur dan Seuruh Pendukung Kemandirian Pangan	1 kegiatan	6.000.000	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	6.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	97,45 Skor	1.156.940.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	4 kegiatan	91.620.000	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	26.620.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan kabupaten atau Kota	1 kegiatan	1.000.000.000	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Ton	1.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	1 kegiatan	65.320.000	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	65.320.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6,05 %	212.000.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten Kota	2 kegiatan	212.000.000	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	192.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	#N/A	#N/A	40.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelaksanaan pengawsan keamanan panga segar daerah kabupaten Kota	2 kegiatan	40.000.000	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.721.976.722	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			23.721.976.722	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	17.098.761.022	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaa Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	91.136.339	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	36.186.339	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	15.750.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39.200.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 kegiatan	14.851.266.362	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/bulan	14.805.162.362	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	46.104.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	25.000.000	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 kegiatan	495.766.214	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.733.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	222.500.214	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.245.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.980.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.508.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 kegiatan	323.578.508	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	276.813.508	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.265.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan	1.312.013.599	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	159.801.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	494.960.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	657.252.099	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Hortikultura	0 %	3.221.611.200	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	prosentase penggunaan sarana pertanian	100 %	3.020.711.200	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	15 Laporan	2.970.711.200	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten atau kota	1 kegiatan	50.000.000	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 kegiatan	72.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	72.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota	2 kegiatan	78.400.000	
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	2 Laporan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Laporan	28.400.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	19,45 %	2.624.717.800	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian	1 kegiatan	427.230.000	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	427.230.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian	3 kegiatan	1.687.487.800	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	480.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	197.116.500	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	1.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	10.371.300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah Kab/Kota	1 kegiatan	510.000.000	
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	510.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %	168.896.700	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penjaminan kesehata hewa, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota	2 kegiatan	103.750.000	
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	83.750.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kab/kota	1 kegiatan	16.850.000	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	80 laporan	16.850.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 kegiatan	48.296.700	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	28.296.700	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Penanganan bencana pertanian	6,67 %	29.950.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengendalian Bencana Pertanian	1 kegiatan	29.950.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	29.950.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	100 %	27.000.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kab /kota	1 kegiatan	27.000.000	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	5 Laporan	27.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	20 %	551.040.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	3 kegiatan	551.040.000	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	168.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	89 Orang	383.040.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0006	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			28.953.907.977	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.953.907.977	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			28.953.907.977	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	13.021.581.576	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.030.500	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen Laporan	11.030.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.123.049.184	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5.052.829.484	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	70.219.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	119.835.500	
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	72.960.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	46.875.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	266.184.663	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.337.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.305.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.065.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.760.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150.718.363	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	35.389.369	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	35.389.369	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.017.012.320	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.140.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	95.550.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.919.322.320	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.449.080.040	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	139.006.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	2.278.527.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	18.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	13.546.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun	0 %	256.000.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	226.000.000	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	226.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000	
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan sumber pencemaran	50 %	233.705.600	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	49.505.600	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	49.505.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	184.200.000	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	40.257.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	20 Titik	143.943.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah RTH yang dikelola	0 %	459.319.570	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	459.319.570	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha	16.227.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	443.092.570	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	0 %	10.020.000	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.020.000	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	25 Dokumen	10.020.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase dokumen UKL-UPL yang diselesaikan	75 %	71.632.400	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	71.632.400	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	24 Dokumen	26.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	45 Badan Usaha	45.632.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	0 %	32.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.000.000	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	190 Orang	32.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	0 %	109.359.900	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	109.359.900	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	109.359.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60 %	14.760.288.931	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-	14.489.644.631	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	573.111.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	5 Dokumen	13.916.533.531	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	270.644.300	
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	5 Laporan	270.644.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.03.0003	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8.292.097.465	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.292.097.465	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8.292.097.465	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.535.394.600	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	73.266.850	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	73.266.850	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.168.271.302	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan Orang/bulan	4.128.875.302	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	39.396.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	102.000.000	
2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	102.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	121.246.200	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.974.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	23.475.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.796.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	152.980.000	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	152.980.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	440.766.248	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	336.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	99.766.248	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	476.864.000	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	340.368.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	136.496.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	80,5 %	496.077.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	496.077.000	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150000 Dokumen	46.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	449.877.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	99,94 %	489.676.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	489.676.000	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	15000 Dokumen	333.832.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	155.844.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	23 %	1.770.949.865	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	89.885.500	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	58 Dokumen	89.885.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	1.681.064.365	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	1.681.064.365	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			37.888.760.434	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.888.760.434	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			37.888.760.434	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.347.389.071	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.994.000	
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	19.994.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.921.033.464	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bln Orang/bulan	2.864.219.914	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	56.813.550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	130.635.169	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.124.700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.710.069	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.984.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.492.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	75.724.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	125.594.200	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	2.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.794.200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.132.238	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	70.132.238	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase budaya desa yang dilestarikan	60 %	35.000.000	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	35.000.000	
2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	56,49 %	30.953.085.513	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	30.953.085.513	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	239 Dokumen	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	239 Dokumen	3.486.584.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	204 Laporan	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	200 Laporan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	239 Dokumen	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	239 Dokumen	27.201.500.713	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	75 %	3.553.285.850	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.553.285.850	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	580.814.550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239 Unit	149.199.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	2.252.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239 Laporan	121.271.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 Dokumen	450.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.13.05.2.01.0009	DINAS PERHUBUNGAN			35.463.596.804	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.463.596.804	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			35.463.596.804	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.796.815.504	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.314.400	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.314.400	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.721.607.038	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.680.579.038	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.028.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	487.995.897	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.693.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.798.500	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.002.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	4.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	167.800.797	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	71.779.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	36.029.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	35.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	742.655.500	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.968.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	538.687.500	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	734.463.669	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	519.463.669	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	27.000.000	
2.15.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	27.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	100 %	27.666.781.300	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	25.135.874.000	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	542.598.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.593.276.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	700 Unit	23.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	425.156.000	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	4 Dokumen	287.656.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	137.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	298.383.000	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	298.383.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	284.685.000	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit	7.040.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	300 Unit	63.645.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	114.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.175.315.500	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5 Dokumen	1.165.315.500	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	44.005.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	14.505.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	29.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	242.774.000	
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	242.774.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	60.588.800	
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60.588.800	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12.0001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.782.311.242	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.782.311.242	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.143.455.604	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.881.875.204	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.000.000	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.859.030.782	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.824.091.882	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	34.938.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	335.906.663	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.152.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.024.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.008.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.577.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.144.363	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	103.600.000	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	28.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.243.272.600	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.625.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.647.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	270.065.159	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	143.950.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	35.115.159	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	16.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	50.000.000	
2.16.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1.686.580.400	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.686.580.400	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	451.580.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	1.575.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.575.000.000	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	445.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	420.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Dokumen	710.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			538.855.638	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %	538.855.638	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	538.855.638	
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	123.855.638	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	100 %	100.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0005	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			19.019.600.003	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.965.352.445	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.965.352.445	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.415.352.445	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja program Disperindagkop dan UKM	12 bulan	10.000.000	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	12 bulan	6.948.919.163	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.888.130.163	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	60.789.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Asn/Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	25.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	432.483.782	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.386.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	75.989.800	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	49.580.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	5.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	156.127.982	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	3 bulan	31.000.000	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan operasional kantor	12 bulan	557.749.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	5.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	460.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.249.500	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	12 bulan	410.200.000	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	70.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	220.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang mengurus izin usaha simpan pinjam	75 %	0	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	15 Koperasi	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70 Peserta Unit Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	45,21 %	140.800.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Koperasi	140.800.000	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	278 Peserta Unit Usaha	140.800.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	#N/A	#N/A	29.600.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	koperasi yang ber RAT Presentase koparesi aktif	88 dokumen 70 persen	29.600.000	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Unit Usaha	29.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	75 %	0	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Koperasi Presentase peserta pelatihan predikat baik	80 lembaga 100 persen	0	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pembinaan koperasi	62 %	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	155 dokumen 12 persen 20 persen	0	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50 Koperasi Unit Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	12 %	379.600.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	379.600.000	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	120 peserta Unit Usaha	129.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	250.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi produk dan layanan	20 %	0	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan usaha mikro Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	29 orang 20 persen	0	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 UMKM Unit Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.054.247.558	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.405.848.104	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan	100 %	15.560.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Verifikasi Teknis	100 persen	15.560.000	
3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	48 laporan	15.560.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	36,36 %	3.061.618.104	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi pasar	4 Unit	600.000.000	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan sarana perdagangan	11 dokumen	2.461.618.104	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	130 Dokumen	2.461.618.104	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga/terpantau	75 %	49.920.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan stok barang	41 unit	0	
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan/sidak pasar, agen, pangkalan monitoring stok barang	3 Kali 365 kegiatan	49.920.000	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	49.920.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring pengawasan harga pupuk	12 kegiatan	0	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	nilai ekspor perdagangan	60215421 USD	0	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan pembinaan ekspor	5 Kegiatan	0	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	#N/A	#N/A	78.750.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah laporan pengawasan kemetrolgian Jumlah peralatan standar ukuran yang diverifikasi/kalibrasi kegiatan yang dilaksanakan Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30 laporan 527 unit 250 kegiatan 75 persen	78.750.000	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 Unit	78.750.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	100 %	200.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan produk	1 kali	200.000.000	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			6.648.399.454	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah IKM	0,67 %	6.593.500.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Bintek buruh rokok Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Penerimaan bantuan modal Usaha	125 Buruh rokok 12 Dokumen 125 KUB	6.593.500.000	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	125 Dokumen	6.593.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	#N/A	#N/A	28.649.454	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perijinan Usaha Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	207 Ijin Usaha 88 persen	28.649.454	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	28.649.454	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	70 %	26.250.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan Kegiatan SIINas	207 Dokumen	26.250.000	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	26.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.04.2.01.0001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4.498.530.808	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.498.530.808	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.498.530.808	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.707.855.957	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan	6 Laporan	12.011.000	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.011.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.341.583.088	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.310.467.088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	31.116.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	233.521.900	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.495.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.207.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.280.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.006.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.996.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	65.537.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	88.675.000	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	88.675.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	669.298.560	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	322.316.360	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	341.982.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	337.766.409	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	215.084.809	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.181.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	3 %	110.193.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang	40 Perusahaan	110.193.000	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	77.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8 Dokumen	33.193.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi di Kabupaten Batang	100 %	150.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi di Kabupaten Batang	100	150.000.000	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	100 %	346.890.200	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-		346.890.200	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	270.136.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	44.246.450	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	32.507.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	100 %	120.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		120.000.000	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	200 Kegiatan Usaha.	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data yang telah dicukupi	100 %	63.591.651	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	Satuan	63.591.651	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	63.591.651	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			13.796.300.001	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.664.063.080	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10.664.063.080	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.321.023.080	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	142.544.200	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	60.012.750	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	82.531.450	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.178.478.880	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.178.478.880	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda	39 %	2.032.500.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Capaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	45 persen	100.000.000	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	35.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	35.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	30.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.932.500.000	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Organisasi	1.932.500.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase atlit yang dibina	10 %	4.110.540.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	50 kegiatan	2.875.000.000	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	12 Unit	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	30 Dokumen	2.875.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilaksanakan	6 kegiatan	600.000.000	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	200.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	700 Orang	400.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	capaian prestasi olahraga berjenjang, dan berkelanjutan	30 kegiatan	0	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	capaian olahraga rekreasi yang dibina	30 kegiatan	635.540.000	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	635.540.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan jumlah peserta kegiatan kepramukaan	4 %	200.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	capaian pembinaan organisasi kepramukaan	4 kegiatan	200.000.000	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Organisasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.132.236.921	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.132.236.921	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	871.621.171	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	85.236.000	
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	85.236.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	330.405.400	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.235.100	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	26.714.700	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	48.217.200	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.230.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	111.008.400	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	100.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	247.667.772	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	2.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.490.472	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.177.300	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	208.311.999	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	170.343.999	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	21 0	7.968.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pendapatan sektor pariwisata	10 %	1.610.330.750	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	capaian destinasi wisata yang dikelola	10 obyek	0	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	capaian Destinasi Pariwisata yang dikelola	9 obyek	1.610.330.750	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	300.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.110.330.750	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tamu wisatawan mancanegara	10 %	276.705.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Capaian jumlah wisatawan	25 persen	276.705.000	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	150.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	26.705.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	15 Dokumen	100.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Promosi	0	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	4 %	186.580.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	17 Unit	186.580.000	
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	81.580.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	8 Promosi	55.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Produk	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	4 %	187.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	capaian Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Orang 100 Orang	162.000.000	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	8 Laporan	50.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	85.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60 Laporan	27.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	25.000.000	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	25.000.000	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.26.05.2.02.0001	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			6.575.897.832	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.575.897.832	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.245.394.252	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.044.698.602	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	31.286.629	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	28.286.629	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.925.272.473	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.897.372.473	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	27.900.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.280.000	
2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	8.280.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	133.684.600	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.988.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.440.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.750.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.327.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43.507.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	10.670.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	350.479.800	
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	65.684.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	34.795.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1000 Unit	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	360.182.900	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	149.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	209.182.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	210.512.200	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	95.512.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh kelompok marginal	10 %	1.141.645.650	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	346.581.400	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4 Perpustakaan	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	29.175.150	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	6.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	29897 Eksemplar	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	80 Dokumen	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	9.560.350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	15.858.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40 Eksemplar	510.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	477.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai skor rata-rata durasi membaca	57 nilai	795.064.250	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	266 Orang	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	21 Orang	449.064.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	150 Lokus	236.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase masyarakat yang mengetahui koleksi	0 %	59.050.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	37.000.000	
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	37.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.050.000	
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2 Eksemplar	22.050.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			330.503.580	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75,05 %	293.371.330	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	104.050.230	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	109500 Berkas	73.596.630	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Laporan	30.453.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	134.740.100	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	134.740.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	54.581.000	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	4.560.350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	50.020.650	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	53,45 %	32.999.250	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	18.594.000	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4 Arsip	18.594.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	4.023.250	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	4.023.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	7.365.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	5.177.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30 Arsip	2.188.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-	3.016.500	
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	1.363.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 Arsip	1.653.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase permohonan penggunaan arsip yang dilayani sesuai prosedur dan ketentuan	NA %	4.133.000	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	4.133.000	
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2 SOP	1.997.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20 Arsip	2.135.750	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04.2.01.0004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.982.487.073	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.982.487.073	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.982.487.073	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.506.416.611	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	5 dokumen	156.714.951	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	80.939.538	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	75.775.413	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN / Non ASN serta Penyusunan dokumen Laporan Keuangan	12 bulan	3.876.639.272	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/bulan	3.823.659.272	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.980.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000	
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadministrasiun umum dan penunjangnya	5 kegiatan	558.773.976	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	176.632.507	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	78.650.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	196.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.791.469	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	567.602.191	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	231.670.291	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	334.681.900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	46 unit	296.686.221	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	181.686.221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	100 %	1.609.010.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anggota Kelompok Nelayan	250 orang	110.000.000	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	20.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	7 Unit	75.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola	6 lokasi	1.424.010.000	
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	1.414.010.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembuatan rekomendasi BBM Bagi Nelayan dan Rekomendasi Pembuatan PAS Kapal	40 dokumen	75.000.000	
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	40 Rekomendasi	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.04.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Capaian produksi perikanan budidaya	94 %	547.060.462	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok pembudidaya yang mendapatkan pendampingan pembinaan, dan bantuan sarpras usaha	10 Kelompok	64.415.462	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	54.763.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3 Kelompok	9.652.462	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarpras pembudidayaan yang dikelola pada kelompok budidaya	12 Unit	482.645.000	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	387.645.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	45.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Capaian masyarakat pengawas sumberdaya perikanan yang diberdayakan	100 %	115.000.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota POKMASWAS yang ikut kegiatan pembinaan	150 Orang	115.000.000	
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.2.01.0011	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	1 Unit	100.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	38 %	205.000.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	15.000.000	
3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10 Rekomendasi	15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	20.000.000	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	20.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Didistribusikan	22124 ton	170.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35000 Ton	170.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	SEKRETARIAT DAERAH			72.972.446.416	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			72.972.446.416	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			72.972.446.416	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	27.593.621.524	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.045.000	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.045.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.112.645.368	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	14.552.387.368	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	517.258.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	43.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.667.580.900	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	239.170.900	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	315.710.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	164.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	418.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	254.507.050	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	121.794.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	132.713.050	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.894.787.500	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	143.202.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	930.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.020.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	566.565.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.611.042.850	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	129.280.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	1.801.228.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	322.710.200	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	307.824.650	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	932.669.656	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	182.669.656	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	3.862.055.822	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	2.149.039.322	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1.270.986.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	442.030.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	505.223.889	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	178.843.760	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	149.449.250	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	27.783.654	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	149.147.225	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	720.063.489	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	144 Laporan	177.982.073	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144 Laporan	170.147.674	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	144 Laporan	371.933.742	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	78 %	38.786.297.365	
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	100		
		Persentase fasilitasi kerjasama daerah	100		
		Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kegiatan administrasi tata pemerintahan	100 %	543.776.424	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	19 Dokumen	137.401.680	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	66.011.265	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	340.363.479	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	37.448.093.000	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	37.244.407.500	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	112.919.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	90.766.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	748.755.476	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	99.188.783	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	12 Kasus	518.450.721	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 dokumen Dokumen	131.115.972	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kegiatan fasilitasi kerja sama daerah dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	100 %	45.672.465	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	25.294.542	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	20.377.923	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Perkembangan Harga Pangan	-6 %	6.592.527.527	
		Persentase ketercapaian deviden BUMD	100		
		Indeks Tata Kelola PBJ	82,95		
		Persentase OPD yang melaporkan pelaksanaan pembangunan sesuai target	97		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan movev dan pelaporan kebijakan perekonomian	12 Kegiatan	766.274.249	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	173.899.248	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	193.608.452	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	398.766.549	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	2 dokumen	548.968.889	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	157.515.739	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	220.742.750	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	170.710.400	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan	50 Paket	551.440.689	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	294.237.500	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	30 Dokumen	124.753.659	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	132.449.530	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Sumber Daya Alam Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Sumber Daya Alam	12 Dokumen 12 kegiatan	4.725.843.700	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	4.620.368.400	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	105.475.300	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0003	SEKRETARIAT DPRD			62.613.554.665	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			62.613.554.665	
4.02	SEKRETARIAT DPRD			62.613.554.665	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	40.361.131.885	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen	95.880.000	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	55.880.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	3 Kegiatan	3.875.181.213	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.666.374.713	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	198.807.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	9.999.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi barang milik daerah	10 Dokumen	230.802.851	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	210.708.051	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.094.800	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	20 Orang	101.500.000	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	101.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi	8 Kegiatan	497.979.438	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.510.538	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	107.999.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	158.267.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	140 Dokumen	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	130.051.200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 Unit	413.055.800	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	285.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	128.055.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang kantor yang tersedia	172 Unit	522.458.600	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	309.200.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Laporan	45.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	168.258.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	149 Unit	1.028.720.482	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	140.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	280.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	27.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	516.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	45.720.482	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen (%)	33.252.678.501	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	32.829.998.501	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	180 Paket	322.680.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 Persen (%)	342.875.000	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	242.875.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	100 %	22.252.422.780	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda non APBD yang ditetapkan	5 Perda	1.997.500.000	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	947.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan anggaran yang dibahas	8 dokumen	479.999.800	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	260.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	49.999.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	360 Laporan	914.564.000	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30 Laporan	119.999.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30 Laporan	119.999.900	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30 Laporan	160.000.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30 Laporan	119.999.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	44.563.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	349.999.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen (%)	3.189.999.800	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.216.044.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	288.955.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	85.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	45 Orang	1.065.000.000	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kepatuhan anggota DPRD terhadap Kode Etik DPRD	100 Persen (%)	69.999.900	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	69.999.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	100 Persen (%)	14.535.359.280	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	13.545.359.280	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	240.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8 Dokumen	750.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			7.797.723.351	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.797.723.351	
5.01	PERENCANAAN			7.174.525.601	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.909.342.226	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	12.283.000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.853.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.430.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	4.028.659.782	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.902.424.782	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	123.791.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.444.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	25.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	256.471.424	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.784.400	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.626.650	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	107.360.374	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.495.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	92.205.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	28.758.000	
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28.758.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	299.368.000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.501.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172.400.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	124.467.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	258.802.020	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	201.506.020	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	57.296.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	731.367.600	
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	100		
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	100		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	2 Dokumen	473.317.000	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	66.557.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	15.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	35.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	38.486.250	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	58.012.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan	11.396.250	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	248.864.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang tersedia	1 Data	149.946.450	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	119.667.600	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	52 Orang	30.278.850	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	108.104.150	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	108.104.150	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	1.533.815.775	
		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA	100		
		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	504.220.450	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	158.649.450	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	262.232.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	55.888.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	17.450.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	304.861.135	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	177.501.600	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	20.664.325	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	2.945.200	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	82.397.200	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	17.365.310	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	3.987.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	724.734.190	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	209.600.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	15.150.650	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	28.936.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	440.807.040	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	9.340.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	20.900.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			623.197.750	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	65 %	623.197.750	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-	159.810.000	
5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	159.810.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-	463.387.750	
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	66.620.500	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan	183.286.850	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	24.159.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan	28.938.250	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan	134.302.150	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	26.081.000	BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03.2.02.0023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			424.941.515.612	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			424.941.515.612	
5.02	KEUANGAN			424.941.515.612	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	44.202.376.849	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	32.017.500	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.366.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.637.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.014.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	40.205.251.382	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	852 Orang/bulan	40.043.803.382	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	161.448.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	5 Dokumen	404.756.500	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	354.756.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	100 %	569.338.450	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.000.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.751.850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	33.307.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	156.592.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	83.686.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	14 Unit	460.472.000	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	450.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	10.472.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Surat Menyurat dan ASN yang terlayani	100 %	1.189.976.616	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	10.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	578.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.976.616	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	100 %	1.340.564.401	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	240.633.144	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	472.472.816	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	433.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	144.458.441	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	Tepat Waktu Status	375.433.737.338	
		Persentase realisasi belanja atas anggaran belanja daerah	93,3		
		Penyampaian Raperda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Tepat Waktu		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah rancangan Perda APBD yang tersusun	2 Dokumen	10.781.058.483	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	124.001.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	123.868.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	93.183.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	89.993.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	10.368.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	3.153.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	407.882.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	437.667.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	9.202.668.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	10.875.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	54.397.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	10.094.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	212.902.883	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi penerbitan SP2D	95 %	874.994.225	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	28.700.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	256.637.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	29.462.375	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	104.831.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	120.810.150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	231.598.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	102.954.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.045.930.700	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	37.059.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	112.389.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan	303.345.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	304.184.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	71.271.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	94.401.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	123.279.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Dana Desa, ADD dan BHP	100 %	362.731.753.930	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	328.397.400.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	22.334.353.730	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tersusunnya laporan BMD	100 %	1.683.547.025	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Kabupaten Batang tersusun	1 dokumen	1.683.547.025	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	182.408.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	74.415.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	905.505.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	154.264.325	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	263.935.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	103.017.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-0,39 %	3.621.854.400	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya mutu pelayanan pendapatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	88 skor 100 persen	3.621.854.400	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	76.681.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60 Laporan	115.261.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8000 Laporan	1.593.939.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	217.508.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen	76.911.850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	151.565.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	130648745150 Dokumen	1.084.497.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	505 Dokumen	305.489.350	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.117.882.573	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.117.882.573	
5.03	KEPEGAWAIAN			7.730.345.106	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.199.826.826	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	71.498.992	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	71.498.992	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.748.427.214	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.719.711.214	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	28.716.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	171.046.150	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	33.585.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165 Orang	137.460.750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	436.615.950	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.746.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	138.437.550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.920.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	46.888.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	142.624.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	403.672.700	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.130.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	146.429.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	368.565.820	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	189.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	178.765.820	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu	85 %	2.530.518.280	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	974.858.880	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	692.429.890	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	67.637.360	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	115.791.790	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	989.385.500	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	27.620.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	916.765.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	12 laporan	160.000.000	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	40 Orang	75.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	406.273.900	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	112 Orang	171.702.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	133.089.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	101.482.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.387.537.467	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat	100 Indeks	1.387.537.467	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	179.800.000	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	267 Orang	179.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	1.207.737.467	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	1.207.737.467	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	INSPEKTORAT DAERAH			18.487.368.726	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			18.487.368.726	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			18.487.368.726	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	11.821.009.802	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.280.050	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9.280.050	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.583.183.726	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	7.457.368.726	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	41.815.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	91.200.000	
6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	91.200.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.365.442.100	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	998.992.100	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	366.450.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	988.179.826	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	345.020.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	147.375.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	151.170.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	128.175.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	211.439.826	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	570.000.000	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	270.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	300.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	421.760.100	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.260.100	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	791.964.000	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	385.964.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	75.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	105.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	226.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	85 %	5.473.720.624	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	3.452.627.674	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 Laporan	448.454.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	542.103.674	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	450.634.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	434.970.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	7 Laporan	509.628.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5 Kesepakatan	533.419.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	533.419.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	2.021.092.950	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7 Laporan	100.036.500	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	22 Laporan	1.921.056.450	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	86 %	1.192.638.300	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	-	699.195.400	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	312.401.400	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	386.794.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-	493.442.900	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 perangkat daerah	61.800.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22 perangkat daerah	113.320.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	39 Kegiatan	281.112.900	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	37.210.000	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN BATANG			11.852.780.105	
	UNSUR KEWILAYAHAN			11.852.780.105	
7.01	KECAMATAN			11.852.780.105	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.706.360.455	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.737.600	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.739.600	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.998.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.078.627.237	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	8.254.024.345	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	824.602.892	KECAMATAN BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.562.500	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	25.562.500	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.098.550	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	29.958.300	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	82.064.850	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	110.697.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	61.378.400	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	130.379.900	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	130.379.900	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	594.068.781	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.137.500	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152.031.271	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	431.900.010	KECAMATAN BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	562.885.887	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	99.869.909	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	429.695.227	KECAMATAN BATANG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	33.320.751	KECAMATAN BATANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	45.971.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	25.971.500	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.971.500	KECAMATAN BATANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	1.065.959.150	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.000.200	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.200	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.055.958.950	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	73.158.950	KECAMATAN BATANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	982.800.000	KECAMATAN BATANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	12.238.900	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	12.238.900	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.238.900	KECAMATAN BATANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	4.134.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	4.134.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.134.000	KECAMATAN BATANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	18.116.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	18.116.100	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BATANG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.116.100	KECAMATAN BATANG
7.01.06.2.01.0003	KELURAHAN WATESALIT			200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	140.000.000	KELURAHAN WATESALIT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN WATESALIT
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN KAUMAN			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	140.000.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN KASEPUHAN			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	140.000.000	KELURAHAN KASEPUHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN KASEPUHAN
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	140.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	140.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	140.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN KARANGASEM UTARA			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	140.000.000	KELURAHAN KARANGASEM UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN KARANGASEM UTARA
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN KARANGASEM SELATAN			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	140.000.000	KELURAHAN KARANGASEM SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN KARANGASEM SELATAN
7.01.03.2.02.0003	KELURAHAN SAMBONG			200.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN			200.000.000	
7.01	KECAMATAN			200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	200.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	140.000.000	KELURAHAN SAMBONG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	60.000.000	KELURAHAN SAMBONG
	KECAMATAN TULIS			1.845.784.140	
	UNSUR KEWILAYAHAN			1.845.784.140	
7.01	KECAMATAN			1.845.784.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.748.129.140	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.438.366.140	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.407.034.140	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	31.332.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.680.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	7.680.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	25.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	96.568.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.600.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	62.971.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.285.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	960.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	11.752.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.390.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.640.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.750.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	83.125.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	56.125.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	8.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	50.063.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP Persentase Pelayanan PATEN yang sesuai SOP	1 Laporan 1 Dokumen	30.063.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	25.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.063.000	KECAMATAN TULIS
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	10.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	10.000.000	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000	KECAMATAN TULIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	6.865.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibun	17 Desa	6.865.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6.865.000	KECAMATAN TULIS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	16.927.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	1 Laporan	16.927.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	6.927.000	KECAMATAN TULIS
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80 Orang	10.000.000	KECAMATAN TULIS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	13.800.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur Desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 %	13.800.000	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	13.800.000	KECAMATAN TULIS
	KECAMATAN WARUNGASEM			2.297.105.080	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.297.105.080	
7.01	KECAMATAN			2.297.105.080	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.219.521.550	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen Dokumen	5.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang di susun	12 Laporan	1.755.937.081	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.679.605.081	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.332.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.680.000	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang disiplin	100 persen	25.000.000	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	25.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Perangkat Daerah	100 persen	59.625.500	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.504.400	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.969.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.480.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.902.000	KECAMATAN WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.340.100	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.430.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan barang milik Daerah	100 persen	51.495.169	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	0	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	51.495.169	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa kantor	4 Laporan	34.372.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.100.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.072.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	280.411.800	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	66.411.800	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0	KECAMATAN WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	20.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	1 laporan	0	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	0	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	0	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	28.763.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 tahun 90 persen	18.763.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	18.763.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.352.530	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	18 Desa 1 tahun	5.352.530	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.352.530	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	10.000.000	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	10.000.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	0	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	13.468.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	1 tahun 85 persen	13.468.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7.280.000	KECAMATAN WARUNGASEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	6.188.000	KECAMATAN WARUNGASEM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN WONOTUNGGAL			2.452.235.770	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.452.235.770	
7.01	KECAMATAN			2.452.235.770	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.372.547.270	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen 12 Bulan	1.647.368.409	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.620.056.409	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.312.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 Laporan 12 Dokumen	42.480.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	34.800.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	13 Orang 100 Orang	46.282.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	21.282.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	25.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase administrasi perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 % 1 tahun	119.139.300	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.377.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.485.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.350.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.595.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.560.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.400.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.372.300	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya mebel Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	50 Unit 3 Unit	400.000.000	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	53.416.961	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.875.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.706.061	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.835.900	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 8 Unit	58.860.600	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.360.600	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.500.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	20.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kali	0	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sosialisasi kegiatan Pelayanan Publik	1 laporan	0	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	29.278.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 Tahun	29.278.500	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.278.500	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100 %	6.360.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.360.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.360.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	16.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45 Orang 1 Kegiatan	16.000.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	10.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	8.050.000	
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang Fasilitas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen yang Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen 1 Dokumen	8.050.000	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	0	KECAMATAN WONOTUNGGAL
7.01.06.2.01.0012	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	8.050.000	KECAMATAN WONOTUNGGAL
	KECAMATAN BANDAR			2.717.312.026	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.717.312.026	
7.01	KECAMATAN			2.717.312.026	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.620.519.026	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.060.286.526	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.020.230.526	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.056.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	52.200.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	52.200.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	52.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	27.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	25.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	109.906.500	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	7.499.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	61.012.500	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	16.945.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	5.950.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan Dokumen	2.400.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	16.100.000	KECAMATAN BANDAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.000.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	4.600.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	18.400.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	303.126.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	47.226.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	250.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	5.900.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	50.453.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	19.600.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	19.600.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	10.853.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	10.853.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	10.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.000.000	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	6.340.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	6.340.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.340.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	20.000.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	68 Orang	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	10.000.000	KECAMATAN BANDAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	10.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	10.000.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN BANDAR
	KECAMATAN BLADO			2.295.219.492	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.295.219.492	
7.01	KECAMATAN			2.295.219.492	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.197.779.492	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	1 Dokumen 0 -	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 laporan 12 dokumen 12 bulan	1.482.227.091	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.408.969.491	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.369.600	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12.888.000	KECAMATAN BLADO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 laporan 12 laporan 12 dokumen	29.400.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.720.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	25.000.000	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	25.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	91.682.600	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.013.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.714.400	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.600.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.500.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.580.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.275.200	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	20.573.569	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20.573.569	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor Jumlah penyediaan jasa kantor	100 % 12 unit	29.733.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.140.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.593.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 % 12 unit	514.163.232	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	51.634.800	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.900.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	450.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6.628.432	KECAMATAN BLADO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	24.040.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	20.000.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	KECAMATAN BLADO
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	4.040.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	8 Dokumen	4.040.000	KECAMATAN BLADO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	34.035.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	14.875.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	14.875.000	KECAMATAN BLADO
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	KECAMATAN BLADO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	1 kegiatan	19.160.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	54 Lembaga Kemasyarakatan	9.160.000	KECAMATAN BLADO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 % 18 desa	5.500.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.500.000	KECAMATAN BLADO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	19.015.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	19.015.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52 Orang	5.950.000	KECAMATAN BLADO
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	10.000.000	KECAMATAN BLADO
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.065.000	KECAMATAN BLADO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	14.850.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	14.850.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	8.370.000	KECAMATAN BLADO
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	6.480.000	KECAMATAN BLADO
	KECAMATAN REBAN			2.440.295.700	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.440.295.700	
7.01	KECAMATAN			2.440.295.700	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.346.316.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.780.342.236	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.720.129.992	KECAMATAN REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.520.244	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.692.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	25.280.122	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	16.260.122	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.020.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	25.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	92.573.250	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.607.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.988.750	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.540.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.200.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.680.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.852.500	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.705.000	KECAMATAN REBAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	33.150.000	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	18.150.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.491.922	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.500.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.991.922	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	314.478.470	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	52.050.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	10.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	232.415.706	KECAMATAN REBAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.012.764	KECAMATAN REBAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	31.788.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Tahun	6.788.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	KECAMATAN REBAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	6.788.000	KECAMATAN REBAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	1 Tahun	5.000.000	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	29.743.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Tahun	29.743.200	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.743.200	KECAMATAN REBAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1 Tahun	5.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	15.302.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 Tahun	15.302.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	5.302.000	KECAMATAN REBAN
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75 Orang	10.000.000	KECAMATAN REBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	12.146.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	90 persen	12.146.500	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	4.976.500	KECAMATAN REBAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	7.170.000	KECAMATAN REBAN
	KECAMATAN KANDEMAN			2.374.746.081	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.374.746.081	
7.01	KECAMATAN			2.374.746.081	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.306.026.281	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	1.553.450.081	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.525.996.081	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.454.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	1 Laporan	35.760.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.760.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	19.292.900	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	3.542.900	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15.750.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	107.850.484	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.944.954	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.468.050	KECAMATAN KANDEMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.937.480	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.500.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	28.149.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	28.149.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	47.388.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.700.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.688.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	509.135.816	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	51.635.816	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	2.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5.500.000	KECAMATAN KANDEMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	32.915.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	15.315.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.315.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	17.600.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	17.600.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	8.935.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	8.935.800	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.935.800	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	6.323.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	6.323.000	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.323.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	15.223.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	15.223.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	5.223.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	10.000.000	KECAMATAN KANDEMAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	5.323.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	5.323.000	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	5.323.000	KECAMATAN KANDEMAN
	KECAMATAN TERSONO			2.246.185.559	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.246.185.559	
7.01	KECAMATAN			2.246.185.559	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.147.768.759	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.500.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	2.500.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	10 Laporan	1.541.789.199	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.506.646.199	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	33.643.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun Jumlah Laporan Aset yang disusun	2 Laporan 2 Laporan	5.760.000	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.760.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Aparatur yang disiplin	100 %	50.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	25.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	25.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Perangkat Daerah	100 %	157.119.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.778.100	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.258.200	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	34.457.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.715.700	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.280.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	17.630.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah	75 %	225.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	220.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor	100 %	109.020.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18.300.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	83.220.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	49.580.560	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4.999.860	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	20.626.900	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	12.980.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	10.973.800	KECAMATAN TERSONO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	20.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan Laporan	20.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	30.300.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	8 usulan	20.300.000	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.300.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 kegiatan	10.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	10.450.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	20 desa	10.450.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.450.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	21.385.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	6 Kegiatan 6 laporan	21.385.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	11.385.000	KECAMATAN TERSONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75 Orang	10.000.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	16.281.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	16.281.800	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	4.730.000	KECAMATAN TERSONO
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	11.551.800	KECAMATAN TERSONO
	KECAMATAN GRINGSING			2.366.051.438	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.366.051.438	
7.01	KECAMATAN			2.366.051.438	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.287.156.438	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.540.658.849	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.501.646.849	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.012.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.680.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	138.867.618	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.740.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.753.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.364.618	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.010.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	241.787.971	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	23.436.100	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	218.351.871	KECAMATAN GRINGSING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	129.162.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.250.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.600.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	81.312.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	199.000.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	24.140.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	0	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	KECAMATAN GRINGSING
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN GRINGSING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	4.140.000	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	4.140.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	28.150.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	28.150.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	18.150.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	KECAMATAN GRINGSING
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	14.655.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	14.655.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	4.655.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	10.000.000	KECAMATAN GRINGSING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	11.950.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	11.950.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	6.550.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	5.400.000	KECAMATAN GRINGSING
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	0	KECAMATAN GRINGSING
	KECAMATAN SUBAH			2.385.234.915	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.385.234.915	
7.01	KECAMATAN			2.385.234.915	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.280.654.915	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan jumlah keuangan yang disusun	12 dokumen	1.667.720.415	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.612.734.915	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.076.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.909.500	KECAMATAN SUBAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	2 dokumen	27.226.500	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	19.200.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.026.500	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur pemerintah yang disiplin	100 %	50.000.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	0	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	25.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	82.298.800	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.004.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.168.800	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.202.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.824.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	67.388.938	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	67.388.938	KECAMATAN SUBAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	3 jenis	31.020.262	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.270.262	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	7 unit	350.000.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	28.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	315.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	2.400.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	12 laporan	2.400.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.400.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	58.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan pembangunandesas yang menjadi prioritas	100 %	48.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan perempuan di pedesaan	100 %	10.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	3.180.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	17 desa	3.180.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.180.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	22.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	1 kegiatan	22.000.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	68 Orang	12.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	72 Orang	10.000.000	KECAMATAN SUBAH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	19.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparaturnya desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	100 %	19.000.000	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	19.000.000	KECAMATAN SUBAH
	KECAMATAN LIMPUNG			2.205.241.288	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.205.241.288	
7.01	KECAMATAN			2.205.241.288	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.112.025.488	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.582.680.568	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.505.550.568	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.798.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.332.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	30.480.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.800.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.680.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	0	KECAMATAN LIMPUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	25.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	133.208.200	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.539.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.389.100	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.510.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.678.600	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.991.500	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	32.587.800	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32.587.800	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.944.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.375.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.245.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.324.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	265.124.920	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	31.655.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	214.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.469.920	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	28.680.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	100 %	0	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	8.680.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	8.680.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	27.832.800	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 %	27.832.800	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.832.800	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	5.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	100 %	5.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	16.225.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	100 %	16.225.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	51 Orang	6.225.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	10.000.000	KECAMATAN LIMPUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	15.478.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	15.478.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	15.478.000	KECAMATAN LIMPUNG
	KECAMATAN BANYUPUTIH			2.206.937.591	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.206.937.591	
7.01	KECAMATAN			2.206.937.591	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.127.590.591	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 lap	1.670.674.232	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.570.786.232	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.632.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.256.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	29.304.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	21.624.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	25.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	25.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	55.680.300	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.708.800	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.195.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	15.776.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.700.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	43.047.600	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	43.047.600	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.046.500	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.546.500	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	261.837.959	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	25.445.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.392.959	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	27.750.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkingan	100 %	4.325.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.325.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	3.425.000	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3.425.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	24.878.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	24.878.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.878.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	4.505.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	4.505.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.505.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	14.104.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	14.104.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	4.104.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	10.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	8.110.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	8.110.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	0	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4.055.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	4.055.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	KECAMATAN PECALUNGAN			1.956.164.646	
	UNSUR KEWILAYAHAN			1.956.164.646	
7.01	KECAMATAN			1.956.164.646	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.875.244.646	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4 Dokumen	8.030.000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.625.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.405.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jenis Dokumen gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.425.746.647	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.399.914.647	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	23.832.000	KECAMATAN PECALUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset yang Disusun	4 Laporan	49.720.000	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	42.500.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.220.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Disiplin	100 %	25.000.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	25.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	100 %	60.588.215	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.055.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.329.250	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.996.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.267.965	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	KECAMATAN PECALUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	12.150.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.790.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	210.691.500	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12.648.300	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	42.043.200	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	150.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor	12 Bulan	53.972.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	16.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	36.972.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	8 Unit	41.496.284	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	37.120.000	KECAMATAN PECALUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	1.376.284	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	25.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Yang Memiliki SOP	100 Persen	0	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	5.000.000	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	25.355.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	100 Persen	20.355.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.355.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	100 Persen	5.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	1 0	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	11.610.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah desa/ kelurahan terfasilitasi Dalam Penanganan Gangguan Trantibum	100 Persen	11.610.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.610.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	17.695.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Bintek, Sosialisasi, Konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	2 Kegiatan	17.695.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.695.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	10.000.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	1.260.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Meningkatkan Pemahaman tentang Keuangan dan Administrasi Desa	90 Persen	1.260.000	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	0	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	400.000	KECAMATAN PECALUNGAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	860.000	KECAMATAN PECALUNGAN
	KECAMATAN BAWANG			2.287.829.632	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.287.829.632	
7.01	KECAMATAN			2.287.829.632	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.197.438.632	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Tahun	5.000.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BAWANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Honorarium non ASN	1 Tahun	1.609.261.632	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.550.329.632	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.932.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dana Honorarium Pengamanan Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	37.680.000	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Dana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kelengkapan PDH beserta Atribut	2 Kegiatan	50.000.000	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	25.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	25.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dana	1 Tahun	145.060.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.980.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.080.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	KECAMATAN BAWANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dana	1 Tahun	19.990.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19.990.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Dana	1 Tahun	16.000.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.500.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	314.447.000	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	70.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	214.447.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	100 %	46.591.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	26.591.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26.591.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan PATEN yang sesuai SOP	240 Dokumen	20.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	100 %	15.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan yang masuk prioritas atau perangkungan Tersedianya Dana	8 Kegiatan 1 Tahun	10.000.000	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Bimtek Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Diselenggarakan Dengan Lancar Tersedianya Dana	2 Kegiatan 1 Tahun	5.000.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	10.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	10.000.000	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	62 Orang	10.000.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	18.800.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang memahami tentang keuangan dan administrasi desa	60 Orang	18.800.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	7.200.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	7.200.000	KECAMATAN BAWANG
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	4.400.000	KECAMATAN BAWANG
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.936.348.650	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.936.348.650	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.936.348.650	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.176.954.650	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	10.286.800	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.286.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2.808.685.052	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.752.568.652	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.181.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.935.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	2 Orang	25.000.000	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta Rakor, jumlah arsip yang dikelola	12 Laporan 40 Paket	101.681.564	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.521.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.657.750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.001.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.847.750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	48.253.764	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kend dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah asert yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah Sarpras gedung yang dibeli	9 Unit	43.547.138	
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43.547.138	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana dalam penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	25 laporan	99.459.096	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.459.096	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	100 %	88.295.000	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	75.295.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	7.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	6.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus	100 %	1.035.000.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	19 kegiatan	1.035.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	375.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	160.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	100 Orang	500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	100 %	1.223.811.150	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran Parpol dan Lembaga pendidikan	7 kegiatan	1.223.811.150	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	144.363.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	67 Orang	1.027.797.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	51.650.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan	100 %	80.582.850	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi dan fasilitas yang dilaksanakan untuk pemantapan bidang pemberdayaan dan Ormas	2 kegiatan	80.582.850	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	80.582.850	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	100 %	300.000.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan upacara dan sosialisai tyang dilaksanakan	4 kegiatan	300.000.000	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan	300 Orang	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial	100 %	1.120.000.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	51 kegiatan	1.120.000.000	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	157.284.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	292.716.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	670.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL				2.127.452.860.765	

Sumber : SIPD RI, RKPD 2026

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Sub bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja daerah. Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 6. 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2026 berdasar RPJMD 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	SKPD Koordinator
1	PDRB Perkapita	Rp Juta	42,05	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,89	Sekretariat Daerah
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,30-8,21	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,2	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,54 - 5,10	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,35 - 6,50	Sekretariat Daerah
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,7	Sekretariat Daerah
8	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	124,7	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	82	Sekretariat Daerah
10	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio	0,992	Sekretariat Daerah
11	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Angka	6,7	Sekretariat Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,9	6,52	Sekretariat Daerah
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	20,96	20,91	Sekretariat Daerah
3	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Angka	64,47	70,7	Sekretariat Daerah
4	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	169,79	776.332,82	Sekretariat Daerah
5	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,77	85,12	Sekretariat Daerah
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	6,53	6,11	Sekretariat Daerah
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	6,35 - 6,50	Sekretariat Daerah
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,73	8,30-8,21	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	36,26	42,05	Sekretariat Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,67	5,54 - 5,10	Sekretariat Daerah
5	Indeks Gini	Angka	0,312	0,308	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,73	71,2	Sekretariat Daerah
7	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,29	0,282-0,27	Sekretariat Daerah
8	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	NA	20,25	Sekretariat Daerah
9	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	14.875	Sekretariat Daerah
10	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	25	Sekretariat Daerah
11	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	60	66	Sekretariat Daerah
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka Ketergantungan	%	44,59	44,5	Sekretariat Daerah
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,89	35,83	Sekretariat Daerah
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,32	4,36	Sekretariat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
4	Rasio Kewirausahaan	%	2,76	3,57	Sekretariat Daerah
5	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,88	3,4	Sekretariat Daerah
6	Disparitas Harga	%	±10	±10	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,91	78,2	Sekretariat Daerah
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,07	27,37	Sekretariat Daerah
9	Ekspor Barang dan Jasa	USD	59.034.726	61.419.729	Sekretariat Daerah
10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	68,17	68,90	Sekretariat Daerah
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	86,00	90,00	Sekretariat Daerah
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81,00	90,00	Sekretariat Daerah
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,62	98,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):				Sekretariat Daerah
14	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	86,14	85,97	Sekretariat Daerah
15	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	88,15	89,05	Sekretariat Daerah
16	c) Numerasi SD/Sederajat	%	76,26	82,13	Sekretariat Daerah
17	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	83,54	86,1	Sekretariat Daerah
18	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	14,76	14,9	Sekretariat Daerah
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	3,51	3,6	Sekretariat Daerah
20	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	95,81	88,25	Sekretariat Daerah
21	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,36	0,35	Sekretariat Daerah
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,81	67,7	Sekretariat Daerah
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,53	0,72	Sekretariat Daerah
24	Tingkat Inflasi	%	2,19	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
25	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,73	0,96	Sekretariat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
26	Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,57	0,61	Sekretariat Daerah
27	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	34,89	35,83	Sekretariat Daerah
28	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	NA	75	Sekretariat Daerah
29	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,17	19,8	Sekretariat Daerah
30	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,32	4,36	Sekretariat Daerah
31	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,133	4,23	Sekretariat Daerah
32	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,962	1,022	Sekretariat Daerah
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,58	82	Sekretariat Daerah
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,49	80,6	Sekretariat Daerah
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59	3,89	Sekretariat Daerah
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,71	82	Sekretariat Daerah
5	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	NA	6,7	Sekretariat Daerah
6	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0	Sekretariat Daerah
INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	Pendidikan				Disdikbud
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,10	7,3	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,4	12,6	
3	Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100	
B	Kesehatan				
1	Dinas Kesehatan				Dinas Kesehatan
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	75,01	75,33	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	98,40	98,35	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	14,00	13,95	
	Angka Prevalensi Balita Stunting	Angka	20,70	16,70	
5	Nilai SAKIP Dinkes	Angka	79,6	79,8	
6	Indeks Pelayanan Publik Dinkes	Angka	83,61	85	
2	RSUD Batang				RSUD Batang
1	Persentase Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	80,2	85	
2	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	87,35	89	
3	Indeks Pelayanan Publik RSUD Batang	Angka	3,68	3,8	
3	RSUD Limpung				RSUD Limpung
1	Persentase Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	87	88	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
2	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	84,32	86	
3	Indeks Pelayanan Publik RSUD Limpung	Angka	3,13	3,6	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				DPUPR
1	Indeks Infrastruktur	Angka	0,74	0,83	
2	Persentase infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, drainase, irigasi, air minum, sanitasi, dan bangunan gedung) dalam kondisi baik	%	57,19	58,6	
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,31	88,31	
4	Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan (TURBINLAK) Penataan Ruang	Nilai Kinerja	71,02	78,24	
5	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	57,35	57,96	
6	Persentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	%	77,01	78,25	
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	88,88	89,08	
8	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	83,22	84,5	
9	Indeks Pelayanan Publik DPUPR	Angka	2,72	2,77	
10	Nilai SAKIP DPUPR	skor	78,55	79,25	
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				DPRKP
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	NA	69,22	
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,12	90,66	
3	Persentase luas kawasan kumuh	%	61,51	60,91	
4	Nilai SAKIP	skor	74,5	75,5	
5	Indeks Pelayanan Publik DPRKP	Angka	2,9	3,1	
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1	SATPOL PP				Satpol PP
1	Indeks Rasa Aman	Angka	4,47	4,49	
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	
5	Indeks Pelayanan Publik SATPOL PP	Angka	2,5	2,85	
6	Nilai SAKIP SATPOL PP	Skor	77,5	78,5	
2	BPBD				BPBD
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,63	
2	Persentase Cakupan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	%	4,84	8,87	
3	Nilai SAKIP BPBD	Skor	73,8	76	
4	Indeks Pelayanan Publik BPBD	Angka	2.01	2.91.	
F	Sosial				Dinsos
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	57,34	57,75	
2	Persentase Populasi PPKS	%	16,82	14,95	
3	Persentase PPKS yang diberdayakan kapasitasnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	7,09	7,2	
4	Indeks Pelayanan Publik Dinsos	Angka	3,16	3,5	
5	Nilai SAKIP Dinsos	Skor	76,95	79,5	
G	Tenaga Kerja				Disnaker
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	94,33	94,6	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	35,25	35,4	
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	64,03	64,07	
4	Nilai SAKIP Disnaker	Skor	76,1	76,5	
5	Indeks Pelayanan Publik Disnaker	Angka	3,02	3,27	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				DP3AP2KB
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,68	92,91	
	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	10,2	11,14	
I	Pangan				Dispaperta
1	Persentase cadangan pangan daerah	%	5,56	0,026	
2	Ketersediaan pangan :				
	- Beras	Ton	96.057,00	80.953	
	- Jagung	Ton	61.601,00	45.279	
3	Cadangan pangan daerah	Ton	123,02	60	
J	Pertanahan				DPRKP
1	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	
K	Lingkungan Hidup				DLH
1	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	58,68	60	
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	80,61	84,83	
3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)	Angka	44,58	62,96	
4	Persentase kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	90	94	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	5,53	6,1	
6	Nilai SAKIP DLH	Skor	72,75	76	
7	Indeks Pelayanan Publik DLH	Angka	3,3	3,4	
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Disdukcapil
1	Nilai SAKIP Disdukcapil	Skor	77,4	77,6	
2	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Angka	3,23	3,4	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Dispermasdes
1	Persentase Desa Mandiri	Angka	NA	8,36	
2	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Kabupaten Batang	%	NA	12	
3	Persentase PKK Aktif	%	55,3	75,31	
4	Indeks Pelayanan Publik Dispermasdes	Angka	2,23	2,5	
5	Nilai SAKIP Dispermades	Angka	75,05	76	
N	Pengendalian Penduduk dan KB				DP3AP2KB
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,85	67,2	
2	Angka pertumbuhan penduduk per tahun/LPP	%	1,44	1,37	
3	Indeks Lansia Berdaya	Angka	56	57	
4	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Angka	85,8	87,7	
5	Indeks Pelayanan Publik DP3AP2KB	Angka	3,12	3,32	
6	Nilai SAKIP DP3AP2KB	Skor	73,35	74,72	
O	Perhubungan				Dishub
1	Rasio Kejadian Kecelakaan per 1000 keberangkatan angkutan umum	Rasio	NA	0,02	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	60	62	
4	Indeks Pelayanan Publik Dishub	Angka	3,8	3,85	
3	Nilai SAKIP Dishub	Skor	74,6	74,8	
P	Komunikasi dan Informatika				Diskominfo
1	Indeks Smart City	Angka	3,59	3,52	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,55	2,7	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	
5	Indeks Pelayanan Publik Diskominfo	Angka	3,7	3,74	
Q	Koperasi dan UKM				Disperindagkop UKM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,00	2,20	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	68,00	13,00	
3	Persentase UMKM yang berdaya saing	%	15,00	12,00	
R	Penanaman Modal				DPMPTSP
1	Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang	%	3,5	1,25	
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Trilyun Rupiah	6,30	6,45	
3	Nilai SAKIP DPMPTSP	Skor	75,80	76,50	
4	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Angka	4,55	4,57	
S	Kepemudaan dan Olahraga				Disparpora
1	Persentase Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	10	15	
2	Persentase medali yang diperoleh	%	10	15	
T	Statistik				Diskominfo
1	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	
U	Persandian				Diskominfo
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	100	100	
V	Kebudayaan				Disdikbud
1	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan, dikelola dan dilindungi	%	0	20	
3	Nilai SAKIP Disdikbud	Skor	77,5	80	
4	Indeks Pelayanan Publik Disdikbud	Angka	3,11	3,3	
W	Perpustakaan				Disperpuska
1	Persentase Masyarakat yang Mengakses Layanan Perpustakaan di Kabupaten Batang	%	18,00	19,00	
2	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	indek	13,82	15,00	
3	Tingkat kegemaran membaca	skor	73.95	76	
X	Kearsipan				Disperpuska
1	Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang melaksanakan arsip secara baku	%	21	25	
2	Tingkat transparansi informasi publik terkait pengelolaan arsip yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk arsip	persen	NA	90,50	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
	laporan keuangan dan administrasi pemerintahan				
3	Nilai SAKIP Disperpuska	Skor	74,50	78	
4	Indeks Pelayanan Publik Disperpuska	Angka	2,69	3,25	
Y	Kelautan dan Perikanan				Dislutkan
1	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	0,24	0,35	
2	Persentase Capaian Produksi Perikanan	%	119,88	100	
3	Capaian peningkatan angka konsumsi ikan	%	96	100	
4	Nilai SAKIP Dislutkan	Skor	68,4	70	
5	Indeks Pelayanan Publik Dislutkan	Angka	2,29	2,80	
Z	Pariwisata				Disparpora
1	Persentase peningkatan pengunjung pariwisata	%	10	14	
2	Rata-Rata Lama Menginap wisatawan	Hari	1	4	
3	Indeks Pelayanan Publik Disparpora	Angka	2,8	3	
4	Nilai SAKIP Disparpora	Skor	75	76	
AA	Pertanian				Dispaperta
1	produksi komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)				
	a. padi	ton	160.299	161.905	
	b. jagung	ton	89.659	90.558	
	c. Bawang Merah	kuintal	5.372	5.361	
	d. Cabai Besar	kuintal	3.298	13.349	
	e. Kentang	kuintal	213.902	187.898	
	f. Kopi	kg	753.929	769.008	
	g. The	kg	1.414.461	1.442.750	
	h. Kakao	kg	176.604	180.136	
	i. Kelapa	kg	1.001.083	1.021.105	
2	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	150,49	100	
3	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	430,08	100	
4	Indeks Pelayanan Publik Dispaperta	Angka	2,39	2,72	
AB	Perdagangan				Disperindagkop UKM
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar,kecil,Reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	12,53	12,55	
2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	%	1	1,03	
AC	Perindustrian				Disperindagkop UKM
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	34,56	34,58	
2	Prersentase peningkatan IKM	%	13,9	0,7	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
3	Nilai SAKIP Disperindagkop UKM	skor	77,2	77,4	
4	Indeks Pelayanan Publik Disperindagkop UKM	Angka	3,43	3,63	
AD	Transmigrasi				Disnaker
	Persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	100	100	
AE	Sekretariat Daerah				SETDA
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Indeks	68,95	70,25	
2	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Angka	4,37	4,38	
3	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	skor	39,40	41,25	
4	Persentase PD dengan Nilai Sakip BB	%	70,45%	73	
AF	Sekretariat DPRD				SETWAN
2	Nilai SAKIP SETWAN	Skor	78,55	78,65	
3	Indeks Pelayanan Publik SETWAN	Angka	3,15	3,25	
AG	Perencanaan				Bapperida
1	Skor Perencanaan	Angka	23,16	23,6	
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	
AH	Kuangan				BPKPAD
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	80,11	80,32	
2	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100	
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	0,5	4,2	
4	Persentase Peningkatan PAD	%	5,19	2,8	
5	Nilai SAKIP BPKPAD	Skor	79,25	79,45	
6	Indeks Pelayanan Publik BPKPAD	Angka	3,24	3,44	
AI	Kepegawaian				BKPSDM
1	Nilai Sistem Merit	Skor	274,50	285,00	
2	Indeks Pelayanan Publik BKPSDM	Angka	3,47	3,70	
3	Nilai SAKIP BKPSDM	skor	80,50	80,75	
1	Indeks NSPK Manajemen ASN	Angka	81,10	82,00	
AJ	Pendidikan, dan Pelatihan				BKPSDM
1	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Angka	NA	3,81	
AK	Penelitian dan Pengembangan				Bapperida
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	57,46	57,95	
2	Nilai Kapabilitas Inovasi	Angka	2,11	2,27	
3	Indeks Pelayanan Publik Bapelitbang	Angka	3,66	3,75	
AL	Pengawasan				Inspektorat
1	Kapabilitas APIP	Level	3	3	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	%	85	86	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
3	Nilai SAKIP Inspektorat	Skor	80,2	80,4	
4	Indeks Pelayanan Publik Inspektorat	Angka	3,65	3,67	
AM	KEWILAYAHAN				
1	Kecamatan Batang				Kecamatan Batang
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Batang	Angka			
2	Presentase Layanan Kecamatan Batang diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
2	Kecamatan Bandar				Kecamatan Bandar
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Angka	2,51	2,51	
2	Presentase Layanan Kecamatan Bandar diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
3	Kecamatan Banyuputih				Kecamatan Banyuputih
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Banyuputih	Angka	2,78	2,82	
2	Presentase Layanan Kecamatan Banyuputih diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
4	Kecamatan Bawang				Kecamatan Bawang
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bawang	Angka	2,97	2,98	
2	Presentase Layanan Kecamatan Bawang diselesaikan tepat Waktu	%	93	100	
5	Kecamatan Blado				Kecamatan Blado
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Blado	Angka	2,76	3,00	
2	Presentase Layanan Kecamatan Blado diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
6	Kecamatan Gringsing				Kecamatan Gringsing
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gringsing	Angka	3	3	
2	Presentase Layanan Kecamatan Gringsing diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
7	Kecamatan Kandeman				Kecamatan Kandeman
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kandeman	Angka	2,5	2,7	
2	Presentase Layanan Kecamatan Kandeman diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
8	Kecamatan Limpung				Kecamatan Limpung
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Limpung	Angka	2,85	2,93	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN	PD
			2024	2026	
2	Presentase Layanan Kecamatan Limpung diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
9	Kecamatan Pecalungan				Kecamatan Pecalungan
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pecalungan	Angka	2	3	
2	Presentase Layanan Kecamatan Pecalungan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
10	Kecamatan Reban				Kecamatan Reban
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Reban	Angka	2,66	2,7	
2	Presentase Layanan Kecamatan Reban diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
11	Kecamatan Subah				Kecamatan Subah
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Subah	Angka	2,39	2,6	
2	Presentase Layanan Kecamatan Subah diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
12	Kecamatan Tersono				Kecamatan Tersono
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tersono	Angka	2,6	2,7	
2	Presentase Layanan Kecamatan Tersono diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
13	Kecamatan Tulis				Kecamatan Tulis
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tulis	Angka	2,65	2,7	
2	Presentase Layanan Kecamatan Tulis diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
14	Kecamatan Warungasem				Kecamatan Warungasem
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Warungasem	Angka	3,41	3,43	
2	Presentase Layanan Kecamatan Warungasem diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
15	Kecamatan Wonotunggal				Kecamatan Wonotunggal
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Wonotunggal	Angka	2,37	2,6	
2	Presentase Layanan Kecamatan Wonotunggal diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	
AN	Unsur Pemerintahan Umum				Bakesbangpol
1	Indeks Kerukunan	Angka	71,95	72,9	
2	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100	
3	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Skor	76,7	76,72	
4	Indeks Pelayanan Publik Bakesbangpol	Angka	2,02	3,52	

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

BAB VII PENUTUP

Penyusunan RKPD Tahun 2026 yang merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029 yang memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2026. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2026.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antarpelaku pembangunan.

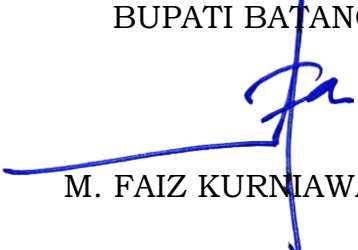
Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2024, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 kedalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA tahun Anggaran 2026, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2024.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2026 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. RKPD Tahun 2026 akan dijabarkan kedalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.
7. Dalam Pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2026 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan yakni tahun 2026.

BUPATI BATANG



M. FAIZ KURNIAWAN